



JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING

MAGISTER AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNSRAT

Goodwill

VOLUME 4 – NOMOR 1, JUNI 2013

Analisis Flypaper Effect pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Adventinus Kristanto Lambut, Sifrid S. Pangemanan, Heince Wokas

Pengaruh Kinerja Auditor Internal Terhadap Efektifitas Pengendalian Internal Prosedur Kredit Kendaraan Bermotor

Claudia Wanda Melati Korompis, Jullie J. Sondakh, Lidia Mawikere

Analisa Konstruksi Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Atas Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah

Fahri Eka Oktora, Jenny Morasa, Sifrid S. Pangemanan

Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pemeriksaan Pajak, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ternate

Lisa Humairah, David P.E Saerang, Ventje Ilat

Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan, Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Keandalan dan Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Perusahaan Dealer Mobil di Sulawesi Utara

Muhammad Saleh, David P.E Saerang, Ventje Ilat

Pengaruh Belanja Pemerintah Terhadap Derajat Desentralisasi Melalui Produk Domestik Regional Bruto pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Utara

Princilvanno Andreas Naukoko, Herman Karamoy, Agus T. Poputra

Analisis Pengaruh Motivasi Terhadap Minat Mahasiswa Jurusan Akuntansi Untuk Mengikuti Pendidikan pada Program Magister Akuntansi

Rizha Dewi Tangkudung, Jenny Morasa, Agus T. Poputra

Pengaruh Investment Opportunity Set, Return On Asset, Return On Equity, Cash Ratio Dan Debt To Equity Ratio Devident Payout Ratio

Elny Claudia Tombeng, Ventje Ilat, Agus T. Poputra

Pengaruh Fixed Asset, Provitabilitas dan Company Size Pada Perusahaan Konstruksi, Properti dan Real Estate Yang Listing Pada Bursa Efek Indonesia

Heidy Pesik, Ventje Ilat, Winston Pontoh

Kajian Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Perspektif Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Sorong

Meyta Longkutoy, Jullie J. Sondakh, Ventje Ilat

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemampuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Biak Numfor

Terry Corie Pangkong, David P.E. Saerang, Jullie J. Sondakh

Pengaruh Profesionalisme Auditor, Kualitas Audit, Etika Profesi Auditor, dan Pengalaman Auditor Terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas Dalam Pemeriksaan Laporan Keuangan Pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Utara.

Rendy Eldy Fensi Entuu, Jullie J. Sondakh, Ventje Ilat

ANALISIS *FLYPAPER EFFECT* PADA PEMERINTAH DAERAH DI PROVINSI SULAWESI UTARA

Adventinus Kristanto Lambut
Sifrid S. Pangemanan
Heince Wokas

ABSTRAK

Otonomi daerah membawa dampak yang luas terhadap akuntansi pemerintah daerah. Antara lain terpisahnya kekuasaan pusat yang diserahkan kepada daerah. Meskipun demikian, pemerintah pusat tidak serta-merta melepaskan daerah otonom sepenuhnya. Namun perlu adanya bantuan-bantuan dana transfer yang diserahkan ke daerah. Salah satu dana transfer adalah Dana Alokasi Umum yang dapat secara bebas digunakan oleh pemerintah daerah baik untuk belanja operasional maupun belanja modal. Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan suatu pos pendapatan bagi pemerintah daerah untuk digunakan dalam Belanja Daerah (BD). Suatu pemborosan dalam BD dapat ditunjukkan melalui suatu fenomena yang disebut *flypaper effect*. Dimana DAU lebih berpengaruh signifikan terhadap BD daripada PAD. Hal ini ditunjukkan dengan menggunakan alat bantu uji statistik regresi berganda dan menghasilkan adanya pengaruh positif antara DAU dengan BD yang signifikansinya 0.00 pada α 0.05. Hal ini disebabkan oleh tingkat kemandirian pemerintah daerah yang tidak bergantung pada PAD dimana fokus pemerintah daerah bukan pada laba atau menghasilkan pendapatan melainkan pada pelayanan publik. Kemudian peranan DAU yang lebih pada belanja operasional daripada belanja modal karena tingginya belanja pegawai yang tidak mampu dibiayai oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sifat oportunistik legislatif dan eksekutif membawa kepentingan individu maupun kelompok ke dalam kepentingan masyarakat daerah memberi pengaruh pada fenomena *flypaper effect*.

Kata kunci: *flypaper effect, kemandirian daerah.*

ABSTRACT

Decentralization leads the broad impact of accounting for local governments. Among other is the separation of powers from the centre, which has been handed to the local (including state, province, county, and town). Even so, the Central Government does not immediately fully release the local governments. But the Central Government still needs to transfers intergovernmental grants to the local. One of the funds transfer is General Allocation Fund which can need by the local government freely for either operational expenditure or capital expenditure. The General Allocation Fund (Dana Alokasi Umum) and the Original Region Revenue (Pendapatan Asli Daerah) are several income account for local governments to be used as Local Expenditure (BD). One example of the waste in the BD can be seen through a phenomenon called the flypaper effect. Where DAU is more significantly influential to BD than PAD. It is shown by using the tools of statistical multiple regression and produce a positive influence between the DAU and their significance to BD 0.00 on α 0.05. This is caused by the level of independence of the local governments that do not rely on the PAD which local governments focus not on profit or earn revenue but on public services. Then the role of the DAU which is more on the operational expenditure rather than capital expenditure caused by high-expensive of the salaries expense unable to be covered by Original Region Revenue (PAD). The opportunistic nature of the legislative and the executive who bring the importance of individuals and groups into local community interests.

Keywords: *flypaper effect, local independence.*

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang No. 32 tahun 2004 menjadi dasar lahirnya otonomi daerah yang di dalamnya terkandung hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur (mengorganisir), serta mengurus sendiri kegiatan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Meskipun istilah dekonsentrasi dan desentralisasi tidak tercantum secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar 1945, tetapi *the founding father* negara ini tampaknya menginginkan kedua azas tersebut digunakan sebagai jembatan untuk mempertemukan antara kepentingan pemerintahan pusat dan daerah (Sarundajang, 2011). Sebagai konsekuensi dari desentralisasi daerah, pemerintah pusat tidak dapat serta-merta melepaskan tanggungjawab secara menyeluruh kepada pemerintah daerah. Ini berarti, pemerintah daerah tidak langsung bisa untuk mandiri. Dengan demikian diperlukan bantuan dana pemerintah pusat bagi pemerintah daerah. UU No. 32 tahun 2004 menyebutkan bahwa untuk melaksanakan kewenangan pemerintah daerah, pemerintah pusat menyalurkan dana pemerimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan bagian daerah dari Dana Bagi Hasil (DBH) yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam. Selain itu, sebagai daerah yang telah terotonomi, daerah memiliki sumber dana lain dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembiayaan, dan pendapat lain-lain yang sah. Untuk itu, diharapkan dana transfer dari pemerintah pusat dapat digunakan oleh pemerintah daerah secara efektif dan efisien demi terwujudnya pelayanan publik yang optimal. Perlu juga pemerintah daerah untuk transparan dan akuntabel dalam mengungkapkan kebijakan daerah atas penggunaan dana tersebut. Dalam UU No. 33 tahun 2004 disebutkan bahwa tujuan dana pemerimbangan adalah untuk mengurangi (bila tidak mungkin menghilangkan) kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Bagi pemerintah daerah dana pemerimbangan merupakan salah satu pos pendapatan yang sangat signifikan, hal ini nampak pada prakteknya bahwa transfer dari pusat merupakan sumber dana utama bagi pemerintah daerah untuk membiayai keperluan operasional dan wajib dilaporkan dalam perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Ketika penerimaan daerah berasal dari transfer dari pemerintah pusat, maka stimulus yang ditimbulkan berbeda dengan stimulus yang muncul dari pendapatan daerah (terutama pajak daerah). Saat respon (belanja) daerah lebih besar terhadap transfer daripada pendapatan asli daerahnya sendiri, maka disebut *flypaper effect* (Hines, 1995).

Untuk membangun kemandirian suatu daerah maka perlu adanya pengeluaran-pengeluaran yang kita sebut sebagai Belanja Daerah (BD). Belanja daerah secara umum diatur dalam APBD terdapat dua yakni, Belanja Operasional dan Belanja Modal. Kecenderungan saat ini dalam prakteknya, DAU sangat berpengaruh terhadap Belanja Daerah, baik belanja operasional maupun belanja modal. Akan tetapi, terdapat kekhawatiran bahwa pemerintah daerah lebih banyak memanfaatkan DAU untuk belanja operasional ketimbang belanja modal. Hal ini dapat dilihat juga dalam penelitian Zao, 1994 di Amerika Serikat, dimana pemerintah pusat telah meningkatkan dana transfernya ke daerah akan tetapi, infrastruktur di daerah justru kian memburuk.

Hingga pada tahun 2010, terdapat 16 (enam belas) pemerintah daerah kabupaten/ kota di Provinsi Sulawesi Utara. Namun, dalam penelitian ini tidak semua pemerintah daerah akan diteliti. Hanya pemerintah daerah yang tidak mengalami perubahan wilayah otonomi dalam kurun waktu 2006 hingga 2010. Hal ini bertujuan agar penelitian *flypaper effect* memberikan hasil yang tidak bias yang diakibatkan oleh perubahan bobot DAU. Dari syarat tersebut maka, penelitian ini mengambil sampel pada 5 (lima) pemerintah daerah yakni, Kota Manado, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Utara, Kota Tomohon, dan Kota Bitung. Pada observasi awal didapati bahwa pada kurun waktu 2006-2010, kelima pemerintah daerah ini menggunakan DAU lebih banyak seiring dengan peningkatan pada pos Belanja Daerah. Secara umum perubahan pada Belanja Daerah dipengaruhi oleh Dana Alokasi Umum. Dengan kata lain, peningkatan presentase pada DAU diikuti pula oleh Belanja Daerah. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah daerah masih memiliki ketergantungan pada DAU dan peningkatan pada DAU direspon oleh pemerintah daerah dengan membelanjakan dana transfer pemerintah pusat

secara lebih pula. Singkat kata, hal ini menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan fenomena *flypaper effect* itu terjadi.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis memutuskan untuk mengangkat judul, “Analisis *Flypaper Effect* Pada Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Utara” yang tidak hanya menggunakan data kuantitatif melainkan, juga menggunakan data kualitatif agar memberi nilai tambah bagi penelitian-penelitian yang sudah lebih dahulu ada.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah terjadi *flypaper effect* pada Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Utara?
2. Bagaimana *flypaper effect* pada Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Utara?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasar pada rumusan masalah di atas maka, tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris pada:

1. Terjadinya *flypaper effect* pada Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Utara.
2. Bagaimana *flypaper effect* terjadi pada Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Utara.

1.4. Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah berupa kontribusi empiris, teori dan kebijakan, yaitu:

1. Kontribusi empiris, untuk menguji kembali penelitian sebelumnya, berkenaan dengan adanya *flypaper effect* yang terjadi dalam transfer dana (DAU) dan PAD terhadap Belanja Daerah yang dilakukan secara empiris pada Pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Sulawesi Utara.
2. Kontribusi kebijakan, memberikan masukan baik bagi Pemerintah Pusat maupun Daerah dalam hal penyusunan kebijakan di masa yang akan datang yang berkaitan dengan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi dari APBN dan APBD, serta UU dan PP yang menyertainya.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Zao pada tahun 1994 menyimpulkan bahwa dana transfer pemerintah pusat Amerika Serikat (seperti DAU) memiliki pengaruh positif terhadap belanja daerah baik operasional maupun belanja modal, dan secara jangka pendek maupun jangka panjang. Hal yang sama juga didukung oleh Dahlberg et al, 2007 yang menyatakan bahwa peningkatan dalam dana transfer secara positif berpengaruh pada belanja daerah di kabupaten/ kota Amerika Serikat. Grossman, 1988 menyimpulkan adanya pengaruh signifikan antara DAU dengan belanja daerah.

Kusumadewi & Rahman, 2007 yang menemukan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah di Kabupaten/ Kota seluruh Indonesia. Lebih spesifik, Maimunah;2006 untuk Kabupaten/ Kota di Pulau Sumatra, Prakosa;2004 untuk Provinsi Jawa dan DIY, Sudjrajat;2010 untuk Provinsi Lampung, dan Kuncoro;2007 menyepakati hal yang sama bahwa DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah.

Gorodnichenko; 2001 menemukan bahwa di Ukraina Pendapat Pajak Daerah dapat meningkatkan belanja daerah dalam jangka pendek. Menurut Deller et al, tahun 2002 pendapatan daerah berpengaruh pada belanja daerah walaupun tidak sebesar pengaruh DAU.

Inman, 2008 justru berpendapat bahwa keputusan dalam menetapkan pengeluaran belanja dana transfer adalah masalah politik daripada anomali. *Flypaper effect* sangat terlihat jelas sebagai hasil politisasi dan dihubungkan dengan insentif bagi mereka yang dipilih publik. Model birokratik meneliti *flypaper effect* dari sudut pandang birokrat, sedangkan model ilusi fiskal mendasarkan kajiannya dari sudut pandang masyarakat yang mengalami keterbatasan informasi terhadap anggaran pemerintah daerahnya (Kuncoro, 2007).

2.2. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) menurut UU No.33 Tahun 2004 berasal dari APBN dan dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

2.3. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

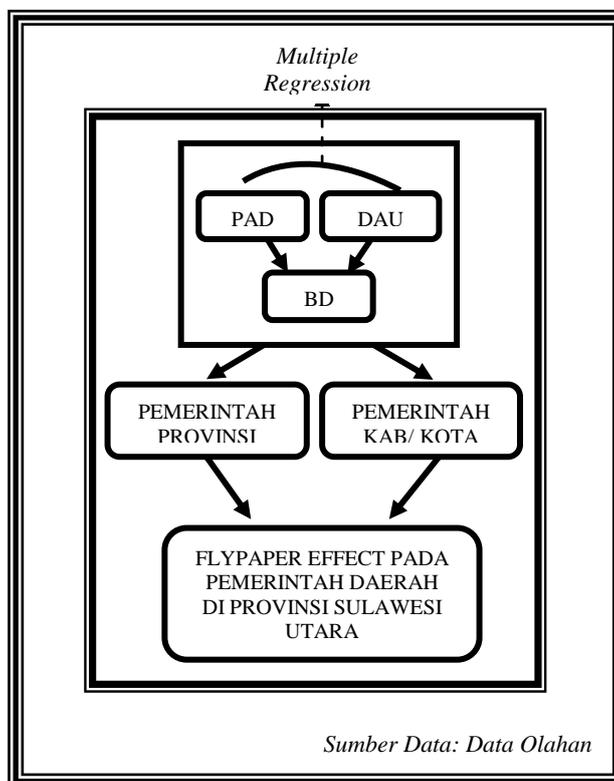
Pendapatan Asli Daerah secara jelas diatur dalam UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah BAB V tentang Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.4. Belanja Daerah (BD)

Dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahunan anggaran yang bersangkutan.

3. KERANGKA KONSEPTUAL

3.1. Kerangka Konseptual Penelitian



3.2. Proposisi

Penelitian ini bertujuan untuk mencari bukti empiris mengenai *flypaper effect* pada Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Utara. Untuk menunjang hal tersebut dibutuhkan suatu uji statistik berupa regresi berganda (*multiple regression*) dengan cara mengkalkulasi hubungan antara Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Belanja untuk mengetahui apakah *flypaper effect*. Selanjutnya penelitian ini menguji fenomena *flypaper effect* secara lebih rinci. Hal ini dilakukan melalui pemisahan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/ Kota. Kemudian menggali lebih dalam lagi hal-hal yang menjadi penyebab terjadinya, mencari tahu dampak, dan manfaat pengetahuan atas fenomena ini. Untuk memperkaya hasil penelitian pendekatan yang

dilakukan adalah dengan metode kualitatif menelaah dari sudut pandang aliran birokratik atau secara *behavioral* akuntansi mengenai pengambilan keputusan.

4. METODE PENELITIAN

4.1. Jenis Data Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis data kualitatif yang menggambarkan fenomena *flypaper effect* pada Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Utara dalam Tahun Anggaran 2006 - 2010. Namun, secara kuantitatif juga dibutuhkan dalam menunjang penelitian ini yakni melalui uji statistik regresi berganda. Hasil uji statistik tersebut akan memperkuat hasil dan menentukan apakah terjadi atau tidak fenomena *flypaper effect*. Selanjutnya untuk menyelesaikan rumusan masalah kedua digunakan jenis data kualitatif dengan cara memperoleh data melalui teknik wawancara.

4.2. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Utara. Jumlah pemerintah daerah hingga tahun 2010 adalah sebanyak 16 pemerintah daerah yaitu:

1. Pemerintah Daerah Kota Bitung
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
4. Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
5. Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
6. Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu
7. Pemerintah Daerah Kota Manado
8. Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa
9. Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Utara
10. Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara
11. Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan
12. Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara
13. Pemerintah Daerah Kabupaten Sangihe
14. Pemerintah Daerah Kabupaten Sitaro
15. Pemerintah Daerah Kabupaten Talaud
16. Pemerintah Daerah Kota Tomohon

4.3. Teknik Pengambilan Sampel

Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu (*purposive sampling*) dimana kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Selama kurun waktu 2006 – 2010 pemerintah daerah tersebut tidak mengalami perubahan (pemekaran) ataupun konsolidasi (penggabungan) daerah. Jika suatu daerah terjadi perubahan (pemekaran atau penggabungan) maka berakibat pada bobot DAU dan jumlah PAD yang berubah pula. Hal ini berdampak pada distorsi pemahaman dalam melakukan pengujian statistik nantinya.
2. Selain itu terdapat pemisahan yang disengaja antara pemerintah daerah provinsi dengan kabupaten/ kota yang diakibatkan oleh perbedaan bobot daerah antara kedua jenis administrasi pemerintahan tersebut.

4.4. Jumlah Sampel

Dengan melihat bahwa penelitian ini tidak menggunakan sensus dan untuk memenuhi kriteria di atas maka, jumlah sampel yang terpilih adalah sebanyak 5 (lima) pemerintah daerah yakni:

1. Pemerintah Daerah Kota Manado
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Utara

4. Pemerintah Daerah Kota Tomohon
5. Pemerintah Daerah Kota Bitung

4.5. Definisi Variabel

1. Belanja Daerah (BD)

Belanja daerah dalam penelitian ini merupakan variabel dependen atau variabel terikat yang merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas (DAU dan PAD). Yang dimaksud dengan Belanja Daerah dalam penelitian ini adalah angka realisasi Belanja Daerah Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Utara pada Tahun Anggaran 2007 hingga 2010 dengan nominal mata uang Rupiah (Rp).

2. Dana Aloaksi Umum (DAU)

DAU dalam penelitian ini merupakan salah satu variabel independen atau variabel bebas yang merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen (BD). Yang dimaksud dengan DAU dalam penelitian ini adalah angka realisasi DAU Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Utara pada Tahun Anggaran 2006 hingga 2009 dengan nominal mata uang Rupiah (Rp).

3. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD dalam penelitian ini merupakan salah satu variabel independen atau variabel bebas yang merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen (BD). Yang dimaksud dengan PAD dalam penelitian ini adalah angka realisasi PAD Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Utara pada Tahun Anggaran 2006 hingga 2009 dengan nominal mata uang Rupiah (Rp).

Untuk *flypaper effect* tidak dijabarkan definisi operasionalnya. Hal ini dikarenakan *flypaper effect* merupakan situasi yang dihasilkan oleh ketiga variabel di atas. Dimana ketika koefisien DAU lebih berpengaruh signifikan terhadap BD daripada PAD maka, situasi ini disebut *flypaper effect*.

4.6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan alat analisis yaitu regresi berganda (*multiple regression*). Regersi berganda yang dipakai untuk memenuhi tujuan penelitian dalam membuktikan secara empiris mengenai fenomena *flypaper effect* di bawah ini dalam bentuk persamaan-persamaan. Berikut persamaan-persamaan yang digunakan dalam pengujian.

Persamaan umum yang digunakan adalah:
$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Dan kemudian dijabarkan sebagai berikut:

Untuk menilai *flypaper effect*
$$Y_i = \alpha + \beta_1 DAU_{1i} + \beta_2 PAD_{2i} + e$$

Menggunakan lag 1 tahun
$$Y_i = \alpha + \beta_1 DAU_{1t-1} + \beta_2 PAD_{2t-1} + e$$

dimana Y_i adalah jumlah Belanja Daerah (BD), α konstanta, β_1, β_2 koefisien regresi, DAU_{1i} jumlah DAU tahun berjalan, PAD_{2i} jumlah PAD tahun berjalan, PAD_{1t-1} adalah PAD tahun sebelumnya, DAU_{1t-1} adalah DAU tahun sebelumnya, dan e error term.

Untuk menentukan apakah terjadi *flypaper effect*, maka efek DAU terhadap BD dibandingkan dengan efek PAD terhadap BD. Dalam regresi berganda, dibandingkan koefisien regresi untuk masing-masing variabel. Syarat terjadinya *flypaper effect* adalah (1) apabila efek (nilai koefisien) DAU terhadap Belanja Daerah lebih besar daripada efek PAD dan keduanya sama-sama signifikan, atau (2) PAD tidak signifikan, maka dapat disimpulkan terjadi *flypaper effect*.

5. ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

5.1. Hasil Uji Statistik

Tabel 5.1 Data Panel Penelitian Tesis (Dalam Rupiah)

ENTITAS	BELANJA	TAHUN	DAU	PAD
PEMERINTAH DAERAH	TAHUN BERJALAN (t)	(t-1)	LAG 1 (t-1)	LAG 1 (t-1)
Kota Manado				
2007	519,872,453,435	2006	330,290,000,000	46,516,787,252
2008	616,807,203,946	2007	374,754,000,000	54,715,561,525
2009	693,742,305,984	2008	430,073,269,000	73,481,423,371
2010	678,488,076,193	2009	420,752,563,000	72,404,996,767
Kabupaten Minahasa				
2007	456,510,534,964	2006	282,227,171,985	17,420,408,548
2008	469,997,324,190	2007	337,027,000,000	16,822,344,811
2009	545,517,050,282	2008	370,172,699,000	19,290,021,468
2010	606,590,446,539	2009	372,083,213,000	23,746,290,907
Kabupaten Minahasa Utara				
2007	347,496,849,691	2006	233,767,685,879	5,790,874,131
2008	375,174,818,606	2007	227,809,000,000	6,045,185,570
2009	410,121,106,423	2008	254,843,630,000	10,267,520,508
2010	405,033,353,009	2009	256,513,575,000	11,755,839,676
Kota Tomohon				
2007	284,833,300,459	2006	165,638,000,000	4,808,295,501
2008	336,610,626,554	2007	182,495,000,000	5,588,947,786
2009	300,128,828,658	2008	204,066,920,000	6,012,262,982
2010	293,870,614,707	2009	204,691,553,000	6,342,461,162
Kota Bitung				
2007	323,387,591,111	2006	217,357,272,000	10,242,334,515
2008	366,960,420,078	2007	243,233,000,000	10,178,349,951
2009	397,263,093,217	2008	271,735,114,000	17,392,736,282
2010	459,724,036,794	2009	271,223,725,000	16,822,773,814

Sumber data: BPK-RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara

Dalam tabel 5.1 di atas, memperlihatkan bahwa penelitian ini tidak menggunakan *cross-section* dalam arti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak dibandingkan dengan tahun yang sama pada Belanja Daerah (BD) melainkan menggunakan lag-1 seperti pada Maimunah, 2006. Maksud penggunaan data DAU dan PAD dengan lag 1 adalah untuk melihat peningkatan dari pengaruh DAU dan PAD tahun sebelumnya dengan BD tahun berjalan (t). Dengan menggunakan lag 1 diharapkan penilaian untuk mengetahui fenomena *flypaper effect* dengan cara yang lebih memadai.

5.2. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Tabel 5.2 Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximun	Mean	Std. Deviation
Belanja Daerah Tahun Berjalan	20	284,833,300,459	693,742,305,984	444,406,501,742	127,790,846,593
DAU lag 1	20	165,638,000,000	430,073,269,000	282,537,719,543	79,163,212,952
PAD lag 1	20	4,808,295,501	73,481,423,371	21,782,270,826	21,850,161,574
Valid N (listwise)	20				

Sumber Data: Data Olahan

Dalam tabel di atas tampak jelas bahwa nilai terendah dari setiap variabel terjadi pada tahun 2007 untuk Belanja Daerah dan tahun 2006 untuk DAU dan PAD serta dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kota Tomohon hal ini menunjukkan bahwa di antara setiap Pemda yang merupakan sampel,

Kota Tomohon adalah kota termuda bersama dengan Pemerintah Daerah Minahasa Utara yakni terbentuk pada tahun 2003. Penjelasan paling logis yang bisa diterima atas nilai minimum adalah perbandingan bobot daerah yang berbeda mengingat luas wilayah kota Tomohon yang relatif kecil yakni 114,20 km², dan berpenduduk 93.680 jiwa bandingkan dengan Minahasa Utara dengan luas wilayah 918,49 km² dan berpenduduk 208.590 jiwa.

Dalam data kolom maksimum menghasilkan suatu yang menarik dimana nilai-nilai tertinggi dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kota Manado. Untuk Belanja Daerah sebagai variabel Y nilai tertinggi pada tahun 2009 sedangkan untuk variabel X₁ dan X₂ masing-masing DAU dan PAD tertinggi terjadi pada tahun 2008 untuk pemerintah daerah yang sama. Secara partial (Pemerintah Daerah Kota Manado) hal ini menunjukkan adanya gejala fenomena *flypaper effect*. Kenaikan pendapatan melalui transfer (DAU) dan PAD tahun 2008 mengakibatkan kenaikan pada Belanja Daerah tahun 2009 – *flypaper effect*.

5.3. Hasil Uji Statistik Regresi Linear Berganda

Tabel 5.3 Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.982(a)	.963	.959	25854785308.191 41	2.023

Tabel di atas menunjukkan bahwa PAD lag 1 dan DAU lag 1 pada Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Utara untuk tahun anggaran 2006 – 2010 berpengaruh positif dengan nilai variabel sebesar 98% hampir 100%. R Square sebagai jumlah kuadrat dari R (R²) bisa disebut sebagai koefisien determinasi artinya, PAD lag 1 dan DAU lag 1 mempengaruhi BD sebanyak 96% sedangkan sisanya adalah faktor lain di luar penelitian ini, yakni hanya sebesar 2% yang tidak signifikan mempengaruhi BD dapat berupa DAK, Dana Bagi Hasil dan sebagainya. Kemudian untuk menguji signifikansi hubungan linear antar variabel Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah tahun sebelumnya terhadap Belanja Daerah tahun berjalan digunakan perbandingan nilai Sig. pada tabel ANOVA dengan taraf signifikan (α) sebesar 0,05 jika nilai Sig. < α , maka pengaruh kedua variabel adalah signifikan.

Tabel 5.4 ANOVA

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	298915520290640400000000.000	2	149457760145320200000000.000	223.582	.000(a)
	Residual	11363988696655390000000.000	17	668469923332670000000.000		
	Total	310279508987295800000000.000	19			

Dalam tabel perhitungan atas uji di atas didapatkan bahwa nilai Sig. yang sebesar 0.000 lebih kecil dari alpha sebesar 0,050 (Sig. < α) sehingga dapat dikategorikan bahwa hubungan simultan antara DAU lag 1 dan PAD lag 1 dengan BD adalah sangat signifikan. Belanja daerah Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Utara sangat dipengaruhi oleh DAU lag 1 dan PAD lag 1 atau ketika DAU lag 1 dan PAD lag 1 berubah (meningkat maupun menurun) hal yang sama terjadi pula pada Belanja Daerahnya. Dalam menentukan terjadinya atau tidaknya *flypaper effect* secara simultan ditunjukkan oleh tabel berikut.

Tabel 5.5 Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	50444613368. 181	32172935201. 355		1.568	.135		
	DAU lag 1	1.306	.145	.809	9.035	.000	.269	3.724
	PAD lag 1	1.142	.524	.195	2.181	.044	.269	3.724

Hasil pengujian dalam tabel di atas menunjukkan bahwa DAU lag 1 dan PAD lag 1 secara bersama-sama berpengaruh terhadap BD. Secara parsial pengaruh DAU lag 1 terhadap belanja daerah

ditunjukkan melalui koefisien t statistik senilai 9.035 dengan tingkat signifikansi 0.000 atau lebih kecil dari tingkat α 0.050 dan berarti sangat signifikan. Sedangkan PAD *lag* 1 menunjukkan koefisien t statistik senilai 2.181 dengan tingkat signifikansi 0.044 atau lebih kecil dari tingkat α 0.050 dan berarti sangat signifikan.

Tabel di atas menghasilkan bahwa melalui uji statistik dengan alat uji regresi linear berganda menunjukkan pengaruh DAU *lag* 1 dan PAD *lag* 1 secara parsial terhadap BD adalah sama-sama signifikan. Namun secara jelas nilai signifikansi DAU *lag* 1 lebih kuat dibandingkan dengan nilai signifikansi PAD *lag* 1 (yakni 0.000 berbanding 0.044). Dengan demikian solusi untuk perumusan masalah pertama telah ditemukan melalui terpenuhinya syarat terjadinya *flypaper effect* yakni, apabila efek (nilai koefisien) DAU *lag* 1 terhadap Belanja Daerah lebih besar daripada efek PAD *lag* 1 dan keduanya sama-sama signifikan. Dengan kata lain Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Utara untuk Realisasi Anggaran Tahun 2006-2010 dengan DAU dan PAD *lag* 1 secara empiris terjadi *flypaper effect*.

5.4. Pembahasan/ Analisis Hasil Uji Statistik

Dalam penelitian ini yakni, Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara digolongkan pula terjadi fenomena *flypaper effect* pula. Pada 5 (lima) pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Utara ditemukan bahwa fenomena ini terjadi dalam kurun waktu realisasi anggaran 2006-2010. Penelitian yang menggunakan *lag* 1 tahun untuk DAU dan PAD terhadap BD tahun berjalan membuktikan secara empiris bahwa DAU dan PAD tahun sebelumnya memberikan pengaruh yang signifikan terhadap BD tahun berikutnya. Hal ini menimbulkan suatu kekhawatiran bahwa dalam menetapkan BD tahun berjalan didasarkan atau berlandaskan DAU, PAD, dan BD tahun sebelumnya, bukan pada kebutuhan pemerintah daerah terkait.

Flypaper effect yang terjadi di pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara mengindikasikan adanya suatu pemborosan dimana Belanja Daerah lebih banyak digunakan untuk belanja operasional dari pada belanja modal. Dalam pemahaman bahwa dengan meningkatkan belanja modal ada pula peningkatan terhadap pendapatan asli daerah. Namun yang terjadi adalah peningkatan pada Dana Alokasi Umum justru lebih mempengaruhi jumlah belanja daerah yang semakin tinggi pula.

5.5. Flypaper Effect pada Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Utara

Setelah penelitian ini menghasilkan temuan adanya fenomena *flypaper effect* pada Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Utara melalui alat uji statistik regresi linear berganda, pada bagian ini peneliti membahas lebih dalam mengenai fenomena pada sudut pandang model birokratik. Model ini lebih mengedepankan pada sisi perilaku para birokrat terlebih khusus kebijakan dan pengambilan keputusan ekonomi dalam penentuan penggunaan belanja daerah.

Sub bab ini bertujuan untuk memperoleh solusi terhadap rumusan masalah yang kedua yakni, bagaimana *flypaper effect* pada Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Utara. Permasalahan ini tidak cocok diselesaikan dengan menggunakan alat uji statistik. Sehingga peneliti memutuskan untuk membahasnya secara deskriptif berdasarkan informasi-informasi yang diperoleh melalui wawancara dengan teknik wawancara terbuka. Dalam wawancara terbuka ini muncul suatu pendapat-pendapat dari pihak yang berperan langsung dalam bidang akuntansi di Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

5.6. Kemandirian Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Utara

Pada perusahaan-perusahaan sektor swasta terdapat beberapa indikasi untuk dapat dikategorikan sebagai perusahaan mandiri. Salah satu indikasi kemandirian bagi perusahaan swasta yang klasik adalah kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan pendapatan (*income ability*). Dalam sudut pandang sektor publik atau pemerintah daerah *income ability* diidentikan dengan kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Banyak literatur yang mengindikasikan bahwa besarnya PAD menunjukkan kemandirian suatu daerah.

Pada wawancara yang dilakukan oleh peneliti, diperoleh persetujuan bahwa daerah yang dikatakan mandiri adalah daerah yang mampu memenuhi seluruh kebutuhan daerahnya. Dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan tersebut dihasilkan oleh daerahnya sendiri. Dengan kata lain, ketika PAD berhasil memenuhi seluruh kebutuhan suatu daerah, daerah itu telah mandiri.

Dengan melihat dua sudut pandang ini belum cukup. Perlu suatu kesadaran dan pemahaman bahwa sektor swasta/ privat dengan sektor publik/ pemerintahan memiliki orientasi yang berbeda. Jelas bahwa sektor swasta berorientasi pada penjualan/ pendapatan untuk memperoleh laba yang bertujuan untuk kelangsungan hidup usahanya (*going concern*), namun berbeda dengan sektor publik/ pemerintahan apakah dengan PAD yang tinggi *going concern*-nya terhenti? Apakah jika suatu daerah tidak mampu menghasilkan PAD daerah tersebut akan ditutup?

PAD bisa menjadi salah satu indikasi bahwa suatu daerah digolongkan mandiri, namun bukan itu yang utama dan tidak hanya berfokus pada ukuran PAD saja. Orientasi sektor publik/ pemerintah adalah pada penyediaan *public services* dan *public goods*. Pemerintah daerah memiliki tujuan untuk memberi kesejahteraan kepada masyarakat bukan menghasilkan PAD yang tinggi.

Fenomena *flypaper effect* diangkat untuk memberikan gambaran mengenai suatu indikasi kemandirian daerah, namun bukan hanya fenomena ini yang menjadi ukuran. Sekurang-kurangnya dengan mengetahui adanya fenomena ini, muncul kesadaran bahwa pemerintah daerah melakukan pemborosan dengan lebih banyak membelanjakan pos pendapatan DAU untuk belanja operasional atau rutin bukan untuk lebih mengembangkan potensi PAD yang ada di daerahnya.

5.7. Peranan DAU dan PAD pada Belanja Daerah

DAU dan PAD merupakan sebagian pos pendapatan bagi suatu daerah yang dapat digunakan secara lebih leluasa bagi pemerintah daerah untuk digunakan pada belanja operasional maupun modal. Kecenderungan saat ini pemerintah daerah masih menggantungkan pendapatannya pada Dana Alokasi Umum untuk membiayai mayoritas belanja daerah tersebut.

Pada wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini, terdapat indikasi yang mengarah pada peran DAU sebagai sumber dana untuk belanja rutin/ operasional yang dialokasikan untuk gaji/ belanja pegawai. Dengan proporsisi DAU yang besar menyebabkan dana transfer pemerintah tersebut terserap hanya untuk belanja operasional. Dengan kata lain, DAU belum memberikan kontribusi yang signifikan bagi belanja modal. Sedangkan untuk PAD sendiri, digunakan untuk belanja modal melalui konsep demokrasi – dari, oleh, dan untuk rakyat. Sehingga menghasilkan suatu pandangan sempit bahwa hanya PAD-lah yang berasal dari rakyat daerahnya dan dikembalikan untuk rakyat daerahnya. Padahal DAU berasal dari rakyat juga. Temuan ini mendukung pemikiran Grossman, 1990 dan Choi, 2009 mengenai *myopic behavior* dimana, pengambil keputusan hanya berdasarkan pada satu pos tertentu tanpa mempertimbangkan pos-pos lain yang lebih bermanfaat. Dengan pandangan seperti maka, peran DAU adalah untuk belanja operasional sedangkan PAD untuk belanja modal – *flypaper effect* terjadi. Pemerintah daerah telah menyiapkan atau dengan sengaja mengalokasikan suatu jumlah belanja yang besar untuk belanja operasional yang tidak memberikan kontribusi bagi pengembangan daerah sebagaimana dengan belanja modal. Dengan demikian ketika jumlah DAU meningkat maka belanja operasional pun ikut meningkat dan lebih meningkat lagi pada tahun berikutnya, itulah fenomena *flypaper effect*.

5.8. Sifat Oportunistik Legislatif dan Eksekutif

Dalam wawancara yang dilaksanakan penulis, nara sumber mengakui bahwa pola perilaku oportunistik baik di lingkungan legislatif maupun eksekutif masih ada dan terdapat kemungkinan besar bahwa hal itu akan selalu ada karena ditunjang oleh sistem politik seperti saat ini. Hasil analisa berdasarkan logika membawa pada suatu kesadaran empiris bahwa ketika sifat oportunistik ini muncul maka timbul suatu beban/ biaya yang tidak seharusnya muncul. Beban ini bukan hanya digunakan untuk pos yang telah disepakati melainkan digunakan pula untuk kepentingan pribadi maupun kelompok dengan istilah ‘mengamankan posisi’. Hal ini sejalan dengan penelitian Inman, 2008 yang menyatakan

flypaper effect sebagai hasil politisasi dan dihubungkan dengan insentif bagi mereka yang dipilih publik. Sekaligus menjelaskan bagaimana dampak risiko muncul atas suatu fenomena pengambilan keputusan secara berkelompok. Oleh Niskanen, 1968 dikutip dari Kuncoro (2007) diasumsikan sebagai perilaku memaksimalkan anggaran sebagai proksi kekuasaan.

Munculnya beban ini secara tidak langsung menyebabkan suatu pemborosan anggaran yang semestinya digunakan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Melalui belanja modal yang disalurkan tanpa/ mengurangi sifat oportunistik maka, pembangunan fisik berjalan lebih maksimal. Hal ini bukan berarti bahwa tidak ada pembangunan fisik. Melainkan mengeliminasi kemungkinan fenomena *flypaper effect* terjadi.

6. PENUTUP

6.1 Simpulan

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dan hasil pengujian atas pengaruh DAU *lag 1* dan PAD *lag 1* terhadap Belanja Daerah tahun berjalan guna membuktikan terjadi atau tidaknya fenomena *flypaper effect*, serta menggali lebih dalam mengenai fenomena *flypaper effect* ini, maka dapat ditarik 2 (dua) kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil pengujian statistik dengan menggunakan alat uji regresi berganda bertujuan untuk mengetahui terjadi atau tidak terjadi fenomena *flypaper effect* menghasilkan suatu bukti empiris bahwa dalam kurun waktu 2006 – 2010 pada 5 (lima) pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Utara sebagai sampel dalam penelitian ini terjadi fenomena *flypaper effect*. Artinya DAU *lag 1* lebih berpengaruh terhadap Belanja Daerah daripada pengaruh PAD *lag 1* terhadap Belanja Daerah. Dimana pengaruh DAU *lag 1* lebih signifikan terhadap BD untuk realisasi Tahun Anggaran 2006 – 2010.
2. Secara deskriptif kualitatif menghasilkan bahwa fenomena *flypaper effect* terjadi diakibatkan oleh:
 - 1) Tingkat kemandirian suatu daerah tidak hanya dilihat dari kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, secara logis fenomena ini menyatakan bahwa pemerintah daerah masih memiliki ketergantungan terhadap pemerintah pusat melalui dana transfernya yakni Dana Alokasi Umum (DAU).
 - 2) Peranan Dana Alokasi Umum (DAU) yang telah dialokasikan (*plot*) untuk belanja operasional berupa gaji/ belanja pegawai. Menyebabkan pos belanja modal hanya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
 - 3) Adanya sifat oportunistik dari legislatif dan eksekutif dalam pengambilan keputusan mengenai penggunaan dana bahkan sejak perencanaan anggaran menyebabkan pemborosan yang tidak semestinya.

6.2. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan di atas hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak yang memiliki ketertarikan dalam berkecimpung membahas masalah anggaran dalam hal ini Realisasi APBD. Penelitian ini juga diharapkan dapat mengundang para peneliti berikutnya untuk dapat membahas lebih dalam lagi informasi yang terkandung dan dihasilkan dari sebuah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berikutnya. Dan penelitian ini pula dapat dikaitkan dengan disiplin ilmu atau cabang ilmu lainnya seperti ilmu hukum administrasi publik maupun penganggaran pemerintah daerah.

Penelitian ini memiliki beberapa hal yang dapat dikembangkan atau bahkan dilanjutkan untuk dapat disempurnakan dengan penelitian-penelitian berikutnya. Sehingga beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penelitian ini bagi para peneliti selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Tidak dilakukannya penelitian lapangan (*field research*) untuk mengetahui perilaku *agents* atau politisi dalam membuat keputusan alokasi sumber dana yang diperoleh baik dari pemerintah

pusat (dalam hal ini DAU) maupun dari Pendapatan Asli Daerahnya sendiri sejak perencanaan (RAPBD/ RAPBD-P) hingga pengambilan keputusan realisasi APBD.

2. Data *panel lag 1* yang digunakan untuk periode 5 tahun yakni 2006 – 2010 tidak secara menyuluruh menggambarkan pada 1 periode tertentu dan sama mengenai hubungan penggunaan dana untuk belanja periode terkait. Sehingga perlu dibuat penelitian dengan menggunakan data *cross section non-lag*.
3. Penelitian ini tidak menguji dan menganalisis efektivitas dan efisiensi penggunaan dana pendapatan. Dalam hal ini tidak memperhitungkan dan mempertimbangkan jumlah belanja, struktur belanja, jumlah penduduk, dan dampak terjadinya *flypaper effect* secara keseluruhan khususnya tingkat kesejahteraan rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

- Choi, Luibson, & Madrian. *Mental Accounting in Portfolio Choice: Evidence From a Flypaper Effect*. American Economic Review. 2009.
- Dahlberg M, Mork, Rattso, & Agren. *Local Taxes and Spending: Estimating the Flypaper Effect Using a Discontinuous Grants Rule*. 2007.
- Deller S, Maher, Lledo. *Winconsin Local Government, State Shared Revenues And The Illusive Flypaper Effect*. Staff Paper No. 451. 2002.
- Gorodnichenko, Yuriy. *Effects of Intergovernmental Aid on Fiscal Behavior of Local Governments: The Case of Ukraine*. Thesis. The National University of Kyiv-Mohyla Academy. 2001.
- Grossman J. Phillip. *The Impact of Federal and State Grants on Local Government Spending: A Test of The Fiscal Illusion Hypothesis*. Discussion Paper. 1988.
- Hines R. James, & Thaler H. Richard. *Anomalies: The Flypaper Effect*. The Journal of Economic Perspectives, Vol. 9, No. 4. J Stor. 1995.
- Inman P. Robert. *The Flypaper Effect*. NBER Working Paper. 2008.
- Kuncoro, Haryo. *Fenomena Flypaper Effect Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten Di Indonesia*. Simposium Nasional Akuntansi 10. 2007. Makassar.
- Kusumadewi A. Diah, & Rahman. *Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/ Kota di Indonesia*. JAAI Vol. 11, No. 1, 67-80. 2007.
- Maimunah, Mutiara. *Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/ Kota di Pulau Sumatra*. Simposium Nasional Akuntansi 9. 2006. Padang.
- Prakosa B. Kesit. *Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Prediksi Belanja Daerah (Studi Empirik di Wilayah Provinsi Jawa Tengah dan DIY)*. JAAI Vol. 8, No. 2. 2004.
- _____. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Sarundajang, S.H. *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*. Ed 3. Kata Hasta Pustaka. 2011. Jakarta.

**PENGARUH KINERJA AUDITOR INTERNAL TERHADAP EFEKTIVITAS
PENGENDALIAN INTERNAL PROSEDUR KREDIT KENDARAAN BERMOTOR PADA
PERUSAHAAN PEMBIAYAAN DI KOTA MANADO**

Claudia Wanda Melati Korompis

Jullie J. Sondakh

Lidia Mawikere

ABSTRAK

Bagian audit internal sangat penting, apabila suatu perusahaan tidak memiliki auditor internal, berbagai permasalahan akan muncul baik yang bersifat administratif hingga kecurangan yang merugikan. Manajemen akan mengandalkan kinerja auditor berupa hasil audit internal yang bermutu, sebagai alat analisis yang obyektif atas pengendalian internal, serta melakukan perbaikan atas sistem pengendalian yang bermasalah. Dalam SPAI 2004, kinerja auditor internal terbagi atas pengelolaan fungsi audit internal, lingkup penugasan, perencanaan penugasan, pelaksanaan penugasan, komunikasi hasil penugasan, pemantauan tindak lanjut, dan resolusi penerimaan resiko oleh manajemen. Tujuan penelitian untuk menganalisis pengaruh kinerja auditor internal terhadap efektivitas pengendalian internal prosedur kredit kendaraan bermotor pada perusahaan pembiayaan di Kota Manado. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa secara bersama-sama Pengelolaan Fungsi Audit Internal, Lingkup penugasan, Perencanaan Penugasan, Pelaksanaan Penugasan, Komunikasi Hasil Penugasan, Pemantauan Tindak Lanjut dan Resolusi Penerimaan Resiko oleh Manajemen berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas Pengendalian Internal Prosedur Kredit dengan besar kontribusi 58,8%, sedangkan secara parsial hanya Lingkup penugasan, Perencanaan Penugasan, Pelaksanaan Penugasan, Resolusi Penerimaan Resiko oleh Manajemen yang berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas Pengendalian Internal Prosedur Kredit. Saran dari penelitian ini adalah agar supaya merekrut auditor internal yang memang memiliki dasar pendidikan akuntansi dan mendapatkan serangkaian pelatihan/atau ujian sertifikasi dari YPIA.

Kata kunci : *Auditor Internal, Pengendalian, Kredit, Leasing.*

ABSTRACT

Internal audit is very important, if a company does not have an internal auditor, various problems may arise both administratively up to fraud that will losses to the company. Management will rely on auditor performance in the form of audit quality, as a means of objective analysis on internal control, and make improvements to the internal control system is problematic. In SPAI 2004, the performance of the internal auditor can be seen from the management of the internal audit function, the scope of the assignment, assignment planning, execution of the assignment, the assignment of communication of results, follow-up monitoring, and resolution of risk acceptance by management. The purpose of this research was to analyze the effect of the performance of the internal auditor of the effectiveness of internal control procedures on a vehicle loan finance company in the city of Manado. From the research it can be concluded that the co-management of the Internal Audit Function, scope of assignment, Planning Assignment, Implementation of Assignment, Communication Assignment Results, Monitoring and Follow-up Risks by Acceptance and Resolution Management influence the

effectiveness of Internal Control Procedures Credit with a large contribution 58,8%, while the scope of the assignment is only partially, Planning Assignment, Implementation of Assignment, Resolution Revenue by Risk Management that affect the effectiveness of the Internal Control Procedures Credit. Suggestions from this study is in order to recruit internal auditors who do have basic education and has been getting a series of training / certification or testing of YPIA.

Keywords : *Internal Auditor, Controlling, Credit, Leasing.*

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perusahaan pembiayaan (*Leasing*) menjadi pilihan utama kredit kendaraan bermotor dibandingkan kredit melalui bank oleh karena suku bunga murah, syarat mudah dan prosesnya yang cepat. Persaingan yang ketat dan sifatnya yang mudah dalam pencairan kredit membuat perusahaan pembiayaan dihadapkan dengan risiko kredit macet. Masalah-masalah dalam tubuh perusahaan tidak hanya disebabkan oleh kelalaian semata, akan tetapi dapat juga disebabkan karena adanya penyimpangan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan yang bersangkutan. Auditor internal muncul dalam rangka mengidentifikasi dini dan melakukan langkah pencegahan, dengan berperan sebagai katalisator yaitu memberikan jasa kepada manajemen melalui saran-saran yang bersifat konstruktif dan dapat diaplikasikan bagi kemajuan perusahaan namun tidak ikut dalam aktivitas operasional perusahaan.

Menurut AICPA dikutip oleh Andayani (2011 : 47-48), pengendalian intern merupakan proses yang dipengaruhi oleh aktivitas dewan komisaris, manajemen atau pegawai lainnya, yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang wajar mengenai pencapaian tujuan yang meliputi: (1) keandalan pelaporan keuangan, (2) efektivitas dan efisiensi operasi, dan (3) ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Dari definisi diatas dapat diketahui bahwa pengendalian internal dipengaruhi oleh aktivitas/kerja yang terstruktur oleh orang-orang dalam perusahaan itu sendiri termasuk satuan kerja audit internal (SKAI). Manajemen akan mengandalkan kinerja yang baik berupa hasil audit internal yang bermutu dari internal auditor sebagai alat analisis yang obyektif atas pengendalian internal yang sedang dijalankan perusahaan, serta melakukan perbaikan atas sistem pengendalian yang bermasalah. Bagian audit internal sangat penting, apabila suatu perusahaan tidak memiliki audit internal, dewan direksi atau pimpinan unit tidak memiliki sumber informasi untuk menilai kinerja perusahaan. Berbagai permasalahan akan muncul baik yang bersifat administratif sampai dengan *fraud* yang tidak dapat dideteksi oleh direksi dan akan menimbulkan kerugian yang besar pada perusahaan. Sesuai dengan SPAI 2004 yang dirumuskan oleh konsorsium organisasi profesi auditor internal menyatakan bahwa kinerja auditor internal dapat dilihat dari pengelolaan fungsi audit internal, lingkup penugasan, perencanaan penugasan, pelaksanaan penugasan, komunikasi hasil penugasan, pemantauan tindak lanjut, dan resolusi penerimaan resiko oleh manajemen.

Jika besar pengaruh kinerja auditor internal terhadap efektivitas pengendalian internal kredit dapat diukur besar pengaruhnya, maka anggapan selama ini yang mengatakan bahwa auditor internal membosankan, menyita waktu kerja auditi, dimana kerja audit internal hanya membuat *checklist*, memeriksa dokumen dan proses yang sama, menemukan beberapa temuan yang hampir sama serta membuat laporan yang kurang lebih sama dengan audit yang lalu akan berhenti. Hal ini akan membuat perusahaan pembiayaan lebih memperhatikan bagian audit internal yang merupakan satu-satunya bagian independen yang memberikan informasi objektif atas segala sesuatu yang terjadi di lapangan,

yang tidak dengan mudah dilacak oleh direksi, mengingat kerentanan perusahaan pembiayaan akan resiko kredit macet sangat tinggi.

Manado sebagai kota Ekowisata memiliki perkembangan pesat dalam perekonomian. Para pemilik modal berlomba-lomba berinvestasi di Kota Manado, salah satunya pasar *leasing*. Pemerintah Kota Manado menyadari potensi perusahaan pembiayaan dalam membantu stabilitas perekonomian, dengan mendorong belanja konsumsi, perputaran dan pendayagunaan modal, penyerapan tenaga kerja, serta peningkatan investasi dan pajak. Perusahaan pembiayaan pun tak ingin membuang kesempatan ini, sehingga kelangsungan perusahaan adalah hal mutlak. Dalam mencegah meningkatnya *non performing loan* dan menjaga kelangsungan perusahaan, auditor internal harus meningkatkan kinerjanya dengan memberikan penilaian yang jujur dan memperbaiki segala pelanggaran yang terjadi dengan solusi yang bijak (*problem solver*).

Dari latar belakang diatas maka judul penelitian yang diteliti adalah “**Pengaruh Kinerja Auditor Internal terhadap Efektivitas Pengendalian Internal Prosedur Kredit Kendaraan Bermotor pada Perusahaan Pembiayaan di Kota Manado**”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Apakah kinerja auditor internal berpengaruh signifikan terhadap sistem pengendalian internal prosedur kredit kendaraan bermotor pada perusahaan pembiayaan di kota Manado.
2. Berapa besar pengaruh kinerja auditor internal terhadap sistem pengendalian internal prosedur kredit kendaraan bermotor pada perusahaan pembiayaan di kota Manado.

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti adalah untuk menganalisis pengaruh kinerja auditor internal terhadap efektivitas pengendalian internal prosedur kredit perusahaan pembiayaan kendaraan bermotor di Kota Manado.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut.

1. Dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi perusahaan dalam menjalankan perusahaannya untuk menghindari kredit bermasalah.
2. Dapat memberikan manfaat dalam hal pengaplikasian teori – teori yang telah didapat selama perkuliahan dan diharapkan dapat berguna di masa yang akan datang.
3. Dapat dijadikan bahan kontribusi bagi pengembangan ilmu yang berkaitan dengan kajian akuntansi, khususnya tentang kredit dan studi audit internal.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Prosedur Kredit

Menurut Auryana (2009 :18,19) yang dimaksud dengan prosedur adalah suatu urutan kegiatan yang biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam terhadap transaksi perusahaan yang terjadi. Menurut Kasmir yang dikutip Pasi (2010 : 13) prinsip 5 C dalam seleksi pengajuan kredit adalah *Character, Capacity, Capital, Collateral*, dan *Condition*.

2.2. Efektivitas Pengendalian Internal

Menurut COSO (Commitee of Sponsoring Organization) seperti yang dikutip oleh Afrianiswara (2010 : 53) menyebutkan bahwa. *Internal Control can be judged effective for each of the three business objectives if management have reasonable assurance that they understand the extent to which the organization's objectives are being met; financial and management reports are being prepared reliably; and applicable laws and regulations are being complied with.* Pernyataan COSO di atas menyebutkan bahwa pengendalian intern akan dianggap efektif untuk tiga misi organisasi tersebut di atas jika manajemen memiliki keyakinan yang memadai bahwa tujuan organisasi tercapai, laporan manajemen dan laporan keuangan yang telah disajikan dapat diandalkan, serta peraturan perundang-undangan telah dipatuhi.

2.3. Kinerja Auditor Internal

Laporan merupakan hal yang sangat penting karena dalam laporan ini auditor internal menuangkan seluruh hasil pekerjaannya dan merupakan realisasi dari tanggung jawab auditor internal untuk menginformasikan hasil pengukuran aktivitas perusahaan yang telah diauditnya (Afrianiswara, 2010 : 20). Laporan inilah yang menunjukkan kinerja dari auditor internal, apakah laporan tersebut memiliki kesimpulan yang benar sesuai yang terjadi di lapangan dan memberikan rekomendasi yang baik bagi kelangsungan perusahaan.

2.4. Standar Profesi Audit Internal

Standar profesi audit internal wajib diterapkan oleh, tetapi tidak terbatas pada semua anggota profesi yang tergabung dalam konsorsium. Konsorsium merekomendasikan anggota IIA *Indonesia chapter*, FKSPI BUMN/BUMD, YPIA, Dewan sertifikasi QIA, dan PAII agar segera memasukkan (mengadopsi) jiwa yang terdapat dalam butir-butir standar ini ke dalam audit *charter*, pedoman, kebijakan, serta prosedur audit internal yang ada pada organisasi masing-masing (SPAI 2004 : 3).

Standar atribut

- 1000 Tujuan, wewenang dan tanggung jawab
- 1100 Independensi dan objektivitas
- 1200 Keahlian dan kecermatan profesional
- 1300 Program jaminan dan peningkatan kualitas fungsi audit

Standar Kinerja

- 2000 Pengelolaan fungsi audit internal
- 2100 Lingkup penugasan
- 2200 Perencanaan penugasan
- 2300 Pelaksanaan penugasan
- 2400 Komunikasi hasil penugasan
- 2500 Pemantauan tindak lanjut
- 2600 Resolusi penerimaan resiko oleh manajemen

Standar Implementasi.

2.5. Pengertian *Leasing*

Dalam Pasal 1 huruf a SK Menkeu RI No. 1169/KMK.01/1991 tentang kegiatan sewa guna usaha (*leasing*) disebutkan bahwa pengertian *leasing* adalah suatu kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan hak guna opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh lesse selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.

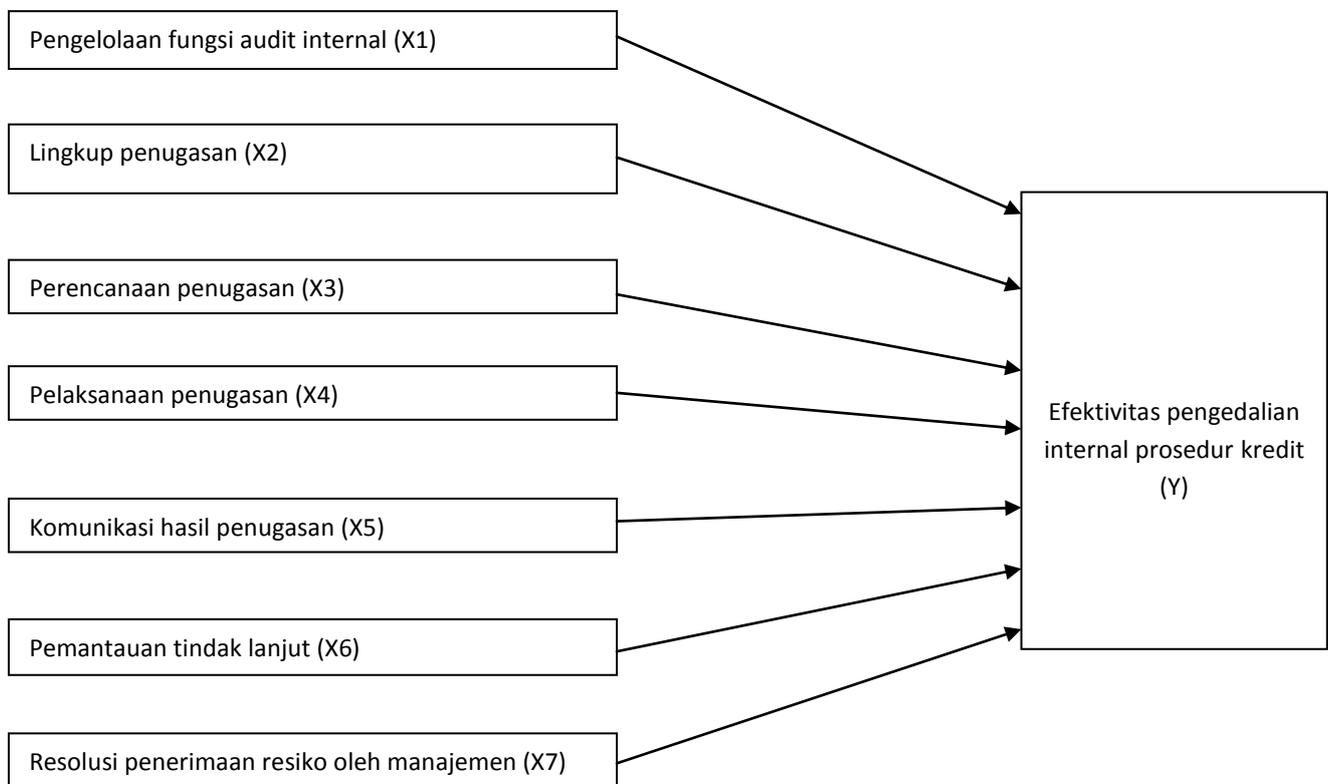
2.6. Penelitian Terdahulu

Afrianiswara (2010), Peranan audit internal dalam menunjang efektivitas pengendalian internal kredit investasi pada PT. Bank X. Hasil Penelitian Pelaksanaan audit internal atas kredit investasi pada

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Kantor Wilayah VIII Surabaya telah memadai sehingga dapat mendorong tercapainya pengendalian internal perusahaan yang efektif. Yuniar (2006), Pengaruh pemeriksaan intern terhadap efektivitas pengendalian pemberian kredit pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Kantor Wilayah I Medan. Hasil Penelitian Secara keseluruhan, variabel bebas bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel terikatnya, sedangkan secara parsial hanya variabel *standard operation prosedur* yang mempunyai pengaruh terhadap pengendalian pemberian kredit, sedangkan kelengkapan berkas, dokumentasi, dan daftar penilai tidak memberikan pengaruh signifikan. Yadnyana (2010), Pengaruh kualitas jasa auditor internal terhadap Efektivitas pengendalian intern pada hotel berbintang Empat dan lima di Bali. Hasil Penelitian, Faktor-faktor yang membentuk kualitas jasa auditor internal secara bersama berpengaruh secara signifikan terhadap efektivitas pengendalian intern pada hotel berbintang empat dan lima di Bali. Desyanti dan Ratnadi (2008), Pengaruh independensi, keahlian profesional, dan Pengalaman kerja pengawas intern terhadap efektivitas Penerapan struktur pengendalian intern pada bank Perkreditan rakyat di kabupaten badung. Hasil Penelitian, independensi, keahlian profesional, dan pengalaman kerja pengawas intern, baik secara simultan maupun parsial berpengaruh signifikan terhadap efektivitas penerapan struktur pengendalian intern pada Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Badung. Mustika (2012), Peranan audit internal dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan melalui pelaksanaan sistem pengendalian internal sebagai variabel intervening. Hasil Penelitian, Dengan tingkat kepercayaan 95%, audit internal memiliki peranan yang positif dan signifikan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan melalui pelaksanaan sistem pengendalian internal. Hal ini ditunjukkan oleh kontribusi sebesar 62,4% dan sisanya adalah pengaruh faktor lain sebesar 37,6%.

3. KERANGKA KONSEPTUAL

3.1. Kerangka Konseptual Penelitian



Gambar 3.1 Kerangka Konseptual Penelitian

3.2. Hipotesis

- H1 : Ada pengaruh signifikan Pengelolaan fungsi audit internal terhadap efektivitas pengendalian internal prosedur kredit pada perusahaan pembiayaan kendaraan bermotor di Kota Manado.
- H2 : Ada pengaruh signifikan Lingkup penugasan terhadap efektivitas pengendalian internal prosedur kredit pada perusahaan pembiayaan kendaraan bermotor di Kota Manado.
- H3 : Ada pengaruh signifikan Perencanaan penugasan terhadap efektivitas pengendalian internal prosedur kredit pada perusahaan pembiayaan kendaraan bermotor di Kota Manado.
- H4 : Ada pengaruh signifikan Pelaksanaan penugasan terhadap efektivitas pengendalian internal prosedur kredit pada perusahaan pembiayaan kendaraan bermotor di Kota Manado.
- H5 : Ada pengaruh signifikan Komunikasi hasil penugasan terhadap efektivitas pengendalian internal prosedur kredit pada perusahaan pembiayaan kendaraan bermotor di Kota Manado.
- H6 : Ada pengaruh signifikan Pemantauan tindak lanjut terhadap efektivitas pengendalian internal prosedur kredit pada perusahaan pembiayaan kendaraan bermotor di Kota Manado.
- H7 : Ada pengaruh signifikan Resolusi penerimaan resiko oleh manajemen terhadap efektivitas pengendalian internal prosedur kredit pada perusahaan pembiayaan kendaraan bermotor di Kota Manado.
- H8 : Ada pengaruh signifikan Pengelolaan fungsi audit internal, Lingkup penugasan, perencanaan penugasan, Pelaksanaan penugasan, Komunikasi hasil penugasan, Pemantauan tindak lanjut, Resolusi penerimaan resiko oleh manajemen terhadap efektivitas pengendalian internal prosedur kredit pada perusahaan pembiayaan kendaraan bermotor di Kota Manado.

4. METODE PENELITIAN

4.1. Jenis/Rancangan Penelitian yang Digunakan

Jenis Penelitian Tesis ini adalah penelitian kuantitatif. Jenis data yang dipergunakan adalah data kualitatif yang berbentuk uraian melalui respon tertulis (kuesioner) yang diukur dengan skala Likert (1-5). Sebagai penunjang peneliti juga menggunakan data kuantitatif yaitu data yang disajikan dalam bentuk angka-angka. Sumber data pokok yang diperoleh sebagai data primer diperoleh dengan survei lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data original yaitu observasi lapangan, wawancara, dan kuesioner/angket. Sebagai penunjang peneliti juga mengumpulkan data sekunder lokasi internal yang merupakan data umum seperti struktur organisasi perusahaan, dan peraturan-peraturan pemerintah terkait perusahaan pembiayaan tersebut. Peneliti juga mengambil referensi melalui data sekunder lokasi eksternal yang didapat melalui literatur-literatur yang ada di perpustakaan Unsrat, koleksi pribadi serta informasi-informasi dari internet dan lembaga penyedia data sekunder lainnya yang dapat dijadikan acuan bagi penelitian ini.

4.2. Populasi, Sampel, Besar Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel *judgement sampling* (non probabilitas) dengan kriteria yaitu semua perusahaan pembiayaan yang bergerak di jasa pemberian kredit kendaraan roda empat (mobil) yang terdaftar dalam data teknis di Badan Pelayanan

Perizinan Terpadu Kota Manado yang memiliki laporan izin berupa surat izin tempat usaha yang terseleksi mulai tanggal 07 Agustus 2009 sampai dengan 07 Agustus 2012 yaitu PT. Indojasa Pratama Finance, PT. Adira Dinamika Multi Finance, PT. Mandiri Tunas Finance, PT. CIMB Niaga Auto Finance, PT. Bima Multi Finance, PT. First Indo American Leasing, PT. Oto Multi Artha, PT. Batavia Prosperindo Finance, PT. BFI Finance Indonesia Tbk, PT. MNC Finance, PT. Hasjrat Multifinance, PT. Sadira Finance, PT. Sinar Mitra Sepadan Finance. Setelah mendapatkan objek penelitian tersebut, maka peneliti membagikan kuesioner pada masing-masing perusahaan, dengan subjek penelitian adalah orang-orang yang mengetahui proses dari audit internal dalam perusahaan dalam hal ini pimpinan dan PIC unit-unit kerja seperti Branch manager, Marketing head, Operation head, Collection head dan bagian audit internal. Total kuesioner yang dibagikan adalah 69 kuesioner, dan yang dikembalikan sejumlah 59 kuesioner. Setelah mendapatkan 59 kuesioner tersebut, peneliti melakukan pemeriksaan secara teliti terhadap kuesioner-kuesioner yang dikembalikan tersebut dan mendapatkan 59 kuesioner tersebut dapat diolah.

4.3. Cara Pengolahan dan Analisis Data

Cara pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Uji Validitas dan Reliabilitas
2. Uji Asumsi Klasik
3. Koefisien Korelasi dan Koefisien Determinasi
4. Analisis Regresi Linear Berganda : $Y = a + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \beta_4X_4 + \beta_5X_5 + \beta_6X_6 + \beta_7X_7 + e$
5. Uji F dan Uji t

5. ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

5.1. Uji Validitas dan Reliabilitas Data

Tabel 5.1 Uji Validitas dan Reliabilitas Data

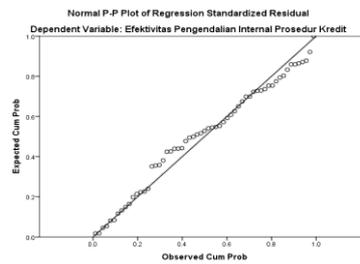
	(X ₁)	(X ₂)	(X ₃)	(X ₄)	(X ₅)	(X ₆)	(X ₇)	(Y)
Corrected Item-Total Correlation P1	0.537	0.495	0.459	0.593	0.402	0.544	0.571	0.525
Corrected Item-Total Correlation P2	0.460	0.463	0.486	0.577	0.450	0.704	0.603	0.505
Corrected Item-Total Correlation P3	0.648	0.437	0.613	0.561	0.454	0.561	0.613	0.458
Corrected Item-Total Correlation P4	0.525	0.415	0.580	0.675	0.702	0.577	0.604	0.345
Corrected Item-Total Correlation P5	0.332	0.309	0.445	0.559	0.315	0.350	0.477	0.566
Cronbach's Alpha	0.743	0.710	0.748	0.771	0.726	0.755	0.766	0.733

(Sumber : Data Hasil Olahan SPSS)

Hasil uji validitas dan reliabilitas untuk pertanyaan 1-5 untuk variabel X₁ X₂ X₃ X₄ X₅ X₆ X₇ dan Y, mempunyai nilai korelasi di atas 0,30 dan *cronbach alpha* 0,743. Semua dinyatakan reliabel dan valid.

5.2. Uji Asumsi Klasik

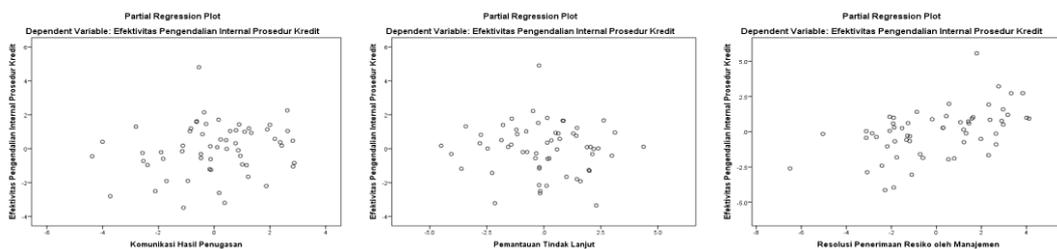
1. Uji Normalitas



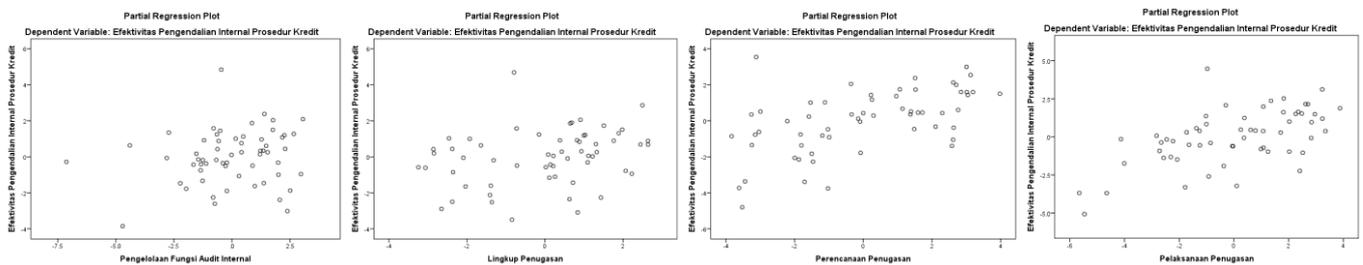
(Sumber : Data Hasil Olahan SPSS)

Gambar 5.1 Uji Normalitas

Gambar 5.1 menunjukkan bahwa grafik *Normal P-P of regression standardized residual* memenuhi asumsi *normalitas* dimana penyebaran data di sekitar dan mengikuti arah garis diagonal grafik tersebut.



2. Uji Heteroskedastisitas



(Sumber : Data Hasil Olahan SPSS)

Gambar 5.2 Uji Heteroskedastisitas

Pada gambar 5.2 dapat dilihat bahwa titik-titik tidak membentuk suatu pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 (nol) pada sumbu Y, hal ini membuktikan tidak terjadi heteroskedastisitas.

3. Uji Multikoleniaritas

Tabel 5.2 Uji Multikoleniaritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Pengelolaan Fungsi Audit Internal	.918	1.090

Lingkup Penugasan	.828	1.208
Perencanaan Penugasan	.934	1.071
Pelaksanaan Penugasan	.945	1.058
Komunikasi Hasil Penugasan	.674	1.483
Pemantauan Tindak Lanjut	.724	1.381
Resolusi Penerimaan Resiko oleh Manajemen	.926	1.080

(Sumber : Data Hasil Olahan SPSS)

Berdasarkan hasil *coefficients* yang terdapat pada tabel 5.2 dapat dilihat pada *output coefficients* model, dikatakan tidak terjadi gejala multikolinearitas jika $VIF < 10$ dan nilai *tolerance* $> 0,10$.

5.3. Koefisien Korelasi (r)

Tabel 5.3 Koefisien Korelasi

		Efektivitas Pengendalian Internal Prosedur Kredit
Pearson Correlation	Efektivitas Pengendalian Internal Prosedur Kredit	1.000
	Pengelolaan Fungsi Audit Internal	.008
	Lingkup Penugasan	.251
	Perencanaan Penugasan	.500
	Pelaksanaan Penugasan	.447
	Komunikasi Hasil Penugasan	.189
	Pemantauan Tindak Lanjut	.083
	Resolusi Penerimaan Resiko oleh Manajemen	.422
Sig. (1-tailed)	Efektivitas Pengendalian Internal Prosedur Kredit	.
	Pengelolaan Fungsi Audit Internal	.477
	Lingkup Penugasan	.027
	Perencanaan Penugasan	.000
	Pelaksanaan Penugasan	.000
	Komunikasi Hasil Penugasan	.076
	Pemantauan Tindak Lanjut	.266
	Resolusi Penerimaan Resiko oleh Manajemen	.000

N	Efektivitas Pengendalian Internal Prosedur Kredit	59
	Pengelolaan Fungsi Audit Internal	59
	Lingkup Penugasan	59
	Perencanaan Penugasan	59
	Pelaksanaan Penugasan	59
	Komunikasi Hasil Penugasan	59
	Pemantauan Tindak Lanjut	59
	Resolusi Penerimaan Resiko oleh Manajemen	59

(Sumber : Data Hasil Olahan SPSS)

Hasil olahan data menunjukkan bahwa variabel Pengelolaan Fungsi Audit Internal (X_1) mempunyai korelasi yang bersifat lemah, positif dan tidak signifikan dengan Efektivitas Pengendalian Internal Prosedur Kredit (Y). Untuk variabel Lingkup penugasan (X_2) mempunyai korelasi yang bersifat cukup, positif dan signifikan dengan Efektivitas Pengendalian Internal Prosedur Kredit (Y). Untuk variabel Perencanaan Penugasan (X_3) mempunyai korelasi yang bersifat cukup, positif dan signifikan dengan Efektivitas Pengendalian Internal Prosedur Kredit (Y). Untuk variabel Pelaksanaan Penugasan (X_4) mempunyai korelasi yang bersifat cukup, positif dan signifikan dengan Efektivitas Pengendalian Internal Prosedur Kredit (Y). Untuk variabel Komunikasi Hasil Penugasan (X_5) mempunyai korelasi yang bersifat lemah, positif dan tidak signifikan dengan Efektivitas Pengendalian Internal Prosedur Kredit (Y). Untuk variabel Pemantauan Tindak Lanjut (X_6) mempunyai korelasi yang bersifat lemah, positif dan tidak signifikan dengan Efektivitas Pengendalian Internal Prosedur Kredit (Y). Untuk variabel Resolusi Penerimaan Resiko oleh Manajemen (X_7) mempunyai korelasi yang bersifat cukup, positif dan signifikan dengan Efektivitas Pengendalian Internal Prosedur Kredit (Y).

5.4. Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 5.4 Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.798 ^a	.637	.588	1.564

(Sumber : Data Hasil Olahan SPSS)

Dengan melihat tabel output SPSS *model Summary* maka dapat diketahui bahwa besarnya nilai koefisien determinasi (R^2) terlihat dari nilai *Adjusted R Square* karena penelitian ini memiliki lebih dari satu variabel bebas yaitu sebesar 0,588 atau 58,8%, sedangkan 41,2% dipengaruhi oleh aktivitas dewan komisaris, manajemen atau pegawai lainnya selain bagian audit internal.

5.5. Analisis Regresi Linear Berganda

$$Y = -17,467 + 0,124 X_1 + 0,265 X_2 + 0,435X_3 + 0,444X_4 + 0,168X_5 - 0,039X_6 + 0,366X_7 + e$$

Tabel. 5.5 Koefisien Regresi

Model	Unstandardized Coefficients	
	B	Std. Error
1 (Constant)	-17.467	5.257
Pengelolaan Fungsi Audit Internal	.124	.104
Lingkup Penugasan	.265	.125
Perencanaan Penugasan	.435	.092
Pelaksanaan Penugasan	.444	.086
Komunikasi Hasil Penugasan	.168	.118
Pemantauan Tindak Lanjut	-.039	.109
Resolusi Penerimaan Resiko oleh Manajemen	.366	.087

(Sumber : Data Hasil Olahan SPSS)

Hasil regresi ini menunjukkan pengaruh beberapa variabel bebas terhadap variabel tergantung Efektivitas Pengendalian Internal Prosedur Kredit. Nilai konstan sebesar -17,467 menunjukkan bahwa jika variabel Pengelolaan Fungsi Audit Internal, Lingkup Penugasan, Perencanaan Penugasan, Pelaksanaan Penugasan, Komunikasi Hasil Penugasan, Pemantauan Tindak Lanjut, dan Resolusi Penerimaan Resiko oleh Manajemen dianggap konstan atau sama dengan nol (0) maka Efektivitas Pengendalian Internal Prosedur Kredit pada Perusahaan Pembiayaan Kendaraan Bermotor di kota Manado adalah sebesar -17,467 satuan *score* (nilai negatif disini dapat dianggap sebagai nol). Koefisien regresi X1 sebesar 0,124 mengartikan bahwa jika faktor Pengelolaan Fungsi Audit Internal meningkat sebesar 1 satuan *score* dari kondisi sebelumnya maka Efektivitas Pengendalian Internal Prosedur Kredit pada Perusahaan Pembiayaan Kendaraan Bermotor di kota Manado akan meningkat sebesar 0,124 satuan *score* dari kondisi sebelumnya dengan asumsi *ceteris paribus*. Koefisien regresi X2 sebesar 0,265 mengartikan bahwa jika faktor Lingkup Penugasan meningkat sebesar 1 satuan *score* dari kondisi sebelumnya maka Efektivitas Pengendalian Internal Prosedur Kredit pada Perusahaan Pembiayaan Kendaraan Bermotor di kota Manado akan meningkat sebesar 0,265 satuan *score* dari kondisi sebelumnya dengan asumsi *ceteris paribus*. Koefisien regresi X3 sebesar 0,435 mengartikan bahwa jika faktor Perencanaan Penugasan meningkat sebesar 1 satuan *score* dari kondisi sebelumnya maka Efektivitas Pengendalian Internal Prosedur Kredit pada Perusahaan Pembiayaan Kendaraan Bermotor di kota Manado akan meningkat sebesar 0,435 satuan *score* dari kondisi sebelumnya dengan asumsi *ceteris paribus*. Koefisien regresi X4 sebesar 0,444 mengartikan bahwa jika faktor Pelaksanaan Penugasan meningkat sebesar 1 satuan *score* dari kondisi sebelumnya maka Efektivitas Pengendalian Internal Prosedur Kredit pada Perusahaan Pembiayaan Kendaraan Bermotor di kota Manado akan meningkat sebesar 0,444 satuan *score* dari kondisi sebelumnya dengan asumsi *ceteris paribus*. Koefisien regresi X5 sebesar 0,168 mengartikan bahwa jika faktor Komunikasi Hasil Penugasan meningkat sebesar 1 satuan *score* dari kondisi sebelumnya maka Efektivitas Pengendalian Internal

Prosedur Kredit pada Perusahaan Pembiayaan Kendaraan Bermotor di kota Manado akan meningkat sebesar 0,168 satuan *score* dari kondisi sebelumnya dengan asumsi *ceteris paribus*. Koefisien regresi X6 sebesar -0,039 mengartikan bahwa jika faktor Pemantauan Tindak Lanjut meningkat sebesar 1 satuan *score* dari kondisi sebelumnya maka Efektivitas Pengendalian Internal Prosedur Kredit pada Perusahaan Pembiayaan Kendaraan Bermotor di kota Manado akan berkurang sebesar 0,039 satuan *score* dari kondisi sebelumnya dengan asumsi *ceteris paribus*. Koefisien regresi X7 sebesar 0,366 mengartikan bahwa jika faktor Resolusi Penerimaan Resiko oleh Manajemen meningkat sebesar 1 satuan *score* dari kondisi sebelumnya maka Efektivitas Pengendalian Internal Prosedur Kredit pada Perusahaan Pembiayaan Kendaraan Bermotor di kota Manado akan meningkat sebesar 0,366 satuan *score* dari kondisi sebelumnya dengan asumsi *ceteris paribus*.

5.6. Pengujian Hipotesis (Uji F)

Tabel 5.6 Analysis Of Variance

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	219.213	7	31.316	12.806	.000 ^a
	Residual	124.719	51	2.445		
	Total	343.932	58			

(Sumber : Data Hasil Olahan SPSS)

Dari tabel 5.6 diketahui nilai $F_{hitung} = 12,806$. Angka ini lebih besar dari $F_{tabel} = 2,20$ pada tingkat $\alpha = 0,05$. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini berarti, Pengelolaan Fungsi Audit Internal (X_1), Lingkup penugasan (X_2), Perencanaan Penugasan (X_3), Pelaksanaan Penugasan (X_4), Komunikasi Hasil Penugasan (X_5), Pemantauan Tindak Lanjut (X_6) dan Resolusi Penerimaan Resiko oleh Manajemen (X_7) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas Pengendalian Internal Prosedur Kredit (Y).

5.7. Pengujian Hipotesis (Uji t)

Tabel 5.7 Uji t

Model	Standardized Coefficients		t	Sig.
	Beta			
1	(Constant)		-3.323	.002
	Pengelolaan Fungsi Audit Internal	.105	1.190	.239
	Lingkup Penugasan	.197	2.127	.038
	Perencanaan Penugasan	.415	4.750	.000
	Pelaksanaan Penugasan	.445	5.132	.000
	Komunikasi Hasil Penugasan	.146	1.424	.160
	Pemantauan Tindak Lanjut	-.035	-.355	.724

Resolusi Penerimaan Resiko oleh Manajemen	.370	4.226	.000
---	------	-------	------

(Sumber : Data Hasil Olahan SPSS)

Pada tabel 5.7 dengan tingkat kepercayaan 5 % pada derajat kebebasan $(N-2) = 59 - 2 = 57$, dapat diketahui nilai t_{tabel} sebesar 2,000. Hasil uji t untuk variabel Pengelolaan Fungsi Audit Internal (X_1). Nilai t_{hitung} variabel X_1 adalah 1,190. Dengan nilai signifikan $0,239 > 0,05$, Hal ini berarti variabel Pengelolaan Fungsi Audit Internal (X_1) tidak berpengaruh signifikan dan searah/positif terhadap Efektivitas Pengendalian Internal Prosedur Kredit pada Perusahaan Pembiayaan Kendaraan Bermotor di Kota Manado. Untuk variabel Lingkup Penugasan (X_2). Nilai t_{hitung} variabel X_2 adalah 2,127. Dengan nilai signifikan $0,038 < 0,05$ Hal ini berarti variabel Lingkup Penugasan (X_2) berpengaruh signifikan dan searah/positif terhadap Efektivitas Pengendalian Internal Prosedur Kredit pada Perusahaan Pembiayaan Kendaraan Bermotor di Kota Manado. Untuk variabel Perencanaan Penugasan (X_3). Nilai t_{hitung} variabel X_3 adalah 4,750. Dengan nilai signifikan $0,000 < 0,05$ Hal ini berarti variabel Perencanaan Penugasan (X_3) berpengaruh signifikan dan searah/positif terhadap Efektivitas Pengendalian Internal Prosedur Kredit pada Perusahaan Pembiayaan Kendaraan Bermotor di Kota Manado. Untuk variabel Pelaksanaan Penugasan (X_4). Nilai t_{hitung} variabel X_4 adalah 5,132. Dengan nilai signifikan $0,000 < 0,05$ Hal ini berarti variabel Pelaksanaan Penugasan (X_4) berpengaruh signifikan dan searah/positif terhadap Efektivitas Pengendalian Internal Prosedur Kredit pada Perusahaan Pembiayaan Kendaraan Bermotor di Kota Manado. Untuk variabel Komunikasi Hasil Penugasan (X_5). Nilai t_{hitung} variabel X_5 adalah 1,424. Dengan nilai signifikan $0,160 > 0,05$ Hal ini berarti variabel Komunikasi Hasil Penugasan (X_5) tidak berpengaruh signifikan dan searah/positif terhadap Efektivitas Pengendalian Internal Prosedur Kredit pada Perusahaan Pembiayaan Kendaraan Bermotor di Kota Manado. Untuk variabel Pemantauan Tindak Lanjut (X_6). Nilai t_{hitung} variabel X_6 adalah -0,355. Dengan nilai signifikan $0,724 > 0,05$ Hal ini berarti variabel Pemantauan Tindak Lanjut (X_6) tidak berpengaruh signifikan dan tidak searah/negaitf terhadap Efektivitas Pengendalian Internal Prosedur Kredit pada Perusahaan Pembiayaan Kendaraan Bermotor di Kota Manado. Untuk variabel Resolusi Penerimaan Resiko oleh Manajemen (X_7). Nilai t_{hitung} variabel X_7 adalah 4,226. Dengan nilai signifikan $0,000 < 0,05$ Hal ini berarti variabel Resolusi Penerimaan Resiko oleh Manajemen (X_7) berpengaruh signifikan dan searah/positif terhadap Efektivitas Pengendalian Internal Prosedur Kredit pada Perusahaan Pembiayaan Kendaraan Bermotor di Kota Manado.

5.8. Pembahasan

1. Pengelolaan Fungsi Audit Internal Tidak Berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas Pengendalian Internal Prosedur Kredit Kendaraan Bermotor pada Perusahaan Pembiayaan di Kota Manado.

Pada penelitian ini khususnya pada objek perusahaan pembiayaan kendaraan bermotor di Kota Manado, pengelolaan fungsi audit internal pengaruhnya tidak signifikan terasa terhadap efektivitas pengendalian internal. Pengaruhnya kurang terasa karena pengelolaan fungsi audit internal akan lebih besar pengaruhnya jika mengadakan supervisi yang lebih sering atas kegiatan audit yang akan dilakukan. Koordinasi juga harus dilakukan oleh penanggungjawab kegiatan untuk memastikan lingkup penugasan telah memadai.

2. Lingkup Penugasan Berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas Pengendalian Internal Prosedur Kredit Kendaraan Bermotor pada Perusahaan Pembiayaan di Kota Manado.

Agar sasaran penugasan tercapai maka fungsi audit internal harus mempunyai ruang lingkup penugasan yang memadai. Oleh karena itu, dalam penelitian ini Lingkup penugasan berpengaruh secara signifikan terhadap efektivitas pengendalian internal prosedur kredit.

3. Perencanaan Penugasan Berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas Pengendalian Internal Prosedur Kredit Kendaraan Bermotor pada Perusahaan Pembiayaan di Kota Manado.

Dengan adanya perencanaan penugasan yang terstruktur dan lengkap maka jalannya pemeriksaan akan lancar dan tujuan yang ditargetkan akan tepat pada sasaran dan meminimalkan segala resiko. Oleh karena itu pada penelitian ini dengan objek perusahaan pembiayaan kendaraan bermotor, dapat disimpulkan bahwa perencanaan penugasan berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengendalian internal prosedur kredit.

4. Pelaksanaan Penugasan Berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas Pengendalian Internal Prosedur Kredit Kendaraan Bermotor pada Perusahaan Pembiayaan di Kota Manado.

Pelaksanaan penugasan yang dilaksanakan secara benar akan menghasilkan hasil yang berkualitas guna memberikan informasi yang dibutuhkan manajemen. Oleh karena itu efektivitas pengendalian prosedur kredit dipengaruhi secara signifikan oleh pelaksanaan penugasan.

5. Komunikasi Hasil Penugasan Tidak Berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas Pengendalian Internal Prosedur Kredit Kendaraan Bermotor pada Perusahaan Pembiayaan di Kota Manado.

Komunikasi hasil penugasan dalam penelitian ini berpengaruh tetapi tidak signifikan teras terhadap efektivitas pengendalian prosedur kredit pada perusahaan pembiayaan kendaraan bermotor di Kota Manado. Pengaruhnya akan bertambah jika komunikasi mencakup sasaran dan lingkup penugasan, simpulan, rekomendasi dan rencana tindakannya, bila memungkinkan memuat opini keseluruhan dan simpulan auditor internal. Auditor internal dianjurkan memberi apresiasi dalam komunikasi hasil penugasan, terhadap kinerja yang memuaskan dari kegiatan yang direview.

6. Pemantauan Tindak Lanjut Tidak Berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas Pengendalian Internal Prosedur Kredit Kendaraan Bermotor pada Perusahaan Pembiayaan di Kota Manado.

Pemantauan tindak lanjut pada perusahaan pembiayaan tidak sepenuhnya dapat mengakomodir perubahan dalam sistem kerja cabang apabila tidak dilakukan perubahan dalam kebijakan dan prosedur secepatnya. Pemantauan tindak lanjut juga tidak berpengaruh signifikan pada perusahaan pembiayaan apabila hanya bersifat formalitas dan administrasi belaka. Pengaruhnya juga dapat berpengaruh negatif apabila tidak direncanakan secara sistematis sehingga mengganggu kerja *auditee*.

7. Resolusi Penerimaan Resiko oleh Manajemen Berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas Pengendalian Internal Prosedur Kredit Kendaraan Bermotor pada Perusahaan Pembiayaan di Kota Manado.

Standar kinerja memberikan praktik-praktik terbaik pelaksanaan audit mulai dari perencanaan sampai dengan pemantauan tindak lanjut ditambah dengan resolusi penerimaan resiko oleh manajemen. Dengan demikian kinerja auditor internal mempengaruhi keefektifan pengendalian internal prosedur kredit secara signifikan.

8. Kinerja Auditor Internal Berpengaruh signifikan Terhadap Efektivitas Pengendalian Internal Prosedur Kredit Kendaraan Bermotor Pada Perusahaan Pembiayaan Di Kota Manado.

Kinerja seorang auditor internal dapat mempengaruhi dan memperbaiki suatu sistem pengendalian internal yang ada, sepanjang auditor internal tidak terlibat langsung dalam aktivitas yang diperiksanya. Kinerja atau hasil kerja auditor internal adalah laporan hasil audit berupa rekomendasi, analisis, penilaian, petunjuk dan informasi sehubungan dengan kegiatan-kegiatan yang diperiksa. Hasil kerja dari auditor internal inilah yang akan digunakan oleh manajemen untuk menilai dan memperbaiki kinerja bagian yang melaksanakan kegiatan tersebut.

6. PENUTUP

6.1. Simpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Secara parsial Pengelolaan Fungsi Audit Internal dan Komunikasi Hasil Penugasan, tidak berpengaruh signifikan dan searah/positif terhadap Efektivitas Pengendalian Internal Prosedur Kredit, sedangkan Lingkup penugasan, Perencanaan Penugasan, Pelaksanaan Penugasan, Resolusi Penerimaan Resiko oleh Manajemen berpengaruh signifikan dan searah/positif terhadap Efektivitas Pengendalian Internal Prosedur Kredit. Adapun variabel Pemantauan tindak lanjut tidak berpengaruh signifikan dan tidak searah/negatif terhadap Efektivitas Pengendalian Internal Prosedur Kredit.
2. Secara bersama-sama Pengelolaan Fungsi Audit Internal, Lingkup penugasan, Perencanaan Penugasan, Pelaksanaan Penugasan, Komunikasi Hasil Penugasan, Pemantauan Tindak Lanjut dan Resolusi Penerimaan Resiko oleh Manajemen berpengaruh signifikan dan searah/positif terhadap Efektivitas Pengendalian Internal Prosedur Kredit dengan kontribusi sebesar 58,8%. Sedangkan sisanya sebesar 41,2% dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar penelitian ini seperti aktivitas dewan komisaris, manajemen atau pegawai lainnya selain bagian audit internal.

6.2. Saran

Dari hasil penelitian ini penulis menyarankan agar supaya sebagai berikut.

1. Peneliti menyarankan agar supaya kegiatan supervisi lebih sering dilakukan saat auditor internal sedang menjalankan tugasnya di lapangan, agar supaya tercipta koordinasi yang baik dan adanya masukan yang bisa membantu kerja auditor internal di lapangan. Disarankan juga agar saat pemberitahuan hasil penugasan yang didapat dilapangan sudah disertai dengan rekomendasi yang berkualitas untuk *auditee*. Selain itu auditor internal dianjurkan memberikan apresiasi atas kinerja baik yang ditunjukkan *auditee*, juga ada penyusunan prosedur dan jadwal pemantauan yang sistematis, sehingga tidak mengganggu kerja *auditee*. Selain itu pemantauan tindak lanjut jangan hanya sekedar formalitas dan administrasi belaka.
2. Hasil dari penelitian ini dan sebelumnya sebaiknya segera dikomunikasikan bagi perusahaan-perusahaan tersebut guna perbaikan dan kemajuan perusahaan di era persaingan saat ini, dan divisi audit internal pada perusahaan-perusahaan tersebut selalu memperhatikan standar audit yang telah dirumuskan oleh konsorsium organisasi profesi audit internal dalam menjalankan tugasnya.
3. Untuk peneliti selanjutnya, sebaiknya melakukan penelitian yang lebih spesifik dengan memperhatikan *audit charter* yang ada pada organisasi yang menjadi objek penelitiannya.
4. Untuk semua perusahaan, peneliti menyarankan agar supaya melakukan rekrutmen auditor internal yang berkualitas. Mengingat kinerja auditor internal berperan dalam menunjang kinerja perusahaan. Peneliti menyarankan agar supaya merekrut auditor internal yang memang

memiliki dasar pendidikan akuntansi dan lebih baik lagi yang sudah mendapatkan serangkaian pelatihan/atau ujian sertifikasi dari yayasan pendidikan internal audit (YPIA).

DAFTAR PUSTAKA

- Afrianiswara, Elok Izza. 2010. *Peranan Audit Internal dalam Menunjang Efektivitas Pengendalian Internal Kredit Investasi pada PT. Bank X*. Surabaya : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas.
- Andayani, Wuryan. 2008. *Audit Internal*. Edisi 1. Yogyakarta : BPFE.
- Auryna, Olla. 2009. *Peranan pengendalian intern piutang dalam meminimalkan kerugian pada PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Medan*. Medan : Universitas Sumatera Utara.
- Desyanti, Ni Putu Eka, Ni Made Dwi Ratnadi. 2008. *Pengaruh independensi, keahlian profesional, dan Pengalaman kerja pengawas intern terhadap efektivitas Penerapan struktur pengendalian intern pada bank Perkreditan rakyat di kabupaten badung*. Denpasar : Universitas Udayana.
- Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal. 2004. *Standar Profesi Audit Internal*. Jakarta.
- Mustika, Febrina. 2012. *Peranan audit internal dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan melalui pelaksanaan sistem pengendalian internal sebagai variabel intervening*. Bandung : Universitas Pendidikan Indonesia.
- Pasi, M. 2010. *Analisis dan Evaluasi Keefektifan Pengendalian Intern pada PT. Bank Tabungan Negara, Tbk. (Persero) Cabang Medan*. Medan : Universitas Sumatera Utara.
- SK. Menkeu RI No.1251/KMK.013/1988 & SK. Menkeu RI No. 1169/KMK.01/1991
- Yadnyana, I Ketut. 2010. *Pengaruh kualitas jasa auditor internal terhadap Efektivitas pengendalian intern pada hotel berbintang Empat dan lima di bali*. Denpasar : Universitas Udayana.
- Yunior, Khomeiny. 2006. *Pengaruh pemeriksaan interen terhadap efektivitas pengendalian pemberian kredit pada PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk. Kantor Wilayah I Medan*. Medan : Universitas Sumatera Utara.

ANALISA KONTRIBUSI PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA ALOKASI KHUSUS ATAS BELANJA MODAL PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TOLITOLI PROVINSI SULAWESI TENGAH

**Fahri Eka Oktora
Jenny Morasa
Sifrid S. Pangemanan**

ABSTRAK

Berbagai fenomena yang terjadi seputar tarik-menarik aset antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat memotivasi penulis untuk meneliti bagaimana kontribusi Pendapatan Asli Daerah maupun Dana Perimbangan (Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus) dalam membiayai belanja modal pemerintah daerah. Penelitian ini dilakukan untuk mengungkap kontribusi Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus atas Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah. Rancangan penelitian menggunakan pendekatan metode kualitatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa: (1) Pendapatan Asli Daerah tidak berkontribusi atas Belanja Modal karena rendahnya proporsi anggaran dan realisasi PAD dibandingkan sumber dana lainnya; (2) Dana Alokasi Umum berkontribusi secara signifikan atas Belanja Modal karena besarnya kucuran dana transfer dari Pemerintah Pusat; (3) Dana Alokasi Khusus memiliki hubungan yang erat dengan Belanja Modal akibat tingginya ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap dana transfer dari Pemerintah Pusat. Temuan penelitian berimplikasi teoritis pada bidang kajian akuntansi sektor publik, sebagaimana teori yang dikemukakan oleh Abdullah dan Halim (2006) bahwa pembuatan kebijakan pengalokasian anggaran belanja modal terkait dengan sumber pendapatan atau pendanaan yang tersedia. Disarankan bahwa sebaiknya penelitian selanjutnya menggunakan data yang lebih lengkap dengan rentang periode waktu penelitian yang lebih panjang serta variabel yang lebih lengkap dan bervariasi sehingga lebih mampu dilakukan generalisasi atas hasil penelitian tersebut.

Kata kunci: Pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, belanja modal

ABSTRACT

A variety of phenomena around the assets attraction between local government with the central government motivated the authors to analyze how the contribution of local own revenue or transfer fund (general allocation fund and the special allocation fund) in funding the capital expenditure. This study was aimed at analyzing the contributions of local own revenue, general allocation fund, and specific allocation fund to capital expenditure at Tolitoli Regency, Central Sulawesi Province. Research design methods is the qualitative methods. Research findings revealed that (1) local own revenue did not contributed to the capital expenditure because of low proportion of budget and realization of local revenue than other funding sources; (2) general allocation fund contributed significantly on capital expenditure because of large transfer from central government; (3) special allocation fund has a close relationship with the capital expenditure due to the high dependence of local governments on the transfer from the central government. The research findings implicate in public sector accounting theory. Based on findings, it is recommended that further research use more complete data with a range period of time and a more comprehensive variable to varying generalization of the results.

Keywords: local own revenue, general allocation fund, spesific allocation fund, capital expenditure.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintahan daerah di Indonesia memasuki era baru ketika sistem sentralistis yang selama ini dianut Presiden Soeharto dianggap tidak mampu membawa kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat. Fakta ini menyebabkan tuntutan kewenangan yang lebih besar dari Daerah untuk melaksanakan pembangunan. Jika kita menelusuri sejarah, Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal sebenarnya bukan merupakan konsep baru karena telah diatur sejak tahun 1903 dimana pemerintah kolonial mengeluarkan Staatsblad Nomor 329 yang memberi peluang dibentuknya satuan pemerintahan dengan pengelolaan keuangan yang berdiri sendiri. Akan tetapi, desentralisasinya masih bersifat terbatas sehingga belum mampu mengurangi ketimpangan antar daerah (Zulyanto, 2010). Pada masa orde baru, pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah dilakukan pemerintah bersamaan dengan kontrol yang ketat terhadap militer dan birokrasi, sehingga pada akhirnya relasi pusat-daerah periode orde baru lebih cenderung bergerak ke arah kutub sentralisasi daripada desentralisasi. Kebalikannya, otonomi daerah yang dilahirkan orde reformasi terlibat lebih nyata namun cenderung membawa dampak negatif dibandingkan orde baru. Otonomi daerah ala orde baru tidak memberikan kewenangan yang luas bagi pemerintah daerah, sehingga tidak pernah terjadi sengketa antara pemerintah pusat dengan daerah.

Saat ini, otonomi daerah memberikan kekuasaan yang sangat luas kepada daerah otonom, yang ditekankan pada kabupaten dan kota. Dampaknya, apabila merasa diambil haknya pemerintah daerah berani 'memberontak' kepada pemerintah pusat lewat pengadilan. Pada tahun 2003, Gelora Bung Karno (GBK), yang terletak di kawasan Senayan, disengketakan hak pengelolanya oleh Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan pemerintah pusat. Sutiyoso, selaku Gubernur DKI Jakarta menganggap bahwa GBK harus dikelola oleh Pemda DKI Jakarta. Sementara Hari Sabarno, Menteri Dalam Negeri selaku Pemerintah, tidaklah demikian menafsirkannya. Dengan mengelola GBK, Sutiyoso menganggap bahwa Pemda DKI akan mendapatkan keuntungan ekonomis. Pernyataan Sutiyoso ini menanggapi pernyataan Mendagri Hari Sabarno, yang menyebutkan bahwa aset Pemerintah tidak dapat dimiliki oleh pemerintah daerah karena merupakan sumber pendapatan untuk pemerintah.

Implementasi otonomi daerah di Indonesia ditandai dengan desentralisasi fiskal, yaitu pelimpahan kewenangan di bidang keuangan dengan proses pengalihan sumber keuangan bagi daerah dalam jumlah yang sangat signifikan. Pembentukan daerah baru atau pemekaran wilayah terjadi secara luas, tidak hanya terjadi pada daerah yang secara geografis kaya akan sumber daya alam ataupun memiliki potensi industri dan perdagangan yang dapat diandalkan sebagai sumber penerimaan daerah, tetapi juga terjadi pada daerah yang miskin sumber daya alam dan terbelakang secara ekonomi, sehingga pada akhirnya pemekaran tersebut menjadi beban fiskal bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Untuk mengatasi persoalan ketimpangan fiskal dan adanya kebutuhan pendanaan daerah yang cukup besar, maka Pemerintah memberikan Dana Perimbangan. Transfer merupakan konsekuensi dari tidak meratanya kemampuan keuangan dan ekonomi daerah dan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan keuangan horisontal antar daerah, mengurangi kesenjangan vertikal Pusat-Daerah, mengatasi persoalan efek pelayanan publik antar daerah, dan untuk menciptakan stabilisasi aktifitas

perekonomian di daerah. Hasil riset yang dilakukan oleh Adi (2006) mengindikasikan bahwa proporsi Dana Perimbangan, khususnya Dana Alokasi Umum (DAU), terhadap penerimaan daerah masih yang tertinggi dibanding dengan penerimaan daerah yang lain, termasuk Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tingginya proporsi Dana Perimbangan dibandingkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menggambarkan bahwa penerimaan daerah sangat bergantung pada bantuan keuangan (transfer) pemerintah pusat. Fakta ini tidak mencerminkan timbulnya kemandirian sebagaimana tujuan dilaksanakannya otonomi daerah. Namun demikian, dalam jangka panjang, ketergantungan semacam ini harus semakin kecil (Harianto dan Priyo, 2010).

Pada sisi lain, pemerintah daerah berkewajiban meningkatkan alokasi belanja modal yang didasarkan pada kebutuhan sarana dan prasarana daerah. Semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik, karena aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya belanja modal merupakan prasyarat utama bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli sebagai salah satu daerah otonom di Provinsi Sulawesi Tengah berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan vital masyarakat melalui pembangunan berbagai sarana dan prasarana publik. Dalam kajian ilmu akuntansi sektor publik, kegiatan pembangunan infrastruktur daerah tersebut dikenal dengan istilah belanja modal (Permendagri No. 13 Tahun 2006 *juncto* Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah).

Berdasarkan konsep *money follow function*, maka pembangunan infrastuktur tersebut harus didanai oleh berbagai sumber pendapatan daerah yang terbagi atas dua jenis, yaitu: Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan.

Berbagai fenomena yang terjadi seputar tarik-menarik aset antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat memotivasi untuk dilakukannya suatu riset dalam rangka mencari tahu apakah aset tetap pemerintah daerah selama ini telah dibelanjakan dengan ‘uang sendiri’ ataukah didanai oleh bantuan dari pemerintah pusat? Oleh karena itu, judul yang diangkat pada tesis ini adalah: “Analisa Kontribusi Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus atas Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan dalam bentuk berikut ini.

1. Bagaimana kontribusi Pendapatan Asli Daerah atas belanja modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah?
2. Bagaimana kontribusi Dana Alokasi Umum atas belanja modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah?
3. Bagaimana kontribusi Dana Alokasi Khusus atas belanja modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. untuk mengetahui dan menganalisis kontribusi pendapatan asli daerah atas belanja modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah.
2. untuk mengetahui dan menganalisis kontribusi dana alokasi umum atas belanja modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah.
3. untuk mengetahui dan menganalisis kontribusi dana alokasi khusus atas belanja modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berikut ini.

1. Secara teoritis memberikan kontribusi positif dalam pengembangan khasanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen sektor publik.
2. Secara praktis, memberi masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah dalam mengelola arus kas masuk dan arus kas keluar, terutama yang terkait dengan sumber pendanaan belanja modal (pengadaan aset tetap).

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik didefinisikan sebagai akuntansi dana masyarakat, yang berarti mekanisme teknik analisis dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen dibawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerja sama sektor publik dan swasta (Bastian, 2002).

2.1.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada hakekatnya merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. APBD adalah suatu anggaran daerah, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut: rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara rinci; adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya-biaya sehubungan dengan aktivitas-aktivitas tersebut, dan adanya biaya-biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran-pengeluaran yang akan dilaksanakan; jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka; periode anggaran, yaitu biasanya 1 (satu) tahun (Halim, 2004).

2.1.3 Pendapatan Asli Daerah

Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 adalah sumber penerimaan daerah asli yang digali di daerah tersebut untuk digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat.

2.1.4 Dana Alokasi Umum

DAU merupakan transfer yang bersifat umum (*block grant*) yang diberikan kepada semua kabupaten dan kota untuk mengisi kesenjangan antara kapasitas dan kebutuhan fiskalnya dan didistribusikan dengan formula berdasarkan prinsip-prinsip tertentu yang secara umum mengindikasikan bahwa daerah miskin dan terbelakang harus menerima lebih banyak dari pada daerah kaya.

2.1.5 Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (Undang-undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan).

2.1.6 Belanja Modal

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan, belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud (Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2005).

2.2 Penelitian Terdahulu

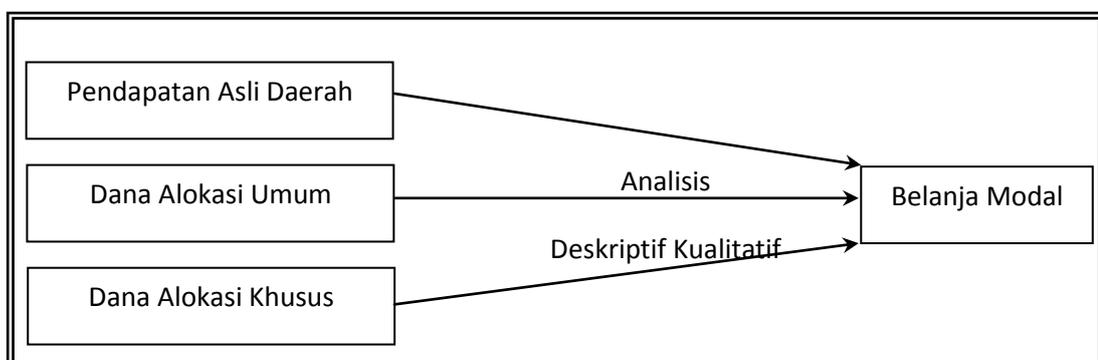
Penelitian ini terinspirasi dari hasil riset Abdullah dan Halim (2006) berjudul “Studi atas Belanja Modal pada Anggaran Pemerintah Daerah dalam Hubungannya dengan Belanja Pemeliharaan dan Sumber Pendapatan” yang dipublikasikan dalam halaman 17 sampai dengan 32 pada Jurnal Akuntansi Pemerintah Volume 2 Nomor 2 yang terbit bulan November 2006. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuatan kebijakan pengalokasian anggaran belanja modal terkait dengan sumber pendapatan atau pendanaan yang tersedia. Pengolahan data yang dilakukan dengan model yang sederhana menunjukkan bahwa besaran belanja modal berasosiasi dengan pendapatan daerah yang bersumber dari pemerintah pusat, tapi tidak dengan pendapatan sendiri (PAD).

Penelitian yang dilakukan Abdullah dan Halim ini masih sangat sederhana dengan segala keterbatasannya termasuk model dan data yang digunakan mengingat masih langkanya penelitian-penelitian topik di bidang yang dibahas. Oleh karena itu, peneliti termotivasi untuk melakukan kajian atas asosiasi antara realisasi belanja modal dengan sumber pendapatan sebagai salah satu bentuk implementasi prinsip disiplin anggaran dalam proses penganggaran dan penatausahaan keuangan daerah.

3. KERANGKA KONSEPTUAL

3.1 Kerangka Konseptual Penelitian

Gambar 3.1. Kerangka Konseptual Penelitian



Sumber: Data sekunder telah diolah (2012)

3.2 Proposisi

Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan sumber utama pendanaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ketiga hal tersebut akan digunakan membiayai pengeluaran pemerintah dalam melaksanakan tiga tugas pokoknya, yaitu: pelaksanaan pembangunan, pemerintahan, dan pembinaan kemasyarakatan. Belanja tersebut pada dasarnya terbagi menjadi tiga, yaitu: (1) belanja pegawai; (2) belanja barang dan jasa; serta (3) belanja modal. Dilihat dari penggunaannya, belanja pegawai dan belanja barang dan jasa merupakan belanja yang digunakan kurang dari satu periode atau bersifat sekali pakai. Sedangkan belanja modal merupakan belanja yang digunakan selama lebih dari satu periode atau dipakai berulang kali. Oleh karena itu, belanja modal merupakan aset yang sangat penting dalam menunjang operasional pemerintah.

Berkaitan dengan sumber pendanaan, belanja modal dibiayai dari tiga sumber pendapatan, yaitu: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Adapun sumber pendanaan di luar itu, yaitu Dana Bagi Hasil (*sharing revenue*) hanya digunakan untuk membiayai belanja pegawai serta belanja barang dan jasa yang sifatnya pakai habis dimana kedua jenis belanja terkait dengan kegiatan pemungutan dana bagi hasil.

Idealnya, aset tetap yang berasal dari belanja modal bersumber dari Pendapatan Asli Daerah sebagai ‘uang milik sendiri’ Pemerintah Daerah. Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus merupakan dana transfer dari Pemerintah Pusat sehingga layak diasumsikan sebagai ‘uang milik Pemerintah Pusat’. Oleh karena itu, semakin banyak belanja modal yang dibiayai oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka dapat dikatakan bahwa tingkat kemandirian daerah tersebut semakin tinggi. Hal ini dilandasi oleh filosofi otonomi daerah adalah mewujudkan kemandirian daerah di segala segi kehidupan, yang secara teoritis diukur melalui elemen Pendapatan Asli Daerah (PAD). Diharapkan dengan otonomi, semua daerah di Indonesia mampu melaksanakan semua urusan pemerintahan dan pembangunan dengan bertumpu pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimilikinya.

4. METODE PENELITIAN

4.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini berbentuk studi kasus (*case study*) secara intensif, terinci dan mendalam sebagai upaya memahami situasi tertentu yang terjadi pada suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu (Arikunto, 2006). Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*) yang mengkaji tentang seberapa jauh kontribusi Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus atas Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah.

4.2. Obyek dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memiliki alokasi belanja modal selama tahun anggaran 2009 sampai dengan tahun anggaran 2011. Data penelitian bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) selama tiga periode, yaitu Tahun Anggaran 2009, 2010, dan 2011. Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan September sampai dengan November 2012.

4.3. Metode Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu:

- (1) Data Primer, berupa prosedur dalam proses penatausahaan dan akuntansi keuangan daerah.
- (2) Data Sekunder, seperti: Peraturan Daerah (Perda) tentang Pertanggungjawaban APBD, Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBD, serta Laporan Keuangan Pemda dan Laporan Keuangan SKPD yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan Keuangan yang digunakan adalah laporan yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Sulawesi Tengah dengan maksud laporan tersebut dapat lebih diandalkan. Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan metode dokumentasi, yaitu mengumpulkan data variabel terkait dari Laporan Keuangan SKPD, kemudian mencatat, menghitung, dan membandingkan data *time series* yang berhubungan dengan penelitian.

4.4. Teknik Analisis Data

Dalam rangka menjawab permasalahan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik deskriptif melalui metode kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan mengungkapkan suatu masalah, keadaan, peristiwa sebagaimana adanya atau mengungkap fakta secara lebih mendalam mengenai kontribusi Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus atas Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah. Ditinjau dari segi waktu, penelitian ini termasuk jenis penelitian *time series*. Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pada kontribusi realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) atas realisasi Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah.

5. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Hasil Penelitian

5.1.1 Gambaran Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) atas Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2009

Berdasarkan tampilan dalam tabel 5.2 dan tabel 5.6, pada Tahun Anggaran 2009 bagian Pendapatan Asli Daerah (PAD) sejumlah Rp1.967.6781.670,96 yang dialokasikan untuk belanja modal adalah sebesar 0,22% atau Rp43.274.650,00. Hal ini disebabkan oleh rendahnya proporsi PAD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2009. PAD digunakan untuk membiayai belanja modal pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sejumlah Rp4.063.925,00 dan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) senilai Rp39.210.725,00.

Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) pada Tahun Anggaran 2009 sebagaimana tercantum dalam tabel 5.3 adalah Rp307.431.914.000,00 dimana jumlah yang dialokasikan untuk belanja modal senilai Rp 68.276.053.584,00 atau 22,21%. DAU merupakan primadona pada Tahun Anggaran 2009 karena digunakan untuk membiayai belanja modal pada 51 SKPD.

Bidang kesehatan menjadi salah satu prioritas APBD Kabupaten Tolitoli pada Tahun Anggaran 2009. Hal ini dibuktikan oleh kontribusi DAU sebesar 14,72% dari jumlah belanja modal pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tolitoli. Pada sisi lain, terdapat kucuran DAU pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) "Mokopido" Tolitoli sebesar Rp1.190.847.502,00 untuk membiayai pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor, alat-alat bengkel peralatan rumah sakit, peralatan kantor, mebeulair, alat

instalasi dapur rumah sakit, penghias ruangan rawat inap, serta dana pendamping Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Pemerintah Pusat. Kementerian Kesehatan pada tahun anggaran 2009 mengalokasikan DAK sebesar Rp7.620.249.100,00 untuk membeli alat-alat kedokteran dan rehabilitasi konstruksi bangunan rumah sakit yang telah rusak.

Berdasarkan tabel 5.6, Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Tolitoli memperoleh alokasi belanja modal tahun anggaran 2009 dalam bentuk perbaikan konstruksi jaringan air berupa: penanggulangan abrasi pantai; pelurusan, penguatan, dan pembuatan bronjong tebing sungai; serta perbaikan tanggul sungai senilai Rp6.533.744.000,00 yang dibiayai oleh Dana Alokasi Umum (DAU).

Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) sejumlah Rp 47.440.000.000,00 digunakan untuk membiayai belanja modal selama tahun anggaran 2009 (lihat tabel 5. 4). Jika kita menilik pada tabel 5.6 sebanyak 62,82% belanja konstruksi bangunan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga pada tahun anggaran 2009 dibiayai oleh DAK Bidang Pendidikan, dan sisanya merupakan dana pendampingan dari DAU. Hal serupa juga terjadi pada Dinas Kesehatan dimana DAK memiliki kontribusi sebesar 85,28% dalam membiayai belanja modal Tahun Anggaran 2009.

5.1.2 Gambaran Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) atas Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2010

Belanja modal pada tahun anggaran 2010 berkurang sebesar 50,99% dibandingkan tahun sebelumnya. Di sisi lain, sumber pendapatan berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) juga mengalami penurunan namun tidak sedrastis belanja modal yaitu 16,85%. Dengan demikian, DAK mendominasi sumber pembiayaan belanja modal pada tahun anggaran 2010. Pada tabel 5.7, belanja modal Dinas Kesehatan yang telah dialokasikan dalam APBD bersumber dari DAK sebesar 96,87% disertai dengan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 3,13%. Pemerintah Pusat mengucurkan DAK dalam bentuk pembelian kendaraan bermotor operasional bagi petugas kesehatan serta mendanai pembangunan dan/atau rehabilitasi sarana kesehatan melalui DAK Bidang Kesehatan.

DAU bertambah sebesar 3,81% dari tahun anggaran 2009. Belanja modal dari semua SKPD menggunakan sumber pendapatan ini dengan persentase yang berbeda-beda. Misalnya, Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga melakukan transaksi penimbunan tanah pada halaman sekolah yang baru dibangun sejumlah Rp.607.830.000,00 yang berasal dari DAU. DAU juga digunakan untuk membeli aset tetap lainnya berupa buku perpustakaan sekolah serta mendanai 55% belanja peralatan dan mesin pada tahun yang bersangkutan.

Pada bidang kesehatan, DAU digunakan untuk mendanai pengadaan pelampung dan rakit darurat guna memberikan bantuan medis serta mendistribusikan obat-obatan kepada para korban bencana banjir. Di samping itu, belanja modal pengadaan alat-alat komputer bagi Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) se-Kabupaten Tolitoli juga berasal dari DAU.

Rumah Sakit Umum Daerah Mokopido Tolitoli melakukan proyek rehabilitasi ringan gedung kantor, instalasi rawat jalan dan instalasi rawat inap dengan sumber dana yang berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU). Akan tetapi, pada tahun anggaran 2010 tidak terdapat kucuran Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan dari Pemerintah Pusat sehingga belanja peralatan dan mesin RSUD "Mokopido" Tolitoli pada tahun yang bersangkutan didanai oleh DAU. Belanja modal tersebut berupa pengadaan kendaraan operasional roda dua, peralatan kantor, mebeulair instalasi rawat jalan dan rawat inap, serta pembelian alat-alat instalasi dapur rumah sakit.

Pada tahun anggaran 2010, Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Tolitoli masih mengandalkan DAU untuk membiayai pengadaan seluruh peralatan dan mesin, berupa: alat-alat bengkel dan peralatan kantor; 67% dari biaya pembangunan dan/atau rehabilitasi konstruksi bangunan; serta 76% dana pembangunan dan/atau rehabilitasi konstruksi jalan, jembatan, dan jaringan air.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berkurang senilai Rp6.544.797.358,65 atau 33,26% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini berdampak pula terhadap kemampuan PAD dalam membiayai belanja modal. Persentase belanja modal yang didanai oleh PAD hanya sebesar 0,02% dari total

belanja modal pada tahun anggaran 2010. Jumlah tersebut tersebar pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD): Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Rp667.800,00), Badan Penanaman Modal Daerah (Rp437.125,00), dan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Rp8.230.425,00).

5.1.3 Gambaran Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) atas Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2011

Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat sejumlah Rp3.523.726.287,54 atau 26,83% dibandingkan tahun sebelumnya (2010). Hal ini turut mendongkrak kontribusi PAD atas belanja modal. Jika pada tahun anggaran 2010 sebesar 0,02% dari total belanja modal, maka kontribusi PAD atas belanja modal pada tahun anggaran 2011 menjadi Rp21.551.000,00 atau 0,13%. Fakta ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli berupaya untuk meningkatkan kemandirian mereka dalam pembelian atau pengadaan aset tetap.

Kenaikan realisasi DAU pada tahun anggaran 2011 sebesar Rp32.605.319.810,00 atau 10,22% dari tahun sebelumnya turut meningkatkan kontribusi DAU atas belanja modal, yaitu 60% dari total belanja modal. DAU mendominasi pengadaan aset tetap berupa peralatan dan mesin yang digunakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga pada tahun anggaran 2011 sebesar 94,78%.

DAK mengalami kenaikan sebesar Rp8.052.100,00 atau meningkat 20,41% dari tahun anggaran 2010. Seluruh dana yang bersumber dari DAK digunakan untuk membiayai belanja modal pada 16 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan rencana pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, yaitu: Dinas Pendidikan, Pemuda & Olah Raga, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah Mokopido, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Tata Ruang & Perumahan, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Badan Lingkungan Hidup, Badan Koordinasi KB & Pemberdayaan Perempuan, Dinas Koperasi, UMKM & Perdagangan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Pelaksana Penyuluhan & Ketahanan Pangan, Dinas Tanaman Pangan & Hortikultura, Dinas Perkebunan, Dinas Peternakan, Dinas Kehutanan, Dinas Kelautan & Perikanan.

Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga menerima kucuran Dana Alokasi Khusus yang cukup besar pada tahun anggaran 2011 untuk membiayai pembangunan sekolah-sekolah (99%), membeli buku-buku perpustakaan (96%) serta belanja peralatan dan mesin (48%). Kegiatan pengadaan kendaraan bermotor bagi petugas medis di seluruh Puskesmas dilanjutkan pada tahun anggaran 2011 yang didanai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 29% dan sisanya (71%) bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU). Pemerintah Pusat juga membiayai seluruh pengadaan alat-alat kedokteran dan sebagian besar (79%) peralatan kantor pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tolitoli. Rehabilitasi bangunan sarana kesehatan, pengadaan alat-alat komputer dan mebeulair Dinas Kesehatan Kabupaten Tolitoli pada tahun 2011 seluruhnya bersumber dari DAU.

Pada tahun anggaran 2011, pengadaan kendaraan operasional bagi staf rumah sakit, peralatan kantor, mebeulair instalasi rawat jalan dan rawat inap, pembelian alat-alat dapur, dan perbaikan jaringan air bersih Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) "Mokopido" Tolitoli ditanggulangi oleh DAU. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) "Mokopido" Tolitoli kembali memperoleh bantuan dari Pemerintah Pusat berupa DAK pada tahun anggaran 2011 yang digunakan untuk membiayai pengadaan alat-alat kedokteran serta pembangunan gedung rumah sakit dalam skala besar. Dengan demikian, terdapat korelasi yang erat antara variabel Dana Alokasi Khusus dengan Belanja Modal. Fakta ini dilatarbelakangi oleh tingginya ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap dana transfer dari Pemerintah Pusat, khususnya pengadaan aset tetap pada bidang kesehatan yang urusannya diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah.

Berdasarkan tabel 5.8., Dana Alokasi Khusus (DAK) digunakan untuk membiayai belanja modal Dinas Pekerjaan Umum (PU) sebesar 23,06%. Dana Alokasi Umum (DAU) berkontribusi sebesar 76,94% atas belanja modal berupa pembangunan dan/atau rehabilitasi konstruksi bangunan dan belanja pembangunan dan/atau rehabilitasi konstruksi jalan, jembatan, dan jaringan air.

5.2 Pembahasan

5.2.1. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah atas Belanja Modal

Berdasarkan hasil riset yang telah diuraikan sebelumnya, maka peneliti menemukan bukti empiris bahwa terdapat korelasi yang tidak kuat antara variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan variabel Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli. Oleh karena itu, implikasi teoritis studi ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Prakosa (2004) serta Darwanto dan Yulia (2006) yang menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

Akan tetapi, penelitian ini sejalan dengan riset yang dilakukan oleh Hoover dan Sheffrin (1992) dalam Prakosa (2004) yang membuktikan secara empiris bahwa pengaruh pajak daerah (PAD) terhadap belanja berkurang sesudah tahun 1960-an. Faktor pendorong terjadinya anomali ini adalah rendahnya proporsi anggaran dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan sumber pendanaan lainnya (Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus) dalam membiayai belanja daerah. Kondisi ini mengakibatkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah untuk membiayai belanja modal sangatlah kecil dari segi jumlah maupun persentasenya.

Kebijakan *earmarking* (alokasi wajib) yang termuat dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah diberlakukan secara efektif mulai tanggal 1 Januari 2011. Regulasi ini diharapkan dapat 'memaksa' daerah dan meningkatkan komitmen pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan di bidang tertentu. Akan tetapi, obyek penelitian belum menerapkan aturan tersebut pada tahun anggaran 2011. Misalnya, belanja pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan yang dianggarkan pada Dinas Pekerjaan Umum seharusnya dibiayai oleh 10% dari pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang merupakan komponen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

5.2.2. Kontribusi Dana Alokasi Umum atas Belanja Modal

Korelasi Dana Alokasi Umum (DAU) dan belanja modal masuk dalam kategori kuat yang berarti bahwa hubungan antara DAU dan belanja modal berbanding lurus. Jadi, semakin besar DAU, maka belanja modal diprediksi akan semakin tinggi. Dengan demikian, proposisi dan model penelitian yang menyatakan bahwa DAU berkontribusi terhadap belanja modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli secara empiris telah terbukti.

Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara DAU dengan Belanja Modal selama tahun anggaran 2009 sampai dengan tahun anggaran 2011 pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah. Hal ini sejalan dengan hasil riset yang telah dilakukan oleh Holtz-Eakin *et.al.* (1985 dan 1994) dan Legrenzi dan Milas (2001) dikutip oleh Abdullah dan Halim (2003), Prakoso (2004), serta Susilo dan Adi (2007) yang menyatakan bahwa terdapat keterkaitan sangat erat antara transfer dari pemerintah pusat (DAU) dengan belanja modal.

5.2.3. Kontribusi Dana Alokasi Khusus atas Belanja Modal

Korelasi antara variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Belanja Modal dikategorikan sebagai hubungan yang kuat dengan arah positif. Hasil riset ini menunjukkan terdapat hubungan yang berbanding lurus antara DAK dengan Belanja Modal, artinya jika terjadi kenaikan DAK maka belanja modal diprediksi akan semakin besar. Proposisi dan model riset yang menyatakan bahwa DAK memiliki kontribusi terhadap belanja modal telah terbukti. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara DAK dengan belanja modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah. Fakta ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Muis (2012) yang menunjukkan bahwa DAK berkontribusi atas belanja modal.

Hasil penelitian berimplikasi teoritis pada studi akuntansi sektor publik yang dikemukakan oleh Abdullah dan Halim (2006) yang menyatakan bahwa pembuatan kebijakan pengalokasian anggaran belanja modal terkait dengan sumber pendapatan atau pendanaan yang tersedia. Besaran belanja modal

berasosiasi dengan pendapatan daerah yang bersumber dari pemerintah pusat (Dana Alokasi Umum & Dana Alokasi Khusus), tetapi tidak berkorelasi dengan pendapatan sendiri, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Implikasi akuntansi dari hasil penelitian ini sejalan pula dengan pendapat yang dikemukakan oleh Mardiasmo dalam buku Akuntansi Sektor Publik (2009) bahwa tiap-tiap dana harus ditempatkan pada laci (*cash drawer*) secara terpisah dimana beberapa tagihan harus diambilkan dari satu laci dan tagihan lain dari laci lainnya. Langkah ini merupakan perwujudan dari salah satu teknik akuntansi keuangan yang diadopsi oleh sektor publik, yaitu akuntansi dana.

Sejalan dengan pemikiran Mardiasmo (2009), Williams dalam Abdullah (2010) menegaskan bahwa salah satu tujuan pengelolaan keuangan daerah adalah untuk meningkatkan fleksibilitas dalam mencocokkan aliran masuk dengan aliran keluar kas sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, dokumen penganggaran dan penatalaksanaan keuangan daerah harus mencantumkan sumber pendanaan yang jelas dari setiap jenis belanja (termasuk belanja modal) guna menghindari ketekoran kas akibat pengeluaran yang tidak direncanakan dalam anggaran.

Proses pengalokasian belanja modal perlu dilakukan secara cermat dengan memperhatikan sumber pendanaan yang tersedia. Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah perlu melakukan kajian mendalam tentang akselerasi kemampuan Pendapatan Asli Daerah dalam membiayai belanja modal agar kemandirian daerah bukan hanya menjadi 'jargon politik' belaka. Selain itu, sinergitas antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat perlu ditingkatkan guna mencapai efektivitas dan efisiensi alokasi belanja modal. Dengan demikian, pencapaian tersebut dapat meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah dalam pelayanan publik guna mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

6. PENUTUP

6.1 Simpulan

Mengacu pada rumusan masalah, tujuan penelitian, analisa hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, penulis menarik beberapa simpulan berikut ini.

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki kontribusi yang sangat rendah atas belanja modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah selama tahun anggaran 2009 sampai dengan 2011. Rendahnya proporsi PAD dalam komposisi Pendapatan Daerah menyebabkan sumber pendapatan ini hanya digunakan untuk membiayai belanja honorarium pegawai serta belanja barang dan jasa. Implikasi teoritis studi ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Prakosa (2004) serta Darwanto dan Yulia (2006) yang menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Akan tetapi, penelitian ini berimplikasi positif terhadap riset yang dilakukan oleh Hoover dan Sheffrin (1992) dalam Prakosa (2004) yang membuktikan secara empiris bahwa pengaruh pajak daerah (PAD) terhadap belanja berkurang sesudah tahun 1960-an. Kebijakan *earmarking* (alokasi wajib) yang termuat dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diharapkan meningkatkan komitmen pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan di bidang tertentu walaupun obyek penelitian belum menerapkan aturan tersebut.
2. Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki kontribusi yang sangat besar atas belanja modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah. Hal ini ditunjang oleh pemberian dana transfer (DAU) dalam jumlah sangat besar sehingga mendominasi sumber pendanaan atas belanja, khususnya belanja modal. Hal ini sejalan dengan hasil riset yang telah dilakukan oleh Holtz-Eakin et.al.

3. (1985 dan 1994), Legrenzi dan Milas (2001), Abdullah dan Halim (2003), Prakoso (2004), serta Susilo dan Adi (2007) yang menyatakan bahwa terdapat keterkaitan sangat erat antara transfer dari pemerintah pusat (Dana Alokasi Umum/DAU) dengan belanja modal pemerintah daerah.
4. Terdapat kontribusi Dana Alokasi Khusus (DAK) atas belanja modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah. Realita ini dilatarbelakangi oleh tingginya ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap dana transfer dari Pemerintah Pusat, khususnya dalam pengadaan aset tetap pada proyek tertentu yang urusannya diserahkan oleh Pemerintah Pusat. Secara teoritis, studi ini berimplikasi positif dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Muis (2012) bahwa Dana Alokasi Khusus berkontribusi atas Belanja Modal.

Hasil penelitian berimplikasi teoritis pada bidang akuntansi, khususnya teori akuntansi sektor publik yang dikemukakan oleh Abdullah dan Halim (2006) bahwa pembuatan kebijakan pengalokasian anggaran belanja modal terkait dengan sumber pendapatan atau pendanaan yang tersedia. Implikasi akuntansi dari hasil penelitian ini sejalan pula dengan pendapat yang dikemukakan oleh Mardiasmo dalam buku Akuntansi Sektor Publik (2009) bahwa tiap-tiap dana harus ditempatkan pada laci (*cash drawer*) secara terpisah dimana beberapa tagihan harus diambilkan dari satu laci dan tagihan lain dari laci lainnya.

Implikasi praktis studi ini menunjukkan bahwa proses pengalokasian belanja modal perlu dilakukan secara cermat dengan memperhatikan sumber pendanaan yang tersedia. Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah perlu meningkatkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah atas belanja modal guna meningkatkan kemandirian daerah. Sinergitas antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat perlu ditingkatkan agar belanja modal dapat tepat sasaran guna meningkatkan pelayanan publik dan kepuasan masyarakat.

6.2 Saran

Berdasarkan perbandingan antara kondisi ideal berdasarkan landasan teori dengan pembahasan hasil penelitian maka disarankan hal-hal berikut ini.

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli hendaknya meningkatkan realisasi Pendapatan Asli Daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi obyek pajak dan retribusi daerah sehingga dapat digunakan untuk membiayai belanja modal.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli seyogyanya mengimplementasikan amanat Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk mengalokasikan 10% dari pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) digunakan dalam membiayai belanja modal pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan data yang lebih lengkap dengan rentang periode waktu penelitian yang lebih panjang sehingga lebih mampu untuk dapat dilakukan generalisasi atas hasil penelitian tersebut.
4. Penelitian yang akan datang diharapkan menggunakan variabel yang lebih lengkap dan bervariasi, dengan menambah variabel independen lain, baik ukuran-ukuran atau jenis-jenis penerimaan pemerintah daerah lainnya, maupun variabel non keuangan, seperti kebijakan pemerintah dan kondisi makroekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Syukriy. 2010. Manajemen Kas Daerah. diakses dari <http://syukriy.word-press.com> pada tanggal 9 Juli 2012.
- Abdullah, Syukriy dan Abdul Halim. 2006. Studi atas Belanja Modal pada Anggaran Pemerintah Daerah dalam Hubungannya dengan Belanja Pemeliharaan dan Sumber Pendapatan. *Jurnal Akuntansi Pemerintah* (Vol. 2 No. 2 November 2006) Halaman 17-32.
- Adi, Priyo Hari. 2006. Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali). *Jurnal* disampaikan pada Simposium Nasional Akuntansi IX di Padang.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Edisi Revisi IV). Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Bastian, Indra. 2002. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Penerbit BPFE-UGM dan Pusat Pengembangan Akuntansi (PPA) Universitas Gadjah Mada.
- Badan Pusat Statistik. 2011. *Kabupaten Tolitoli dalam Angka Tahun 2011*. Tolitoli: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tolitoli.
- Darwanto dan Yulia Yustikasari. 2007. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Jurnal* disampaikan pada Simposium Nasional Akuntansi X di Universitas Hasanuddin Makassar.
- Halim, Abdul dan Syukriy Abdullah. 2004. Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Pemda: Studi Kasus Kabupaten dan Kota di Jawa dan Bali. *Jurnal Ekonomi STEI No.2/Tahun XIII/25*.
- Hariato, David dan Priyo Hari Adi. 2010. Hubungan antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Per Kapita. *Jurnal* yang disampaikan pada Simposium Nasional Akuntansi X di Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Muis, Noni Hilwa. 2012. Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal sebagai Variabel Intervening pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. Tesis. Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Prakosa, Kesit Bambang. 2004. Analisa Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Prediksi Belanja Daerah (Studi Empirik di Propinsi Jawa Tengah dan DIY). *JAAI Vol. 8 No. 2*, Hal. 101-118.
- _____. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438). Jakarta: Departemen Dalam Negeri.

Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Departemen Dalam Negeri.

Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575). Jakarta: Departemen Dalam Negeri.

_____. 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Departemen Dalam Negeri.

_____. 2007. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Departemen Dalam Negeri.

_____. 2009. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049). Jakarta: Departemen Dalam Negeri.

Susilo, Gideon Tri Budi dan Priyo Hari Adi. 2007. Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah (Studi Empiris di Propinsi Jawa Tengah). Surabaya: Konferensi Penelitian Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik Pertama.

Zulyanto, Aan. 2010. Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Bengkulu. Tesis. Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang.

PENGARUH SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN MODERN, PEMERIKSAAN PAJAK, DAN PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TERNATE

**Lisa Humairah
David P.E. Saerang
Ventje Ilat**

ABSTRAK

Untuk meningkatkan pencapaian target pajak, kepatuhan wajib pajak perlu ditumbuhkan secara terus-menerus dalam memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh kondisi sistem administrasi perpajakan yang meliputi pelayanan perpajakan (*tax service*) dan penegakan hukum perpajakan (*tax enforcement*). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pemeriksaan Pajak, dan Pelayanan Fiskus berpengaruh secara parsial dan bersama-sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ternate. Hasil penelitian ini menyarankan agar penentu kebijakan perlu terus menjaga dan meningkatkan sistem administrasi dan pelayanan pegawai melalui pemberian pelatihan-pelatihan serta kesempatan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan atau peningkatan pendidikan yang lain.

Kata kunci : perpajakan, kepatuhan wajib pajak.

ABSTRACT

To increase the achievement of the target, taxpayer compliance needs to be grown continuously in fulfilling tax liabilities in accordance with applicable regulations. Taxpayers Compliance affected by the tax administration system which includes service tax and enforcement of the tax law. The purpose of this research was to determine and analyze the effect of Modern Taxation Administration System, Tax Audit and tax authorities Services to the taxpayers Compliance on the Primary Tax Office of Ternate. From this research conclusion can be drawn that the Modern Administration of Taxation System, Tax Audit, and The tax authorities services affected by partial and together the Taxpayer Compliance on Primary Tax Office of Ternate.

Keywords : taxation, tax payers compliance.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan sumber utama pembiayaan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan yang bersifat dinamik, serta mengikuti perkembangan kehidupan masyarakat dan negara dalam bidang sosial maupun ekonomi.

Kepatuhan Wajib Pajak (*tax compliance*) dapat dilihat dari patuh-tidaknya seorang Wajib Pajak dalam mendaftarkan dirinya, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan Wajib Pajak dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam membayar tunggakan. Ketidakepatuhan Wajib Pajak berakibat pada berkurangnya penyetoran dana pajak ke Kas Negara.

Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh kondisi sistem administrasi perpajakan yang meliputi pelayanan perpajakan (*tax service*) dan penegakan hukum perpajakan (*tax enforcement*). Sejak tahun

2001, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI telah menggulirkan reformasi administrasi perpajakan yang bertujuan untuk tercapainya: (1) tingkat kepatuhan sukarela yang tinggi, (2) tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi, dan (3) produktivitas pegawai pajak yang tinggi. Kegiatan reformasi ini diwujudkan dalam penerapan sistem administrasi perpajakan modern, antara lain: struktur organisasi berdasarkan fungsi, perbaikan pelayanan bagi setiap wajib pajak melalui pembentukan *account representative* dan *compliant center* untuk menampung keberatan wajib pajak. Selain itu diadakan juga pengembangan Sistem Informasi Perpajakan (SIP) dengan pendekatan fungsi menjadi Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu (SAPT) yang dikendalikan oleh *case management system* dalam *workflow system* dengan berbagai modul otomasi kantor serta berbagai pelayanan dengan basis *e-system*, seperti: *e-SPT*, *e-Filing*, *e-Payment*, *Taxpayers'Account*, *e-Registration*, dan *e-Counseling* yang diharapkan meningkatkan mekanisme kontrol yang lebih efektif ditunjang dengan penerapan Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang mengatur perilaku pegawai dalam melaksanakan tugas.

Untuk meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah harus melakukan perbaikan-perbaikan dan perubahan mendasar dalam segala aspek perpajakan. Dalam rangka efektivitas penerimaan pajak, maka pemerintah mulai melakukan reformasi perpajakan secara menyeluruh pada tahun 1983. Selain dengan melakukan reformasi administrasi perpajakan, peningkatan efektifitas pemeriksaan harus digalakkan.

Pemeriksaan pajak merupakan sistem pengimbang dari 'kepercayaan penuh' yang diberikan kepada Wajib Pajak, dan kewenangan dalam menentukan pajak yang sangat luar biasa besarnya. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ternate merupakan institusi pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan menyelenggarakan urusan perpajakan, karena iuran pajak dapat digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Sesuai yang tercantum dalam visi Direktorat Jenderal Pajak yaitu menjadi institusi pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien, dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi dan misi menghimpun penerimaan pajak negara berdasarkan Undang-undang Perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien (www.pajak.go.id).

Dalam menilai keberhasilan penerimaan pajak, perlu diingat beberapa sasaran administrasi perpajakan, seperti: (1) meningkatkan kepatuhan para pembayar pajak, dan (2) melaksanakan ketentuan perpajakan secara seragam untuk mendapatkan penerimaan maksimal dengan biaya yang optimal. Administrasi perpajakan umumnya dinilai efektif apabila dapat meminimalisasi penghindaran, penyelundupan, dan penyalahgunaan instrumen perpajakan untuk "membobol" Kas Negara.

Berbagai fenomena tinggi-rendahnya kepatuhan wajib pajak yang dipengaruhi oleh berbagai factor, diantaranya: sistem administrasi perpajakan modern, pemeriksaan pajak, dan pelayanan fiskus memotivasi penulis untuk menyusun tesis berjudul: **"Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pemeriksaan Pajak, dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ternate"**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Apakah Sistem Administrasi Perpajakan Modern berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ternate?
2. Apakah Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ternate?
3. Apakah Pelayanan Fiskus berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ternate?
4. Apakah Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pemeriksaan Pajak, dan Pelayanan Fiskus berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ternate?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan tesis ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ternate.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ternate.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ternate.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pemeriksaan Pajak, dan Pelayanan Fiskus secara bersama-sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ternate.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penulisan tesis ini adalah:

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ternate, diharapkan dapat memberi masukan mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak.
2. Bagi para pembaca, dapat digunakan sebagai referensi penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh sistem administrasi perpajakan modern, pemeriksaan pajak dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak
3. Bagi penulis, dapat melatih penulis dalam menerapkan ilmu dan wawasan yang telah diperoleh selama perkuliahan terutama mengenai pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pemeriksaan Pajak dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi Pajak

Definisi pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH, guru besar dalam Hukum Pajak pada Universitas Padjajaran, Bandung, seperti dikutip oleh Nurmantu (2005), yaitu: "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikular ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (*tegen prestasi*), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum."

2.2 Sistem Perpajakan

Sistem pemungutan pajak menurut Ilyas dan Burton (2010) yakni:

1. *Official Assesment System* yakni sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemungut pajak (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar (pajak yang terutang) oleh seseorang.
2. *Semi Self Assessment System* yakni suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada fiskus dan Wajib Pajak untuk menentukan besarnya utang pajak.
3. *Self Assessment System* yakni suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak.
4. *Witholding System* yakni suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Pihak Ketiga untuk memotong/memungut besarnya pajak yang terutang.

2.3 Reformasi Perpajakan

Menurut Nasucha (2004), reformasi perpajakan merupakan resep untuk penyehatan ekonomi melalui pendekatan fiskal. Reformasi perpajakan meliputi perluasan basis perpajakan, perbaikan administrasi perpajakan, mengurangi terjadinya penghindaran dan manipulasi pajak, serta mengatur

pengenaan aset yang berada di luar negeri. Perubahan struktur pajak (*tax base dan tax rate*) terkait dengan perubahan dalam administrasi perpajakannya.

2.4 Sistem Administrasi Perpajakan Modern

Menurut Pandiangan (2004) modernisasi administrasi perpajakan yang dilakukan pada dasarnya meliputi :

1. Restrukturisasi organisasi.
2. Penyempurnaan proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi.
3. Penyempurnaan manajemen sumber daya manusia.

2.5 Pemeriksaan Pajak

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, Pemeriksaan didefinisikan sebagai “serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

2.6 Kepatuhan Wajib Pajak

Eliyani (1989) yang dikutip Jatmiko (2006) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai memasukkan dan melaporkan kepada waktunya informasi yang diperlukan, mengisi secara benar jumlah pajak yang terutang, dan membayar pajak pada waktunya tanpa tindakan pemaksaan.

2.7 Penerimaan Pajak

Dalam rangka penerimaan pajak perlu diketahui teori-teori yang melatarbelakangi dilakukannya pemungutan pajak, sebagaimana diungkapkan Simanjuntak dan Mukhlis (2012) yaitu berikut ini.

1. Teori Asuransi
2. Teori Kepentingan
3. Teori Gaya Pikul
4. Teori Bakti
5. Teori Asas Gaya Beli

2.8 Penelitian Terdahulu

Sofyan (2005) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Moderen terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar”. Penelitian ini memiliki kesamaan berupa mengambil faktor Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Kepatuhan Wajib Pajak. Namun, dalam penelitian ini menambahkan variable Pemeriksaan Pajak, dan Pelayanan Fiskus Selain itu, penulis menggunakan analisis regresi linear berganda sedangkan peneliti sebelumnya menggunakan analisis regresi linear sederhana.

Sari dan Afriyanti (2012) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan PPH Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Denpasar Timur”. Penelitian ini juga mengambil faktor Kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel penelitian tesis. Namun, peneliti menambahkan faktor Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pemeriksaan Pajak, dan Pelayanan Fiskus sebagai variabel yang akan diteliti. Selain itu, peneliti juga menggunakan analisis regresi linear berganda yang sama dengan Maria M. Ratna Sari Ni Nyoman Afriyanti yang menggunakan analisis regresi linear berganda.

Damayanti (2011) meneliti tentang Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Pemeriksaan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak

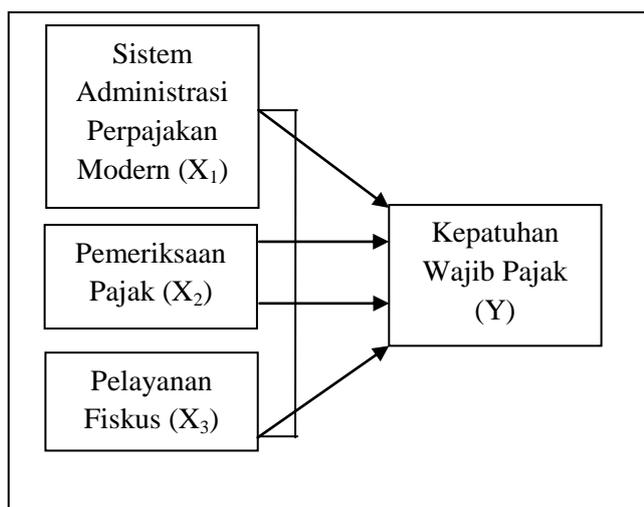
Madya Tangerang). Penelitian ini memiliki kesamaan yaitu mengambil faktor Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Pemeriksaan Pajak sebagai variabel penelitian tesis. Sedangkan perbedaannya yaitu peneliti menambahkan faktor pelayanan fiskus sebagai variabel yang akan diteliti.

Studi empirik yang dilakukan oleh Arum (2012) dengan judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Cilacap)” menyimpulkan bahwa Kesadaran Wajib

Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

3. KERANGKA KONSEPTUAL

3.1 Kerangka Konseptual Penelitian



3.2 Hipotesis

- H₁ : Ada pengaruh signifikan Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ternate.
- H₂ : Ada pengaruh signifikan Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ternate.
- H₃ : Ada pengaruh signifikan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ternate.
- H₄ : Ada pengaruh secara simultan Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pemeriksaan Pajak, dan pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ternate.

3.3 Model Analisis

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda (*multiple regression analysis*).

4. METODE PENELITIAN

4.1 Jenis/Rancangan Penelitian yang Digunakan

Jenis penelitian tesis ini adalah penelitian kuantitatif. Data kualitatif sebagai data utama dalam penelitian ini yaitu berbentuk uraian melalui respon tertulis (kuesioner). Sebagai penunjang penulis juga menggunakan data kuantitatif yaitu data yang disajikan dalam bentuk angka-angka.

4.2 Populasi, Sampel, Besar Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel

Adapun yang menjadi pertimbangan dari peneliti sebagai dasar pengambilan sampel adalah jumlah pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ternate adalah 91 orang, maka berdasarkan *purposive sampling* maka ditetapkan sebanyak 73 orang sebagai sampel dengan kriteria sebagai berikut:

1. Pegawai bagian pelayanan
2. Pegawai bagian pemeriksaan
Lamanya bekerja minimal 1 tahun

4.3 Klasifikasi Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Adapun variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Penerapan sistem administrasi perpajakan modern adalah Menurut Lumbantoruan (1997:582), administrasi perpajakan ialah cara-cara atau prosedur pengenaan dan pemungutan pajak. Variabel ini diukur dengan menggunakan skala Likert (skor jawaban) 1 (Sangat Setuju), 2 (Setuju), 3 (Netral), 4 (Tidak Setuju), 5 (Sangat Tidak Setuju).
2. Pemeriksaan pajak adalah didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Variabel ini diukur dengan menggunakan skala likert (Skor Jawaban) 1 (Sangat Setuju), 2 (Setuju), 3 (Netral), 4 (Tidak Setuju), 5 (Sangat Tidak Setuju).
3. Pelayanan Fiskus adalah menurut Jatmiko dalam Arum (2012), pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu, mengurus, atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang yang dalam hal ini adalah wajib pajak. Variabel ini diukur dengan menggunakan skala likert (skor jawaban) 1 (Sangat Setuju), 2 (Setuju), 3 (Netral), 4 (Tidak Setuju), 5 (Sangat Tidak Setuju).
4. Kepatuhan wajib pajak adalah didefinisikan sebagai memasukkan dan melaporkan kepada waktunya informasi yang diperlukan, mengisi secara benar jumlah pajak yang terutang, dan membayar pajak pada waktunya tanpa tindakan pemaksaan. Variabel ini diukur dengan menggunakan skala likert (skor jawaban) 1 (Sangat Setuju), 2 (Setuju), 3 (Netral), 4 (Tidak Setuju), 5 (Sangat Tidak Setuju).

4.4. Cara Pengolahan dan Analisis Data

1. Uji Validitas dan Reliabilitas
2. Uji Asumsi Klasik
3. Koefisien Korelasi dan Koefisien Determinasi
4. Regresi Linear Berganda
$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + \beta_7 X_7 + e$$
5. Uji F dan Uji t

5. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1. Uji Validitas dan Reliabilitas

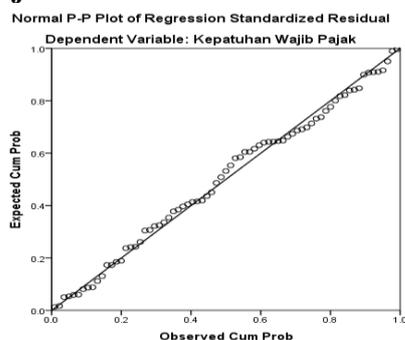
No. Item	Koefisien Korelasi Butir Total				Keterangan
	Sistem Administrasi Perpajakan Modern	Pemeriksaan Pajak	Pelayanan Fiskus	Kepatuhan Wajib Pajak	
1	0,952	0,608	0,834	0,815	Valid
2	0,766	0,726	0,839	0,855	Valid
3	0,733	0,604	0,852	0,480	Valid
4	0,753	0,713	0,871	0,492	Valid
5	0,954	0,552	0,701	0,796	Valid
Variabel		Cronbach's Alpha Based on Standardized Items		N of Items	
Sistem Administrasi Perpajakan Modern		0,938		5	
Pemeriksaan Pajak		0,637		5	
Pelayanan Fiskus		0,875		5	
Kepatuhan Wajib Pajak		0,744		5	

Dari hasil uji validitas yang dilakukan dengan bantuan program SPSS versi 20,0 menunjukkan bahwa koefisien korelasi *pearson moment* untuk setiap item butir pernyataan dengan skor total variabel Sistem Administrasi Perpajakan Modern (X1), Pemeriksaan Pajak (X2), Pelayanan Fiskus (X3), dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) signifikan pada tingkat signifikansi 0,01.

Hasil perhitungan uji reliabilitas menunjukkan bahwa nilai *Cronbach Alpha* (α) untuk masing-masing variabel adalah lebih besar dari 0,60, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa item-item instrumen untuk masing-masing variabel adalah reliabel (Nunnally dalam Ghozali, 2005).

5.2. Uji Asumsi Klasik

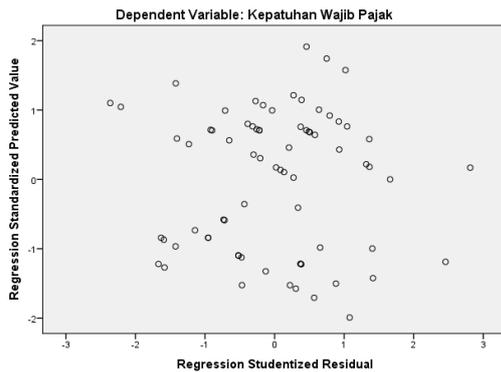
1. Uji Normalitas



2. Uji Multikolinearitas

Variabel Independen	Collinearity Statistics		Keputusan
	Tolerance	VIF	
Sistem Administrasi Perpajakan Modern	0,212	4,717	Tidak ada multikolinearitas
Pemeriksaan Pajak	0,892	1,121	Tidak ada multikolinearitas
Pelayanan Fiskus	0,223	4,475	Tidak ada multikolinearitas

3. Uji Heteroskedastisitas



5.3. Analisis Regresi Berganda

1. Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.865 ^a	.748	.737	1.49692	1.652

Besarnya *adjusted R²* (koefisien determinasi yang telah disesuaikan) adalah 0,865. Nilai ini menunjukkan bahwa 86,5% variasi Kepatuhan Wajib Pajak dapat dijelaskan oleh variansi dari ketiga variabel independen yaitu Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pemeriksaan Pajak, dan Pelayanan Fiskus, sedangkan sisanya 13,5% dijelaskan oleh sebab lain di luar model.

2. Uji Parsial (Uji t)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.353	1.600		.846	.401
	Sistem Administrasi Perpajakan Modern	.190	.087	.288	2.193	.032
	Pemeriksaan Pajak	.316	.082	.246	3.842	.000
	Pelayanan Fiskus	.389	.095	.522	4.087	.000

Dapat diketahui koefisien untuk persamaan regresi dari data yang diteliti pada rumus berikut ini.

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

$$Y = 1.353 + 0.190 X_1 + 0.316 X_2 + 0.389 X_3 + e$$

Interpretasi : Nilai $a = 1.353$ berarti bahwa jika tidak ada faktor variabel independen Sistem Administrasi Perpajakan Modern (X_1), Pemeriksaan Pajak (X_2), dan Pelayanan Fiskus (X_3) maka nilai kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ternate sebesar 1,353.

Nilai $\beta_1 = 0.190$ berarti setiap kenaikan 1% faktor Sistem Administrasi Perpajakan Modern diharapkan terjadi kenaikan persentase kepatuhan wajib pajak sebesar 0,19 dari kondisi sebelumnya dengan asumsi variabel lain (X_2 dan X_3) yang diteliti tetap.

Nilai $\beta_2 = 0.316$ berarti setiap kenaikan 1% faktor Sistem Pemeriksaan Pajak diharapkan terjadi kenaikan persentase kepatuhan wajib pajak sebesar 0,316 dari kondisi sebelumnya dengan asumsi variabel lain (X_1 dan X_3) yang diteliti tetap.

Nilai $\beta_3 = 0.389$ berarti setiap kenaikan 1% faktor Pelayanan Fiskus diharapkan terjadi kenaikan persentase kepatuhan wajib pajak sebesar 0,389 dari kondisi sebelumnya dengan asumsi variabel lain (X_1 dan X_2) yang diteliti tetap.

Hasil ini dipertegas dengan hasil perhitungan nilai t_{hitung} dan t_{tabel} . Nilai t_{tabel} 2,193 pada taraf signifikansi 5% dan df (derajat kebebasan) $n-k-1 = 69$ adalah 1,645. Dengan demikian, nilai t_{hitung} 2,193 > t_{tabel} 1,645. Hasil pengujian ini menginterpretasikan bahwa variabel Sistem Administrasi Perpajakan Modern berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ternate pada taraf signifikansi 5% atau dengan kata lain H_1 diterima.

Hasil pengujian hipotesis kedua (H_2) yang menyebutkan bahwa Pemeriksaan Pajak diduga berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ternate. dikonfirmasi pada tabel 5.7. Ditunjukkan bahwa nilai koefisien regresi variabel Pemeriksaan Pajak (X_2) adalah 0,316 dan nilai t_{hitung} 3,842. Nilai koefisien regresi ini signifikan pada tingkat signifikansi 0,05 dengan *p value* sebesar 0,000. Hasil ini menjelaskan bahwa nilai koefisien regresi variabel Pemeriksaan Pajak (X_2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ternate pada taraf signifikansi 5% atau dengan kata lain H_2 diterima.

Hasil ini diperkuat dengan hasil perhitungan nilai t_{hitung} dan t_{tabel} . Nilai t_{tabel} 3,842 pada taraf signifikansi 5% dan df (derajat kebebasan) $n-k-1 = 69$ adalah 1,645. Dengan demikian, nilai t_{hitung} 3,842 > t_{tabel} 1,645 sehingga perubahan atau variasi variabel Pemeriksaan Pajak akan diikuti oleh variasi Kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan hasil pengujian H_2 ini dapat diinterpretasikan bahwa variabel Pemeriksaan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ternate pada taraf signifikansi 5% atau dengan kata lain H_2 diterima.

Hasil pengujian hipotesis ketiga (H_3) yang menyebutkan bahwa Pelayanan Fiskus diduga berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ternate dikonfirmasi pada tabel 5.7. Hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi variabel Pelayanan Fiskus (X_3) adalah 0,389 dan nilai t_{hitung} 4,087. Nilai koefisien regresi ini signifikan pada tingkat signifikansi 0,05 dengan *p value* sebesar 0,000.

Hasil ini didukung oleh hasil perhitungan nilai t_{hitung} dan t_{tabel} . Nilai t_{tabel} 4,087 pada taraf signifikansi 5% dan df (derajat kebebasan) $n-k-1 = 69$ adalah 1,645. Dengan demikian, nilai t_{hitung} 4,087 > t_{tabel} 1,645. Hasil pengujian ini menginterpretasikan bahwa variabel Pelayanan Fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ternate pada taraf signifikansi 5% atau dengan kata lain H_3 diterima.

3. Uji Simultan (Uji F)

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	459.552	3	153.184	68.363	.000 ^b
Residual	154.612	69	2.241		
Total	614.164	72			

Dari hasil pengujian terhadap uji simultan ANOVA atau *F test* seperti yang ditampilkan pada tabel 5.7 dibawah ini diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 68,363 dengan probabilitas 0,000. Karena probabilitas jauh lebih kecil dari nilai signifikan 0,05, maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi Kepatuhan Wajib Pajak pemeriksaan atau dapat dikatakan bahwa Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pemeriksaan Pajak, dan Pelayanan Fiskus secara simultan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ternate.

5.4. Pembahasan

1. Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pada hakekatnya kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kondisi sistem administrasi perpajakan modern yang meliputi *tax service dan tax enforcement*. Langkah-langkah perbaikan administrasi diharapkan dapat mendorong kepatuhan wajib pajak melalui dua cara yaitu pertama, wajib pajak patuh karena mendapatkan pelayanan yang baik, cepat, dan menyenangkan serta pajak yang mereka bayar akan bermanfaat bagi pembangunan bangsa. Kedua, wajib pajak akan patuh karena

mereka berpikir bahwa mereka akan mendapat sanksi berat akibat pajak yang tidak mereka laporkan terdeteksi sistem informasi dan administrasi perpajakan serta kemampuan crosschecking informasi dengan instansi lain.

2. Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pemeriksaan pajak penting dilakukan guna menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah dilaksanakan atas dasar sistem *self assessment*, hal tersebut dilakukan dalam kegiatan untuk meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak dalam hal Surat Pemberitahuan (SPT) menunjukkan kelebihan pembayaran Pajak dan/atau rugi, SPT tidak disampaikan atau disampaikan tidak tepat waktu yang telah ditetapkan. Pemeriksaan ini juga dapat dilakukan bila terdapat bukti bahwa Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan oleh Wajib Pajak tidak benar, adanya pengaduan dari masyarakat yang mengetahui kecurangan Wajib Pajak tersebut dalam memenuhi kewajiban pajaknya, maupun jika terdapat indikasi bahwa Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Pemeriksaan pajak yang baik akan mendatangkan penerimaan pajak yang baik pula.

3. Pengaruh Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Petugas pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ternate sudah dengan baik membantu, mengurus dan menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan oleh wajib pajak. Cara yang dirasa paling baik untuk bisa mengubah sikap masyarakat yang masih kontra dan belum memahami pentingnya membayar pajak, dan akhirnya mau mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP adalah melalui pelayanan fiskus. Pelayanan yang baik akan mendorong wajib pajak untuk mematuhi aturan dan ketentuan yang telah buat oleh kantor pajak.

4. Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pemeriksaan Pajak, dan Pelayanan Fiskus secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak adalah dengan melalui administrasi perpajakan, yaitu dengan membuat program dan kegiatan yang diharapkan dapat menyadarkan dan meningkatkan kepatuhan sukarela, khususnya bagi Wajib Pajak yang belum patuh dan meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak yang relatif sudah patuh sehingga tingkat kepatuhannya dapat dipertahankan atau ditingkatkan, serta meningkatkan kepatuhan dengan program dan kegiatan yang dapat memerangi ketidakpatuhan (*combatting noncompliance*).

6. PENUTUP

6.1. Simpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem Administrasi Perpajakan Modern berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ternate, sehingga semakin baik tingkat sistem administrasi perpajakan modern, maka akan semakin tinggi kepatuhan wajib pajak untuk menyetorkan pajaknya guna menambah penerimaan pajak.
2. Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, sehingga pemeriksaan pajak oleh pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ternate sudah dapat menjamin Wajib Pajak mematuhi aturan yang telah ditetapkan.
3. Pelayanan Fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, sehingga semakin baik tingkat Pelayanan Fiskus, maka akan semakin baik Wajib Pajak yang akan mematuhi aturan yang telah ditetapkan.
4. Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pemeriksaan Pajak, dan Pelayanan Fiskus berpengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ternate.

6.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka diajukan saran, antara lain:

1. Lebih jauh peneliti menganjurkan agar penentu kebijakan perlu terus menjaga dan meningkatkan sistem administrasi dan pelayanan pegawai melalui pemberian pelatihan-

- pelatihan serta kesempatan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan atau peningkatan pendidikan yang lain.
2. Penelitian mendatang sebaiknya melakukan sebuah penelitian dengan menggunakan metode wawancara langsung untuk mengumpulkan data penelitian agar dapat mengurangi adanya kelemahan terkait *internal validity*.
 3. Peneliti juga menyarankan untuk penelitian selanjutnya agar memperluas objek penelitian pada wajib pajak. Tidak hanya pada pegawai pajak.
 4. Pada penelitian ini, variabel independen yang diteliti berpengaruh terhadap variabel independen sebesar 89,6%, berarti bahwa ada pengaruh sebesar 10,4% dari variabel-variabel lain di luar model. Penelitian selanjutnya disarankan untuk meneliti pengaruh variabel-variabel lain yang belum termasuk dalam model regresi pada penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Arum, Harjanti Puspa. 2012. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Cilacap)*. Skripsi. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Damayanti, Fitri . 2011. *Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Pemeriksaan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Tangerang)*.
- Ghozali. 2005, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Ilyas, Wirawan B. dan Richard Burton. 2010. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Jatmiko, Agus Nugroho. 2006. *Pengaruh sikap wajib pajak pada pelaksanaan sanksidenda, pelayanan fiskus dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang)* Tesis. Program Studi Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Diponegoro. Semarang.
- Lumbantoruan, Sophar. 1997. *Ensiklopedi Perpajakan*. Jakarta: Erlangga.
- Maria M, Ratna Sari, dan Ni Nyoman Afriyanti. 2012. *Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan PPh Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Denpasar Timur*.
- Nasucha, Chaizi. 2004. *Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Praktik*. Jakarta
- Nurmantu, Safri. 2005. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit.
- Pandiangan, Liberty. *Pelayanan: Wajah Kantor Pajak*. Bisnis Indonesia, 27 Desember 2004. Penerbit PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2003.
- Republik Indonesia. 2000. *Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545/KMK.04/2000 Tanggal 22 Desember 2000 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan.
- Republik Indonesia. 2000. *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan.
- Republik Indonesia. 2007. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740)*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan.
- Simanjuntak, Timbul Hamonangan dan Imam Mukhlis. 2012. *Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Raih Asa Sukses.

PENGARUH KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP KEANDALAN DAN KETEPATAN WAKTU PELAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN DEALER MOBIL DI SULAWESI UTARA

**Muhammad Saleh
David P.E. Saerang
Ventje Ilat**

ABSTRAK

Hambatan dalam pelaporan keuangan perusahaan terutama masih terbatasnya kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Sistem akuntansi sebagai sistem informasi merupakan subjek terjadinya kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja (Ria Setiawan dalam Indriasari dan Nahartyo, 2007). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Keandalan dan Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Perusahaan Dealer Mobil di Sulawesi Utara. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa secara bersama-sama Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap Keandalan dan Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Perusahaan Dealer Mobil di Sulawesi Utara. Sedangkan secara parsial ketiga variable independen tidak berpengaruh terhadap Keandalan dan Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan.

Kata Kunci : SDM, Teknologi, SPI, Pelaporan Keuangan.

ABSTRACT

Barriers in corporate financial reporting mainly to the limited quantity and quality of human resources (HR). The accounting system as an information system is the subject the occurrence of errors both intentional or unintended (Ria Setiawan in Indriasari and Nahartyo, 2007). The purpose of this study was to determine and analyze the effect quality of Human Resources, Information Technology, and Internal Control System to the Reliability and Timeliness of Corporate Financial Reporting Car Dealers in North Sulawesi. From the research results conclusion can be drawn that simultaneously Quality Human Resources, Information Technology, and Internal Control System effect on the Reliability and the Timeliness Company's Financial Reporting Car Dealers in North Sulawesi. While partially third independent variable has no effect on reliability and the Timeliness Financial Reporting.

Keywords : SDM, Technology, SPI, Financial Reporting.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pesatnya perkembangan industri otomotif di tanah air patut dibanggakan karena membawa dampak ikutan yang sangat luas, yaitu bertumbuhnya industri komponen dan dapat membuka lapangan kerja serta jasa terkait. Hal ini terlihat dari jumlah investasi disektor otomotif dan komponennya yang terus meningkat secara signifikan di Indonesia. Provinsi Sulawesi Utara merupakan salah satu pasar otomotif terbesar di Kawasan Timur Indonesia dimana hampir semua Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) mobil telah membuka dealer resminya di Sulawesi Utara untuk memenuhi permintaan pasar.

Dalam rangka mencapai perkembangan yang telah diramalkan tersebut, perusahaan dealer mobil sebagai pihak yang bersentuhan langsung dengan konsumen akan melakukan investasi besar-besaran yang membutuhkan modal sangat banyak. Pada umumnya, sumber pendanaan yang dapat

diandalkan berasal dari pemegang saham (sumber internal) dan kalangan perbankan (sumber eksternal). Pemilik modal maupun kreditur sangat selektif dalam menyalurkan dana mereka kepada perusahaan dealer mobil. Indikator yang lazim digunakan dalam memutuskan perlu tidaknya menambah dana kepada suatu perusahaan adalah kinerja perusahaan yang bersangkutan selama satu periode atau lebih yang dapat dilihat pada laporan keuangan perusahaan tersebut.

Laporan keuangan berperan penting dalam proses pengukuran dan penilaian kinerja perusahaan serta pengambilan keputusan. Banyak pihak seperti manajemen, pemegang saham, kreditur, pemerintah dan lain-lain berkepentingan dengan laporan keuangan. Mereka yang mempunyai kepentingan terhadap perkembangan suatu perusahaan sangatlah perlu untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan tersebut yang tercermin dalam laporan keuangannya. Laporan keuangan harus disusun sedemikian rupa agar dapat memenuhi kebutuhan dari semua pihak yang membutuhkan. Laporan keuangan yang disusun secara baik dan akurat dapat memberikan gambaran keadaan yang nyata mengenai hasil atau prestasi yang telah dicapai oleh suatu perusahaan selama kurun waktu tertentu, keadaan inilah yang digunakan untuk menilai kinerja keuangan.

Informasi yang dihasilkan laporan keuangan akan sangat bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan apabila informasi tersebut disajikan secara tepat waktu dan akurat. Tepat waktu didefinisikan sebagai suatu pemanfaatan informasi oleh pengambil keputusan sebelum informasi tersebut kehilangan kapasitas atau kemampuan untuk mengambil keputusan. Oleh karena itu, suatu informasi dikatakan tidak relevan jika tidak disampaikan tepat waktu. Informasi terus tersedia untuk pengambilan keputusan sebelum informasi tersebut kehilangan kesempatan untuk mempengaruhi pengambil keputusan (Chariri dan Ghozali, 2007). Pada organisasi sektor privat di Indonesia, batas waktu penyampaian laporan keuangan umumnya antara tiga sampai dengan enam bulan setelah waktu penutupan buku.

Ketepatan waktu mengimplikasikan bahwa laporan keuangan seharusnya disajikan pada suatu interval waktu untuk menjelaskan perubahan dalam perusahaan yang akan mempengaruhi pemakai informasi dan membuat prediksi dan keputusan. Selanjutnya ketepatan waktu menunjukkan rentang waktu antara penyajian informasi yang diinginkan serta frekuensi pelaporan informasi. Informasi tepat waktu akan mempengaruhi kemampuan manajemen dalam merespon setiap kejadian dan permasalahan. Apabila informasi itu tidak disampaikan dengan tepat waktu akan menyebabkan informasi tersebut kehilangan nilai dalam mempengaruhi kualitas keputusan informasi tepat waktu juga akan mendukung manajer menghadapi ketidakpastian yang terjadi dalam lingkungan kerja mereka (Ukago, Ghozali, dan Sugiyono, 2005).

Hal lainnya yang mungkin mempengaruhi keterandalan pelaporan keuangan adalah pengendalian intern akuntansi. Sistem akuntansi sebagai sistem informasi merupakan subjek terjadinya kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja (Ria Setiawan dalam Indriasari dan Nahartyo, 2007). Oleh karena itu, sistem akuntansi memerlukan pengendalian intern atau dengan kata lain sistem akuntansi berkaitan erat dengan pengendalian intern organisasi (Mahmudi, 2007).

Realita pentingnya pelaporan keuangan yang andal dan tepat waktu pada perusahaan dealer mobil di Sulawesi Utara mendorong penulis untuk melaksanakan studi empiric berjudul: "Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Keandalan dan Ketepatan Waktu pada Perusahaan Dealer Mobil di Sulawesi Utara".

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang telah dideskripsikan pada latar belakang, maka peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap keandalan pelaporan keuangan perusahaan *dealer* mobil di Sulawesi Utara?
2. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap keandalan pelaporan keuangan perusahaan *dealer* mobil di Sulawesi Utara?

3. Apakah sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap keandalan pelaporan keuangan perusahaan *dealer* mobil di Sulawesi Utara?
4. Apakah kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan *dealer* mobil di Sulawesi Utara?
5. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan *dealer* mobil di Sulawesi Utara?
6. Apakah sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan *dealer* mobil di Sulawesi Utara?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk memperoleh bukti empiris dan menganalisis pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap keandalan pelaporan keuangan perusahaan *dealer* mobil di Sulawesi Utara.
2. Untuk memperoleh bukti empiris dan menganalisis pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap keandalan pelaporan keuangan perusahaan *dealer* mobil di Sulawesi Utara.
3. Untuk memperoleh bukti empiris dan menganalisis pengaruh system pengendalian intern terhadap keandalan pelaporan keuangan perusahaan *dealer* mobil di Sulawesi Utara.
4. Untuk memperoleh bukti empiris dan menganalisis pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan *dealer* mobil di Sulawesi Utara.
5. Untuk memperoleh bukti empiris dan menganalisis pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan *dealer* mobil di Sulawesi Utara.
6. Untuk memperoleh bukti empiris dan menganalisis pengaruh system pengendalian intern terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan *dealer* mobil di Sulawesi Utara.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Bagi para akademisi diharapkan dapat memberikan tambahan wacana studi empiris dan pertimbangan untuk melakukan penelitian-penelitian selanjutnya.
2. Bagi manajemen perusahaan *dealer* mobil di Sulawesi Utara diharapkan dapat memberi masukan yang berguna dalam pelaksanaan pelaporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori keagenan menjelaskan hubungan antara agen (manajemen suatu usaha) dan prinsipal (pemilik usaha). Di dalam hubungan keagenan terdapat suatu kontrak dimana si agen menutup kontrak untuk melakukan tugas-tugas tertentu bagi prinsipal, prinsipal menutup kontrak untuk memberi imbalan pada si agen. Analoginya seperti antara pemilik perusahaan dan manajemen perusahaan itu (Hendriksen, 2000).

2.2 Teori Sinyal (*Signalling Theory*)

Teori *signalling* menyatakan bahwa perusahaan yang berkualitas baik dengan sengaja akan memberikan sinyal pada pasar, dengan demikian pasar diharapkan dapat membedakan perusahaan yang berkualitas baik dan buruk (Hartono, 2005).

2.3 Laporan Keuangan dan Pelaporan Keuangan

Definisi laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (2009) yaitu: "Laporan keuangan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba-rugi, laporan perubahan posisi keuangan yang disajikan dalam berbagai cara (seperti misalnya sebagai laporan arus kas atau arus dana), catatan

dan laporanlain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporankeuangan. Di samping itu juga termasuk skedul dan informasi tambahan yangberkaitan dengan laporan tersebut misalnya informasi keuangan segmenindustri dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga”.

2.4 Ketepatan Waktu

Hendriksen (dalam Bandi dan Hananto, 2000) menyatakan ketepatan waktu mengimplikasikan bahwa laporan keuangan seharusnya disajikan padasuatu interval waktu, untuk menjelaskan perubahan dalam perusahaan yang mungkin mempengaruhi pemakai informasi dalam membuat prediksikeputusan.

2.5 Kualitas Sumber Daya Manusia

Kualitas sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya denganbekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai (Widodo dalam Kharis, 2010).

2.6 Teknologi Informasi

Teknologi informasi meliputi komputer (*mainframe, mini, micro*), perangkat lunak (*software*), *database*, jaringan (*internet, intranet, electronic commerce*), dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi (Wilkinson *et al.*, 2000).

2.7 Keandalan (*reliability*) dan Ketepatan Waktu (*timeliness*)

Keandalan adalah kemampuan informasi untuk memberi keyakinan bahwainformasi tersebut benar atau valid. Informasi yang memiliki kualitas andal adalahapabila informasi tersebut bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahanmaterial, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang jujur (*faithfulrepresentation*) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan.

Ketepatan waktu merupakan penyajian informasi yang sesuai dengan standarwaktu yang ditetapkan. Apabila informasi yang diterima oleh pengguna laporankeuangan tidak tepat waktu, maka informasi tersebut tidak memiliki nilai. Akibatnya, akan berdampak dalam proses pengambilan keputusan.

2.8 Sistem Pengendalian Intern (SPI)

Menurut Wilkinson dan kawan-kawan (2000), sub komponen dari aktivitas pengendali-an yang berhubungan dengan pelaporan keuangan adalah: (a) perancangan yang memadai dan penggunaan dokumen-dokumen dan catatan-catatan bernomor, (b) pemisahan tugas, (c) otorisasi yang memadai atas transaksi-transaksi,(d) pemeriksaan independen atas kinerja, dan (e) penilaian yang tepatatas jumlah yang dicatat.

2.9 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merupakan *original replica* dari penelitian Indriasari (2008) tentang “Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan kapasitas sumberdaya manusia tidak memiliki pengaruh. Selanjutnya, pemanfaatan teknologi informasi dan kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Winidya ningrum dan Rahmawati (2010) melakukan penelitian tentang “Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Keterandalan dan Ketepat waktuan

Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel *Intervening* Pengendalian Intern Akuntansi (Studi Empiris di Pemda subosuka wonosraten)”. Hasil dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah melalui pengendalian intern akuntansi. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan sumber daya manusia tidak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Azhar (2007) melakukan penelitian tentang “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Penerapan Permendagri Nomor 13 pada Pemerintah Kota Banda Aceh”. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa secara simultan komitmen, sumber daya manusia, perangkat pendukung, dan regulasi berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Sementara secara parsial, regulasi tidak berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.

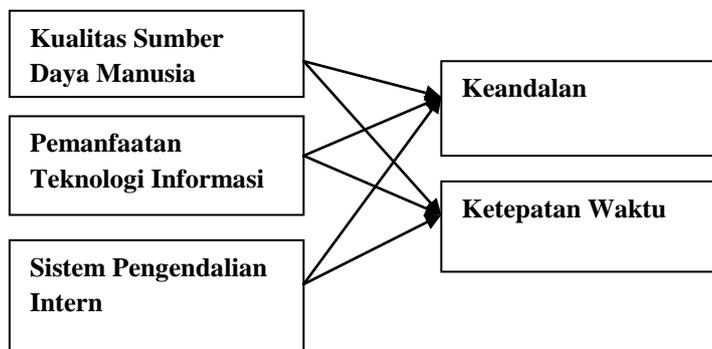
Tuasikal (2007) melakukan penelitian tentang “Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Studi pada Kabupaten Maluku Tengah di Provinsi Maluku)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan maupun parsial, pemahaman mengenai sistem akuntansi dan pengelolaan keuangan berpengaruh terhadap kinerja satuan kerja pemerintah daerah. Apabila pengelolaan keuangan daerah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan adanya peningkatan pemahaman tentang akuntansi keuangan daerah, maka kinerja satuan kerja pemerintah daerah akan meningkat.

Warisno (2009) melakukan penelitian tentang “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi”. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa kualitas sumber daya manusia, komunikasi, sarana pendukung, dan komitmen organisasi secara simultan berpengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja SKPD. Secara parsial, hanya kualitas sumber daya manusia dan komunikasi yang berpengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja SKPD, sedangkan sarana pendukung dan komitmen organisasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja SKPD.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Chrisanty (2010) berjudul “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur tahun 2006-2008)” dimana hasilnya menunjukkan bahwa profitabilitas, likuiditas, dan ukuran perusahaan mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Sedangkan *leverage* keuangan, kepemilikan publik, reputasi Kantor Akuntan Publik (KAP), dan opini auditor tidak mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

3 KERANGKA KONSEPTUAL

3.1 Kerangka Konseptual Penelitian



3.2 Hipotesis

H₁ : Kualitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap keandalan pelaporan keuangan perusahaan *dealer* mobil di Sulawesi Utara.

H₂ : Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap keandalan pelaporan keuangan perusahaan *dealer* mobil di Sulawesi Utara.

H₃ : Efektivitas sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap keandalan pelaporan keuangan perusahaan *dealer* mobil di Sulawesi Utara.

H₄ : Kualitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan *dealer* mobil di Sulawesi Utara.

H₅ : Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan *dealer* mobil di Sulawesi Utara.

H₆ : Efektivitas sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan *dealer* mobil di Sulawesi Utara.

4 METODE PENELITIAN

4.1 Jenis/Rancangan Penelitian yang Digunakan

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh berupa hasil pengisian kuesioner oleh responden, yaitu fungsi akuntansi pada perusahaan *dealer* mobil di Provinsi Sulawesi Utara.

4.2 Populasi, Sampel, Besar Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel

No.	Perusahaan	
1	PT.Bosowa Berlian Motor	(Mitsubishi)
2	PT.Hasrat Abadi	(Toyota)
3	PT.Gowa Dinasti Motor	(Hyundai)
4	PT. Wahana Wirawan	(Nissan)
5	PT.Sinar Galeson Prima	(Suzuki)
6	PT.Kalla Kia Motor	(Kia)
7	PT.Tujuh Dua-Dua	(Chevrolet)
8	PT.Kumala Motor Prima	(Ford)
9	PT.Nengga Pratama Internusa	(Hino)
10	PT.Proton Edar Manado	(Proton)
11	PT.Astra Internasional	(Daihatsu)
12	PT.Astra Internasional	(Izusu)
13	UD.Remaja Jaya	(Honda)
14	CV.Dwi Sejati	(Chery)

Teknik pengambilan sampel (*sampling method*) dilakukan secara bertujuan (*purposive sampling*) dengan pertimbangan bahwa informasi berasal dari sumber yang sengaja dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan peneliti (Sekaran dalam Indriasari, 2008) yaitu para pegawai yang melaksanakan fungsi akuntansi pada perusahaan *dealer* mobil, meliputi: satu orang kepala cabang (*head of branch*), seorang kepala departemen keuangan (*head of finance department*) beserta satu orang staf, dan seorang kepala departemen akuntansi (*head of accounting department*) beserta satu orang staf. Jumlah sampel sebanyak 70 orang.

4.3 Klasifikasi Variabel dan Definisi Operasional Variabel

1. Keandalan adalah kemampuan informasi untuk memberi keyakinan bahwa informasi tersebut benar atau valid. Pengukuran variabel ini menggunakan skala *Likert* lima poin, yaitu: (1) Sangat Tidak Setuju mempunyai skor 1, (2) Tidak Setuju mempunyai skor 2, (3) Netral mempunyai skor 3, (4) Setuju mempunyai skor 4, dan (5) Sangat Setuju mempunyai skor 5.
2. Ketepatan waktu merupakan penyajian informasi yang sesuai dengan standar waktu yang ditetapkan. Pengukuran variabel ini menggunakan skala *Likert* lima poin, yaitu: (1) Sangat Tidak Setuju mempunyai skor 1, (2) Tidak Setuju mempunyai skor 2, (3) Netral mempunyai skor 3, (4) Setuju mempunyai skor 4, dan (5) Sangat Setuju mempunyai skor 5.

3. Kualitas sumber daya manusia adalah kemampuan dari staf bagian akuntansi dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan latar belakang pendidikan dan pelatihan yang diperoleh responden, pemahaman mengenai tugas, dan tanggung jawab terhadap kewajiban. Pengukuran variabel ini menggunakan skala *Likert* lima poin, yaitu: (1) Sangat Tidak Setuju mempunyai skor 1, (2) Tidak Setuju mempunyai skor 2, (3) Netral mempunyai skor 3, (4) Setuju mempunyai skor 4, dan (5) Sangat Setuju mempunyai skor 5.
4. Pemanfaatan teknologi informasi merupakan penggunaan secara optimal dari komputer (*mainframe, mini, micro*), perangkat lunak (*software*), *database*, jaringan (*internet, intranet*), *electronic commerce*, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi (Wilkinson *et.al*, 2000). Pengukuran variabel ini menggunakan skala *Likert* lima poin, yaitu: (1) Sangat Tidak Setuju mempunyai skor 1, (2) Tidak Setuju mempunyai skor 2, (3) Netral mempunyai skor 3, (4) Setuju mempunyai skor 4, dan (5) Sangat Setuju mempunyai skor 5.
5. Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, serta berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan (*fraud*). Pengukuran variabel ini menggunakan skala *Likert* lima poin, yaitu: (1) Sangat Tidak Setuju mempunyai skor 1, (2) Tidak Setuju mempunyai skor 2, (3) Netral mempunyai skor 3, (4) Setuju mempunyai skor 4, dan (5) Sangat Setuju mempunyai skor 5.

4.4 Cara Pengolahan dan Analisis Data

1. Analisa Kuantitatif
2. Uji Validitas dan Reliabilitas
3. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)
4. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)
5. Koefisien Determinasi
6. Pengujian Model dengan Asumsi Klasik

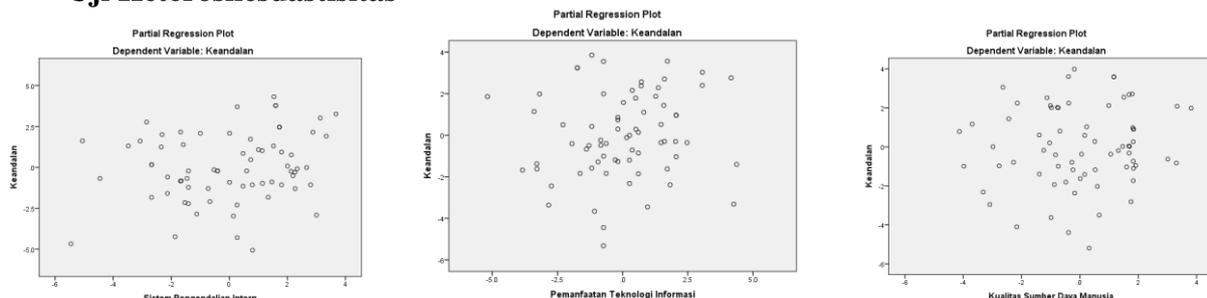
5 ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

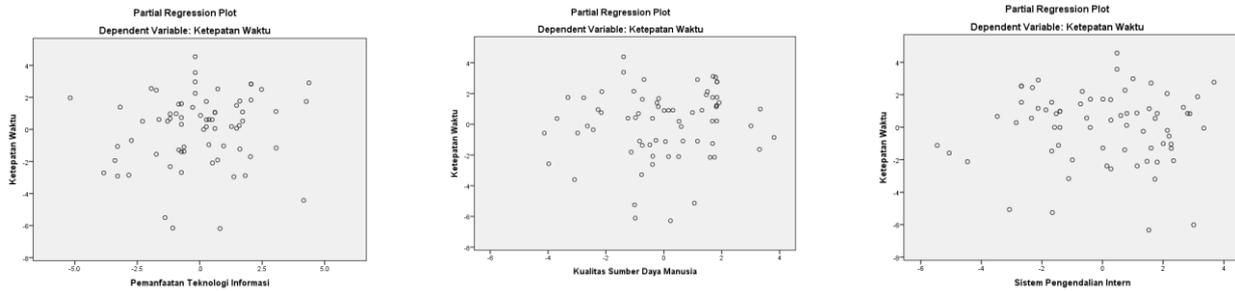
5.1 Uji Validitas dan Reliabilitas

	(X ₁)	(X ₂)	(X ₃)	(Y ₁)	(Y ₂)
Corrected Item-Total Correlation P1	0,743	0,482	0,632	0,480	0,485
Corrected Item-Total Correlation P2	0,723	0,737	0,726	0,632	0,369
Corrected Item-Total Correlation P3	0,727	0,756	0,605	0,428	0,318
Corrected Item-Total Correlation P4	0,722	0,590	0,621	0,638	0,340
Corrected Item-Total Correlation P5	0,717	0,719	0,589	0,357	0,566
Corrected Item-Total Correlation P6	0,723	0,719	0,644	0,337	0,395
Corrected Item-Total Correlation P7	0,719	0,647	0,550	0,322	0,422
Cronbach's Alpha	0,751	0,778	0,770	0,720	0,698

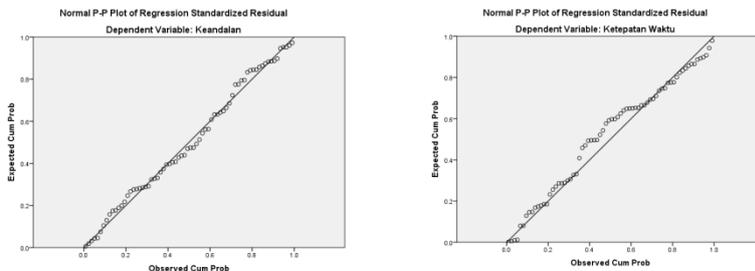
5.2 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Heteroskedastisitas





2. Uji Normalitas



3. Uji Multikolinieritas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Kualitas Sumber Daya Manusia	.482	2.077
	Pemanfaatan Teknologi Informasi	.378	2.646
	Sistem Pengendalian Intern	.505	1.982

Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai VIF semua variabel independen berada di bawah 5 dan nilai *tolerance* berada di atas 0,10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas.

5.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Model		Unstandardized Coefficients	
		B	Std. Error
1	(Constant)	17.889	3.047
	Kualitas Sumber Daya Manusia	.108	.137
	Pemanfaatan Teknologi Informasi	.128	.130
	Sistem Pengendalian Intern	.202	.119

Dari hasil perhitungan untuk analisa kuantitatif berdasarkan metode analisis regresi linear berganda (*multiple regression*) diperoleh persamaan 1 sebagai berikut: $Y_1 = 17,889 + 0,108X_1 + 0,128X_2 + 0,202X_3$. Hasil regresi ini menunjukkan pengaruh variabel bebas (kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern) terhadap variabel terikat (keandalan pelaporan keuangan). Nilai konstan sebesar 17,889 menunjukkan bahwa jika variabel kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern dianggap konstan atau sama dengan nol (0) maka tingkat keandalan pelaporan keuangan perusahaan dealer mobil di Sulawesi Utara adalah 17,889 satuan skor. Koefisien regresi X_1 sebesar 0,108 mengartikan bahwa jika faktor kualitas sumber daya manusia meningkat sebesar 1 satuan skor dari kondisi sebelumnya, maka tingkat keandalan pelaporan keuangan perusahaan dealer mobil di Sulawesi Utara akan meningkat sebesar 0,108 satuan skor dari kondisi sebelumnya dengan asumsi variabel lain (X_2 , dan X_3) yang diteliti tetap. Koefisien regresi X_2 sebesar 0,128 mengartikan bahwa jika faktor pemanfaatan teknologi informasi meningkat sebesar 1 satuan skor dari kondisi sebelumnya, maka tingkat keandalan pelaporan keuangan perusahaan dealer mobil di Sulawesi Utara akan meningkat

sebesar 0,128 satuan skor dari kondisi sebelumnya dengan asumsi variabel lain (X_1 dan X_3) yang diteliti tetap. Koefisien regresi X_3 sebesar 0,202 mengartikan bahwa jika faktor sistem pengendalian intern meningkat sebesar 1 satuan skor dari kondisi sebelumnya, maka tingkat keandalan pelaporan keuangan perusahaan dealer mobil di Sulawesi Utara akan meningkat sebesar 0,202 satuan skor dari kondisi sebelumnya dengan asumsi variabel lain (X_1 dan X_2) yang diteliti tetap.

Koefisien Persamaan 2

Model		Unstandardized Coefficients	
		B	Std. Error
1	(Constant)	22.536	3.308
	Kualitas Sumber Daya Manusia	.136	.149
	Pemanfaatan Teknologi Informasi	.163	.141
	Sistem Pengendalian Intern	-.013	.129

Persamaan 2 sebagai berikut: $Y_2 = 22,536 + 0,136X_1 + 0,163X_2 - 0,013X_3$

Hasil regresi ini menunjukkan pengaruh variabel bebas (kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern) terhadap variabel tergantung (ketepatan waktu pelaporan keuangan). Nilai konstan sebesar 22,536 menunjukkan bahwa jika variabel kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern dianggap konstan atau sama dengan nol (0) maka ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan dealer mobil di Sulawesi Utara adalah sebesar 22,536 satuan skor. Koefisien regresi X_1 sebesar 0,136 mengartikan bahwa jika faktor kualitas sumber daya manusia meningkat sebesar 1 satuan skor dari kondisi sebelumnya, maka ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan dealer mobil di Sulawesi Utara akan meningkat sebesar 0,108 satuan skor dari kondisi sebelumnya dengan asumsi variabel lain (X_2 dan X_3) yang diteliti tetap. Koefisien regresi X_2 sebesar 0,163 mengartikan bahwa jika faktor pemanfaatan teknologi informasi meningkat sebesar 1 satuan skor dari kondisi sebelumnya, maka ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan dealer mobil di Sulawesi Utara akan meningkat sebesar 0,163 satuan skor dari kondisi sebelumnya dengan asumsi variabel lain yang diteliti (variabel X_1 dan X_3) tetap. Koefisien regresi X_3 sebesar -0,013 mengartikan bahwa jika faktor sistem pengendalian intern meningkat sebesar 1 satuan skor dari kondisi sebelumnya, maka ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan dealer mobil di Sulawesi Utara akan berkurang sebesar 0,013 satuan skor dari kondisi sebelumnya dengan asumsi variabel lain (X_1 dan X_2) yang diteliti tetap.

5.4 Koefisien Korelasi (R) dan Koefisien Determinasi (R^2)

Correlations untuk Keandalan

		Keandalan
Pearson Correlation	Keandalan	1.000
	Kualitas Sumber Daya Manusia	.394
	Pemanfaatan Teknologi Informasi	.437
	Sistem Pengendalian Intern	.447
Sig. (1-tailed)	Keandalan	.
	Kualitas Sumber Daya Manusia	.000
	Pemanfaatan Teknologi Informasi	.000
	Sistem Pengendalian Intern	.000
N	Keandalan	70
	Kualitas Sumber Daya Manusia	70
	Pemanfaatan Teknologi Informasi	70
	Sistem Pengendalian Intern	70

Dapat dilihat bahwa koefisien korelasi linear yang dihasilkan antara kualitas sumber daya manusia (X_1) dengan keandalan pelaporan keuangan (Y_1) perusahaan dealer mobil di Sulawesi Utara adalah 0,394 dan bersifat positif. Hal ini berarti terdapat hubungan antara variabel X_1 dengan variabel Y_1 meskipun tingkat hubungannya tidak begitu kuat sebab koefisien korelasinya $< 0,5$. Koefisien korelasi linear yang dihasilkan antara pemanfaatan teknologi informasi (X_2) dengan keandalan

pelaporan keuangan (Y_1) adalah sebesar 0,437 dan bersifat positif. Hal ini berarti terdapat hubungan antara variabel X_2 dengan variabel Y_1 meskipun tingkat hubungannya tidak begitu kuat sebab koefisien korelasinya $<0,5$. Koefisien korelasi linear yang dihasilkan antara sistem pengendalian intern dengan keandalan pelaporan keuangan (Y_1) adalah sebesar 0,447 dan bersifat positif hal ini berarti terdapat hubungan antara variabel X_3 dengan variabel Y_1 meskipun tingkat hubungannya tidak begitu kuat sebab koefisien korelasinya $<0,5$.

Correlations untuk Ketepatan waktu

		Ketepatan Waktu
Pearson Correlation	Ketepatan Waktu	1.000
	Kualitas Sumber Daya Manusia	.299
	Pemanfaatan Teknologi Informasi	.317
	Sistem Pengendalian Intern	.225
Sig. (1-tailed)	Ketepatan Waktu	.
	Kualitas Sumber Daya Manusia	.006
	Pemanfaatan Teknologi Informasi	.004
	Sistem Pengendalian Intern	.031
N	Ketepatan Waktu	70
	Kualitas Sumber Daya Manusia	70
	Pemanfaatan Teknologi Informasi	70
	Sistem Pengendalian Intern	70

Dapat dilihat bahwa koefisien korelasi linear yang dihasilkan antara kualitas sumber daya manusia (X_1) dengan ketepatan waktu pelaporan keuangan (Y_2) adalah sebesar 0,299 dan bersifat positif. Hal ini berarti terdapat hubungan antara variabel X_1 dengan variabel Y_2 meskipun tingkat hubungannya tidak begitu kuat sebab koefisien korelasinya $<0,5$. Koefisien korelasi linear yang dihasilkan antara pemanfaatan teknologi informasi (X_2) dengan ketepatan waktu pelaporan keuangan (Y_2) adalah sebesar 0,317 dan bersifat positif. Hal ini berarti terdapat hubungan antara variabel X_2 dengan variabel Y_2 meskipun tingkat hubungannya tidak begitu kuat sebab koefisien korelasinya $<0,5$. Koefisien korelasi linear yang dihasilkan antara sistem pengendalian intern dengan ketepatan waktu pelaporan keuangan (Y_2) adalah sebesar 0,225 dan bersifat positif. Hal ini berarti terdapat hubungan antara variabel X_3 dengan variabel Y_2 meskipun tingkat hubungannya tidak begitu kuat sebab koefisien korelasinya $<0,5$.

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.488 ^a	.238	.204	2.085	.334 ^a	.112	.071	2.263

Dapat diketahui nilai *adjusted R square* yang diperoleh adalah sebesar 0,204 atau 20,4 % artinya variabel kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern berpengaruh sebesar 20,4% terhadap keandalan pelaporan keuangan perusahaan dealer mobil di Sulawesi Utara, sedangkan sisanya sebesar 79,6% dijelaskan oleh faktor lain diluar penelitian ini. Dapat diketahui nilai *adjusted R square* yang diperoleh adalah sebesar 0,071 atau 7,1 % berarti kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern berpengaruh sebesar 7,1% terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan dealer mobil di Sulawesi Utara, sedangkan sisanya sebesar 92,9% dijelaskan oleh faktor lain diluar penelitian ini.

5.5 Pengujian Hipotesis Uji F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	89.822	3	29.941	6.890	.000 ^a	42.536	3	14.179	2.768	.049 ^a
Residual	286.821	66	4.346			338.035	66	5.122		
Total	376.643	69				380.571	69			

Dari tabel Anova didapat nilai $F_{hitung}=6,890$ dengan menggunakan derajat keyakinan 95% atau taraf nyata 5% serta derajat kebebasan dari $df_1=3$ dan $df_2=66$ didapat nilai $F_{tabel}=2,75$. Jadi, nilai $F_{hitung} < F_{tabel}$, sehingga H_0 diterima dan H_a ditolak. Dari tabel Anova juga didapat nilai $F_{hitung}=2,768$ dengan menggunakan derajat keyakinan 95% atau taraf nyata 5% serta derajat kebebasan dari $df_1=3$ dan $df_2=66$ didapat nilai $F_{tabel}=2,75$. Jadi, nilai $F_{hitung} < F_{tabel}$, sehingga H_0 diterima dan H_a ditolak.

5.6 Pengujian Hipotesis Uji t

Hasil uji-t untuk variabel kualitas sumber daya manusia (X_1) memperoleh nilai t_{hitung} variabel X_1 sebesar 0,790 sehingga dengan tingkat kepercayaan 5% pada derajat kebebasan $(N-2) = 70-2 = 68$, dapat diketahui nilai t_{tabel} sebesar 2,000. Dengan demikian nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$, artinya variabel kualitas sumber daya manusia (X_1) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keandalan pelaporan keuangan (variabel Y_1) perusahaan dealer mobil di Sulawesi Utara. Hasil uji-t variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi (X_2) menunjukkan nilai t_{hitung} adalah 0,984 dengan tingkat kepercayaan 5% pada derajat kebebasan $(N-2) = 70-2 = 68$, dapat diketahui nilai t_{tabel} sebesar 2,000. Dengan demikian nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$, artinya variabel pemanfaatan teknologi informasi (X_2) tidak berpengaruh signifikan terhadap keandalan pelaporan keuangan (variabel Y_1) perusahaan dealer mobil di Sulawesi Utara. Hasil uji-t variabel Sistem Pengendalian Intern (X_2) memperoleh nilai $t_{hitung}=1,702$ dengan tingkat kepercayaan 5% pada derajat kebebasan $(N-2)=70-2=68$, dapat diketahui nilai t_{tabel} sebesar 2,000. Dengan demikian, nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ artinya variabel Sistem Pengendalian Intern (X_3) tidak berpengaruh signifikan terhadap keandalan pelaporan keuangan (Y_1) perusahaan dealer mobil di Sulawesi Utara.

Uji-t untuk variabel kualitas sumber daya manusia (X_1) menghasilkan nilai $t_{hitung} = 0,916$. Dengan tingkat kepercayaan 5% pada derajat kebebasan $(N-2) = 70 - 2 = 68$, dapat diketahui nilai t_{tabel} sebesar 2,000. Dengan demikian nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ yang berarti variabel kualitas sumber daya manusia (X_1) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel ketepatan waktu pelaporan keuangan (Y_2) perusahaan dealer mobil di Sulawesi Utara. Hasil uji-t untuk variabel pemanfaatan teknologi informasi (X_2) dengan nilai $t_{hitung}=1,162$. Dengan tingkat kepercayaan 5% pada derajat kebebasan $(N-2) = 70 - 2 = 68$ dapat diketahui nilai $t_{tabel}=2,000$. Dengan demikian nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ artinya variabel pemanfaatan teknologi informasi (X_2) tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan (Y_2) perusahaan dealer mobil di Sulawesi Utara. Hasil uji-t untuk variabel sistem pengendalian intern (X_3) bahwa nilai t_{hitung} variabel $X_3 = -0,097$. Dengan tingkat kepercayaan 5% pada derajat kebebasan $(N-2) = 70 - 2 = 68$ dapat diketahui nilai $t_{tabel}=2,000$. Dengan demikian nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ artinya variabel sistem pengendalian intern (X_3) tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan (Y_2) perusahaan dealer mobil di Sulawesi Utara.

5.7 Pembahasan

1. Kualitas Sumber Daya Manusia tidak Berpengaruh Signifikan terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Perusahaan Dealer Mobil di Sulawesi Utara

Fakta yang ditemukan di lapangan mengindikasikan bahwa sebagian besar rekrutmen staf akuntansi masih berasal dari lulusan perguruan tinggi yang berlatarbelakang pendidikan di luar bidang ilmu akuntansi. Padahal fungsi dan proses akuntansi hanya dapat dilaksanakan oleh staf yang memiliki pengetahuan

di bidang ilmu akuntansi. Selain itu, uraian tugas dan fungsi (*job description*) staf akuntansi yang ada masih terlalu umum (belum terspesifikasi dengan jelas).

2. Pemanfaatan Teknologi Informasi tidak Berpengaruh Signifikan terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Perusahaan Dealer Mobil di Sulawesi Utara

Realita ini dipicu oleh masih rendahnya kesadaran manajemen *dealer* mobil di Sulawesi Utara dalam memperbaharui (*up-grade*) aplikasi teknologi informasi (*software*) sesuai revisiterbaru Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Selain itu, masih ada transaksi yang belum dilakukan secara

komputerisasi sehingga mengurangi keandalan pelaporan keuangan perusahaan dealer mobil di Sulawesi Utara.

3. Sistem Pengendalian Intern tidak Berpengaruh Signifikan terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Perusahaan Dealer Mobil di Sulawesi Utara

Faktor penyebab anomali ini adalah lemahnya sistem pengendalian intern terkait dengan proses penyusunan laporan keuangan sehingga mengurangi tingkat keandalan pelaporan keuangan perusahaan dealer mobil di Sulawesi Utara.

4. Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh signifikan terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Perusahaan Dealer Mobil di Sulawesi Utara

Variabel-variabel independen yang digunakan dalam model penelitian ini secara bersama-sama mampu menjelaskan variasi dari variabel dependen. Hasil penelitian ini mendukung studi empirik yang dilakukan oleh Indriasari (2008).

5. Kualitas Sumber Daya Manusia tidak Berpengaruh Signifikan terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Perusahaan Dealer Mobil di Sulawesi Utara

Rekrutmen staf penyusun laporan keuangan berasal dari luar bidang ilmu akuntansi padahal sumber daya manusia yang berkualitas akan sangat membantu dalam mewujudkan ketepatan waktu pelaporan keuangan tersebut.

6. Pemanfaatan Teknologi Informasi tidak Berpengaruh Signifikan terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Perusahaan Dealer Mobil di Sulawesi Utara

Fenomena ini disebabkan oleh mahalnya biaya instalasi dan pemutakhiran data, ditambah dengan keterbatasan dana sehingga mengakibatkan teknologi informasi belum mampu dimanfaatkan secara maksimal. Fakta ini berpengaruh terhadap rendahnya tingkat ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan dealer mobil di Sulawesi Utara.

7. Sistem Pengendalian Intern tidak Berpengaruh Signifikan terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Perusahaan Dealer Mobil di Sulawesi Utara

Kondisi ini terjadi akibat lemahnya sistem pengendalian intern atas penyusunan laporan keuangan sehingga laporan keuangan perusahaan dealer mobil di Sulawesi Utara tidak dapat disusun tepat waktu.

8. Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Berpengaruh Signifikan terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Perusahaan Dealer Mobil di Sulawesi Utara

Kombinasi dari ketiga variabel independen tersebut dapat meningkatkan kinerja staf akuntansi dalam menyusun laporan keuangan tepat pada waktunya. Dengan demikian, hasil penelitian ini mendukung studi empirik yang telah dilakukan oleh Indriasari (2008).

6 PENUTUP

6.3 Simpulan

Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

5. Kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap keandalan pelaporan keuangan perusahaan dealer mobil di Sulawesi Utara. Faktor penyebabnya adalah rekrutmen staf akuntansi yang berlatarbelakang pendidikan di luar bidang ilmu akuntansi dan belum jelasnya uraian tugas dan fungsi (*job description*) staf akuntansi yang ada, serta masih rendahnya frekuensi pendidikan dan pelatihan penyusunan laporan keuangan yang disesuaikan dengan perkembangan terbaru Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Oleh karena itu, hasil penelitian ini mendukung studi empirik yang dilakukan oleh Indriasari (2008).
6. Pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap keandalan pelaporan keuangan perusahaan dealer mobil di Sulawesi Utara. Pemicunya yaitu rendahnya kesadaran manajemen *dealer* mobil di Sulawesi Utara dalam memperbaharui (*up-grade*) aplikasi

teknologi informasi (*software*) sesuai revisi terbaru Standar Akuntansi Keuangan (SAK) serta masih ada transaksi yang belum dilakukan secara komputerisasi sehingga mengurangi keandalan pelaporan keuangan perusahaan dealer mobil di Sulawesi Utara.

7. Sistem pengendalian intern tidak berpengaruh signifikan terhadap keandalan pelaporan keuangan perusahaan dealer mobil di Sulawesi Utara. Faktor penyebabnya adalah lemahnya sistem pengendalian intern terkait dengan proses penyusunan laporan keuangan sehingga mengurangi tingkat keandalan pelaporan keuangan perusahaan dealer mobil di Sulawesi Utara.
8. Kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap keandalan pelaporan keuangan perusahaan dealer mobil di Sulawesi Utara. Dengan demikian, variabel-variabel independen yang digunakan dalam model penelitian ini secara bersama-sama mampu menjelaskan variasi dari variabel dependen. Hasil penelitian ini mendukung studi empirik yang dilakukan oleh Indriasari (2008)
9. Kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan dealer mobil di Sulawesi Utara. Hal ini disebabkan oleh rekrutmen staf penyusun laporan keuangan berasal dari luar bidang ilmu akuntansi padahal sumber daya manusia yang berkualitas akan sangat membantu dalam mewujudkan ketepatan waktu pelaporan keuangan tersebut. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Winidyaningrum dan Rahmawati (2010).
10. Pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan dealer mobil di Sulawesi Utara. Fenomena ini disebabkan oleh mahalannya biaya instalasi dan pemutakhiran data, ditambah dengan keterbatasan dana sehingga mengakibatkan teknologi informasi belum mampu dimanfaatkan secara maksimal. Fakta ini berpengaruh terhadap rendahnya tingkat ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan dealer mobil di Sulawesi Utara. Hasil penelitian ini mendukung studi empirik yang dilakukan oleh Prpto (2010).
11. Sistem pengendalian intern tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan dealer mobil di Sulawesi Utara. Kondisi ini terjadi akibat lemahnya sistem pengendalian intern atas penyusunan laporan keuangan sehingga laporan keuangan perusahaan dealer mobil di Sulawesi Utara tidak dapat disusun tepat waktu.
12. Kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan dealer mobil di Sulawesi Utara. Kombinasi dari ketiga variabel independen tersebut dapat meningkatkan kinerja staf akuntansi dalam menyusun laporan keuangan tepat pada waktunya. Dengan demikian, hasil penelitian ini mendukung studi empirik yang telah dilakukan oleh Indriasari (2008).

6.4 Saran

5. Manajemen dealer mobil di Sulawesi Utara sebaiknya meningkatkan frekuensi kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat) bagi karyawan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk mewujudkan keandalan dan ketepatan waktu dalam kualitas informasi pelaporan keuangan.
6. Manajemen dealer mobil di Sulawesi Utara hendaknya mengupayakan peningkatan sistem teknologi informasi agar penyajian laporan keuangan dapat lebih dapat diandalkan dan tepat waktu.
7. Manajemen dealer mobil di Sulawesi Utara seyogyanya menerapkan akselerasi atas implementasi sistem pengendalian intern pada tiap perusahaan guna mencapai peningkatan kualitas informasi pelaporan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhar. 2007. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Penerapan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 pada Pemerintah Kota Banda Aceh*. Tesis (tidak untuk dipublikasikan). Universitas Sumatera Utara Medan.
- Bandi dan Santoso Tri Hananto. 2000. *Ketepatan Waktu atas Laporan Keuangan Perusahaan Indonesia*. Simposium Nasional Indonesia III. hal. 66-67.
- Chrisanty, Yuanita Dhiora. 2010. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur tahun 2006-2008)*. Tesis. Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro, Semarang.
- Ghozali, Imam dan Anis Chariri. 2007. *Teori Akuntansi Edisi Ketiga*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hartono. 2005. *Hubungan Teori Signalling dengan Underpricing Saham Perdana di Bursa Efek Jakarta*. Jurnal Bisnis dan Manajemen. halaman 35-48.
- Hendriksen, Eldon S. 2000. *Teori Akuntansi. Edisi Kelima*. Editor: Lindon Saputra. Alih Bahasa: Herman Wibowo. Jakarta: Interaksara.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2012. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Indriasari, Desi dan Ertambang Nahartyo. 2007. *Pengaruh Kapasitas Sumberdaya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir)*. Simposium Nasional Akuntansi XI Pontianak.
- Kharis, Abdul. 2010. *Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern pada PT. Avia Avian*. Skripsi. Fekon Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
- Mahmudi. 2007. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Prapto, Susilo. 2010. *Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten Sragen)*. Tesis. Program Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Tuasikal, Askam. 2007. *Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi dan Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik. Vol. 08, No. 01, Februari 2007.
- Warisno. 2009. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi*. Tesis. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Wilkinson, Josep W. et.al. 2000. *Accounting Information System Essential Concept and Application. 4th Edition*. New York-USA: John Willey & Sons Inc.
- Winidyaningrum, Celviana dan Rahmawati. 2010. *Pengaruh Sumberdaya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Pengendalian Intern Akuntansi (Studi Empiris di Pemda SUBOSUKAWONOSRATEN)*. Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto.

PENGARUH BELANJA PEMERINTAH TERHADAP DERAJAT DESENTRALISASI MELALUI PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO PADA KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI SULAWESI UTARA

Princilvanno Andreas Naukoko
Herman Karamoy
Agus T. Poputra

ABSTRAK

Adanya ketimpangan fiskal yang terjadi di antara daerah akibat dari desentralisasi fiskal serta tuntutan akan akuntabilitas kinerja akan penggunaan dana publik, maka diperlukan adanya pengukuran kinerja pada sektor publik dalam menggunakan dana yang dialokasikan ke dalam belanja daerah yang diharapkan dapat meningkatkan aktivitas perekonomian daerah tersebut (PDRB) sehingga akan meningkatkan kemandirian daerah yang tercermin dengan meningkatnya derajat desentralisasi. Tujuan penelitian ini; (1) menganalisis pengaruh dari Belanja Pemerintah terhadap PDRB ADHK 2000, (2) menganalisis pengaruh dari PDRB terhadap Derajat Desentralisasi, (3) menganalisis pengaruh dari Belanja Pemerintah terhadap Derajat Desentralisasi melalui PDRB. Metode analisis yang digunakan adalah analisa jalur untuk menganalisis pengaruh dari belanja pemerintah secara langsung maupun tidak langsung terhadap derajat desentralisasi. Hasil menunjukkan bahwa belanja pemerintah (X) secara signifikan berpengaruh langsung terhadap PDRB (Y) pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara. PDRB (Y) berpengaruh langsung secara signifikan terhadap derajat desentralisasi (Z) kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara. Saran yang diajukan kepada pemerintah kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sulawesi Utara untuk memperhatikan alokasi belanja kepada pos-pos belanja-belanja yang dapat meningkatkan aktivitas perekonomian di daerahnya guna menarik minat investor untuk berinvestasi di daerah tersebut, sehingga peningkatan PDRB dapat tercapai.

Kata kunci: Belanja Pemerintah, PDRB, Derajat Desentralisasi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara.

ABSTRACT

The existence of the fiscal gap that as the result of fiscal decentralization and demand for performance accountability for the use of public funds, it's necessary to measure the performance of the public sector in the use of funds allocated to the government expenditure which is expected to increase the economic activity (GDP) so that will increase the independence of the region by the increasing degree of decentralization. The purpose of this study: (1) analyze the effect of government spending to GDP ADHK 2000, (2) analyze the effect of GDP the degree of decentralization, (3) analyze the effect of government spending to GDP through degree of decentralization. The method of analysis was path analysis to analyze the effect of government spending directly or indirectly to the degree of decentralization. The results show that government spending (X) significantly directly affect GDP (Y) of districts/cities in the province of North Sulawesi. GDP (Y) is a significant directly affect the degree of decentralization (Z) of districts/cities in North Sulawesi. Suggestions submitted to the district / cities in North Sulawesi province to consider the allocation of expenditure to items expenditures could increase economic activity in the region to attract investors to invest in the area, so that an increase in GDP can be achieved.

Keywords: government spending, GDP, degree of decentralization, and the Regency / City of North Sulawesi province.

1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada era otonomi daerah menurut UU No. 32 Tahun 2004, salah satu bentuk hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah adalah desentralisasi. Maksud dari desentralisasi itu sendiri adalah sebagai implikasi langsung dari kewenangan/urusan yang diserahkan kepada daerah adalah kebutuhan dana yang cukup besar. Untuk itu, perlu diatur perimbangan keuangan antara pusat dan daerah yang dimaksudkan untuk membiayai kewenangan/urusan yang menjadi tanggung jawabnya.

Kebijakan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah dilakukan dengan mengikuti pembagian kewenangan/urusan atau *money follows function*. Hal ini berarti bahwa hubungan keuangan antara pusat dan daerah perlu diberikan pengaturan sedemikian rupa, sehingga kebutuhan pengeluaran yang akan menjadi tanggungjawab daerah dapat dibiayai dari sumber-sumber penerimaan yang ada di daerah itu sendiri (kemandirian daerah). Namun permasalahan yang sering terjadi, ekonomi daerah tak kunjung mandiri, malah sangat kuat tergantung kepada pusat. Hal ini terjadi sebagai akibat dari tidak optimalnya pengelolaan penggunaan uang yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

Penggunaan uang yang tidak optimal oleh pemerintah daerah sangat bertolak belakang dengan maksud diberlakukannya desentralisasi fiskal yang tertuang dalam UU No. 22 tahun 1999 tentang *Pemerintahan Daerah* dan UU No 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah efektif diberlakukan per Januari tahun 2001 (UU ini dalam perkembangannya diperbarui dengan dikeluarkannya UU No.32 tahun 2004 dan UU No. 33 tahun 2004). Tujuan dari diberlakukannya undang-undang ini adalah untuk memberikan peluang bagi daerah untuk menggali potensi lokal dan meningkatkan kinerja keuangannya dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Naukoko (2010) mengemukakan, dari hasil analisis rasio-rasio kemandirian, dimana pada analisis rasio-rasio kemandirian dilakukan analisis rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan daerah, dan rasio kemandirian, diketahui bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara masih belum mandiri dalam hal keuangan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Naukoko (2010) juga menunjukkan bahwa besarnya rasio ketergantungan daerah (pendapatan transfer/ total pendapatan daerah) masih lebih besar dibandingkan dengan besarnya rasio derajat desentralisasi (Pendapatan Asli Daerah/Total Pendapatan Daerah).

Nilai rasio ketergantungan daerah yang lebih besar dibandingkan dengan derajat desentralisasi daerah memiliki arti bahwa, dalam membiayai kegiatannya, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara masih lebih banyak menggunakan pendapatan transfer yang berasal dari pusat dan pinjaman-pinjaman dibandingkan dengan PAD. Keadaan ini diperkuat juga dengan besarnya rasio derajat desentralisasi (PAD/Total Pendapatan Daerah) yang dimiliki oleh provinsi Sulawesi Utara yang masih menunjukkan angka rata-rata sebesar 0,3437 atau 34,37%.

Hal ini berarti, proporsi PAD yang dimiliki oleh Provinsi Sulawesi Utara masih di bawah 50% (rata-rata 33,37% per tahun) dari total Pendapatan Daerah. Rendahnya derajat desentralisasi ini menunjukkan kurangnya jumlah PAD yang direalisasikan jika dibandingkan dengan total pendapatan daerah karena masih belum mencapai 50%. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Provinsi Sulawesi Utara masih belum mengandalkan PAD sebagai sumber pendanaan di dalam melaksanakan kegiatannya, atau masih belum dapat mencapai kemandirian keuangan daerah.

Dalam meningkatkan rasio derajat desentralisasi daerah, maka pemerintah daerah harus meningkatkan PAD yang direalisasikan pada daerah tersebut. Santosa dan Rahayu (2003) mengemukakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi PAD adalah pengeluaran pembangunan, jumlah penduduk dan PDRB. Dengan demikian, salah satu cara yang dapat dilakukan untuk dapat meningkatkan PAD suatu daerah adalah dengan meningkatkan PDRB daerah tersebut. Karena dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi suatu daerah yang tercermin dari meningkatnya PDRB, akan meningkatkan aktivitas-aktivitas ekonomi daerah tersebut. Peningkatan aktivitas-aktivitas ekonomi daerah tersebut akan meningkatkan potensi-potensi PAD yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dilihat dari pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Utara mampu mendulang pertumbuhan ekonomi yang cukup fantastis. Periode semester I / 2009 secara nasional perekonomian Indonesia tumbuh pada kisaran 1,6%, sementara itu Provinsi Sulawesi Utara mampu tumbuh 7,45%. Selanjutnya pada periode triwulan II / 2009 secara nasional perekonomian Indonesia tumbuh 2,3%, Provinsi Sulawesi Utara membukukan pertumbuhan ekonomi 8,31%. Periode Triwulan III / 2009 secara nasional perekonomian Indonesia tumbuh 3,9%, Sulawesi Utara tumbuh 7,63%, hal ini membuktikan bahwa Provinsi Sulawesi Utara patut berbangga dan kebanggaan itu tidak dapat diciptakan hanya oleh segelintir pelaku ekonomi saja atau dapat diklaim sebagai keberhasilan pemerintah daerah semata, tapi karena peran seluruh lapisan masyarakat yang berdomisili di Provinsi Sulawesi Utara.

Pertumbuhan ekonomi provinsi Sulawesi Utara mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, demikian pula dengan besarnya angka rasio-rasio kemandirian keuangan daerah. Hal ini menunjukkan adanya hubungan yang searah antara PDRB dengan kemandirian keuangan daerah di Provinsi Sulawesi Utara. Hanya saja permasalahan yang ada disini adalah besarnya angka rata-rata rasio ketergantungan daerah provinsi sulawesi utara masih lebih besar daripada besarnya angka rata-rata rasio derajat desentralisasi yaitu: $53,57\% > 33,37\%$.

Peningkatan PDRB diharapkan dapat meningkatkan kemandirian keuangan daerah Provinsi Sulawesi Utara dan hal ini tidaklah lepas dari peran pemerintah di daerah ini dengan memberikan berbagai fasilitas pendukung. Konsekuensinya, pemerintah perlu untuk memberikan alokasi belanja yang lebih besar untuk tujuan ini. Adanya desentralisasi fiskal di satu sisi Pemerintah Daerah diberikan kewenangan yang lebih besar dalam pengelolaan daerah, tetapi di sisi lain memunculkan persoalan baru, dikarenakan tingkat kesiapan fiskal daerah yang berbeda-beda.

Pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara terdapat perbedaan yang cukup jauh pada derajat desentralisasi antar beberapa daerah yang menjadi objek penelitian. Rata-rata nilai derajat desentralisasi tertinggi dimiliki oleh pemerintah Kota Manado dengan nilai rata-rata derajat desentralisasi sebesar 12,21%. Sedangkan rata-rata nilai derajat desentralisasi terendah dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dengan nilai rata-rata derajat desentralisasi sebesar 1,82%.

Besarnya perbedaan antara derajat desentralisasi di pemerintah kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Sulawesi Utara menuntut adanya kajian khusus guna mengetahui hal-hal apa saja yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pemerataan kemandirian keuangan daerah. Penelitian yang dilakukan Nanga dikutip oleh Harianto (2007) mengindikasikan terjadinya ketimpangan fiskal antar daerah dan bisa jadi hal ini dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan ekonomi daerah.

Berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Nanga yang dikutip oleh Harianto (2007) pemerintah daerah ada baiknya menggunakan sumber daya dana yang ada untuk belanja yang dapat meningkatkan kesiapan fiskal di daerahnya. Oleh karena itu, penggunaan dana untuk belanja ada baiknya dilakukan dengan efektif dan efisien dan dialokasikan untuk belanja yang dapat meningkatkan PDRB daerah tersebut sehingga desentralisasi fiskal dapat tercapai.

Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk mencapai tujuan dari desentralisasi fiskal, tentunya tidak lepas dari peran akuntansi. Peran akuntansi sendiri, tidak hanya sebatas pada akuntabilitas keuangan saja. Dimana dalam akuntabilitas keuangan, fokus utamanya adalah pelaporan yang akurat dan tepat waktu mengenai penggunaan dana publik, yang biasanya dilakukan dengan laporan yang telah diaudit secara profesional.

Peran akuntansi juga mencakup akan kinerja dari penggunaan dana publik. Oleh karena itu, diperlukan adanya penelitian tak hanya sebatas penelitian deskriptif tapi juga penelitian yang menggunakan informasi akuntansi untuk mengukur kinerja penggunaan dana sektor publik dengan rasio keuangan yang kemudian di uji secara statistik akan variabel-variabel yang mempengaruhinya. Hal ini dimaksudkan agar supaya dana sektor publik yang digunakan, tidak hanya wajar dalam segi pencatatannya saja, tetapi berguna dalam penggunaannya.

Berdasarkan pada masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, dimana terjadinya ketimpangan fiskal antar daerah sebagai akibat dari desentralisasi fiskal serta tuntutan akan akuntabilitas kinerja akan penggunaan dana publik. Maka diperlukan adanya pengukuran kinerja pada sektor publik dalam

menggunakan input berupa dana yang dialokasikan ke dalam belanja daerah yang diharapkan dapat meningkatkan aktivitas perekonomian daerah tersebut (PDRB) sehingga akan meningkatkan kemandirian daerah yang tercermin dengan meningkatnya derajat desentralisasi dari Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Utara.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Belanja Pemerintah berpengaruh terhadap?
2. Apakah PDRB berpengaruh terhadap Derajat Desentralisasi?
3. Apakah Belanja Pemerintah berpengaruh terhadap Derajat Desentralisasi melalui PDRB?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan berdasarkan pada latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Menganalisis pengaruh dari Belanja Pemerintah terhadap PDRB.
2. Menganalisis pengaruh dari PDRB terhadap Derajat Desentralisasi.
3. Menganalisis pengaruh dari Belanja Pemerintah terhadap Derajat Desentralisasi melalui PDRB.

2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Belanja Pemerintah

Belanja Pemerintah adalah pengeluaran pemerintah yang merupakan seperangkat produk yang dihasilkan yang memuat pilihan atau keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk menyediakan barang-barang publik dan pelayanan kepada masyarakat. Total belanja pemerintah merupakan penjumlahan keseluruhan dari keputusan anggaran pada masing-masing tingkatan pemerintahan (pusat/ propinsi/ daerah). Pada masing-masing tingkatan dalam pemerintahan ini dapat mempunyai keputusan akhir namun proses pembuatan yang berbeda dan hanya beberapa hal pemerintah yang di bawahnya dapat dipengaruhi oleh pemerintah yang lebih tinggi (Lee Robert, Jr and Ronald W. Johnson dikutip Rustiono, 2008:46).

Pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) adalah bagian dari kebijakan fiskal (Sukirno, 2000) yakni suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah tiap tahunnya yang tercermin dalam dokumen APBN untuk nasional dan APBD untuk daerah/regional. Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat output maupun kesempatan kerja dan memacu pertumbuhan ekonomi.

2.2 Pertumbuhan Ekonomi

Mankiw dikutip Saptomo (2008:14) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Karena pada dasarnya aktivitas perekonomian adalah suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan *output*, maka proses ini pada gilirannya akan menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi merupakan tahapan dari pembangunan ekonomi di mana pertumbuhan ekonomi adalah hasil yang dicapai dalam kegiatan ekonomi yang berlangsung dari tahun ke tahun (Ichimura S. dikutip Saptomo 2008:12). Suatu perekonomian di katakan mengalami pertumbuhan ekonomi jika jumlah produksi barang dan jasanya meningkat. (Todaro, 2000:117).

2.3 Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk membiayai aktivitasnya dengan menggunakan dari daerah itu sendiri (Mahmudi 2007 : 128). Salah satu cara untuk mengukur kemandirian suatu daerah adalah dengan menggunakan analisis rasio derajat desentralisasi.

Rasio derajat desentralisasi (DD) ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan Daerah. Derajat desentralisasi ditunjukkan dengan membandingkan jumlah PAD dengan Total Penerimaan Daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi nilai rasio ini, menunjukkan bahwa semakin tinggi kemampuan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi (Mahmudi 2007:128)

$$DD = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$$

2.4 Penelitian Terdahulu

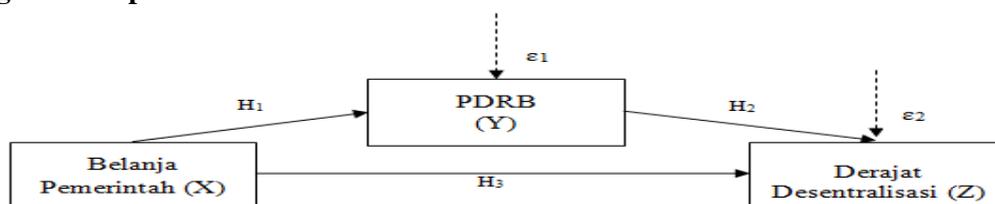
Rustiono (2008) melakukan penelitian dengan judul, “Analisis Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa angkatan kerja, investasi swasta (PMA dan PMDN) dan belanja pemerintah daerah memberi dampak positif terhadap perkembangan PDRB Propinsi Jawa Tengah. Krisis ekonomi menyebabkan perbedaan yang nyata kondisi antara sebelum dan sesudah krisis dan memberi arah yang negatif.

Sebagai upaya meningkatkan PDRB Propinsi Jawa Tengah maka diperlukan kebijakan mendorong minat berinvestasi di daerah. Pengembangan usaha sebaiknya diarahkan pada kegiatan yang bersifat padat karya agar mampu menyerap tenaga kerja sebanyak mungkin. Pada akhirnya peran pemerintah daerah melalui pengeluaran pemerintah yang dapat merangsang peningkatan variabel investasi dan penyerapan angkatan kerja diharapkan mampu meningkatkan kegiatan ekonomi daerah guna tercapainya pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan perkapita masyarakat.

Suprajitno (2003) melakukan penelitian dengan judul, “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemandirian Fiskal Daerah (Studi Kasus di Kabupaten Banjarnegara)”. Hasil penelitian mengemukakan bahwa tingkat ketergantungan fiskal antara Kabupaten Banjarnegara dengan pemerintah pusat cukup besar, hal ini ditandai dengan proporsi sumbangan dan bantuan terhadap total penerimaan daerah sebesar 74,21%. Disisi lain kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun bagi hasil pajak dan bukan pajak terhadap total pendapatan daerah sangat rendah, yaitu masing-masing sebesar 16,41% dan 9,38%.

3 KERANGKA KONSEPTUAL

3.1 Kerangka Konseptual Penelitian



3.2 Hipotesis

Belanja yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara, diharapkan akan memberikan fasilitas layanan publik kepada masyarakat. Sehingga belanja yang digunakan akan meningkatkan aktivitas-aktivitas ekonomi dalam daerahnya, yang dapat dilihat dari meningkatnya PDRB di daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara. Namun apabila dana sektor publik yang digunakan lewat belanja pemerintah tidak berhasil meningkatkan PDRB maka ada indikasi bahwa Belanja Pemerintah tersebut kurang dimanfaatkan untuk peningkatan fasilitas layanan publik kepada masyarakat. Dengan demikian dapat disimpulkan hipotesis 1 sebagai berikut.

H₁: Belanja pemerintah berpengaruh signifikan terhadap PDRB

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah yang tercermin dari meningkatnya produktivitas dan aktivitas ekonomi dalam suatu daerah (PDRB) akan memberikan potensi-potensi penerimaan daerah baik berupa pajak maupun retribusi terhadap daerah tersebut. Dengan meningkatnya PDRB maka akan meningkatkan Derajat Desentralisasi melalui pajak daerah maupun retribusi daerah sebagai akibat dari meningkatnya aktivitas ekonomi daerah tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan hipotesis 2 dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

H₂: PDRB berpengaruh signifikan terhadap Derajat Desentralisasi

Dengan adanya alokasi belanja pemerintah yang dimanfaatkan sebaik mungkin untuk meningkatkan PDRB yang pada akhirnya akan meningkatkan kemandirian keuangan daerahnya melalui peningkatan Derajat Desentralisasi. Maka hipotesis 3 dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

H₃: Belanja Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap Derajat Desentralisasi melalui PDRB.

3.3 Model Analisis

Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis jalur (*path analysis*) yaitu model analisis yang digunakan untuk menganalisis pola hubungan di antara variabel (Sarjono dan Julianita, 2011: 117). Dimana variabel yang akan dianalisis adalah belanja pemerintah dalam meningkatkan PDRB dan kemandirian keuangan melalui PAD di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara. Berikut adalah model persamaan penelitian.

$$\text{PDRB} = \alpha + \beta_1 \text{ Belanja Pemerintah (1)}$$

$$\text{DD} = \alpha + \beta_2 \text{ PDRB}^{\wedge} \text{ (2)}$$

$$\text{DD} = \alpha + \beta_3 \text{ Belanja Pemerintah (3)}$$

4 METODE PENELITIAN

4.1 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah semua pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara. Sampel dalam penelitian ini adalah sembilan kabupaten/kota yaitu Kabupaten Bolaang Mangondow, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Talaud, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Utara, Kota Manado, Kota Bitung dan Kota Tomohon. Hal ini dikarenakan kesembilan kabupaten/kota tersebut memiliki data yang mencukupi untuk dilakukan pengujian.

Kabupaten/kota yang tidak dimasukkan dalam sampel penelitian ini adalah kabupaten/kota yang masih baru, atau daerah pemekaran dari kabupaten/kota yang ada sebelumnya, sehingga ke lima kabupaten dan satu kota tersebut belum memiliki data mengenai belanja pemerintah, PDRB, dan derajat desentralisasi pada tahun 2007 dan 2008.

4.2 Klasifikasi Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Agar pembaca dan penulis memiliki pemahaman yang sama dalam penelitian ini, maka diperlukan adanya klasifikasi variabel dan definisi operasional guna mendapatkan definisi variabel dan ukuran variabel yang jelas dalam penelitian ini. Adapun variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

5. Belanja Pemerintah (X) adalah besarnya pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dalam penelitian ini, belanja pemerintah diperoleh dari besarnya total belanja pemerintah kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2007-2010 yang direalisasikan. Belanja Pemerintah dalam penelitian ini dinyatakan dalam satuan Rupiah (Rp).
6. Produk Domestik Regional Bruto ADHD (Y) adalah produktifitas dan aktivitas perekonomian suatu daerah. Dalam penelitian ini untuk dapat mengukur pengaruh dari belanja pemerintah terhadap derajat desentralisasi melalui PDRB maka digunakan nilai PDRB ADHD. Hal ini

dilakukan dengan pertimbangan akan nilai dari belanja pemerintah adalah nilai riil. PDRB ADHB dinyatakan dalam satuan Rupiah (Rp).

7. Derajat Desentralisasi (Z) adalah Rasio yang menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan Daerah. Derajat desentralisasi ditunjukkan dengan membandingkan jumlah PAD dengan Total Penerimaan Daerah. Semakin tinggi nilai rasio ini, menunjukkan bahwa semakin tinggi kemampuan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Rasio ini dinyatakan dalam satuan persentase (%).

4.3 Cara Pengolahan dan Analisis Data

1. Uji Asumsi Klasik
2. Uji korelasi dan koefisien determinasi
3. *Path analysis*

5 ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

5.1 Uji Asumsi Klasik Data

Model analisis regresi linear dapat disebut sebagai model yang baik jika memenuhi asumsi klasik. Oleh karena itu, uji asumsi klasik sangat diperlukan sebelum melakukan analisis regresi. Uji asumsi klasik terdiri atas uji normalitas, uji heterokedastisitas, uji autokorelasi, dan uji multikorelasi (Sarjono dan Julianita, 2011:53).

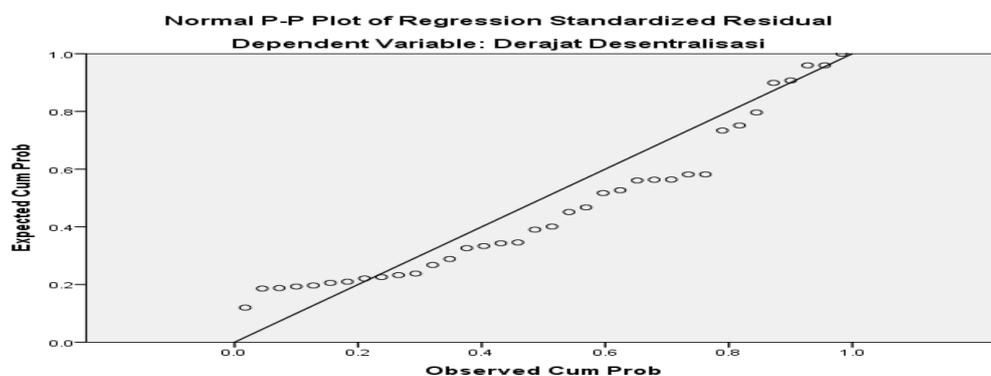
Karena dalam penelitian ini digunakan tiga persamaan untuk menjelaskan pengaruh belanja pemerintah terhadap derajat desentralisasi melalui PDRB ADHB pada kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Utara, maka dalam penelitian ini dilakukan tiga kali pengujian asumsi klasik kecuali asumsi klasik uji multikorelasi.

1 Uji Normalitas

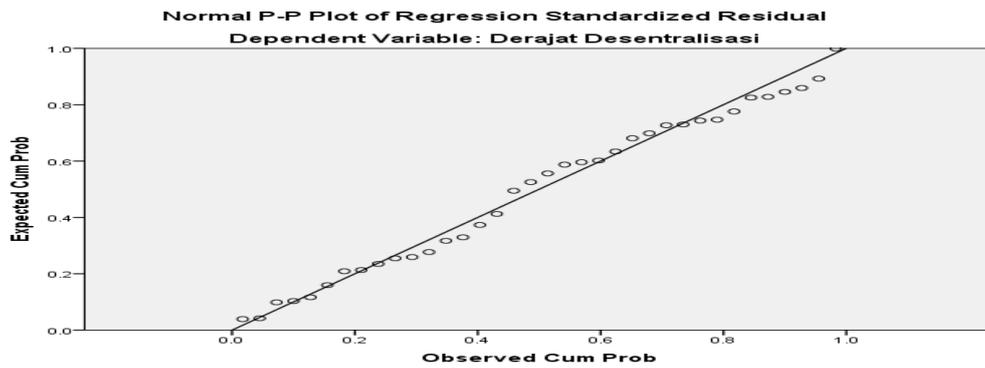
Pengujian normalitas data dalam penelitian ini digunakan analisis grafik. Berikut hasil grafik pengujian normalitas data untuk persamaan sub struktural 1, persamaan sub struktural 2 dan persamaan sub struktural 3.



Gambar 5.1 Grafik Normalitas Data Persamaan sub struktural 1



Gambar 5.2 Grafik Normalitas Data Persamaan sub struktural 2



Gambar 5.3 Grafik Normalitas Data Persamaan sub struktural 3

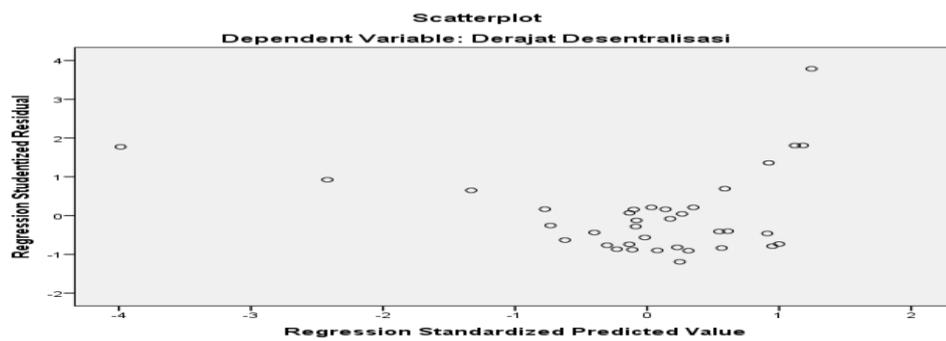
Gambar 5.1, 5.2 dan 5.3 menunjukkan bahwa titik-titik data menyebar mengikuti sumbu diagonal dari grafik. Berdasarkan pada hasil grafik tersebut dapat dikatakan bahwa ketiga persamaan dalam penelitian ini memenuhi asumsi klasik uji normalitas.

2 Uji Heterokedastisitas

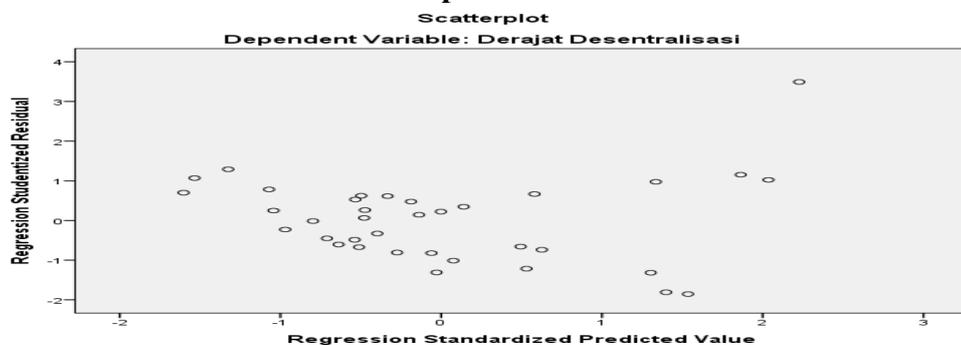
Pengujian heteroskedastisitas data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan grafik *Scatterplot*. Berikut adalah grafik *scatterplot* untuk persamaan sub struktural 1, 2 dan 3.



Gambar 5.4 Grafik Scatterplot Persamaan sub struktural 1



Gambar 5.5 Grafik Scatterplot Persamaan sub struktural 2



Gambar 5.6 Grafik Scatterplot Persamaan sub struktural 3

Berdasarkan pada hasil olahan data SPSS, gambar 5.4, 5.5 dan 5.6 menunjukkan titik-titik data menyebar di atas maupun di bawah angka nol pada sumbu Y. Hasil ini menyatakan bahwa model regresi linear untuk persamaan sub struktural 1, 2 dan 3 memenuhi asumsi klasik uji heteroskedastisitas data.

3 Uji Autokorelasi

Pengujian ini dilakukan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengguna pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (Ghozali dalam Sarjono dan Julianti 2011:81). Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain.

Persamaan regresi linear yang baik adalah persamaan yang bebas dari asumsi klasik uji autokorelasi. Pengujian autokorelasi dilakukan dengan menggunakan nilai Durbin-Watson (DW) dari hasil output *Model Summary*.

Tabel 5.1 Durbin-Watson Persamaan sub struktural 1, 2 dan 3

Model	Durbin-Watson
1	2.366
2	1.900
3	1.771

Hasil analisis data untuk persamaan sub struktural 1 diperoleh nilai DW sebesar 2,366, untuk persamaan sub struktural 2 diperoleh nilai DW sebesar 1,900, dan untuk persamaan sub struktural 3 diperoleh nilai DW sebesar 1.771. Apabila tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$ untuk $n = 36$ dan $k = 1$ maka nilai dU dan dL untuk pengujian autokorelasi adalah $dU = 1,5245$; $dL = 1,4107$.

Pengujian untuk uji autokorelasi persamaan sub struktural 1 menunjukkan hasil bahwa persamaan sub struktural 1 memenuhi syarat asumsi klasik uji autokorelasi $dU < DW < 4 - dL$ ($1,525 < 2,366 < 2,589$). Hal ini berarti persamaan sub struktural 1 bebas dari autokorelasi.

Pengujian untuk uji autokorelasi persamaan sub struktural 2 juga menunjukkan hasil bahwa persamaan sub struktural 2 memenuhi syarat asumsi klasik uji autokorelasi $dU < DW < 4 - dL$ ($1,525 < 1,900 < 2,589$). Hal ini berarti persamaan sub struktural 2 bebas dari autokorelasi.

Pengujian untuk uji autokorelasi persamaan sub struktural 3 menunjukkan hasil bahwa persamaan sub struktural 3 memenuhi syarat asumsi klasik uji autokorelasi $dU < DW < 4 - dL$ ($1,525 < 1,771 < 2,589$). Hal ini berarti persamaan sub struktural 1 bebas dari autokorelasi.

Berdasarkan pada pengujian normalitas, heterokedastisitas, dan autokorelasi yang telah dipaparkan sebelumnya, maka persamaan sub struktural 1, persamaan sub struktural 2 dan persamaan sub struktural 3 dinyatakan telah memenuhi asumsi klasik. Persamaan sub struktural 1, 2 dan 3 yang telah memenuhi persyaratan asumsi klasik telah dinyatakan sebagai persamaan linear yang baik untuk digunakan.

5.2 Hubungan Belanja Pemerintah, PDRB dengan Derajat Desentralisasi

Belanja pemerintah merupakan salah satu faktor yang menentukan besarnya PDRB suatu daerah dan dengan meningkatnya PDRB pada akhirnya akan meningkatkan derajat desentralisasi daerah tersebut. Berapa besar hubungan dari ketiga variabel tersebut dapat dilihat pada hasil olahan data SPSS, khususnya pada Tabel *correlations*. Hasil olahan data SPSS yang menunjukkan hubungan antara belanja pemerintah dengan PDRB dapat dilihat pada Tabel 5.2.

Tabel 5.2 Korelasi Belanja Pemerintah dan PDRB

		PDRB ADHB	Belanja Pemerintah
Pearson Correlation	PDRB ADHB	1.000	.787
	Belanja Pemerintah	.787	1.000
Sig. (1-tailed)	PDRB ADHB	.	.000
	Belanja Pemerintah	.000	.
N	PDRB ADHB	36	36
	Belanja Pemerintah	36	36

Tabel 5.2 menunjukkan bahwa adanya hubungan antara belanja pemerintah dengan PDRB. Besarnya hubungan belanja pemerintah dengan PDRB adalah sebesar 0,787. Hal ini berarti hubungan antara belanja pemerintah dengan PDRB adalah sangat kuat dan bersifat positif. Hubungan dari variabel PDRB dan derajat desentralisasi dapat dilihat pada Tabel 5.3.

Tabel 5.3 Korelasi PDRB dan Derajat Desentralisasi

		Derajat Desentralisasi	PDRB ADHB*
Pearson Correlation	Derajat Desentralisasi	1.000	.452
	PDRB ADHB*	.452	1.000
Sig. (1-tailed)	Derajat Desentralisasi	.	.003
	PDRB ADHB*	.003	.
N	Derajat Desentralisasi	36	36
	PDRB ADHB*	36	36

Data pada Tabel 5.3 menunjukkan bahwa besarnya hubungan antara variabel PDRB dengan derajat desentralisasi adalah sebesar 0,452. Hal ini berarti hubungan antara PDRB yang diperoleh dengan persamaan 1 dengan derajat desentralisasi adalah lemah dan bersifat positif. Sedangkan untuk hubungan antara belanja pemerintah dan derajat dapat dilihat dalam Tabel 5.4.

Tabel 5.4 Korelasi Belanja Pemerintah dan Derajat Desentralisasi

		Derajat Desentralisasi	Belanja Pemerintah
Pearson Correlation	Derajat Desentralisasi	1.000	.703
	Belanja Pemerintah	.703	1.000
Sig. (1-tailed)	Derajat Desentralisasi	.	.000
	Belanja Pemerintah	.000	.
N	Derajat Desentralisasi	36	36
	Belanja Pemerintah	36	36

Data pada Tabel 5.4 menunjukkan bahwa besarnya hubungan antara variabel belanja pemerintah dengan derajat desentralisasi adalah sebesar 0,703. Hal ini berarti hubungan antara belanja pemerintah dengan derajat desentralisasi adalah kuat dan bersifat positif.

Berdasarkan pada hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa variabel belanja pemerintah memiliki hubungan yang sangat kuat dengan PDRB. Selain itu, variabel belanja pemerintah memiliki hubungan yang kuat dengan derajat desentralisasi, dan variabel PDRB memiliki hubungan yang lemah dengan derajat desentralisasi.

Hubungan diantara variabel, mengindikasikan adanya pengaruh diantara variabel-variabel tersebut. Apabila diantara variabel tidak memiliki hubungan, maka dapat dipastikan tidak akan ada pengaruh diantara variabel tersebut. Suatu variabel yang memiliki hubungan dengan variabel lain belum tentu mempunyai pengaruh. Namun demikian, jika suatu variabel mempunyai pengaruh terhadap variabel lain maka dapat dipastikan variabel tersebut mempunyai hubungan (Sarjono dan Julianita, 2011:157).

5.3 Pengaruh Belanja Pemerintah terhadap Derajat Desentralisasi melalui PDRB pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara

Pengaruh dari belanja pemerintah terhadap derajat desentralisasi melalui PDRB pada kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Utara diukur dengan menggunakan 3 persamaan. Persamaan sub struktural 1 digunakan untuk mengukur pengaruh langsung dari belanja pemerintah terhadap PDRB. Persamaan sub struktural 2 digunakan untuk mengukur pengaruh langsung dari PDRB terhadap derajat desentralisasi. Sedangkan pengaruh langsung dari belanja pemerintah terhadap derajat desentralisasi diukur dengan menggunakan persamaan sub struktural 3.

1 Koefisien Jalur dari Belanja Pemerintah terhadap PDRB

Pedekatan konsumsi dalam menentukan besarnya PDRB menunjukkan bahwa, salah satu faktor yang mempengaruhi besarnya PDRB suatu daerah adalah konsumsi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Pengaruh langsung dari belanja pemerintah terhadap PDRB di sembilan kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Utara dirumuskan dalam persamaan sub struktural 1 ($Y = \rho_{yx}X$

+ $\rho_y \varepsilon_1$). Besarnya nilai koefisien jalur dari persamaan sub struktural 1 dapat dirumuskan seperti $Y = 0,787X + 0,617$. Berikut adalah gambaran persamaan sub struktural 1 beserta dengan koefisien jalur.



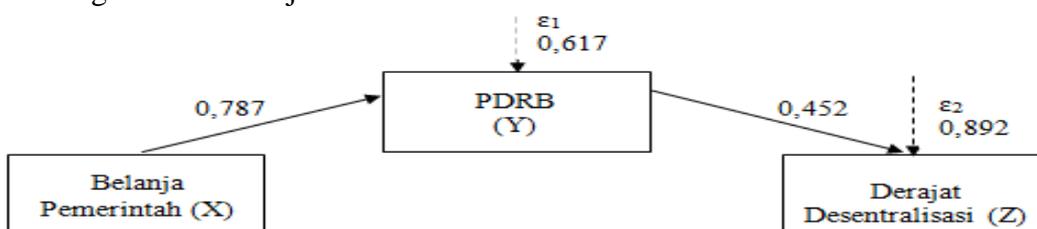
Gambar 5.6 Persamaan Sub Struktural 1 dengan Koefisien Jalur

2 Koefisien Jalur dari PDRB terhadap Derajat Desentralisasi

Peningkatan PDRB merupakan cerminan dari meningkatnya aktivitas ekonomi di suatu daerah, dengan meningkatnya aktivitas perekonomian di daerah tersebut, semakin meningkat juga pos-pos potensial untuk dijadikan sumber bagi PAD di daerah tersebut. Meningkatnya PAD akan mendorong peningkatan derajat desentralisasi daerah tersebut.

PDRB dalam penelitian ini berperan sebagai variabel moderating. Variabel moderating adalah variabel yang mempengaruhi hubungan antara variabel independen dan variabel dependen menjadi hubungan tidak langsung, atau dapat diartikan sebagai variabel yang terletak di antara variabel independen dan dependen sehingga variabel independen tidak langsung mempengaruhi variabel dependen (Sarjono dan Julianita, 2011:158). Peran PDRB merupakan variabel yang mempengaruhi hubungan antara belanja pemerintah dengan derajat desentralisasi menjadi hubungan tidak langsung.

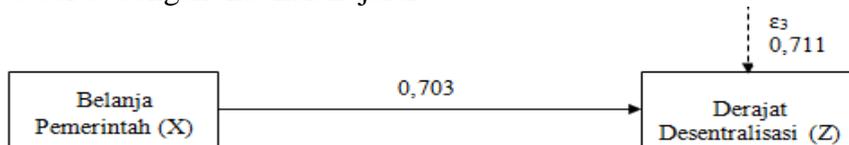
Pengaruh langsung PDRB terhadap derajat desentralisasi di sembilan kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Utara dirumuskan dalam persamaan sub struktural 2 ($Z = \rho_{zy}\hat{Y} + \rho_z\varepsilon_2$). Besarnya nilai masing-masing koefisien jalur yang ada di persamaan sub struktural 2 dapat dirumuskan seperti $Z = 0,452\hat{Y} + 0,892$. Berikut adalah gambaran persamaan sub struktural 2 beserta dengan koefisien jalur.



Gambar 5.7 Persamaan Sub Struktural 2 dengan Koefisien Jalur

3 Koefisien Jalur dari Belanja Pemerintah terhadap Derajat Desentralisasi

Pengaruh langsung dari belanja pemerintah terhadap derajat desentralisasi di sembilan kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Utara dirumuskan dalam persamaan sub struktural 3 ($Z = \rho_{zx}X + \rho_z\varepsilon_3$). Besarnya nilai masing-masing koefisien jalur yang ada di persamaan sub struktural 3 dapat dirumuskan seperti $Z = 0,703X + 0,711$. Berikut adalah gambaran persamaan sub struktural 3 beserta dengan koefisien jalur.



Gambar 5.8 Persamaan Sub Struktural 3 dengan Koefisien Jalur

5.4 Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan, dengan melihat besarnya koefisien jalur dari pengaruh belanja pemerintah terhadap derajat desentralisasi melalui PDRB pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara dapat diketahui besarnya pengaruh langsung dan tidak langsung dari belanja pemerintah dan PDRB terhadap derajat desentralisasi. Besarnya koefisien jalur dari yang menjelaskan pengaruh

langsung dan tidak langsung dari belanja pemerintah dan PDRB terhadap derajat desentralisasi dapat dilihat pada Tabel 5.5 berikut.

Tabel 5.5 Koefisien Jalur Pengaruh Langsung, Tidak Langsung, Pengaruh Total dari Belanja Pemerintah (X) dan PDRB (Y) terhadap Derajat Desentralisasi (Z)

Variabel	Koefisien Jalur	Pengaruh	
		Langsung	Tidak Langsung
XY	0,787	0,787	-
XZ	0,703	0,703	$0,787 \times 0,452 = 0,355$
$\hat{Y}Z$	0,452	0,452	-

Besarnya pengaruh dari belanja pemerintah (X) terhadap derajat desentralisasi (Z) melalui PDRB (Y) kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara dapat dilihat pada besarnya koefisien proporsi. Nilai koefisien proporsi adalah hasil pengkuadratan dari nilai koefisien jalur. Besarnya nilai koefisien proporsi adalah besarnya pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen pada analisis jalur.

Pengaruh langsung dari belanja pemerintah (X) terhadap PDRB (Y) pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara adalah sebesar $(0,787^2)$ atau berkontribusi sebesar 61,9%. Sisanya sebesar 38,1% nilai PDRB kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara dipengaruhi oleh variabel-variabel lain di luar penelitian dengan asumsi ceteris paribus.

Pengaruh langsung dari belanja pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara bersifat positif dan signifikan terhadap tinggi rendahnya PDRB pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara. Hal ini berarti, tinggi rendahnya PDRB pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara dijelaskan oleh belanja pemerintah kabupaten/kota. Dimana, belanja pemerintah yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu total belanja pemerintah baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung pada tahun 2007-2010 yang terealisasi.

Berdasarkan hasil penelitian, untuk mengoptimalkan realisasi PDRB maka pemerintah perlu untuk memperhatikan alokasi belanja pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara. Hal ini dikarenakan, belanja pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara.

Temuan ini diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan untuk menganalisis pengaruh investasi, tenaga kerja dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah oleh Rustiono (2008). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rustiono mengemukakan bahwa, belanja pemerintah memberikan dampak positif terhadap perkembangan PDRB.

PDRB (\hat{Y}) mempengaruhi derajat desentralisasi (Z) kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara secara langsung sebesar $(0,452^2)$ atau berkontribusi sebesar 20,4%. Peningkatan PDRB yang merupakan gambaran peningkatan atas aktivitas perekonomian suatu daerah akan meningkatkan derajat desentralisasi. Kontribusi dari PDRB secara langsung terhadap adalah sebesar 20,4% dari derajat desentralisasi.

Pengaruh langsung dari PDRB kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara bersifat positif dan signifikan terhadap tinggi rendahnya derajat desentralisasi pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara. Hal ini berarti, tinggi rendahnya derajat desentralisasi yang dimiliki oleh kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara dijelaskan oleh PDRB kabupaten/kota. Peningkatan aktivitas perekonomian suatu daerah yang tercermin dari realisasi PDRB, akan memberikan potensi-potensi penerimaan daerah baik berupa pajak daerah maupun retribusi daerah tersebut, yang pada akhirnya akan meningkatkan derajat desentralisasi di kabupaten/kota Sulawesi Utara.

Penelitian yang dilakukan oleh Suprajitno (2003) juga mendukung akan hasil penelitian ini, dimana hasil penelitiannya mengemukakan pertumbuhan ekonomi merupakan faktor penting untuk meningkatkan derajat kemandirian fiskal, yang dimana dalam penelitian ini merupakan variabel derajat

desentralisasi (Z). Dengan demikian, hasil penelitian ini memiliki hasil yang serupa dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Suprajitno (2003).

Berdasarkan hasil penelitian, untuk meningkatkan derajat desentralisasi maka pemerintah perlu untuk memperhatikan perkembangan aktivitas perekonomian yang tercermin dari perkembangan PDRB kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara. Pentingnya perhatian pemerintah akan perkembangan aktivitas perekonomian di daerahnya dikarenakan DPRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap derajat desentralisasi, sehingga salah satu faktor yang dapat meningkatkan derajat desentralisasi daerah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara adalah PDRB.

Pengaruh langsung Belanja pemerintah (X) terhadap derajat desentralisasi (Z) kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara bersifat positif dan signifikan sebesar $(0,703^2)$ atau berkontribusi sebesar 49,4%. Pengaruh tidak langsung Belanja pemerintah (X) terhadap derajat desentralisasi (Z) kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara bersifat positif dan signifikan. Besarnya pengaruh tidak langsung dari belanja pemerintah (X) terhadap derajat desentralisasi (Z) kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara adalah sebesar $(0,355^2)$ atau berkontribusi sebesar 12,6%.

Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pengaruh langsung dari belanja pemerintah terhadap derajat desentralisasi dan pengaruh tidak langsung dari belanja pemerintah terhadap derajat desentralisasi bersifat positif dan signifikan. Hal ini berarti besarnya belanja pemerintah yang dialokasikan akan meningkatkan derajat desentralisasi daerah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara baik secara langsung maupun tidak langsung.

Secara langsung pengaruh belanja pemerintah mempengaruhi derajat desentralisasi dapat dilihat dari belanja pemerintah yang dialokasikan untuk BUMD di daerah tersebut. Pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara untuk mengoptimalkan derajat desentralisasi maka harus memperhatikan alokasi belanja seperti belanja untuk BUMD di daerah tersebut. Hal ini karena BUMD merupakan sumber PAD, meningkatnya PAD akan meningkatkan derajat desentralisasi daerah tersebut.

Secara tidak langsung pengaruh belanja pemerintah bersifat positif dan signifikan mempengaruhi derajat desentralisasi. Pengaruh ini menunjukkan peran dari PDRB sebagai variabel *moderating* bersifat positif dan signifikan atas derajat desentralisasi.

Pengaruh total dari belanja pemerintah (X) terhadap derajat desentralisasi (Z) yang melalui PDRB (Y) kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara adalah sebesar 62,0% (49,4% + 12,6%). Sisanya sebesar 48,0% nilai derajat desentralisasi dipengaruhi oleh variabel-variabel lain diluar penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan pengaruh total dari belanja pemerintah terhadap derajat desentralisasi melalui PDRB adalah bersifat positif dan signifikan. Hal ini berarti, tinggi rendahnya derajat desentralisasi yang dimiliki oleh kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara dijelaskan belanja pemerintah melalui PDRB kabupaten/kota. Belanja pemerintah yang direalisasikan oleh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara dapat meningkatkan derajat desentralisasi masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara melalui PDRB.

Belanja pemerintah akan meningkatkan aktivitas perekonomian di daerahnya. Belanja pemerintah tersebut baik belanja langsung maupun tidak langsung terbukti dapat meningkatkan aktivitas perekonomian di daerah masing-masing. Total belanja pemerintah dapat mempengaruhi aktivitas perekonomian dengan cara alokasi belanja pemerintah untuk infrastruktur digunakan untuk memberikan sarana dan prasarana kepada masyarakat, sehingga menarik para investor baik dari dalam maupun luar daerah untuk berinvestasi di daerah tersebut.

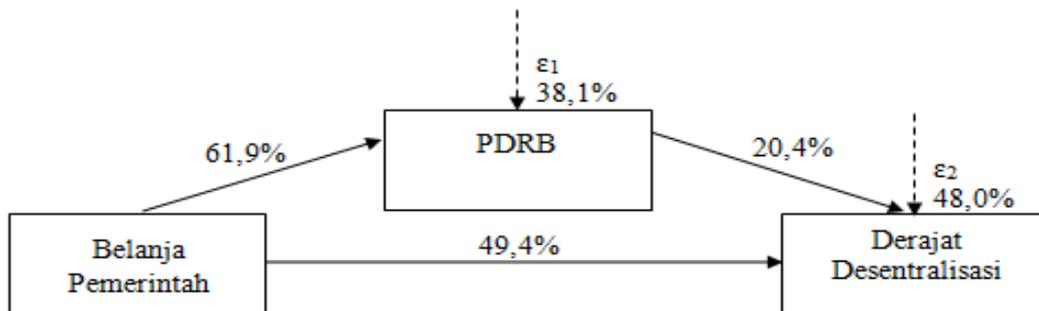
Ketambahan investasi di daerah tersebut akan mendorong aktivitas perekonomian yang tercermin dari PDRB di daerah tersebut untuk berkembang dan mengalami peningkatan. Meningkatnya aktivitas perekonomian di daerah tersebut akan memberikan potensi baru bagi pos-pos PAD baik melalui pajak daerah maupun retribusi daerah, yang berarti meningkatnya derajat desentralisasi pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara.

Berdasarkan pada hasil penelitian, maka dapat diketahui bahwa ketiga hipotesis dalam penelitian ini dapat diterima. Besarnya pengaruh langsung dari belanja pemerintah terhadap PDRB, pengaruh

langsung dari PDRB terhadap derajat desentralisasi, serta pengaruh total dari belanja pemerintah secara langsung dan tidak langsung terhadap derajat desentralisasi melalui PDRB dapat dilihat pada Tabel 5.15 dan Gambar 5.10.

Tabel 5.6 Koefisien Proporsi Pengaruh Langsung, Tidak Langsung, Pengaruh Total dari Belanja Pemerintah (X) dan PDRB (Y) terhadap Derajat Desentralisasi (Z)

Variabel	Koefisien Jalur (%)	Pengaruh (%)		
		Langsung	Tidak Langsung	Total
XY	61,9	61,9	-	61,9
XZ	49,4	49,4	12,6%	62,0
YZ	20,4	20,4	-	20,4
ε_1	38,1	38,1	-	38,1
ε_2	48,0	48,0	-	48,0



Gambar 5.9 Pengaruh Belanja Pemerintah terhadap Derajat Desentralisasi melalui PDRB

6 SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan beberapa kesimpulan sebagai berikut.

3. Belanja pemerintah berpengaruh signifikan terhadap PDRB kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara. Pengaruh dari belanja pemerintah terhadap PDRB kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara adalah bersifat positif. Hal ini berarti, peningkatan penggunaan dana sektor publik yang digunakan lewat belanja pemerintah dapat meningkatkan PDRB pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara.
4. PDRB berpengaruh signifikan terhadap derajat desentralisasi. Pengaruh dari PDRB terhadap derajat desentralisasi bersifat positif. Hal ini berarti peningkatan aktivitas perekonomian yang tercermin dari PDRB kabupaten/kota di Provinsi dapat meningkatkan kemandirian daerah tersebut yang dapat dilihat dari meningkatnya derajat desentralisasi di daerah tersebut.
5. Secara tidak langsung pengaruh belanja pemerintah bersifat positif dan signifikan mempengaruhi derajat desentralisasi. Pengaruh ini menunjukkan peran dari PDRB sebagai variabel *moderating* antara belanja pemerintah dengan derajat desentralisasi memiliki pengaruh yang bersifat positif dan signifikan atas derajat desentralisasi. Hal ini berarti, belanja pemerintah yang direalisasikan oleh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara dapat meningkatkan PDRB yang pada akhirnya akan meningkatkan derajat desentralisasi masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara.

6.2 Saran

Berdasarkan pada kesimpulan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka beberapa saran yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut.

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja pemerintah berpengaruh secara langsung terhadap derajat desentralisasi, dan berpengaruh secara tidak langsung terhadap derajat desentralisasi melalui PDRB. Oleh karena itu, bagi pemerintah daerah kabupaten/kota agar dapat meningkatkan derajat desentralisasi daerah, perlu adanya perhatian khusus akan peran pemerintah melalui belanja pemerintah. Perhatian khusus dapat dilakukan baik dari segi

akuntansi maupun perencanaan pembangunan. Dilihat dari segi akuntansi sendiri, pemerintah sangatlah disarankan agar dalam pengalokasian belanja, pemerintah tetap memperhatikan akuntabilitas dari penggunaan dana tersebut. Hal ini dilakukan karena pentingnya kontribusi dari belanja pemerintah terhadap derajat desentralisasi melalui PDRB di daerah kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Utara.

2. Total kontribusi dari belanja pemerintah terhadap derajat desentralisasi melalui PDRB adalah sebesar 62,0%. Oleh karena itu, sangatlah disarankan kepada pemerintah kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sulawesi Utara dalam perencanaan pembangunannya untuk memperhatikan alokasi belanja kepada pos-pos belanja-belanja yang dapat meningkatkan aktivitas perekonomian di daerahnya. Belanja-belanja tersebut pada dasarnya berupa alokasi kepada infrastruktur-infrastruktur pendukung, guna menarik minat investor untuk berinvestasi di daerah tersebut, sehingga peningkatan PDRB dapat tercapai.
3. Implikasi yang mungkin dapat diperhatikan adalah peran pemerintah melalui belanja di kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Utara adalah dengan tetap menjaga perputaran uang di dalam daerahnya. Hal ini dapat ditempuh dengan cara lebih banyak mengalokasikan belanja untuk pengembangan daerah, pengembangan sektor-sektor perekonomian daerah sehingga dapat meningkatkan tingkat produksi di daerahnya. Meningkatkan tingkat produksi di daerah, dapat meningkatkan aktivitas perekonomian, yang pada akhirnya akan memberikan pengembalian kepada penerimaan daerahnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Hariato David dan Adi Priyo Hari. 2007. *Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah Dan Pendapatan Per Kapita*. Jurnal Simposium Nasional Akuntansi X. ASP-15.
- Mahmudi. 2007. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. UPP STIM YKPN: Yogyakarta.
- Naukoko Princilvanno Andreas. 2010. *Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara*. Tesis Program Studi Magister Ekonomi dan Pembangunan Universitas Sam Ratulangi. Manado
- . 2010. *Analisis Rasio Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara*. Laporan Akhir Program Profesi Akuntansi Universitas Sam Ratulangi. Manado.
- Rustiono Deddy. 2008. *Analisis Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Propinsi Jawa Tengah*. Tesis Program Studi Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Diponegoro. Semarang.
- Saptomo Tjahjanto. 2008. *Pengaruh Pertumbuhan Investasi Publik, Pertumbuhan Investasi Swasta, Dan Pertumbuhan Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Semarang Periode 1992-2006*. Tesis Program Studi Magister Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Diponegoro. Semarang
- Sarjono Haryadi, dan Julianita Winda. 2011. *SPSS vs LISREL*. Penerbit Salemba Empat: Jakarta.
- Sukirno, Sadono. 2000 *Makroekonomi Modern:Perkembangan Pemikiran Dari Klasik Hingga Keynesian Baru*. Raja Grafindo Pustaka: Jakarta
- Todaro, Michael P. 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Terjemahan, Edisi Ketujuh, Jilid 1, Penerbit Erlangga: Jakarta.
- Undang-undang RI No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Penerbit Fokusmedia: Bandung.
- Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Penerbit Fokusmedia: Bandung.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Penerbit Fokusmedia: Bandung.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Penerbit Fokusmedia: Bandung.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2007, Fokusmedia: Bandung.

ANALISIS PENGARUH MOTIVASI TERHADAP MINAT MAHASISWA JURUSAN AKUNTANSI UNTUK MENGIKUTI PENDIDIKAN PADA PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI

Rizha Dewi Tangkudung
Jenny Morasa
Agus T. Poputra

ABSTRAK

Perkembangan dunia usaha menimbulkan persaingan dan tantangan tersendiri bagi para pelaku bisnis. Menghadapi perkembangan tersebut, dunia bisnis harus selalu didukung dengan pendidikan akuntansi yang dapat menghasilkan lulusan sarjana yang berkualitas dan siap untuk bersaing di dunia kerja. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh dari motivasi kualitas, motivasi karir, motivasi sosial, motivasi mencari ilmu terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti pendidikan pada program magister akuntansi. Hasil penelitian secara statistik memberikan kesimpulan bahwa motivasi kualitas, motivasi karir, motivasi sosial, motivasi mencari ilmu secara bersama-sama berpengaruh terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti pendidikan pada program magister akuntansi, namun secara parsial, motivasi karir dan motivasi mencari ilmu secara signifikan tidak berpengaruh terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti pendidikan pada program magister akuntansi.

Kata Kunci : Motivasi, Akuntansi.

ABSTRACT

Business developments cause challenge and competition for many businesses. In order to deal with these, business should always supported by accounting education which generate qualified graduates and ready to compete in the world of work. This research aims to prove the influence of quality motivation, career motivation, social motivation, and knowledge seeking motivation toward accounting student's interest for education in master of accounting program. The results were statistically lead to the conclusion that quality motivation, career motivation, social motivation, seeking knowledge motivation simultaneously affect accounting student's interest for education in master of accounting program, however partially, career motivation and knowledge seeking motivation did not significantly affect the accounting student's interest for education in master of accounting program.

Keywords : Motivation, Accounting.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perkembangan dalam dunia usaha menimbulkan persaingan dan tantangan tersendiri bagi para pelaku bisnis dan dampak dari perkembangan ini secara tidak langsung memberikan peluang atau kesempatan lapangan pekerjaan yang semakin beragam untuk semua angkatan kerja (Gultom,2007). Guna menghadapi perkembangan tersebut, dunia bisnis harus selalu didukung dengan pendidikan akuntansi yang dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas dan siap untuk bersaing di dunia kerja. Oleh sebab itu, diperlukan desain pendidikan akuntansi yang relevan dengan dunia kerja, dalam hal ini dunia kerja bagi sarjana akuntansi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, uang yang dikelola semakin besar disertai dengan kemajuan teknologi yang pesat, maka dalam hal ini juga perlu adanya peningkatan sumber daya manusia. Hal ini menyebabkan kewajaran penyajian informasi keuangan tergantung pada sumber daya manusia di bidang akuntansi.

Program Magister Akuntansi (Program MAKSI) merupakan jenjang pendidikan lanjutan dari S1 akuntansi. Dalam Akademi Maranatha, Program MAKSI bertujuan menjadi wahana untuk

menumbuhkan dan mengembangkan citra profesionalisme bagi para lulusannya, yaitu mahir dalam *hardskill* (konsep aplikasi pengetahuan akuntansi) dan *softskill* (*leadership, strategic thinking, critical thinking, public speaking*). Kemampuan kepemimpinan, *strategic thinking, critical thinking*, dan *public speaking*, merupakan pengetahuan yang akan meningkatkan kualitas dari seorang individu, yang nantinya akan menjadi motivasi kualitas dari individu tersebut.

Kejelasan motivasi yang mendorong minat dari mahasiswa untuk mengikuti program perkuliahan akan berguna dalam penyusunan materi kuliah, sehingga materi yang disampaikan bisa efektif dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Perencanaan penyusunan program kuliah merupakan hal yang penting untuk mendukung pencapaian ekspektasi dari mahasiswa. Untuk memperoleh pengetahuan dan kemampuan dibidang akuntansi yang sesuai dengan tuntutan perekonomian dan teknologi saat ini, maka mahasiswa haruslah mempunyai motivasi untuk mengikuti program pendidikan akuntansi yang lebih lanjut setelah menempuh jenjang S-1.

Pendidikan Strata dua (S2) bidang akuntansi dapat dijalani selama 16 hingga 20 bulan saja. Hal ini menjadi salah satu pertimbangan bagi calon mahasiswa dan orang tua, apakah akan melanjutkan pendidikan ke PPAk atau ke program MAKSI, maupun mengambil dual program. Hal ini tentunya juga akan dipengaruhi oleh berbagai motivasi, di antaranya adalah motivasi kualitas, karir dan ekonomi (Benny dan Yuskar, 2006:1).

Berdasarkan nomor SK 1713/H12/PP2010 Program MAKSI telah diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulangi sejak Januari 2010. Berdasarkan SK tersebut, otomatis telah membuat Fakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulangi sebagai universitas negeri pertama di Manado yang menyelenggarakan Program MAKSI, dan hal ini tentu saja memberikan nilai tambah bagi Fakultas Ekonomi. Sejak didirikan pada tahun 2010, sebanyak 85 mahasiswa telah mendaftar pada Program MAKSI, dan telah mencapai 5 angkatan sejak penulisan ini dilakukan.

Melihat jumlah yang ada mengindikasikan bahwa adanya motivasi dari mahasiswa untuk mengikuti pendidikan pada program tersebut, dengan demikian penulis tertarik untuk mengadakan penelitian pada Program MAKSI. Mahasiswa yang mendaftar berasal dari Manado, Ternate, Sorong dan daerah sekitarnya. Dikarenakan sebagian besar mahasiswa yang mendaftar berasal dari daerah Manado yaitu sebanyak 70 mahasiswa, maka objek dari penelitian ini dibatasi pada mahasiswa akuntansi pada universitas di daerah Manado, yaitu Universitas Sam Ratulangi, Universitas Katolik De La Salle dan STIE Eben Haezar.

Beberapa penelitian sebelumnya mengenai motivasi dilakukan pada PPAk, namun penulis tertarik untuk mengadakan penelitian kembali pada Program MAKSI. Dalam penelitian ini akan diteliti mengenai pengaruh dari beberapa motivasi yang dapat mempengaruhi minat dari mahasiswa untuk mengikuti pendidikan Program MAKSI. Motivasi-motivasi tersebut adalah motivasi karier, motivasi sosial, motivasi kualitas, dan motivasi mencari ilmu. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka peneliti tertarik mengadakan penelitian dengan judul **“Analisis Pengaruh Motivasi Terhadap Minat Mahasiswa Jurusan Akuntansi Untuk Mengikuti Pendidikan Pada Program Magister Akuntansi”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan fenomena pada latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut.

1. Apakah motivasi kualitas berpengaruh terhadap minat mahasiswa jurusan akuntansi untuk mengikuti pendidikan pada Program MAKSI?
2. Apakah motivasi karir berpengaruh terhadap minat mahasiswa jurusan akuntansi untuk mengikuti pendidikan pada Program MAKSI?
3. Apakah motivasi sosial berpengaruh terhadap minat mahasiswa jurusan akuntansi untuk mengikuti pendidikan pada Program MAKSI?
4. Apakah motivasi mencari ilmu berpengaruh terhadap minat mahasiswa jurusan akuntansi untuk mengikuti pendidikan pada Program MAKSI?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang dipaparkan sebelumnya, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

4. Untuk menganalisa pengaruh dari motivasi kualitas terhadap minat mahasiswa jurusan akuntansi untuk mengikuti pendidikan pada Program MAKSI
5. Untuk menganalisa pengaruh dari motivasi karir terhadap minat mahasiswa jurusan akuntansi untuk mengikuti pendidikan pada Program MAKSI
6. Untuk menganalisa pengaruh dari motivasi sosial terhadap minat mahasiswa jurusan akuntansi untuk mengikuti pendidikan pada Program MAKSI
7. Untuk menganalisa pengaruh dari motivasi mencari ilmu terhadap minat mahasiswa jurusan akuntansi untuk mengikuti pendidikan pada Program MAKSI

1.4 Manfaat Penelitian

Selain itu, melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa kontribusi empiris dan kebijakan, sebagai berikut.

3. Kontribusi empiris, berkaitan dengan akuntansi keperilakuan, untuk menguji pengaruh dari motivasi terhadap mahasiswa akuntansi untuk mengambil Program MAKSI pada Fakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulangi, Unika Della Salle, STIE Eben Haezar yang berlokasi di Manado.
4. Kontribusi kebijakan, memberikan masukan bagi penyelenggara program studi Magister Akuntansi berkaitan dengan penyusunan kurikulum dan pengembangan ilmu sehingga dapat meningkatkan keahlian dan pengetahuan di bidang akuntansi.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Akuntansi Perilaku

Akuntansi keperilakuan merupakan bagian dari disiplin ilmu akuntansi yang mengkaji hubungan antara perilaku manusia dan sistem akuntansi, serta dimensi keperilakuan dari organisasi di mana manusia dan sistem akuntansi itu berada dan diakui keberadaannya. Keberhasilan suatu sistem informasi akuntansi tidak lepas dari perilaku manusia selaku pemakai dan yang memberikan responnya. Perkembangan akuntansi pun tak lepas dari perilaku. Mendesaknya kebutuhan akuntansi dan pentingnya peranan manusia (akuntan dan auditor) dalam bidang akuntansi, maka dengan mengadopsi bidang-bidang ilmu lainnya, seperti ilmu psikologi khususnya psikologi kognitif, antropologi dan sosial, lahirlah akuntansi keperilakuan. Ruang lingkup akuntansi keperilakuan meliputi:

1. Mempelajari pengaruh antara perilaku manusia terhadap konstruksi, bangunan, dan penggunaan sistem informasi yang diterapkan dalam perusahaan dan organisasi, yang berarti bagaimana sikap dan gaya kepemimpinan manajemen mempengaruhi sifat pengendalian akuntansi dan desain organisasi; apakah desain sistem pengendalian akuntansi bisa diterapkan secara universal atau tidak.
2. Mempelajari pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap perilaku manusia, yang berarti bagaimana sistem akuntansi mempengaruhi kinerja, motivasi, produktivitas, pengambilan keputusan, kepuasan kerja dan kerja sama.
3. Metode untuk menjelaskan dan memprediksi perilaku manusia dan strategi untuk mengubahnya, yang berarti bagaimana sistem akuntansi dapat dipergunakan untuk mempengaruhi perilaku, dan bagaimana mengatasi resistensi itu. Disini muncul istilah *freezing* (membekukan) dan *unfreezing* (mencairkan). Contohnya perubahan sistem. Perubahan sistem bukanlah sesuatu yang mudah, tetapi perlu upaya untuk sampai pada aplikasi sistem itu sendiri karena bisa jadi ada resistensi di situ. (Suartana, 2010:1-3).

2.1.2 Motivasi

Menurut Robbins dan Coulter (2005:393), *Maslow's Need Hierarchy Theory* merupakan lima hierarki kebutuhan manusia yang mencakup psikologi, keamanan, hubungan sosial, pengakuan, dan aktualisasi diri.

Robbins dan Coulter (2005:405) menyatakan bahwa *expectancy theory* (teori pengharapan) merupakan kecenderungan individu untuk bertindak dengan cara tertentu tergantung pada kekuatan suatu pengharapan, dimana tindakan tersebut akan diikuti oleh suatu hasil tertentu bagi individu. Sedangkan *expectancy theory* dalam hubungannya dengan motivasi akan membantu dalam memahami bagaimana individu membuat keputusan mengenai bermacam-macam alternatif tingkah laku. Vroom's dikutip oleh Campbell (2003) menyatakan bahwa *Expectancy Theory* memberikan masukan terhadap motivasi mahasiswa dengan menggunakan dua komponen model, yaitu sebagai berikut.

1. *model valence*; valensi berkaitan dengan preferensi hasil yang dilihat oleh individu. Konsep valensi berlaku terhadap hasil tingkat pertama dan kedua, misalnya seseorang mungkin memilih profesi tertentu yang tinggi prestasi kerjanya (hasil tingkat pertama), karena ia berpendapat bahwa hal tersebut akan menyebabkan gaji yang tinggi (hasil tingkat kedua)
2. *model force*; istilah *force* disamakan dengan kekuatan atau motivasi. Maksud teori pengharapan adalah menilai besar dan arah dari semua kekuatan yang mempengaruhi individu. Tindakan yang di dorong oleh motivasi paling besar adalah tindakan yang paling mungkin dapat dilakukan.

2.1.3 Minat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia minat yaitu kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu. Minat adalah suatu rasa dan suatu ketertarikan pada sesuatu hal/aktivitas, tanpa ada yang menyuruh dan timbul tidak secara tiba-tiba/spontan, melainkan timbul akibat partisipasi, pengetahuan dan kebiasaan Slameto (2001).

2.1.4 Motivasi Mempengaruhi Minat Untuk Mengikuti Program Magister Akuntansi

Beberapa motivasi yang dianggap mempengaruhi minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti Program MAKSI yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Motivasi Kualitas. Penelitian Samiaji (2004) yang dikutip oleh Widyastuti, *et al.* (2004:4) mencoba untuk mengetahui persepsi mahasiswa, akuntan, dan pemakai jasa akuntansi terhadap program PPAk yang meliputi kualitas lulusan S-1 akuntansi, materi, dan manfaat pendidikan. Berdasarkan hasil penelitian, ketiga responden mempunyai persepsi bahwa kualitas lulusan S-1 akuntansi sudah berkualitas, dalam hal ini pemakai jasa akuntansi mempunyai persepsi yang paling baik tentang kualitas lulusan akuntansi. Maka bisa dikatakan elemen kualitas atau kompetensi merupakan hal yang sangat diperhatikan dalam profesi akuntansi, khususnya profesi akuntan publik. Pencapaian keahlian tersebut dimulai dengan peningkatan pendidikan formal (tingkat universitas) yang diperluas melalui pengalaman-pengalaman selanjutnya dalam praktik audit.
2. Motivasi Karir. Menurut Ariani (2004) yang dikutip Mahmud (2008:30) pemilihan dan pencapaian karier merupakan ungkapan diri seseorang, karena pilihan karier menunjukkan motivasi seseorang, ilmu, kepribadian dan seluruh kemampuan yang dimiliki. Samiaji (2004) yang dikutip oleh Widyastuti, *et al.* (2004:6) menyatakan bahwa sebagian besar mahasiswa jurusan akuntansi adalah pragmatis dan memilih jurusan akuntansi karena adanya kesempatan karir yang luas di bidang akuntansi. Dengan demikian motivasi karir dapat diartikan sebagai dorongan yang ada pada seseorang untuk mendapatkan posisi pekerjaan yang lebih baik dari sebelumnya, dan tentu saja untuk memperoleh posisi tersebut maka dibutuhkan pendidikan yang bermutu untuk menunjang pencapaian tersebut.
3. Motivasi Sosial. Pada penelitian Mahmud (2008), diperoleh kesimpulan bahwa minat mengikuti PPAk didorong oleh motivasi sosial. Dengan menyandang gelar akuntan, maka muncul kepuasan batiniah dimana eksistensi diri diakui oleh orang lain dan lingkungannya. Bahkan dalam penelitiannya, motivasi sosial memberikan kontribusi terbesar terhadap minat. Hal ini

mengindikasikan bahwa kebanggaan dan pengakuan di hadapan orang lain setelah menjadi akuntan melebihi motivasi lain yang ditelitinya.

4. Motivasi Mencari Ilmu. Montagna (1974) dalam Paisey (2005) yang dikutip oleh Lisnasari dan Fitriany (2008:9) menyatakan “pengetahuan sebuah profesi memberikan keahlian khusus bagi praktisi, dimana pengetahuan tersebut dapat memberikan pengakuan mutlak terhadap profesi yang ditekuninya. Sebuah pemahaman bahwa memiliki pengetahuan yang luas merupakan karakteristik yang penting untuk memperoleh sebuah profesionalitas”. Pendidikan di MAKSI merupakan sarana bagi mahasiswa untuk meningkatkan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi yang akan bermanfaat pula untuk meningkatkan profesionalisme.

2.2 Penelitian Terdahulu

Widyastuti, *et al.* (2004) dalam penelitiannya yang berjudul pengaruh motivasi terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti pendidikan profesi akuntansi (PPAk). Hasil temuan yang diperoleh pada penelitian ini, variabel motivasi karir merupakan faktor yang paling signifikan mempengaruhi minat mahasiswa untuk mengikuti PPA.

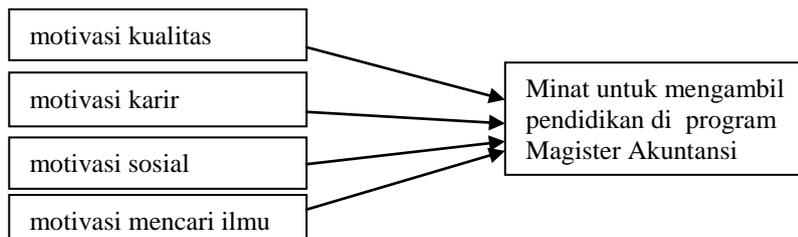
Kemudian Benny dan Yuskar (2006) dengan penelitian yang berjudul pengaruh motivasi terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti pendidikan profesi akuntansi (ppak) (Studi Empiris Pada Perguruan Tinggi di Padang). Hasil penelitian yang dilakukan menghasilkan kesimpulan bahwa motivasi kualitas dan motivasi karir mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap minat mahasiswa untuk mengikuti PPAk.

Atahasi Gultom (2007) melakukan penelitian pada mahasiswa peserta PPAk di Universitas Indonesia (UI) dan Universitas Gajah Mada (UGM) dengan judul penelitian pengaruh motivasi kualitas, motivasi ekonomi dan motivasi karir terhadap minat mahasiswa peserta pendidikan profesi akuntansi (PPAk). Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Motivasi kualitas, Motivasi Ekonomi, motivasi karir berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat mahasiswa peserta PPAk.

3. Kerangka Konseptual

3.1 Kerangka Konseptual Penelitian

Sebagai individu yang ingin terus maju dan berkembang tentu perlu memotivasi dirinya untuk mau bekerja keras, penuh tanggung jawab, selalu tidak mudah menyerah, serta selalu meningkatkan kualitas diri sebagai upayaantisipasi menghadapi persaingan yang semakin berat di antara sesama tenaga kerja. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001), motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Sukanto (1990) dalam Simarmata (2002) yang dikutip oleh Mahmud (2008:28) menyatakan bahwa motivasi dibagi menjadi dua: Pertama, motivasi internal, yakni kebutuhan/keinginan yang ada dalam diri seseorang akan mendorong dan mengarahkan seseorang untuk melakukan perbuatan, artinya sesuatu yang mendorong seseorang tersebut adalah faktor dari dalam diri sendiri. Kedua motivasi eksternal, yaitu menjelaskan kekuatan-kekuatan yang ada dalam diri individu yang dipengaruhi oleh faktor-faktor luar yang dapat mendorong seseorang tersebut. Hasil penulisan Widyastuti, *et al.* (2004) tentang minat mahasiswa untuk mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk) menunjukkan bahwa motivasi memiliki peran dalam menentukan minat seorang mahasiswa untuk mengikuti PPAk. Kerangka konseptual untuk menjelaskan hubungan antar variabel dapat dilihat dalam bagan berikut:



Gambar 3.1 Kerangka Konseptual

3.2 Hipotesis Penelitian

- H₁: Motivasi kualitas mempengaruhi minat mahasiswa akuntansi untuk mengambil pendidikan di program Magister Akuntansi.
- H₂: Motivasi karir mempengaruhi minat mahasiswa akuntansi untuk mengambil pendidikan di program Magister Akuntansi.
- H₃: Motivasi sosial mempengaruhi minat mahasiswa akuntansi untuk mengambil pendidikan di program Magister Akuntansi.
- H₄: Motivasi mencari ilmu mempengaruhi minat mahasiswa akuntansi untuk mengambil pendidikan di program Magister Akuntansi.

3.3 Model Analisis

Analisis regresi berganda digunakan untuk menguji hubungan antara variabel, motivasi karir, motivasi kualitas, motivasi sosial, dan motivasi mencari ilmu terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti program Magister Akuntansi. Model persamaan penelitian yang digunakan.

$$\text{Minat} = \alpha + \beta_1 \text{ Motivasi Kualitas} + \beta_2 \text{ Motivasi Karier} + \beta_3 \text{ Motivasi Sosial} + \beta_4 \text{ Motivasi Mencari Ilmu} + \varepsilon$$

Dimana:

α : Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$: Koefisien regresi

ε : Error term

4. Metode Penelitian

4.1. Jenis Penelitian yang Digunakan

Penelitian ini merupakan penelitian hubungan kausal (*causal effect*), dimana penelitian ini dirancang untuk menguji pengaruh dari fakta dan fenomena serta mencari keterangan secara faktual yaitu penelitian yang bersifat menjelaskan mengenai motivasi yang mempengaruhi minat untuk mengikuti Program Magister Akuntansi bagi mahasiswa jurusan akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulangi, Fakultas Ekonomi Universitas Katolik De La Salle, dan STIE Eben Heazer Manado. Dalam penelitian ini, data kuantitatif yang digunakan adalah data mengenai jumlah mahasiswa jurusan akuntansi yang lulus pada tahun 2012 dan mahasiswa akuntansi yang berada di semester 7, ketika penulisan ini sedang dilakukan, yaitu mahasiswa angkatan 2009, yang terdaftar di Fakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulangi, Fakultas Ekonomi Universitas Katolik De La Salle, dan STIE Eben Heazer Manado. Sedangkan data kualitatif yang digunakan adalah data yang diperoleh dari data responden dan jawaban responden terhadap *open question* (pertanyaan terbuka) pada *questionnaire*.

4.2. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

4.2.1 Populasi

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah mahasiswa jurusan akuntansi pada FE Unsrat dengan jumlah 194 untuk angkatan 2009 dan 127 orang untuk lulusan 2012; FE Unika De La Salle dengan jumlah 30 untuk angkatan 2009 dan 33 orang untuk lulusan 2012; STIE Eben Heazer dengan jumlah 77 untuk angkatan 2009 dan 251 orang untuk lulusan 2012.

4.2.2 Sampel

Dalam penelitian ini, yang menjadi sample yang akan diteliti adalah mahasiswa jurusan akuntansi yang lulus pada tahun 2012 dan mahasiswa akuntansi yang berada di semester 7, ketika penulisan ini sedang dilakukan, yaitu mahasiswa angkatan 2009.

4.2.3 Teknik Pengambilan Sampel

Teknik Pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono 2011). Adapun yang menjadi pertimbangan dari peneliti sebagai dasar pengambilan sampel adalah para mahasiswa telah memiliki gambaran tentang pencapaian karir ataupun rencana studi yang telah mereka pertimbangkan setelah mereka menyelesaikan pendidikan pada program studi akuntansi. Rumus yang digunakan untuk mengukur sampel, menggunakan rumus Slovin (Umar, 2009:78). Penentuan sample untuk setiap strata pada penelitian ini menggunakan pengambilan sample menurut strata dengan memakai rumusan alokasi proporsional (Sugiyono dalam Alma, 2004:66)

Berdasarkan perhitungan, diperoleh jumlah sampel yang akan diteliti sebesar 232 responden, maka dapat dilakukan perhitungan sampel untuk setiap strata sebagai berikut.

1. Angkatan 2009 FE Unsrat: $194 / 552 \times 232 = 81,53 \approx 82$ mahasiswa
2. Wisuda 2012 FE Unsrat: $127 / 552 \times 232 = 53,37 \approx 53$ mahasiswa
3. Angkatan 2009 FE Unika De La Salle: $30 / 552 \times 232 = 12,60 \approx 13$ mahasiswa
4. Wisuda 2012 FE Unika De La Salle: $33 / 552 \times 232 = 13,86 \approx 14$ mahasiswa
5. Angkatan 2009 STIE Eben Haezar : $77 / 552 \times 232 = 32,36 \approx 32$ mahasiswa
6. Wisuda 2012 STIE Eben Haezar : $91 / 552 \times 232 = 38,24 \approx 38$ mahasiswa

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, sampel mahasiswa FE Unika De La Salle baik angkatan 2009 maupun yang wisuda 2012, mendapatkan hasil dibawah 30, maka untuk menghindari kesalahan dalam pengambilan data, sampel diambil secara utuh, yaitu 30 untuk angkatan 2009, dan 33 untuk wisuda tahun 2010. Dengan demikian diperoleh sampel keseluruhan berjumlah 268 responden.

4.3 Klasifikasi Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Pengukuran variabel dependen (Y) penulisan ini adalah mengetahui minat dari mahasiswa akuntansi untuk mengikuti Program Magister Akuntansi. Minat adalah keinginan yang didorong oleh suatu keinginan setelah melihat, mengamati dan membandingkan serta mempertimbangkan dengan kebutuhan yang diinginkannya.

Variable independen, terdiri atas:

1. Motivasi karir diartikan sebagai dorongan yang timbul dalam diri seseorang untuk meningkatkan kemampuan pribadinya dengan tujuan mencapai kedudukan, jabatan/karir yang lebih baik dari sebelumnya. Motivasi karir dapat diukur dengan mengetahui seberapa besar keinginan seseorang dalam meningkatkan karirnya yaitu memperoleh kesempatan promosi, mendapat perlakuan profesional, mendapatkan pengetahuan berkaitan dengan pertanggungjawaban dalam bekerja, mampu melaksanakan beban pekerjaan dengan baik dan mendapatkan pengetahuan yang berkaitan dengan dunia pekerjaannya (Widyawati, *et al.* 2004).
2. Motivasi sosial diartikan sebagai suatu dorongan seseorang untuk melakukan perbuatan dengan tujuan/bernilai sosial, memperoleh pengakuan maupun penghargaan dari lingkungan dimana seseorang berada. (Mahmud,2008:29).
3. Motivasi kualitas yang diartikan sebagai dorongan yang timbul dari diri seseorang yang memiliki dan meningkatkan kualitas diri dan kemampuannya dalam bidang yang ditekuninya sehingga dapat melaksanakan tugas dengan baik dan benar (Benny dan Yuskar ,2006:12).
4. Motivasi mencari ilmu diartikan sebagai dorongan yang timbul dalam diri seseorang untuk mendapatkan dan meningkatkan ilmu pengetahuan serta kemampuan dalam bidang yang ditekuninya sehingga dapat melaksanakan tugas dengan baik dan benar.

4.4 Cara Pengolahan dan Analisis Data

4.4.1 Metode Analisis Data

Metode analisis dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Untuk pengolahan data menggunakan alat bantu program *Statistical Product and Service Solutions (SPSS)* versi 19.0.

5. ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

5.1 Hasil Penelitian

5.1.1 Deskripsi Data

Dari 268 kuesioner yang disebar, terkumpul sebanyak 226 kuesioner, dan terdapat 17 kuesioner yang tidak dapat digunakan, sehingga kuesioner yang dapat diolah sebanyak 209 kuesioner. Berdasarkan total kuesioner yang diolah, diperoleh responden untuk mahasiswa angkatan 2009 berjumlah 127 orang. Responden untuk mahasiswa wisuda tahun 2012, diperoleh hasil sebesar 82 orang.

5.1.2 Uji Validitas dan Reabilitas Data

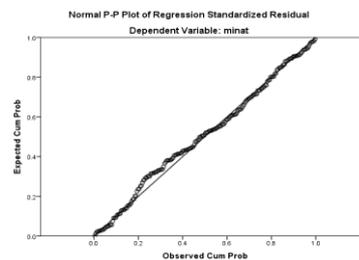
Tabel 5.1 Uji Validitas dan Reliabilitas Data

	(X ₁)	(X ₂)	(X ₃)	(X ₄)	(Y)
Corrected Item-Total Correlation P1	0.403	0.406	0.552	0.319	0.510
Corrected Item-Total Correlation P2	0.433	0.349	0.420	0.450	0.517
Corrected Item-Total Correlation P3	0.582	0.454	0.312	0.511	0.441
Corrected Item-Total Correlation P4	0.411	0.620	0.557	0.468	0.394
Corrected Item-Total Correlation P5	0.593	0.453	0.523	0.323	0.510
Corrected Item-Total Correlation P6	0.600	0.418	0.483	0.471	0.460
Corrected Item-Total Correlation P7	0.461	0.377	0.358	0.369	0.486
Corrected Item-Total Correlation P8	0.486	0.417	0.364	0.554	0.586
Corrected Item-Total Correlation P9	0.595	0.418	0.427	0.601	0.515
Corrected Item-Total Correlation P10	0.504		0.417	0.499	
Cronbach's Alpha	0.740	0.719	0.723	0.727	0.736

Hasil uji validitas dan reliabilitas setiap pertanyaan pada variabel X₁, X₂, X₃, X₄ dan Y, mempunyai nilai korelasi di atas 0,11408 dan *cronbach alpha* diatas 0,6. Semua dinyatakan reliabel dan valid.

5.1.3 Uji Asumsi Klasik

4. Uji Normalitas

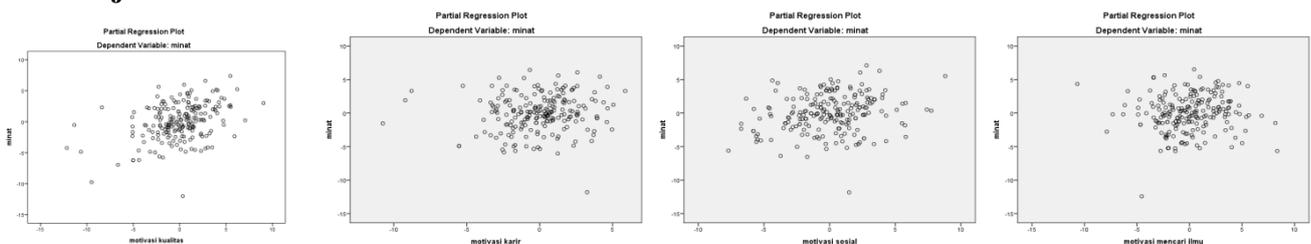


Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2012

Gambar 5.1 Output pengujian Normality P-Plot

Gambar 5.1 menunjukkan bahwa grafik *Normal P-P Plot of regression standardized residual* memenuhi asumsi *normalitas* dimana penyebaran data tersebar di sekitar dan mengikuti arah garis diagonal grafik tersebut.

5. Uji Heteroskedastisitas



(Sumber : Data Hasil Olahan SPSS)
Gambar 5.2 Uji Heteroskedastisitas

Pada gambar 5.2 terlihat bahwa titik-titik tidak membentuk suatu pola yang jelas, serta menyebar di atas dan di bawah angka 0 (nol) pada sumbu Y, hal ini membuktikan tidak terjadi heteroskedastisitas.

6. Uji Multikoleniaritas

Tabel 5.2 Uji Multikoleniaritas
Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
motivasi kualitas	.647	1.546
motivasi karir	.638	1.568
motivasi sosial	.778	1.285
motivasi mencari ilmu	.874	1.144

Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2012

Pada Tabel 5.2, diketahui bahwa nilai VIF < 10 dan nilai *tolerance* > 0,10, maka dikatakan tidak terjadi gejala multikolinearitas.

5.1.4 Koefisien Korelasi dan Koefisien Determinasi

Tabel 5.3 Koefisien Korelasi

		minat
Pearson Correlation	minat	1.000
	motivasi kualitas	.559
	motivasi karir	.423
	motivasi sosial	.409
	motivasi mencari ilmu	.238
Sig. (1-tailed)	minat	.
	motivasi kualitas	.000
	motivasi karir	.000
	motivasi sosial	.000
	motivasi mencari ilmu	.000
N	minat	209
	motivasi kualitas	209
	motivasi karir	209
	motivasi sosial	209
	motivasi mencari ilmu	209

Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2012

Berdasarkan hasil olah data, diketahui bahwa variabel Motivasi Kualitas (X_1) mempunyai korelasi yang bersifat kuat dan positif dengan variabel Minat (Y), hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,559. Untuk variabel Motivasi Karir (X_2) mempunyai korelasi yang bersifat cukup dan positif dengan variabel Minat (Y), dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,423. Korelasi yang bersifat cukup dan positif juga terjadi pada variabel Motivasi Sosial (X_3) dengan variabel Minat (Y), dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,409. Sedangkan untuk variabel Motivasi Mencari Ilmu (X_4) mempunyai korelasi yang juga bersifat sangat lemah dan positif dengan variabel Minat (Y), dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,238.

Tabel 5.4 Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.608 ^a	.370	.358	2.740

Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2012

Berdasarkan table hasil output SPSS *model Summary* dapat diketahui bahwa nilai koefisien determinasi atau R^2 adalah sebesar 0,370 atau 37%. Angka tersebut berarti sebesar 37% minat

mahasiswa akuntansi untuk mengikuti pendidikan pada Program MAKSI dapat dijelaskan oleh variabel Motivasi Kualitas, Motivasi Karir, Motivasi Sosial, dan Motivasi Mencari Ilmu. Sedangkan sisanya (100% - 37% = 63%) disebabkan oleh faktor-faktor lain diluar model, antara lain seperti motivasi untuk mencari gelar, faktor finansial, pengaruh tuntutan karir atau pekerjaan, faktor lingkungan, keterbatasan waktu, dan faktor lainnya yang lebih mempengaruhi minat mahasiswa tersebut.

5.1.5 Regresi Linear Berganda

Tabel 5.5 Koefisien Regresi

Model	Unstandardized Coefficients	
	B	Std. Error
1 (Constant)	6.104	3.485
motivasi kualitas	.379	.063
motivasi karir	.105	.077
motivasi sosial	.215	.066
motivasi mencari ilmu	.061	.067

Sumber:Hasil Olah Data SPSS, 2012

Hasil tersebut bila dimasukkan ke dalam persamaan penelitian menjadi:

$$Y = 6,104 + 0,379 X_1 + 0,105 X_2 + 0,215X_3 + 0,061X_4 + e$$

Nilai dari variabel Motivasi Kualitas atau b_1 adalah positif (0,379). Nilai koefisien regresi b_1 ini menunjukkan bahwa variabel motivasi kualitas mempunyai pengaruh hubungan positif dan searah terhadap variabel minat secara statistik. Hal ini berarti bahwa apabila motivasi kualitas meningkat, maka minat untuk mengikuti pendidikan pada program MAKSI juga ikut meningkat.

Nilai variabel Motivasi Karir atau b_2 adalah positif (0,105). Nilai koefisien regresi b_2 ini menunjukkan bahwa pengaruh hubungan variabel motivasi karir terhadap variabel minat adalah positif dan searah. Dengan demikian, apabila motivasi karir meningkat, maka minat untuk mengikuti pendidikan pada program MAKSI juga akan ikut meningkat.

Variabel Motivasi Sosial atau b_3 memiliki nilai positif (0,215), dimana nilai koefisien regresi b_3 ini menunjukkan bahwa variabel motivasi sosial mempunyai pengaruh hubungan positif dan searah terhadap variabel minat secara statistik. Dengan demikian apabila terjadi peningkatan pada motivasi sosial, maka minat untuk mengikuti pendidikan pada program MAKSI juga ikut meningkat.

Nilai dari variabel Motivasi Mencari Ilmu atau b_4 adalah positif (0,061). Nilai koefisien regresi b_4 ini menunjukkan bahwa motivasi kualitas mempunyai pengaruh hubungan yang positif dan searah dengan variabel minat. Dengan demikian, apabila terjadi peningkatan pada motivasi mencari ilmu maka minat untuk mengikuti pendidikan pada program MAKSI juga akan ikut meningkat.

5.1.6 Pengujian Hipotesis (Uji t)

Tabel 5.6 Hasil Uji-t

Model	Standardized Coefficients	t	Sig.	95.0% Confidence Interval for B
	Beta			Lower Bound
1 (Constant)		1.751	.081	-.768
motivasi kualitas	.419	6.059	.000	.256
motivasi karir	.095	1.364	.174	-.047
motivasi sosial	.204	3.231	.001	.084
motivasi mencari ilmu	.054	.917	.360	-.070

Sumber:Hasil Olah Data SPSS, 2012

Menggunakan tingkat kepercayaan 5% pada derajat kebebasan $(N-2) = 209 - 2 = 207$, diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 1,6522. Dengan demikian hanya variabel motivasi kualitas dan motivasi sosial yang berpengaruh terhadap Minat Mahasiswa Jurusan Akuntansi untuk Mengikuti Pendidikan pada Program Magister Akuntansi.

5.1.7 Uji F

Tabel 5.7 Analysis Of Variance

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	900.369	4	225.092	29.982	.000 ^a
	Residual	1531.555	204	7.508		
	Total	2431.923	208			

Sumber:Hasil Olah Data SPSS, 2012

Hasil perhitungan pengujian yang dilakukan (Uji F) terlihat bahwa variabel independen yang memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Hal ini didasarkan pada perbandingan F_{hitung} dengan F_{tabel} dengan menggunakan signifikansi hitung yang berada di angka 0,05. Berdasarkan hasil pengujian statistik Uji Bersama (Uji F) F_{hitung} diperoleh angka 29,982 > dari F_{tabel} 2,416 dengan sig. hitung 0,000 < 0,05 (α : 5%), hal ini berarti bahwa Motivasi Kualitas, Motivasi Karir, Motivasi Sosial, dan Motivasi Mencari secara bersama mempunyai pengaruh terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti pendidikan pada program MAKSI.

5.2 Pembahasan

Berdasarkan persamaan regresi diatas diketahui bahwa, dari ke empat variabel independen, variabel motivasi kualitas berada pada tingkat paling besar dalam pengaruhnya terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti pendidikan pada program MAKSI, variabel berikutnya adalah variabel motivasi sosial, kemudian variabel motivasi karir, dan yang terakhir adalah variabel motivasi mencari ilmu. Hal ini berarti bahwa minat mahasiswa dilatarbelakangi oleh kemauan untuk meningkatkan kualitas sumber daya yang mereka miliki, yang kemudian bisa memberikan kesuksesan dalam kehidupan sosial diiringi dengan kemudahan dalam memperoleh pekerjaan ataupun peningkatan karir, serta mendapatkan ilmu pengetahuan yang nantinya dapat mendukung pelaksanaan tugas dengan baik dan benar.

6. PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan sebagai berikut.

6. Nilai koefisien regresi dari variabel Motivasi Kualitas (b_1) diperoleh positif, hal ini menunjukkan bahwa variabel motivasi kualitas mempunyai pengaruh hubungan positif dan searah terhadap variabel minat secara statistik.
7. Pengujian hipotesis 1, diperoleh hasil $t_{hitung} > t_{tabel}$, dengan demikian H_1 diterima atau dengan kata lain variabel Motivasi Kualitas berpengaruh signifikan terhadap Minat Mahasiswa akuntansi untuk Mengikuti Pendidikan pada Program MAKSI.
8. Nilai koefisien regresi dari variabel motivasi karir (b_2) diperoleh positif, hal ini menunjukkan bahwa variabel motivasi kualitas mempunyai pengaruh hubungan positif dan searah terhadap variabel minat secara statistik.
9. Pengujian hipotesis 2, diperoleh hasil $t_{hitung} < t_{tabel}$, dengan demikian H_2 ditolak, atau dengan kata lain variabel motivasi karir secara signifikan tidak berpengaruh terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti pendidikan pada program MAKSI.
10. Nilai koefisien regresi dari variabel motivasi sosial (b_3) diperoleh positif, menunjukkan bahwa variabel motivasi sosial mempunyai pengaruh hubungan positif dan searah terhadap variabel minat secara statistik.
11. Pengujian hipotesis 3, diperoleh hasil $t_{hitung} > t_{tabel}$, dengan demikian H_3 diterima, atau dengan kata lain motivasi sosial berpengaruh signifikan terhadap minat mahasiswa jurusan akuntansi untuk mengikuti pendidikan pada program MAKSI.
12. Nilai koefisien regresi dari variabel motivasi mencari ilmu (b_4) diperoleh positif, menunjukkan bahwa variabel motivasi mencari ilmu mempunyai pengaruh hubungan positif dan searah terhadap variabel minat secara statistik.

13. Pengujian hipotesis 4, diperoleh hasil $t_{hitung} < t_{tabel}$, dengan demikian H_4 ditolak, atau Motivasi Mencari Ilmu secara signifikan tidak berpengaruh terhadap Minat Mahasiswa Jurusan Akuntansi untuk Mengikuti Pendidikan Pada Program MAKSI.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat dikemukakan beberapa saran sebagaimana berikut ini.

1. Penyelenggara program MAKSI diharapkan untuk selalu melakukan penyesuaian dan pengembangan kurikulum yang sejalan dengan perkembangan ekonomi dan bisnis sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan menghasilkan lulusan yang berkualitas serta kompeten.
2. Mahasiswa akuntansi diharapkan meningkatkan motivasi yang dimiliki terutama motivasi karir dan mencari ilmu, sehingga dapat meningkatkan minat untuk mengikuti pendidikan pada program MAKSI, agar profesionalisme dan sumberdaya manusia yang dimiliki dapat ditingkatkan.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas variasi populasi dan jumlah sampel, sehingga diharapkan dapat diperoleh hasil penelitian yang lebih baik. Penelitian yang akan datang juga dapat melibatkan sampel mahasiswa MAKSI untuk memperoleh gambaran motivasi yang melatarbelakangi keikutsertaannya dalam program MAKSI.
4. Hendaknya untuk penelitian selanjutnya menggunakan variabel *dummy* agar lebih menjelaskan mengenai motivasi karir dari sudut pandang mahasiswa yang sudah bekerja dan belum bekerja.
5. Penambahan variabel lainnya untuk penelitian selanjutnya yang mungkin dapat mempengaruhi minat, seperti lamanya pendidikan, gender, biaya pendidikan, dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alma, Buchari. H. (2004). *Metode & Teknik Menyusun Tesis*. Penerbit Alfabeta. Bandung
- Benny, Ellya dan Yuskar. (2006). *Pengaruh Motivasi terhadap Minat Mahasiswa Akuntansi Untuk Mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk)*. Simposium Nasional Akuntansi IX
- Campbell, S. V., T. Baronina and B. P. Reider., (2003). *Using Expectancy Theory to Assess Group-Level Differences in Student Motivation: A Replication in the Russian Far East. Issues In Accounting Education* (May): 125-136
- Handhika, Anggara Yudha. (2010). *Persepsi Mahasiswa Akuntansi Terhadap Faktor-faktor Pemilihan Karier Akuntan Publik Dan Non Akuntan Publik. (Studi Kasus Pada Mahasiswa Akuntansi Di UPN "Veteran" Jawa Timur)*. Skripsi. Universitas Pembangunan Nasional "Veteran". Jawa Timur.
- <http://www.maranatha.edu/academic/program-magister-akuntansi>
- Mahmud, Amir. (2008). *Pengaruh Motivasi Terhadap Minat Mahasiswa untuk Mengikuti Pendidikan Profesi Akuntan*. Jurnal Pendidikan Ekonomi Vol 3 No.1 Februari, Tahun 2008. Fakultas Ekonomi Unnes.
- Paisey, Catriona dan Nicholas J. Paisey. (2006). *Cutting the core? A reflection upon recent education policy debates within the institute of chartered accountants in england and wales, The British Accounting Review* 38 (2006) 31-61.
- Robbins, Stephen P, dan Coulter Mary. (2005). *Management*. Eighth Edition. Pearson Prentice Hall. New Jersey.
- Sarjono Haryadi, dan Julianita Winda. (2011). *SPSS vs LISREL*. Penerbit Salemba Empat: Jakarta.
- Slameto. (2001). *Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya*. Jakarta : Rineka Cipta
- Suartana, I Wayan. (2010). *Akuntansi Keperilakuan*. Penerbit ANDI, Yogyakarta.
- Umar, Husein. (2009). *Metode Penelitian untuk skripsi dan Tesis Bisnis*. Edisi Kedua. Jakarta: Rajawali Press
- Widyastuti, Suryaningsum dan Juliana. (2004). *Pengaruh Motivasi terhadap Minat Mahasiswa Akuntansi Untuk Mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi*. Simposium Nasional Akuntansi VII.

**PENGARUH *INVESTMENT OPPORTUNITY SET, RETURN ON ASSET, RETURN ON EQUITY, CASH RATIO DAN DEBT TO EQUITY RATIO* TERHADAP
DIVIDEND PAYOUT RATIO
(Studi Kasus pada Perusahaan Perbankan di BEI Tahun 2007-2010)**

**Elny Claudia Tombeng
Ventje Ilat
Agus T. Poputra**

ABSTRAK

Pasar modal memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan dua fungsi, yaitu sebagai sarana perolehan dana bagi perusahaan dan sebagai sarana investasi dana bagi investor. Melalui pasar modal inilah permintaan dan penawaran terjadi. Sehingga dapat memberikan keuntungan antara kedua pihak tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh *investment opportunity set, return on asset, return on equity, cash ratio dan debt to equity ratio* terhadap *dividend payout ratio* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI dalam hal analisis laporan keuangan tahunan periode 2007-2010. Populasi penelitian adalah semua perusahaan perbankan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2007-2010, yaitu sebanyak 23 bank. Sedangkan sampel penelitian diperoleh dengan menggunakan metode *judgement sampling*, sebanyak 8 bank. Metode analisis yang dipakai adalah model regresi data panel. Data panel adalah gabungan antara data runtut waktu (*time series*) dan data silang (*cross section*). Sedangkan untuk pemrosesan data penelitian menggunakan program komputer Eviews. Hasil pengujian secara simultan (uji-F), kelima variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Untuk uji parsial (uji-t), variabel ROA dan DER berpengaruh negatif terhadap DPR, sedangkan variabel IOS, ROE dan *cash ratio* tidak berpengaruh terhadap DPR.

Kata kunci: *Investment opportunity set, return on asset, return on equity, cash ratio, debt to equity ratio dan dividend payout ratio.*

ABSTRACT

Capital markets have an important role in the economy of a country that runs two functions that are tools to get funds for the company and tools to invest the funds for investors. Through this capital market supply and demand occurs. So it can provide benefits between the two parties. The purpose of this study was to analyze the effect of the investment opportunity set, return on assets, return on equity, cash ratio and debt to equity ratio of dividend payout ratio in the banking company listed on the Indonesia Stock Exchange in the analysis of annual financial statements 2007-2010. The study population was all the banking companies listed on the Stock Exchange 2007-2010, as many as 23 banks. While the study sample is obtained bay using judgment sampling method, a total of 8 banks. The method of analysis used is panel data regression models. Panel data is a combination of time series data and cross section data. While for the processing of research data using a computer program called Eviews 5.0. The simultaneous test results (F-test), five independent variables have an influence on the dependent variable. For partial test (t-test), DER and ROA variables negatively affect DPR variable, while the IOS, ROE and cash ratio variables does not affect DPR variable.

Keywords: *Investment opportunity set, return on asset, return on equity, cash ratio, debt to equity ratio dan dividend payout ratio.*

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan pasar modal di Indonesia saat ini sudah semakin maju di mana sampai saat ini terdapat 455 perusahaan yang terdaftar sebagai emiten di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pasar modal dapat menjadi tempat berinvestasi yang menguntungkan. Selain keuntungan bagi pihak investor, perusahaan yang menjual instrumen keuangan juga dapat memperoleh dana yang dibutuhkan untuk perkembangan perusahaan tersebut. Namun demikian, masih banyak masyarakat yang tidak memanfaatkan keuntungan dari pasar modal. Masih jarang ditemui investor berinvestasi di pasar modal. Ini disebabkan pengetahuan tentang pasar modal di kalangan para investor masih sangat minim. Untuk itu, sangat penting mengetahui keuntungan apa yang bisa diperoleh masyarakat dalam berinvestasi di pasar modal.

Masyarakat sebagai pelaku pasar modal (investor) biasanya menginvestasikan dananya pada saham, dengan harapan dapat memperoleh keuntungan di masa mendatang. Investasi yang dilakukan biasanya pada saham biasa (*common stock*), karena saham biasa dapat memberikan pengembalian (*return*) berupa *capital gain* dan *dividend*. Kebanyakan investor yang tidak ingin berspekulasi (dikelompokkan sebagai *risk averter*) akan lebih memilih dividen dibandingkan dengan *capital gain*. Untuk itu, informasi yang berhubungan dengan keputusan pembayaran dividen suatu perusahaan sangatlah penting bagi jenis investor tersebut. Pembuatan keputusan tentang dividen ini disebut kebijakan dividen (Atmaja, 2008:285). Pembagian dividen dilakukan tanpa memandang jenis perusahaan (*financial* maupun *non-financial*), melainkan didasarkan pada berbagai macam faktor yang mempengaruhinya. Perbankan adalah salah satu jenis perusahaan *financial* yang membagikan dividen kepada para pemegang sahamnya. Kebijakan dividen perbankan diukur dengan menggunakan *dividend payout ratio* (DPR).

Return on asset (ROA) dan *return on equity* (ROE) dapat menjadi pendekatan untuk memperkirakan jumlah dividen yang akan dibagikan perusahaan kepada pemegang sahamnya. Semakin besar pengembalian atas aset yang dimiliki oleh perusahaan, maka diharapkan perusahaan akan membayarkan dividen yang semakin besar. Demikian pula dengan pengembalian atas ekuitas perusahaan yang semakin besar, diharapkan pembagian dividen yang semakin besar oleh perusahaan. Selain itu, perusahaan dengan *cash ratio* yang besar mampu memenuhi pembayaran utang jangka pendeknya, sehingga diharapkan juga dapat memberikan dividen yang besar.

Di lain sisi, perusahaan yang memiliki *debt to equity ratio* (DER) yang tinggi akan menurunkan tingkat pembayaran dividen perusahaan. Ini disebabkan utang yang tinggi akan mempengaruhi besarnya pendapatan bersih yang tersedia bagi pemegang saham, karena keuntungan yang diperoleh digunakan untuk membayar utang dan bunga utang perusahaan. Selain itu, perusahaan yang memiliki *investment opportunity set* (IOS) yang tinggi memiliki peluang pertumbuhan yang tinggi (Mulyono, 2009). Menanggapi hal tersebut, perusahaan membutuhkan dana untuk membiayai kebutuhan perusahaan dalam upaya meningkatkan pertumbuhan. Dana internal yang biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut mengakibatkan penurunan jumlah dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham. Namun, ada juga perusahaan disamping ingin mengembangkan bisnisnya, ingin memberikan kesejahteraan bagi pemegang sahamnya. Hal ini tentunya menuntut pihak manajemen untuk mempertimbangkan kebijakan dividen perusahaan dengan sebaik-baiknya.

1.2 Perumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana pengaruh IOS terhadap DPR pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2007-2010?
2. Bagaimana pengaruh ROA terhadap DPR pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2007-2010?
3. Bagaimana pengaruh ROE terhadap DPR pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2007-2010?

4. Bagaimana pengaruh *cash ratio* terhadap DPR pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2007-2010?
5. Bagaimana pengaruh DER terhadap DPR pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2007-2010?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Menganalisis pengaruh IOS terhadap DPR pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2007-2010.
2. Menganalisis pengaruh ROA terhadap DPR pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2007-2010.
3. Menganalisis pengaruh ROE terhadap DPR pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2007-2010.
4. Menganalisis pengaruh *cash ratio* terhadap DPR pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2007-2010.
5. Menganalisis pengaruh DER terhadap DPR pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2007-2010.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagi investor yang berinvestasi untuk memperoleh dividen, penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan agar dapat memilih perusahaan yang dapat dipercaya, yang memiliki nilai yang tinggi dengan kebijakan dividen yang tepat sehingga investasi yang dilakukan dapat memberikan pengembalian yang sesuai dengan harapan.
2. Bagi perusahaan-perusahaan, penelitian ini dapat menjadi pertimbangan dalam memutuskan kebijakan dividen di masa mendatang dengan memperhatikan kinerja rasio-rasio keuangan perusahaan sehingga dapat memberikan kesejahteraan bagi para pemegang saham.

1.5 Tinjauan Pustaka

Beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai bahan perbandingan dan referensi untuk penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Anggraini (2006) meneliti variabel-variabel keuangan yang mempengaruhi pembayaran dividen. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel dividen periode lalu, *cash ratio* dan ROE berpengaruh, sedangkan variabel DER dan pertumbuhan EPS tidak berpengaruh terhadap DPR. Variabel dividen periode lalu dan *cash ratio* berpengaruh positif, sedangkan ROE berpengaruh negatif.
2. Priono, T (2006) meneliti variabel rasio keuangan, pertumbuhan aset dan ukuran perusahaan terhadap *dividend per share*. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan adanya pengaruh positif dari variabel ROI dan EPS, pengaruh negatif dari variabel DTA dan *growth*. Namun, variabel *cash ratio* dan *size* tidak berpengaruh terhadap variabel DPS.
3. Hadiwidjaja (2007) meneliti pengaruh variabel ROI, *tax rate*, *cash ratio*, DER dan *net profit margin* (NPM) terhadap variabel DPR. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan adanya pengaruh positif dari variabel *net profit margin* (NPM) dan ROI, sedangkan variabel *cash ratio*, DER dan *tax rate* berpengaruh negatif.
4. Kumar (2007) melakukan studi komparatif pada perusahaan PMA dan PMDN di BEJ periode 2003-2005. Hasil penelitian menjelaskan bahwa secara parsial, hanya variabel ROA yang berpengaruh positif terhadap variabel DPR pada perusahaan PMDN, sedangkan variabel kepemilikan manajemen, kepemilikan institusi, IOS dan DER tidak berpengaruh terhadap variabel DPR. Pada perusahaan PMA. Sedangkan pada perusahaan PMDN, variabel

- kepemilikan manajerial, IOS, ROA dan DER berpengaruh positif terhadap variabel DPR, hanya variabel kepemilikan institusi yang tidak berpengaruh terhadap variabel DPR.
5. Andriyani (2008) melakukan studi empiris pada perusahaan *automotive* di BEI tahun 2004-2006. Hasil penelitian menjelaskan bahwa secara parsial variabel *cash ratio*, IOS dan ROA berpengaruh positif, variabel DER berpengaruh negatif, sedangkan variabel *insider ownership* tidak berpengaruh terhadap variabel DPR.
 6. Nadjibah (2008) melakukan studi kasus pada perusahaan asuransi di BEI tahun 2000-2006. Hasil penelitian menjelaskan bahwa variabel *asset growth*, *size* dan *cash ratio* berpengaruh negatif sedangkan variabel ROA berpengaruh positif terhadap variabel DPR.
 7. Deitiana (2009) melakukan penelitian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pembayaran dividen kas. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa variabel EPS dan PER berpengaruh positif terhadap variabel DPR, variabel DER, ROA, *current ratio*, NPM, *inventory turnover* dan ROE tidak berpengaruh terhadap variabel DPR.
 8. Lubis (2009) melakukan penelitian pada perusahaan manufaktur jenis *consumer goods yang go public* di BEI. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa secara parsial variabel *current ratio* berpengaruh positif terhadap dividen kas, sedangkan *cash ratio* dan DER berpengaruh negatif. Namun, variabel ROI, DTA, dan EPS tidak berpengaruh terhadap dividen kas.
 9. Mulyono (2009) melakukan studi pada industri manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2005-2007. Hasil penelitian menjelaskan bahwa secara parsial variabel DER berpengaruh positif, variabel IOS berpengaruh negatif, sedangkan variabel *insider ownership* dan *firm size* tidak berpengaruh terhadap variabel DPR.
 10. Munthe (2009) menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen pada perusahaan yang terdaftar di BEI. Hasil uji secara parsial menunjukkan bahwa hanya variabel ROE yang berpengaruh positif terhadap variabel kebijakan dividen, sedangkan variabel kepemilikan manajerial, pertumbuhan dan ROA berpengaruh negatif. Namun, variabel arus kas bebas, penjaminan aktiva tetap dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap variabel kebijakan dividen.

1.6 Hipotesa

- h_1 : *Investment opportunity set* (IOS) berpengaruh terhadap *dividend payout ratio* (DPR) pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2007-2010.
- h_2 : *Return on asset* (ROA) berpengaruh terhadap *dividend payout ratio* (DPR) pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2007-2010.
- h_3 : *Return on equity* (ROE) berpengaruh terhadap *dividend payout ratio* (DPR) pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2007-2010.
- h_4 : *Cash ratio* berpengaruh terhadap *dividend payout ratio* (DPR) pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2007-2010.
- h_5 : *Debt to equity ratio* (DER) berpengaruh terhadap *dividend payout ratio* (DPR) pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2007-2010.

2. KERANGKA TEORITIS

2.1 Pengertian dan Teori Kebijakan Dividen

Kebijakan dividen adalah suatu keputusan untuk menentukan berapa besar bagian dari pendapatan perusahaan yang akan dibagikan kepada para pemegang saham dan yang akan diinvestasikan kembali atau ditahan di dalam perusahaan (Andriyani, 2008).

Menurut Atmaja (2008:285-288), ada berbagai pendapat atau teori tentang kebijakan dividen, yaitu sebagai berikut.

1. Dividen tidak relevan dari Modigliani dan Miller (MM). Menurut MM, nilai suatu perusahaan tidak ditentukan oleh besar kecilnya DPR, tapi ditentukan oleh laba bersih sebelum pajak (EBIT) dan kelas resiko perusahaan. Jadi menurut MM, dividen adalah tidak relevan.

Pernyataan ini didasarkan pada asumsi penting yang “lemah”, seperti: (1) pasar modal sempurna di mana semua investor adalah rasional; (2) tidak ada biaya emisi saham baru jika perusahaan menerbitkan saham baru; (3) tidak ada pajak; dan (4) kebijakan investasi perusahaan tidak berubah.

2. Teori *the bird in the hand*. Gordon dan Lintner menyatakan bahwa biaya modal sendiri akan naik jika DPR rendah karena investor lebih suka menerima dividen daripada *capital gains*. Menurut mereka, investor memandang *dividend yield* lebih pasti daripada *capital gains yield*.
3. Teori perbedaan pajak. Teori ini diajukan oleh Litzenberger dan Ramaswamy. Mereka menyatakan bahwa karena adanya pajak terhadap keuntungan *dividend* dan *capital gains*, para investor lebih menyukai *capital gains* karena dapat menunda pembayaran pajak. Oleh karena itu, investor mensyaratkan suatu tingkat keuntungan yang lebih tinggi pada saham yang memberikan *dividend yield* tinggi, *capital gains yield* rendah daripada saham dengan *dividend yield* rendah, *capital gains yield* tinggi. Jika pajak atas *dividend* lebih besar dari pajak atas *capital gains*, perbedaan ini akan makin terasa.
4. Teori *signaling hypothesis*. Ada bukti empiris bahwa jika ada kenaikan dividen, sering diikuti dengan kenaikan harga saham. Sebaliknya penurunan dividen pada umumnya menyebabkan harga saham turun. Fenomena ini dapat dianggap sebagai bukti bahwa para investor lebih menyukai dividen daripada *capital gains*. Tapi MM berpendapat bahwa suatu kenaikan dividen yang di atas biasanya merupakan suatu “sinyal” kepada para investor bahwa manajemen perusahaan meramalkan suatu penghasilan yang baik di masa mendatang. Sebaliknya, suatu penurunan dividen atau kenaikan dividen yang di bawah kenaikan normal diyakini investor sebagai suatu “sinyal” bahwa perusahaan menghadapi masa sulit di waktu mendatang.
5. Teori *clienteles effect*. Teori ini menyatakan bahwa kelompok (*clienteles*) pemegang saham yang berbeda akan memiliki preferensi yang berbeda terhadap kebijakan dividen perusahaan. Kelompok pemegang saham yang membutuhkan penghasilan pada saat ini lebih menyukai suatu DPR yang tinggi. Sebaliknya kelompok pemegang saham yang tidak begitu membutuhkan uang saat ini lebih senang jika perusahaan menahan sebagian besar laba bersih perusahaan. Jika ada perbedaan pajak bagi individu, maka kelompok pemegang saham yang dikenai pajak tinggi lebih menyukai *capital gains* karena dapat menunda pembayaran pajak. Kelompok ini lebih senang jika perusahaan membagi dividen yang kecil. Sebaliknya kelompok pemegang saham yang dikenai pajak relatif rendah cenderung menyukai dividen yang besar.

Selain teori-teori yang telah dijelaskan sebelumnya, ada juga teori tentang kebijakan dividen lainnya yang menjelaskan permasalahan mengenai dividen menurut Sriwulandari (2006), yaitu sebagai berikut.

1. *Residual theory*

Menurut teori ini, pembayaran dividen dilakukan jika perusahaan memiliki dana sisa setelah membiayai investasi-investasi yang memiliki *net present value* (NPV) positif dengan menggunakan pendapatan perusahaan yang ditahan (*retained earnings*). Dengan kata lain, pembayaran dividen merupakan prioritas terakhir perusahaan. Apabila perusahaan tidak memiliki dana sisa, maka tidak ada pembayaran dividen yang dilakukan.

2. *Agency theory*

Masalah keagenan merupakan isu penting dalam bidang keuangan. Masalah keagenan terjadi karena perbedaan kepentingan antara manajer, pemilik perusahaan, dan investor. Masalah keagenan akan memunculkan biaya agensi, yaitu biaya yang timbul akibat adanya perbedaan kepentingan tersebut. Menurut teori ini, dividen dapat dijadikan sebagai alat untuk meminimalisir biaya agensi. Dengan adanya pembayaran dividen, maka manajer harus mengeluarkan saham baru ataupun menggunakan utang baru untuk membiayai investasi. Hal ini menyebabkan manajer harus mengelola perusahaan dengan lebih baik karena investor menginginkan imbal hasil yang baik atas investasi yang dilakukan perusahaan. Di samping itu,

dengan adanya investor yang lebih banyak dan adanya kreditor baru, maka pengawasan atas kinerja perusahaan akan menjadi lebih ketat sehingga masalah keagenan dapat diminimalisir.

3. *Expectation theory*

Teori ini menyatakan bahwa para pemegang saham memiliki harapan masing-masing terhadap besarnya dividen yang akan dibayarkan perusahaan. Harapan atas besarnya dividen yang akan dibayarkan dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor internal perusahaan, seperti besarnya dividen tahun lalu, keputusan investasi perusahaan, dan pendapatan perusahaan tahun ini. Harapan pemegang saham juga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal, seperti kondisi perekonomian dan politik negara. Pada saat dividen diumumkan dan dibagikan, maka pemegang saham akan membandingkan keadaan aktual dengan harapan mereka.

Faktor-faktor lain yang perlu dipertimbangkan manajemen dalam menentukan *dividend payout* dikemukakan oleh Sudana (2011:170-171), antara lain dana yang dibutuhkan perusahaan, likuiditas, kemampuan perusahaan untuk meminjam, nilai informasi dividen, pengendalian perusahaan, pembatasan yang diatur dalam perjanjian pinjaman dengan pihak kreditor dan inflasi.

2.2 Dividend Payout Ratio (DPR)

Manajemen mempunyai dua alternatif perlakuan terhadap penghasilan bersih sesudah pajak (EAT) perusahaan: (1) dibagi kepada para pemegang saham perusahaan dalam bentuk dividen; dan (2) diinvestasikan kembali ke perusahaan sebagai laba ditahan (Atmaja, 2008:285). Besarnya persentase dividen yang dibagikan dapat diukur dengan *dividend payout ratio* (DPR). Semakin besar rasio ini berarti semakin sedikit bagian laba yang ditahan untuk membelanjai investasi yang dilakukan perusahaan (Sudana 2011:24). Rumus DPR menurut Mulyono (2009), yaitu:

2.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi DPR dalam Penelitian Ini

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi DPR suatu perusahaan perbankan, seperti yang dibahas dalam penelitian ini antara lain IOS, ROA, ROE, *cash ratio* dan DER. Hubungan antara faktor-faktor tersebut dengan DPR ialah sebagai berikut.

1. *Investment opportunity set* (IOS)

IOS merupakan variabel yang tidak dapat diobservasi, untuk itu diperlukan proksi. Menurut Goyal dan Adam (2007), terdapat empat proksi yang biasa digunakan untuk menentukan IOS suatu perusahaan, yaitu sebagai berikut.

- a. *Market to Book Assets Ratio*. Rasio ini menunjukkan bahwa prospek pertumbuhan perusahaan tercermin dalam harga pasar, karena nilai pasar mencerminkan adanya pertumbuhan aktiva dan kesempatan investasi di masa yang akan datang.
- b. *Market to Book Equity Ratio*. Rasio ini mencerminkan bahwa pasar menilai return dari investasi perusahaan di masa yang akan datang akan lebih besar dari return yang diharapkan dari ekuitasnya.
- c. *Earnings Price Ratio*. Rasio ini menunjukkan harga pasar saham terhadap laba per lembar saham. Semakin besar nilai *price to earnings* maka semakin besar kemungkinan yang dimiliki oleh perusahaan untuk bertumbuh atau mengembangkan bisnisnya.
- d. *Capital Expenditures to Net Plant Property and Equipment Ratio*. Proksi yang terakhir adalah *capital expenditures* yang dimiliki oleh perusahaan yang terbagi atas total *plant property* dan *equipment* pada awal periode. Investasi pada *capital expenditures* yang besar saat ini relatif memberikan kesempatan investasi yang lebih besar di masa depan.

Dari keempat proksi di atas, penelitian ini menggunakan proksi *market to book equity ratio* (MVE/BVE). Andriyani (2008) menyatakan bahwa rasio *market to book equity* mencerminkan bahwa pasar menilai *return* atas investasi perusahaan di masa depan dari *return*

yang diharapkan dari ekuitasnya. Adanya perbedaan nilai pasar dan nilai buku ekuitas menunjukkan kesempatan investasi bagi perusahaan. Oleh karena itu, IOS dapat diukur dengan menggunakan rumus MVE/BVE. Rumus MVE/BVE menurut Mulyono (2009), yaitu :

Keterangan:

MVE/BVE = *market to book equity ratio*

MC = Kapitalisasi pasar (lembar saham beredar dikalikan dengan harga saham)

TE = Total ekuitas

IOS menunjukkan seberapa besar kesempatan suatu perusahaan untuk berinvestasi guna mengembangkan bisnisnya di masa mendatang. Oleh karena kesempatan pengembangan tersebut, maka perusahaan membutuhkan dana. Pendanaan internal sering digunakan oleh kebanyakan perusahaan dalam pengembangan bisnisnya, yaitu dana yang berasal dari laba ditahan (laba setelah pajak yang disisihkan untuk membiayai kebutuhan perusahaan). Jika perusahaan memiliki kesempatan investasi yang besar, maka perusahaan akan menyisihkan laba dalam jumlah yang besar pula. Hal ini mengakibatkan laba yang akan dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen akan berkurang sesuai dengan besarnya laba ditahan perusahaan.

Teori residual yang dikemukakan oleh Sriwulandari (2006) menyatakan bahwa pembayaran dividen dilakukan jika perusahaan memiliki dana sisa setelah membiayai investasi-investasi yang memiliki *net present value* (NPV) positif dengan menggunakan pendapatan perusahaan yang ditahan (*retained earnings*). Dengan kata lain, pembayaran dividen merupakan prioritas terakhir perusahaan. Apabila perusahaan tidak memiliki dana sisa, maka tidak ada pembayaran dividen yang dilakukan.

Keputusan pembiayaan investasi dengan menggunakan pendanaan internal, yaitu dengan menggunakan pendapatan yang ditahan lebih disukai perusahaan dibandingkan dengan pembiayaan eksternal karena biaya yang dikeluarkan akan lebih murah. Oleh karena itu, perusahaan akan cenderung membiayai proyek-proyek investasi dengan menggunakan pendapatan ditahan. Sehingga, selama masih ada investasi yang dapat dibiayai, maka dividen yang akan dibayarkan perusahaan akan semakin sedikit tergantung kepada sisa dana internal yang ada.

Teori ini menjelaskan mengapa perusahaan yang sedang mengalami pertumbuhan cepat cenderung jarang membayarkan dividen dan memiliki rasio pembayaran dividen yang lebih rendah dibandingkan perusahaan yang pertumbuhannya sudah lambat karena ukurannya sudah besar. Perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi akan menahan pendapatannya untuk membiayai proyek-proyek investasi yang layak sehingga rasio pembayaran dividennya kecil. Sedangkan perusahaan yang sudah besar tidak terlalu banyak lagi membiayai proyek-proyek investasi sehingga lebih banyak menggunakan pendapatannya untuk membayarkan dividen. Dengan kata lain, IOS yang besar akan mengakibatkan DPR yang kecil dan IOS yang kecil akan mengakibatkan DPR yang besar.

2. *Return on asset* (ROA)

ROA merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat laba terhadap aset yang digunakan dalam menghasilkan laba tersebut (Prihadi, 2008:68). Menurut Sudana (2011:22), ROA menunjukkan kemampuan perusahaan dengan menggunakan seluruh aktiva yang dimiliki untuk menghasilkan laba setelah pajak. Rasio ini penting bagi pemegang saham untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi pengelolaan modal sendiri yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan. Semakin tinggi ROA, semakin efisien penggunaan aktiva perusahaan atau dengan kata lain dengan jumlah aktiva yang sama bisa dihasilkan laba yang lebih besar. Rumus ROA, yaitu:

Perusahaan yang dapat menghasilkan laba yang besar dikatakan sebagai perusahaan yang *profitable* atau perusahaan yang memiliki profitabilitas baik. Atmaja (2008:285) mengemukakan teori *signaling hypothesis* yang menyatakan bahwa kenaikan dividen merupakan suatu sinyal bagi investor yang menandakan adanya penghasilan yang baik di masa depan. Profitabilitas suatu perusahaan yang baik di masa yang akan datang dapat diramalkan melalui peningkatan jumlah dividen. Peningkatan laba (*earning after tax*) akan mempengaruhi nilai ROA, dalam hal ini ROA akan meningkat pula. Peningkatan ROA diharapkan adanya peningkatan dalam pembagian dividen.

Expectation theory yang dikemukakan oleh Sriwulandari (2006) menyatakan bahwa para pemegang saham memiliki harapan masing-masing terhadap besarnya dividen yang akan dibayarkan oleh perusahaan. Pada saat dividen diumumkan dan dibagikan, maka pemegang saham akan membandingkan keadaan aktual dengan harapan mereka. ROA merupakan salah satu rasio profitabilitas. ROA yang besar menunjukkan tingkat profitabilitas yang tinggi. Para investor akan mengharapkan dividen yang besar dari perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi. Oleh karena itu, perusahaan dengan ROA yang tinggi diharapkan memiliki DPR yang tinggi pula dan sebaliknya.

3. *Return on equity* (ROE)

Menurut Prihadi (2008:73), ROE menunjukkan besarnya laba atas modal sendiri atau ekuitas. Perhitungan ROE bias menggunakan basis setelah pajak maupun sebelum pajak. Namun, basis setelah pajak lebih sering digunakan dalam menghitung ROE. Rumus ROE, yaitu:

Sudana (2011:22) dalam bukunya mengatakan bahwa ROE menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba setelah pajak dengan menggunakan modal sendiri yang dimiliki perusahaan. Rasio ini penting bagi pihak pemegang saham untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi pengelolaan modal sendiri yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin efisien penggunaan modal sendiri yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan.

Selain ROA, ROE juga menunjukkan tingkat profitabilitas suatu perusahaan. Dengan rasio ini, tingkat profitabilitas diukur berdasarkan ekuitas perusahaan. Perusahaan yang memiliki laba yang besar berarti memiliki profitabilitas yang tinggi. Perusahaan seperti ini diharapkan dapat memberikan dividen yang besar. Sesuai dengan teori *signaling hypothesis*, perusahaan yang membagikan dividen dalam jumlah yang besar diramalkan memiliki penghasilan yang baik (Atmaja 2008:285). Suatu kenaikan dividen yang di atas biasanya merupakan suatu “sinyal” kepada para investor bahwa manajemen perusahaan meramalkan suatu penghasilan yang baik di masa mendatang. Sebaliknya, suatu penurunan dividen atau kenaikan dividen yang di bawah kenaikan normal diyakini investor sebagai suatu “sinyal” bahwa perusahaan menghadapi masa sulit di waktu mendatang.

Para investor memiliki harapan masing-masing terhadap besarnya dividen yang akan dibayarkan oleh perusahaan menurut *expectation theory* yang dikemukakan oleh Sriwulandari (2006). Seperti halnya ROA, perusahaan dengan ROE yang tinggi diharapkan oleh investor akan memiliki DPR yang tinggi pula dan sebaliknya.

4. *Cash ratio*

Cash ratio digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan kas yang tersedia dan yang disimpan di bank (Helmi, 2009). Rasio ini paling akurat dalam mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Semakin tinggi rasio likuiditas menunjukkan semakin baik kondisi keuangan

jangka pendek perusahaan, dan sebaliknya (Sudana 2011:21). Rumus *cash ratio* menurut Kasmir (2011:139), yaitu:

Cash ratio menunjukkan kemampuan kas dan setara kas yang dimiliki oleh perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Bank disebut likuid apabila bank tersebut memiliki kemampuan menyediakan uang tunai atau alat-alat pembayaran lainnya yang cukup. Suatu bank dianggap likuid apabila bank tersebut mempunyai kesanggupan untuk membayar penarikan giro, tabungan, deposito berjangka, pinjaman bank yang segera jatuh tempo, pemenuhan permintaan kredit tanpa adanya suatu penundaan (Pandia, 2012:113).

Hadiwidjaja (2007) menyatakan bahwa apabila masih ada peluang investasi yang bisa diambil, perusahaan akan lebih baik menggunakan dana dari aliran kas intern untuk membiayai investasi dan cenderung membayarkan dividen yang rendah. Selain itu, digunakannya seluruh kas yang tersedia untuk membayar hutang lancar perusahaan dapat mengakibatkan penghasilan pemegang saham (dividen) menurun. Oleh karena itu, perusahaan harus memiliki proporsi kas yang besar untuk dapat membagikan dividen dalam jumlah yang besar. Karena pembayaran dividen adalah prioritas terakhir perusahaan setelah membiaya investasi dan menutupi hutang perusahaan, hal ini sesuai dengan teori residual dari Sriwulandari (2006).

Cash ratio yang tinggi berarti bahwa perusahaan memiliki ketersediaan kas yang besar untuk membayar kewajiban jangka pendeknya. *Cash ratio* merupakan variabel penting yang dipertimbangkan oleh manajemen dalam kebijakan dividen. Pembayaran dividen merupakan arus kas keluar, oleh karena itu *cash ratio* yang tinggi akan memungkinkan perusahaan membayarkan dividen dalam jumlah yang besar.

5. *Debt to equity ratio* (DER)

Prihadi (2008:91-94) dalam bukunya menyatakan bahwa *debt to equity* adalah perbandingan antara hutang dengan modal sendiri atau *total capital*. Ide dasar dari rasio hutang adalah untuk mengetahui sampai seberapa besar porsi hutang dalam mendanai perusahaan. Rasio ini dibaca dengan cara kelipatan. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin buruk kondisi *solvency*-nya. Batasan setiap bank terhadap rasio ini berbeda-beda. Proporsi 70% hutang dan 30% modal cukup layak untuk dijadikan sebagai pedoman. Namun dalam kondisi tertentu, misalnya *project financing* angkanya menjadi 85% hutang dan 15% modal. Rumus DER, yaitu:

Perusahaan-perusahaan yang *profitable* memiliki lebih banyak *earnings* yang tersedia untuk retensi atau investasi dan karenanya, akan cenderung membangun ekuitas mereka relatif terhadap *debt* (Andriyani, 2008). Semakin meningkatnya rasio hutang (dimana beban hutang juga semakin besar) maka hal tersebut berdampak terhadap profitabilitas yang diperoleh perusahaan, karena sebagian laba digunakan untuk membayar bunga pinjaman. Dengan biaya bunga yang semakin besar, maka profitabilitas (*earnings after tax*) semakin berkurang, maka hak para pemegang saham (dividen) juga semakin berkurang (menurun). Hal ini menimbulkan *agency cost* yang merupakan biaya yang timbul karena perusahaan menggunakan hutang dan melibatkan hubungan antara pemilik perusahaan (pemegang saham) dan kreditor (Atmaja, 2008:258).

Semakin besar rasio ini mencerminkan resiko keuangan perusahaan yang semakin tinggi, dan sebaliknya (Sudana 2011:21). DER yang besar, mencerminkan tingkat resiko yang besar bagi perusahaan. Hal ini berarti perusahaan memiliki hutang dalam jumlah yang besar, sehingga perusahaan harus menggunakan laba ditahan untuk membayar hutang dan bunga hutang tersebut. Akibatnya, sebagian besar laba perusahaan akan disisihkan menjadi laba ditahan dan laba yang akan dibagikan sebagai dividen akan semakin kecil.

Teori residual yang dikemukakan oleh Sriwulandari (2006) juga menyatakan bahwa pembayaran dividen adalah prioritas terakhir jika perusahaan memiliki dana sisa untuk dibagikan sebagai dividen. Perusahaan akan mendahulukan pembiayaan terhadap investasi-investasi dan pembayaran atas pinjaman atau hutang beserta dengan bunga hutang. Pembayaran hutang dan bunga hutang ini diambil dari laba yang diperoleh perusahaan sehingga sisa laba semakin sedikit untuk dibagikan kepada para pemegang saham. Oleh karena itu, semakin besar DER maka semakin kecil DPR dan semakin kecil DER maka semakin besar DPR.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Data dan Sumber Data

3.1.1 Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif, yaitu data dari laporan keuangan dan ringkasan kinerja beberapa perusahaan perbankan yang membayarkan dividen secara berturut-turut selama tahun 2007-2010.

3.1.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder, di mana data yang digunakan ialah data perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI.

3.1.3 Populasi dan Sampel

Populasi penelitian adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI selama tahun 2007-2010. Terdapat 23 perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI pada periode tersebut.

Penentuan sampel ditentukan dengan *purposive sampling*, di mana sampel dipilih berdasarkan penilaian terhadap beberapa karakteristik anggota sampel yang disesuaikan dengan maksud penelitian (Kuncoro, 2009:139). Karakteristik sampel dalam penelitian ini, ialah sebagai berikut.

1. Perusahaan perbankan yang membayarkan dividen selama tahun 2007-2010 secara berturut-turut.
2. Perusahaan perbankan yang mempublikasikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit selama tahun 2007-2010.

Diperoleh 8 perusahaan sampel yang memenuhi karakteristik sampel dalam penelitian ini. Tabel 3.1 menunjukkan daftar nama perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini.

Tabel 3.1 Sampel Penelitian

No	Nama Perusahaan Perbankan
1	Bank Bukopin Tbk
2	Bank Bumi Artha Tbk
3	Bank Central Asia Tbk
4	Bank Danamon Indonesia Tbk
5	Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk
6	Bank Mandiri (Persero) Tbk
7	Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
8	Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Sumber: Data olahan (2012)

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi, yaitu penggunaan data dari dokumen historis BEI berupa laporan keuangan dan ringkasan kinerja perusahaan sampel. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data-data yang relevan dari buku, jurnal dan internet.

3.3 Metode Analisis

Model analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah model regresi data panel. Data panel adalah gabungan antara data runtut waktu (*time series*) dan data silang (*cross section*). Data runtut waktu biasanya meliputi satu objek/individu (misalnya harga saham, kurs mata uang, SBI, atau tingkat inflasi), tetapi meliputi beberapa periode (bisa harian, bulanan, kuartalan, atau tahunan). Data silang terdiri dari beberapa atau banyak objek, sering disebut responden (misalnya perusahaan) dengan beberapa jenis data (misalnya laba, biaya iklan, laba ditahan, dan tingkat investasi) dalam suatu periode waktu tertentu. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut.

Keterangan:

Y = *Dividend payout ratio* (DPR)

X₁ = *Investment opportunity set* (IOS)

X₂ = *Return on asset* (ROA)

X₃ = *Return on equity* (ROE)

X₄ = *Cash ratio*

X₅ = *Debt to equity ratio* (DER)

= Konstanta

= Koefisien regresi

= Error

3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu variabel dependen (Y) dan variabel independen (X). Definisi dan pengukuran variabel-variabel tersebut adalah sebagai berikut.

1. Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen adalah variabel yang menjadi perhatian utama dalam sebuah pengamatan (Kuncoro, 2009:50). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah DPR. DPR menunjukkan seberapa besar rasio dividen atas EPS perusahaan. DPR dapat dirumuskan sebagai berikut.

2. Variabel Independen (X)

Variabel independen adalah variabel yang dapat mempengaruhi perubahan dalam variabel dependen dan mempunyai hubungan yang positif ataupun yang negatif bagi variabel dependen nantinya (Kuncoro, 2009:50). Variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari beberapa variabel keuangan, yaitu *investment opportunity set* (IOS), *return on asset* (ROA), *return on equity* (ROE), *cash ratio* dan *debt to equity ratio* (DER). Indikator untuk mengukur variabel-variabel tersebut adalah sebagai berikut.

a. *Investment opportunity set* (IOS)

Investment opportunity set (IOS) menunjukkan seberapa besar kesempatan investasi bagi suatu perusahaan di masa depan. Variabel ini diukur dengan rasio MVE/BVE, yaitu rasio yang perhitungannya berdasarkan pada perbedaan antara aset dan nilai perusahaan. IOS dapat dirumuskan sebagai berikut.

b. *Return on asset* (ROA)

ROA menunjukkan seberapa besar tingkat pengembalian atas aset suatu perusahaan. ROA dapat dirumuskan sebagai berikut.

c. *Return on equity* (ROE)

ROE menunjukkan seberapa besar tingkat pengembalian atas ekuitas suatu perusahaan. ROE dapat dirumuskan sebagai berikut.

d. *Cash ratio*

Cash ratio menunjukkan kemampuan kas untuk menutupi utang jangka pendek perusahaan. *Cash ratio* dapat dirumuskan, sebagai berikut.

e. *Debt to equity ratio* (DER)

DER menunjukkan perbandingan antara total hutang dan total ekuitas perusahaan. DER dapat dirumuskan, sebagai berikut.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Menentukan Variabel Independen dan Variabel Dependen

Variabel independen (X_1 - X_5) dalam penelitian ini, yaitu *investment opportunity set* (IOS), *return on asset* (ROA), *return on equity* (ROE), *cash ratio* dan *debt to equity ratio* (DER). Sedangkan variabel dependen (Y) ialah *dividen payout ratio* (DPR).

4.1.2 Hasil Pengujian

Tabel 4.1 menunjukkan hasil uji model regresi data panel untuk 8 perusahaan perbankan periode 2007-2010 dengan menggunakan program eviews.

Tabel 4.1 Hasil Pengujian

Dependent Variable: DPR?				
Method: Pooled EGLS (Cross-section weights)				
Date: 11/07/12 Time: 19:10				
Sample: 2007 2010				
Included observations: 4				
Cross-sections included: 8				
Total pool (balanced) observations: 32				
Linear estimation after one-step weighting matrix				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.942305	0.232042	4.06092	0.0007
IOS?	0.052676	0.030453	1.729705	0.0999
ROA?	-18.93373	5.821055	-3.252628	0.0042
ROE?	0.576721	1.019615	0.565626	0.5783
CR?	0.065839	0.126245	0.521513	0.608
DER?	-0.054442	0.019997	-2.722567	0.0135
Fixed Effects (Cross)				
BBKP--C		0.283594		
BNBA--C		-0.352846		
BBCA--C		0.203409		
BDMN--C		-0.067779		
SDRA--C		-0.026069		
BMRI--C		0.052376		
BBNI--C		-0.058487		
BBRI--C		-0.034198		
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
Weighted Statistics				
R-squared	0.816975	Mean dependent var		0.505632
Adjusted R-squared	0.70138	S.D. dependent var		0.255177
S.E. of regression	0.139444	Sum squared resid		0.36945
F-statistic	7.067571	Durbin-Watson stat		2.423784
Prob(F-statistic)	0.000099			

Sumber: hasil olah eviews (2012)

4.1.3 Menentukan Besarnya Koefisien Determinasi (R^2)

Angka R^2 yaitu 0,81 yang berarti 81% nilai perusahaan dapat dijelaskan oleh variabel IOS, ROA, ROE, *cash ratio* dan DER. Sedangkan sisanya ($100\% - 81\% = 19\%$) disebabkan oleh faktor-faktor lain. Faktor-faktor lain yang dimaksud antara lain adalah pembagian dividen periode sebelumnya, kepemilikan manajerial, ukuran perusahaan, pertumbuhan perusahaan dan lain sebagainya.

4.1.4 Melakukan Pengujian Hipotesis

Setelah diperoleh nilai koefisien determinasi, selanjutnya dilakukan pengujian uji-F dan uji-t dengan hasil sebagai berikut.

1. Uji-F

Uji-F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen yaitu IOS (X_1), ROA (X_2), ROE (X_3), *cash ratio* (X_4) dan DER (X_5) secara bersama mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen yaitu DPR (Y).

Dari hasil perhitungan pengujian yang dilakukan (uji-F), dapat dilihat bahwa variabel-variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Hal ini didasarkan pada perbandingan F_{hitung} dengan F_{tabel} dan signifikansi hitung berada di angka 0,05. Berdasarkan hasil pengujian statistik Uji-F, F_{hitung} diperoleh angka 7,06 > dari F_{tabel} 2,59 dan sig. hitung 0,00009 < 0,05 ($\alpha=5\%$). Hal ini berarti bahwa variabel IOS, ROA, ROE, *cash ratio* dan DER secara bersama berpengaruh terhadap DPR perusahaan perbankan periode 2007-2010.

2. Uji-t

Setelah melakukan uji-F, maka selanjutnya dilakukan uji-t untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara parsial (individual) terhadap variabel dependen.

Dari hasil perhitungan pengujian yang dilakukan (uji-t) dapat dilihat bahwa variabel independen yang berpengaruh terhadap variabel dependen berdasarkan perbandingan t_{hitung} dengan t_{tabel} dan sig. hitung dengan $\alpha=5\%$, yaitu variabel ROA (X_2) dan DER (X_5). Hal ini ditunjukkan berdasarkan,

- a. Hasil uji-t variabel ROA t_{hitung} diperoleh angka -3,252 > 2,056 dari t_{tabel} dengan sig. hitung 0,004 < 0,05 ($\alpha=5\%$), dengan demikian H_2 diterima. Hal ini berarti bahwa variabel ROA berpengaruh negatif terhadap variabel DPR pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2007-2010.
- b. Hasil uji-t variabel DER t_{hitung} diperoleh angka -2,722 > 2,056 dari t_{tabel} dengan sig. hitung 0,013 < 0,05 ($\alpha=5\%$), dengan demikian H_5 diterima. Hal ini berarti bahwa variabel DER berpengaruh negatif terhadap variabel DPR pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2007-2010.

Sementara untuk variabel IOS (X_1), ROE (X_3) dan *cash ratio* (X_4) tidak berpengaruh terhadap variabel DPR (Y). Hal ini ditunjukkan berdasarkan,

- a. Hasil uji-t variabel IOS t_{hitung} diperoleh angka 1,730 < 2,056 dari t_{tabel} dengan sig. hitung 0,099 > 0,05 ($\alpha=5\%$), dengan demikian H_1 ditolak. Hal ini berarti bahwa variabel IOS tidak berpengaruh terhadap variabel DPR pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2007-2010.
- b. Hasil uji-t variabel ROE t_{hitung} diperoleh angka 0,565 < 2,056 dari t_{tabel} dengan sig. hitung 0,578 > 0,05 ($\alpha=5\%$), dengan demikian H_3 ditolak. Hal ini berarti bahwa variabel ROE tidak berpengaruh terhadap variabel DPR pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2007-2010.
- c. Hasil uji-t variabel *cash ratio* t_{hitung} diperoleh angka 0,521 < 2,056 dari t_{tabel} dengan sig. hitung 0,608 > 0,05 ($\alpha=5\%$), dengan demikian H_4 ditolak. Hal ini berarti bahwa variabel *cash ratio* tidak berpengaruh terhadap variabel DPR pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2007-2010.

4.1.5 Melakukan Interpretasi Model Regresi Linier Data Panel

Model regresi linier data panel dapat dituliskan persamaannya sebagai berikut.

$$Y = 4,06 + 1,73 X_1 - 3,25 X_2 + 0,56 X_3 + 0,52 X_4 - 2,72 X_5$$

Nilai konstan () = 4,06. Nilai ini menunjukkan bahwa apabila tidak ada variabel IOS, ROA, ROE, *cash ratio* dan DER (X_1 - X_5), maka variabel DPR (Y) akan sebesar 4,06. Dengan kata lain, variabel DPR akan sebesar 4,06 sebelum atau tanpa adanya variabel IOS, ROA, ROE, *cash ratio* dan DER (X_1 , X_2 , X_3 , X_4 dan $X_5 = 0$).

Nilai variabel IOS () = 1,73. Nilai parameter atau koefisien regresi ini menunjukkan bahwa setiap IOS meningkat 1 kali, maka DPR akan naik 1,73 kali dengan asumsi variabel lain tetap (X_2 , X_3 , X_4 dan X_5) atau *ceteris paribus*.

Nilai variabel ROA () = -3,25. Nilai parameter atau koefisien regresi ini menunjukkan bahwa setiap ROA meningkat 1 kali, maka DPR akan turun 3,25 kali dengan asumsi variabel lain tetap (X_1 , X_3 , X_4 dan X_5) atau *ceteris paribus*.

Nilai variabel ROE () = 0,56. Nilai parameter atau koefisien regresi ini menunjukkan bahwa setiap ROE meningkat 1 kali, maka DPR akan naik 0,56 kali dengan asumsi variabel lain tetap (X_1, X_2, X_4 dan X_5) atau *ceteris paribus*.

Nilai variabel *cash ratio* () = 0,52. Nilai parameter atau koefisien regresi ini menunjukkan bahwa setiap *cash ratio* meningkat 1 kali, maka DPR akan naik 0,52 kali. Dengan kata lain, setiap kenaikan variabel DPR dibutuhkan variabel *cash ratio* sebesar 0,52 dengan asumsi variabel lain tetap (X_1, X_2, X_3 dan X_5) atau *ceteris paribus*.

Nilai variabel DER () = -2,72. Nilai parameter atau koefisien regresi ini menunjukkan bahwa setiap DER meningkat 1 kali, maka DPR akan turun 2,72 kali dengan asumsi variabel lain tetap (X_1, X_2, X_3 dan X_4) atau *ceteris paribus*.

4.2 Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian menggunakan model regresi data panel, maka dapat dijelaskan hubungan antara variabel-variabel independen terhadap variabel dependen sebagai berikut.

1. *Investment opportunity set* (IOS)

Hipotesis yang pertama menyatakan bahwa *investment opportunity set* (IOS) berpengaruh terhadap *dividend payout ratio* (DPR) pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2007-2010. Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Mulyono (2009) yang menyatakan bahwa IOS berpengaruh negatif terhadap DPR. Studi pada industri manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2005-2007 menghasilkan nilai t_{hitung} sebesar -2,230 dengan nilai signifikansi sebesar 0,031 atau 3,1%. Hal ini menunjukkan ada pengaruh negatif antara variabel IOS dengan variabel DPR. Menurut teori residual yang dikemukakan oleh Sriwulandari (2006), pembayaran dividen dilakukan jika perusahaan memiliki dana sisa setelah membiayai investasi-investasi yang memiliki *net present value* (NPV) positif dengan menggunakan pendapatan perusahaan yang ditahan (*retained earnings*). Keputusan pembiayaan investasi dengan menggunakan pendapatan yang ditahan (pendanaan internal) lebih disukai perusahaan dibandingkan dengan pembiayaan eksternal karena biaya yang dikeluarkan akan lebih murah. Oleh karena itu, perusahaan akan cenderung membiayai proyek-proyek investasi dengan menggunakan pendapatan ditahan.

Namun, hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Kumar (2007) pada perusahaan PMDN yang terdaftar di BEI periode 2003-2005. Berdasarkan perhitungan uji secara parsial, hasilnya adalah nilai t_{hitung} sebesar (0,748) dan nilai signifikansi sebesar 0,456. Karena nilai signifikansi lebih besar dari 5% berarti tidak ada pengaruh signifikan antara variabel IOS dengan variabel DPR. Dalam hal ini, kesempatan investasi di masa yang akan datang tidak mempengaruhi kebijakan dividen perusahaan. Besarnya dividen yang akan dibagikan perusahaan kepada para pemegang sahamnya tidak diukur berdasarkan kemungkinan adanya pengembangan usaha di masa depan. Ada tidaknya peluang investasi di masa mendatang, tidak akan mempengaruhi besarnya dividen yang akan dibagikan perusahaan demi kesejahteraan para investornya.

2. *Return on asset* (ROA)

Hipotesis kedua menyatakan bahwa *return on asset* (ROA) berpengaruh negatif terhadap *dividend payout ratio* (DPR) pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2007-2010. Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Puspita (2009) yang menyatakan bahwa variabel ROA menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap DPR pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2005-2007 dengan koefisien regresi sebesar 0,352. Tanda positif pada koefisien regresi variabel ROA menunjukkan bahwa setiap terjadinya peningkatan pada variabel ROA akan mengakibatkan peningkatan pada variabel DPR. Teori *signaling hypothesis* Mondigliani-Miller menyatakan bahwa kenaikan dividen merupakan suatu sinyal kepada para investor bahwa manajemen meramalkan suatu penghasilan yang baik di masa yang akan datang. Berdasarkan teori tersebut

menunjukkan bahwa penghasilan yang tinggi melalui asset yang dimiliki yang tercermin dari ROA menunjukkan pengaruh positif terhadap kebijakan dividen yang tercermin dari DPR. ROA mengalami peningkatan karena laba yang dihasilkan berupa *earning after tax* juga mengalami kenaikan.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Munthe (2009) pada perusahaan yang terdaftar di BEI yang membagikan dividen periode 2005-2007. Dalam pembahasan dinyatakan bahwa variable ROA memiliki $t_{hitung} -3,384$ sedangkan $t_{tabel} 1,66$ dengan tingkat signifikansi sebesar 0,001 lebih kecil dari 5%. Artinya, terdapat pengaruh yang signifikan negatif terhadap kebijakan dividen. Semakin besar ROA, semakin kecil kebijakan dividen. Demikian sebaliknya, semakin kecil ROA, semakin besar kebijakan dividen. Semakin kecil ROA, maka semakin besar DPR. Hal ini terjadi karena untuk menjaga reputasi perusahaan dengan profitabilitas yang rendah (ROA yang rendah), maka perusahaan akan membagikan dividen dalam jumlah yang besar. Dengan jumlah dividen yang besar, pihak investor akan menganggap bahwa profitabilitas perusahaan tinggi walaupun pada kenyataannya tidak seperti itu. Teori *signaling hypothesis* menurut Atmaja (2008:285-288) menjelaskan bahwa dividen dalam jumlah yang kecil akan memberikan sinyal yang buruk bagi para investor, sehingga perusahaan akan selalu berupaya untuk memberikan dividen yang besar untuk sinyal yang baik meskipun terjadi penurunan laba.

Sebaliknya, semakin besar ROA, maka semakin kecil DPR. Hal ini terjadi karena pada saat profitabilitas perusahaan tinggi, perusahaan cenderung membayarkan dividen yang kecil. Keadaan ini disebabkan oleh sebagian keuntungan yang diperoleh perusahaan akan dialokasikan pada laba ditahan. Perusahaan berani menetapkan dividen yang rendah karena ada investor yang menginginkan dividen yang rendah sesuai dengan teori *clientele effect*. Di mana kelompok (*clientele*) pemegang saham yang berbeda akan memiliki preferensi yang berbeda terhadap kebijakan dividen perusahaan. Kelompok pemegang saham yang tidak begitu membutuhkan uang saat ini lebih senang jika perusahaan menahan sebagian besar laba bersih perusahaan. Begitu juga dengan kelompok pemegang saham yang dikenai pajak tinggi lebih senang jika perusahaan membagikan dividen yang kecil (Atmaja 2008:285-288).

3. *Return on equity* (ROE)

Hipotesis yang ketiga menyatakan bahwa *return on equity* (ROE) berpengaruh terhadap *dividend payout ratio* (DPR) pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2007-2010. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugroho (2010) yang menyatakan bahwa ROE memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap DPR. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi 0,000 ($< 0,05$). Sedangkan nilai $t_{hitung} 5,315 > t_{tabel} 1,9977$ yang menunjukkan bahwa ROE memiliki pengaruh yang signifikan terhadap DPR. Sesuai dengan teori *signaling hypothesis* (Atmaja 2008:285), pihak manajemen akan membayarkan dividen untuk memberikan sinyal mengenai keberhasilan perusahaan. Sinyal tersebut menyimpulkan bahwa kemampuan perusahaan untuk membayar dividen merupakan fungsi dari keuntungan. Dengan demikian profitabilitas mutlak diperlukan untuk perusahaan apabila hendak membayar dividen.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Deitiana (2009) pada perusahaan asuransi yang *go public* di BEI periode 2005-2007. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan *return on asset* terhadap *dividend payout ratio*, dengan nilai signifikansi sebesar 0,516 lebih besar dari 0,05 yang berarti hipotesis tidak dapat diterima. Perusahaan yang memiliki ROE yang tinggi berarti memiliki tingkat pendapatan yang besar dan dapat dikatakan memiliki profitabilitas yang tinggi atau merupakan perusahaan yang *profitable*. Namun, besar kecilnya nilai ROE suatu perusahaan tidak akan mempengaruhi kebijakan dividen perusahaan tersebut. Hal ini berarti juga bahwa tingkat profitabilitas suatu perusahaan yang diukur dengan jumlah ekuitas tidak

akan memberikan pengaruh pada jumlah dividen yang akan dibagikan oleh perusahaan tersebut sehingga persentase DPR juga tidak akan terpengaruh.

4. *Cash ratio*

Hipotesis yang keempat menyatakan bahwa *cash ratio* berpengaruh terhadap *dividend payout ratio* (DPR) pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2007-2010. Hasil penelitian ini tidak sama dengan hasil penelitian Andriyani (2008). Dari hasil perhitungan uji-t diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 2,439 dengan nilai signifikansi sebesar 0,027. Karena nilai t_{hitung} 2,439 lebih besar dari t_{tabel} 1,96 dan nilai signifikansi lebih kecil dari 5% yaitu sebesar 2,7%, berarti ada pengaruh positif antara variabel *cash ratio* terhadap variabel DPR. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa kas yang besar mencerminkan bahwa perusahaan tersebut juga akan membagikan dividen yang besar.

Namun, hasil penelitian ini sama seperti penelitian yang dilakukan oleh Priono (2006) pada perusahaan yang terdaftar di BEJ yang membagikan dividen periode 2002-2004. Dari hasil perhitungan uji secara parsial diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 1,133 dengan nilai signifikansi sebesar 0,260. Karena nilai signifikansi lebih besar dari 5%, maka hipotesis ditolak yang berarti bahwa tidak ada pengaruh signifikan antara variabel *cash ratio* dengan variabel DPS. *Cash ratio* tidak berpengaruh terhadap DPR karena pembagian dividen oleh suatu perusahaan tidak hanya memperhatikan besarnya kas yang dimiliki oleh perusahaan tersebut, tetapi juga memperhatikan faktor yang lain seperti laba, hutang dan sebagainya. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah kas dan setara kas yang dimiliki suatu perusahaan, tidak akan mempengaruhi besar kecilnya dividen yang akan dibagikan oleh perusahaan tersebut.

5. *Debt to equity ratio* (DER)

Hipotesis yang kelima menyatakan bahwa *debt to equity ratio* (DER) berpengaruh negatif terhadap *dividend payout ratio* (DPR) pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2007-2010. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Hadiwidjaja (2007), Andriyani (2008) dan Handayani (2010). Hadiwidjaja (2007) menyatakan bahwa faktor DER sebagai variabel bebas mempunyai pengaruh yang negatif dan tidak signifikan secara parsial terhadap DPR. Hal ini ditunjukkan dari nilai t_{hitung} sebesar -0,204 dan tingkat signifikansi 0,840 lebih besar dari 0,05, sehingga variabel DER berpengaruh negatif namun tidak signifikan secara parsial terhadap DPR. Semakin besar DER, maka semakin kecil DPR. DER yang tinggi menunjukkan bahwa proporsi hutang lebih besar dibandingkan dengan proporsi ekuitas, hal ini berarti perusahaan memiliki hutang yang besar. Hutang perusahaan yang besar akan mengurangi sebagian besar laba bersih perusahaan yang akan digunakan untuk menutupi hutang dan bunga hutang, akibatnya semakin kecil pendapatan yang akan dibagikan sebagai dividen yang juga menyebabkan nilai DPR semakin kecil karena perusahaan akan lebih memprioritaskan kewajiban dari pada dividen. Oleh karena itu, semakin besar hutang perusahaan, maka semakin kecil jumlah dividen yang akan diterima oleh para pemegang sahamnya. Sebaliknya, semakin kecil DER, maka semakin besar DPR. Sedikitnya jumlah hutang perusahaan akan menyediakan proporsi pendapatan bersih yang cukup besar yang tersedia untuk dibagikan kepada para pemegang saham. Untuk itu, investor sebaiknya berinvestasi pada perusahaan yang memiliki proporsi hutang yang rendah untuk memperoleh dividen yang tinggi.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh variabel-variabel independen, antara lain: (1) *investment opportunity set* (IOS); (2) *return on asset* (ROA); (3) *return on equity* (ROE); (4) *cash ratio*; dan (5) *debt to equity ratio* (DER) terhadap variabel dependen *dividend payout ratio* (DPR) pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2007-2010. Berdasarkan hasil pengujian

hipotesis dengan menggunakan model analisis regresi data panel, maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut.

1. Variabel *investment opportunity set* (IOS) tidak berpengaruh terhadap variabel *dividend payout ratio* (DPR).
2. Variabel *return on asset* (ROA) berpengaruh negatif terhadap variabel *dividend payout ratio* (DPR).
3. Variabel *return on equity* (ROE) tidak berpengaruh terhadap variabel *dividend payout ratio* (DPR).
4. Variabel *cash ratio* tidak berpengaruh terhadap variabel *dividend payout ratio* (DPR).
5. Variabel *debt to equity ratio* (DER) berpengaruh negatif terhadap variabel *dividend payout ratio* (DPR).

5.2 Saran

Dari hasil penelitian ini, dapat dikemukakan saran sebagai berikut.

1. Bagi investor yang berinvestasi untuk memperoleh dividen, analisis atas laporan keuangan perusahaan yang menjadi target investasi perlu dilakukan. Terutama analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen perusahaan. Hal ini sangat bermanfaat bagi investor dalam memperoleh pengembalian atas investasinya berupa dividen sesuai dengan harapan. Berdasarkan hasil penelitian, ROA dan DER dapat menjadi tolak ukur dalam memprediksikan besarnya DPR suatu perusahaan perbankan. Dengan informasi melalui kedua rasio perusahaan ini, para investor dapat menentukan target perusahaan perbankan yang tepat untuk dijadikan tempat berinvestasi.
2. Bagi perusahaan-perusahaan terutama perusahaan perbankan, menjaga kestabilan kondisi keuangan perusahaan sangatlah penting karena dapat mempengaruhi kondisi keuangan bidang usaha lainnya terutama kondisi keuangan negara. Kesehatan perbankan pun akan turut dinikmati oleh para investor dan masyarakat karena sesuai dengan fungsi bank adalah untuk menyediakan pendanaan baik untuk perusahaan, pemerintah, investor dan masyarakat. Dengan kondisi keuangan yang stabil, perusahaan perbankan dapat menentukan kebijakan dividen yang sebaik-baiknya demi kesejahteraan pemegang sahamnya. Sehingga para investor dapat bertahan dalam berinvestasi pada saham perusahaan yang sama.
3. Penelitian ini masih memiliki keterbatasan-keterbatasan, di antaranya keterbatasan variabel yang menjadi tolak ukur terhadap besarnya dividen suatu perusahaan perbankan. Di mana variabel-variabel yang diangkat dalam penelitian ini memberikan pengaruh sebesar 81% dan sisanya 19% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Untuk itu, disarankan bagi peneliti-peneliti selanjutnya untuk dapat melakukan penelitian dengan menggunakan variabel yang lebih banyak lagi. Selain itu, melakukan penelitian terhadap jenis perusahaan lain yang terdaftar di BEI serta menggunakan metode penelitian yang sesuai dengan perkembangan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriyani, M. (2008), Analisis Pengaruh Cash Ratio, Debt to Equity Ratio, Insider Ownership, Investment Opportunity Set (IOS), dan Profitability Terhadap Kebijakan Dividen, *Tesis Magister Manajemen*, 13-68.
- Anggraini, S. (2006), Analisis Variabel-variabel Keuangan yang Mempengaruhi Pembayaran Dividen, *Skripsi Akuntansi*, 55.
- Atmaja, L. S. 2008. *Teori dan Praktik Manajemen Keuangan*. Yogyakarta: ANDI.
- Deitiana, T. (2009), Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Pembayaran Dividen Kas, *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, Vol 11 (1):63.
- Hadiwidjaja, R. D. (2007), Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Dividend Payout Ratio pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia, *Tesis Magister Manajemen*, 17-92.

- Handayani, D. (2010), Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Dividend Payout Ratio pada Perusahaan Manufaktur di BEI Periode 2005-2007, *Skripsi Manajemen*, 68.
- Kasmir. 2010. *Manajemen Perbankan*. Edisi revisi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kasmir. 2011. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kumar, S. (2007), Analisis Pengaruh Struktur Kepemilikan, Investment Opportunity Set (IOS), dan Rasio-rasio Keuangan Terhadap Dividend Payout Ratio (DPR), *Tesis Magister Manajemen*, 63-70.
- Kuncoro, M. 2009. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Edisi ketiga. Jakarta: Erlangga.
- Lubis, Y. M. (2009), Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Dividen Kas pada Perusahaan Manufaktur Jenis Consumer Goods yang Go Public di Bursa Efek Jakarta, *Tesis Magister Akuntansi*, 50.
- Mulyono, B. (2009), Pengaruh Debt to Equity Ratio, Insider Ownership, Size dan Investment Opportunity Set Terhadap Kebijakan Dividen, *Tesis Magister Manajemen*, 5-62.
- Munthe, T. F. (2009), Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Dividen pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI, *Draft Skripsi Manajemen*, 82.
- Nadjibah (2008), Analisis Pengaruh Asset Growth, Size, Cash Ratio dan Return on Asset Terhadap Dividend Payout Ratio, *Tesis Magister Manajemen*, 67-68.
- Nugroho, R. F. (2010), Analisis Pengaruh Return on Equity, Insider Ownership, Investment Opportunity Set, Firm Size, Cash Flow, dan Debt Ratio Terhadap Dividend Payout Ratio, *Skripsi Manajemen*, 33-108.
- Pandia. 2012. *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Prihadi, T. 2008. *Deteksi Cepat Kondisi Keuangan: 7 Analisis Rasio Keuangan*. Jakarta: PPM.
- Priono, T. (2006), Analisis Pengaruh Rasio-rasio Keuangan, Pertumbuhan Asset dan Ukuran Perusahaan terhadap Dividend Per Share, *Tesis Magister Manajemen*, 53-55.
- Puspita, F. (2009), Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Dividend Payout Ratio, *Tesis Magister Manajemen*, 106-110.
- Sriwulandari, N. S. (2009), Faktor-faktor yang Mempengaruhi Dividend Payout Ratio Berdasarkan Stakeholder Theory: Analisis Empiris Terhadap Perusahaan-Perusahaan LQ-45 Periode 2004-2007, *Skripsi Manajemen*, 20-23.
- Sudana, I. M. 2011. *Manajemen Keuangan Perusahaan: Teori dan Praktik*. Jakarta: Erlangga.

PENGARUH FIXED ASSET, PROFITABILITAS DAN *COMPANY SIZE* PADA PERUSAHAAN KONSTRUKSI, PROPERTI DAN REAL ESTATE YANG LISTING PADA BURSA EFEK INDONESIA

Heidy Pesik
Ventje Ilat
Winston Pontoh

ABSTRAK

Berfokus pada Perusahaan-Perusahaan Konstruksi, Properti dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sepanjang tahun 2007-2010, penelitian ini menggunakan tiga variabel kunci yaitu : *Fixed Asset* , *Company Size* dan *Profitabilitas* sebagai variabel yang erat kaitannya dengan jenis perusahaan ini yang banyak mempergunakan “aset” seperti diatur dalam PSAK 34. Dengan menggunakan teknik analisa Regresi Linear Berganda berdasarkan Uji statistik F menunjukkan bahwa secara bersama sama ketiga variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap *Leverage* dengan tingkat signifikansi $0.02 < \alpha = 0.05$. Dan pada Uji t ditemukan bahwa hanya *Profitabilitas* saja yang secara signifikan berpengaruh terhadap *Leverage* sebesar 0.01. Sedangkan untuk *Fixed Aset* dan *Company Size* yang diukur dari Total Aset tidak signifikan berpengaruh terhadap *Leverage*.

Kata Kunci : *Fixed Asset, Company Size, Profitabilitas, Leverage, Perusahaan Konstruksi, Properti dan Real Estate.*

ABSTRACT

Focusing on Construction companies, property and Real Estate were listed on the Indonesia stock exchange during the year 2007-2010, this research uses three key variables, as follows: Fixed assets, Company Size and Profitabilitas as a variable that is closely related to the type of company that many use “asset” as set forth in PSAK NO. 34. By using Multiple Linear Regression analysis technique based on statistical tests F shows that three of the variables influence the variables significantly with $0.02 < \alpha = 0.05$ significance level with Leverage. And t-test found that only the Profitability that significantly affect the Leverage of 0.01. As for the Fixed assets and Company Size measured from the Total Assets insignificant effect on Leverage.

Keywords: *Fixed Asset, Company Size, Profitabilitas , Leverage, Perusahaan Konstruksi, Properti dan Real Estate.*

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini perkembangan pembangunan meningkat dengan cepat dan sangat membutuhkan pekerjaan konstruksi hampir disemua bidang. Perkembangan pembangunan infrastruktur juga sangat memainkan peranan penting dalam bertumbuhnya perusahaan perusahaan baru dalam sektor konstruksi , properti dan real estate . Kepuasan konsumen akan sejalan dengan mutu atau hasil yang di hasilkan dari suatu pekerjaan fisik oleh perusahaan konstruksi, properti dan real estate tersebut.

Dengan meningkatnya pembangunan infrastruktur hal ini juga memicu perusahaan konstruksi dan sejenis seperti properti dan real estate untuk melakukan ekspansi. Untuk ekspansi perusahaan memerlukan tambahan modal yang lebih, perusahaan mendapatkan tambahan dana external dengan menambah hutang. Menurut Babu dan Jain (1998) dalam Fitri Mega (2010) terdapat empat alasan mengapa perusahaan lebih menyukai penggunaan hutang daripada saham baru, yaitu: (1) adanya manfaat pajak atas pembayaran bunga (2) Biaya transaksi pengeluaran hutang lebih murah daripada biaya transaksi emisi saham baru; (3) lebih mudah mendapatkan pendanaan hutang daripada pendanaan saham; (4) Kontrol manajemen lebih besar adanya hutang baru daripada saham baru.

Ada beberapa penelitian tentang *Leverage* sebagai bagian dari *Capital Structure* serta faktor – faktor yang mempengaruhi. Ferri & Jones (1979) dalam Friend & Hasbrouck (1986) struktur keuangan dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain klasifikasi industri, ukuran perusahaan, risiko bisnis (*Business Risk*), & *Operating Leverage*. Penelitian Rajan & Zingales (1995) mengatakan bahwa ada 4 faktor penting yang berhubungan dengan *Leverage* perusahaan yaitu *Tangible Asset*, *The Market to Book Ratio (Investment Opportunity)*, ukuran perusahaan (*Firm Size*) & *Profitability* perusahaan. Fitri Mega (2010) menganalisa Ukuran Perusahaan (*Size*), Risiko Bisnis (BRISK), Likuiditas (CR), Kebijakan Hutang (DTA) dengan hasil ukuran perusahaan dan risiko bisnis berpengaruh signifikan terhadap kebijakan hutang , likuiditas tidak berpengaruh.

Ramlalli (2009) menjelaskan bahwa perusahaan cenderung menggunakan *Retained Earning*, kemudian hutang dan terakhir adalah *Equity* dan dari hasil penelitian yang dilakukan menyimpulkan bahwa faktor – faktor yang mempengaruhi *Leverage* seperti *Growth*, *Size*, *Tangibility of Assets*, *Profitability*, *Liquidity* , *Non-Debt Tax Shield*, *Age* dan *Investment* dengan hasil bahwa *Profitability* tidak berpengaruh terhadap *Leverage* , *Tangibility Asset* dan *Size* berpengaruh terhadap *Leverage*. Hasil penelitian yang dihasilkan oleh Nugroho (2006) ukuran perusahaan yang biasanya di ukur dengan besaran aset tidak berpengaruh terhadap kebijakan hutang dan penelitian ini bertentangan dengan yang dilakukan Ozkan (2000) bahwa *Profitabilitas* berpengaruh signifikan terhadap *Leverage Ratio* tetapi tidak untuk ukuran perusahaan.

Karena banyaknya faktor-faktor yang berpengaruh terhadap Struktur Modal termasuk *Leverage* dengan hasil yang beragam pula dari beberapa penelitian terdahulu, kita tidak bisa mengambil suatu kesimpulan yang absolut karena waktu dan jenis perusahaan yang berbeda. Hal inilah yang menarik penulis untuk lebih fokus kepada faktor – faktor yang menurut penulis lebih dekat dengan karakteristik perusahaan konstruksi.

Adapun karakteristik utama berdasarkan PSAK 34 perusahaan konstruksi ini adalah pekerjaan yang dilakukan dalam industri konstruksi didasarkan atas kontrak dengan pemberi kerja. Kegiatan yang dilakukan perusahaan pada industri ini biasanya melebihi dari satu siklus normal operasi perusahaan. Selain itu setiap kontrak biasanya menghasilkan produk yang spesifik dan bukan merupakan produk yang sama.

Ruang lingkup kegiatan usaha pada industri konstruksi adalah :

1. Kontrak untuk pembangunan sebuah aset tunggal.
2. Kontrak untuk pembangunan sejumlah aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal rancangan, teknologi dan fungsi atau tujuan dan penggunaan pokok.
3. Kontrak untuk penghancuran atau restorasi aset dan restorasi lingkungan setelah penghancuran aset.
4. Kontrak untuk pemberian jasa dalam bidang perencanaan konstruksi
5. Kontrak untuk pemberian jasa dalam bidang pengawasan pekerjaan konstruksi sejak awal pelaksanaan pekerjaan sampai dengan diserahkan terimanya kepada pemberi kerja.

Dan faktor – faktor yang mempengaruhi tersebut yaitu faktor *Profitabilitas* dan *Assets (Fixed Asset dan Total Assets)*, dimana perusahaan konstruksi dalam perkembangannya selalu erat kaitan dengan “aset” Sedangkan untuk faktor *Profitabilitas*, yang menunjukkan kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan bagi investor sangat penting untuk diteliti dalam hal pembiayaan proyek - proyek konstruksi yang ada . *Company Size* erat kaitannya dengan total aset , yang seperti penjelasan sebelumnya bahwa “aset” berkaitan erat dengan karakteristik konstruksi yang bervariasi untuk ketiga faktor tersebut sangat menarik untuk di kaji lebih dalam lagi khususnya untuk perusahaan konstruksi dan sejenis yaitu properti dan real estate.

Menurut Halpin dan Woodhead 1998 dalam Sudarto (2011:4) Secara umum industri konstruksi sesuai dengan jenis dan tipe bangunan yang dihasilkan dapat dibagi menjadi empat bagian yaitu

- a. Konstruksi Rekayasa Berat (*Heavy Engineering Construction*) antara lain dam, terowongan , jembatan, jalan airport, system transportasi kota, pelabuhan, pemipaan, *water treatment plants*, jaringan komunikasi.

- b. Konstruksi Gedung antara lain sekolah, universitas , rumah sakit, gedung perkantoran, gudang ,teater, mal , pusat rekreasi.
- c. Konstruksi Perumahan antara lain rumah perorangan , multi unit *townhouses*, apartemen, kondominium.

Tingginya tingkat hutang atau *Leverage* pada perusahaan yang ada di Indonesia mendorong penulis mengangkat tesis dengan judul :

“PENGARUH *FIXED ASSET*, *PROFITABILITAS* DAN *COMPANY SIZE* TERHADAP *LEVERAGE* PADA PERUSAHAAN KONSTRUKSI, PROPERTI DAN REAL ESTATE YANG LISTING PADA BURSA EFEK INDONESIA” Ditinjau teori struktur modal bila perusahaan mengalami kesulitan likuiditas karena keputusan yang salah dalam melakukan *Leverage* akan sangat membebani perusahaan dalam melakukan kewajiban pembayaran karena perusahaan harus tetap membayar beban bunga dan angsuran pinjaman sesuai dengan perjanjian kredit walaupun mengalami penurunan keuntungan.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan data struktur modal pada perusahaan konstruksi, properti dan real estate yang terdaftar di BEI serta teori teori yang melandasinya dan dari hasil penelitian terdahulu, dalam penelitian ini permasalahan dapat di rumuskan sebagai berikut

1. Apakah *Fixed Asset* signifikan berpengaruh terhadap *Leverage* ?
2. Apakah *Profitabilitas* signifikan berpengaruh terhadap *Leverage* ?
3. Apakah *Company Size* signifikan berpengaruh terhadap *Leverage* ?

1.3. Tujuan Penelitian

Supaya penelitian ini bisa memberikan pemahaman sesuai dengan yang apa yang diharapkan, maka dalam penelitian ini terdapat beberapa batasan yang ditetapkan, yaitu:

1. Objek penelitian yang dipilih adalah seluruh perusahaan konstruksi dan sejenis dalam hal ini properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2007 sampai dengan tahun 2010.
2. Penelitian ini dibatasi masalah ada atau tidaknya pengaruh *Fixed asset* , *Profitabilitas* dan *Company Size* terhadap *Leverage* pada perusahaan konstruksi, properti dan real estate yang listing tahun 2007-2010. Penelitian ini bertujuan untuk:
 1. Untuk menganalisa apakah *Fixed Asset* berpengaruh signifikan terhadap *Leverage* khususnya perusahaan konstruksi, properti dan real estate yang listing di BEI tahun 2007 – 2010
 2. Untuk menganalisa apakah *Profitabilitas* berpengaruh signifikan terhadap *Leverage* khususnya pada perusahaan konstruksi, properti dan real estate yang listing di BEI tahun 2007 – 2010
 3. Untuk menganalisa apakah *Company Size* berpengaruh signifikan terhadap *Leverage* khususnya pada perusahaan konstruksi, properti dan real estate yang listing di BEI tahun 2007 – 2010

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Bagi perusahaan yang telah tercatat di Bursa Efek Indonesia diharapkan penelitian ini memberikan masukan terhadap kebijakan hutang (*Leverage*) sebagai sumber dana bagi pengembangan usaha.
2. Bagi Program studi Magister Akuntansi Universitas Sam Ratulangi tesis ini merupakan tambahan kekayaan hasil penelitian yang dapat di gunakan untuk penelitian lebih lanjut lagi.
3. Bagi pembaca khususnya bisa menambah wawasan lebih luas lagi tentang pengaruh *Fixed Asset*, *Profitabilitas* dan *Company Size* terhadap *Leverage* pada perusahaan konstruksi, properti dan real estate sehingga bisa dikembangkan untuk penelitian lebih lanjut.

1.5. Tinjauan Pustaka

Pengertian struktur modal itu sendiri adalah bauran (proporsi) pendanaan permanen jangka panjang perusahaan yang ditunjukkan oleh hutang. Sedangkan struktur modal perusahaan adalah pembiayaan permanen yang terdiri dari hutang jangka panjang, saham preferen dan modal pemegang saham. Menurut Weston dan Copeland (1997) seperti dikutip oleh Santika dan Bambang (2011) struktur keuangan adalah bagaimana perusahaan membiayai aktivitya dan dapat dilihat dari pada seluruh sisi kanan dan neraca yang terdiri dari hutang jangka pendek dan jangka panjang sehingga kebijakan struktur modal mempunyai peran yang cukup tinggi bagi kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang.

Beberapa teori struktur modal telah di kembangkan khususnya untuk menganalisa pengaruh penggunaan hutang terhadap nilai perusahaan dan biaya modal. Modigliani & Miller memasukkan pengaruh pajak perusahaan dan *Agency Cost* atau konflik antar pihak dalam perusahaan. Sejalan dengan pemikiran Modigliani dan Miller (1958) ada dua aliran dalam struktur modal, pertama target *Leverage Ratio* yang di definisikan sebagai bauran antara tingkat hutang dan ekuitas. Kemudian Myers (1984) menyempurnakan teori ini dan disebut *The Pecking Order Hypothesis*. Aliran kedua ini ini mengemukakan bahwa pemilihan struktur modal akan mengikuti tingkatan disebut *The Fund Cost Hierarchy*, dimana tingkatan pertama adalah menggunakan pendanaan dari dalam perusahaan (*Retained Earnings*), kemudian hutang dan yang terakhir menerbitkan saham di pasar modal De Jong (1998).

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Trade-off Theory*

Teori *Trade Off* menyatakan dimana perusahaan menyeimbangkan manfaat dari pendanaan dengan utang, karena utang memberikan manfaat perlindungan pajak. Dengan kata lain hutang bermanfaat bagi perusahaan bagi perusahaan karena bunga dapat dikurangkan dalam penghitungan pajak.

Trade-off theory beranggapan bahwa perusahaan mempunyai rasio yang yang optimal antara hutang dan ekuitas yang di tentukan oleh manfaat dan biaya hutang (Brigham, 1992; Brigham dan Daves, 2002; Megginson, 1997) seperti di kutip Florentina (2004) . Biaya dan manfaat berhubungan dengan hutang adalah :

1. Pajak (*Taxation*) Modigliani dan Miller (1963) berpendapat bahwa perusahaan yang memiliki *Leverage* akan memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan tanpa *Leverage*. Sebagai implikasinya peningkatan pajak akan meningkatkan penggunaan hutang perusahaan. (Zyblock, 1997)
2. Biaya kebangkrutan dan kesulitan keuangan (*Bankruptcy dan Financial Distress Costs*). Kebangkrutan menyebabkan biaya langsung dan tidak langsung. Biaya langsung meliputi pengeluaran untuk jasa hukum, biaya yang terkait dengan masalah kepercayaan dan pembayaran ke pihak pihak lain misalnya pemegang saham dan pihak yang member pinjaman sedangkan biaya kebangkrutan tidak langsung meliputi terputusnya operasional, kehilangan pemasok dan pangsa pasar dan terputusnya hubungan dengan kreditur. Biaya Keagenan (*Agency Cost*). Hal ini menunjuk pada struktur kepemilikan dan tingkat hutang, dimana dapat terjadi konflik antara pemegang saham dan pemberi pinjaman serta antara pemegang saham dengan manajer (Jensen dan Meckling. 1976; Haris Raviv, 1991; Megginson, 1997) seperti dikutipoleh Florentina (2004 :11) Perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang signifikan diharapkan lebih menggunakan modalnya sendiri daripada hutang sebagai sumber dananya.

2.2 *Pecking – Order Theory*

Dalam *Pecking – Order Theory* menyatakan bahwa keputusan pendanaan perusahaan memiliki suatu hierarki. Perusahaan akan cenderung untuk menggunakan sumber pendanaan internal yaitu *Retained Earning* daripada dana eksternal dalam aktivitas pendanaan. Myers dan Majluf (1984).

Perusahaan perusahaan yang *Profitable* umumnya meminjam dalam jumlah yang sedikit. Perusahaan perusahaan yang kurang *Profitable* cenderung mempunyai hutang yang lebih besar karena alasan dana internal yang tidak mencukupi kebutuhan. Dana eksternal dalam bentuk hutang lebih disukai karena pertimbangan biaya emisi hutang jangka panjang lebih murah dibanding dengan biaya emisi saham.

Menurut Priantahara (2010) aktiva tetap adalah kekayaan perusahaan yang memiliki wujud, mempunyai manfaat ekonomis lebih dari satu tahun dan diperoleh perusahaan. Untuk melaksanakan kegiatan perusahaan, bukan untuk di jual kembali karena kekayaan ini mempunyai wujud sering kali aktiva tetap ini disebut dengan aktiva tetap berwujud. Dan aktiva tetap dalam perusahaan konstruksi umumnya di golongkan sebagai berikut :

1. Tanah
2. Gedung dan Bangunan
3. Mesin dan peralatan
4. Investasi kantor
5. Kendaraan

Item-item ini relatif permanen dan seringkali secara kolektif mencerminkan investasi keuangan terbesar perusahaan. Sistem yang efektif akan mendukung manajemen, pelaporan keuangan dan pelaporan ke pihak yang berwenang dan juga memiliki internal control yang memadai.

Definisi aktiva tetap menurut PSAK No. 16 adalah aktiva berwujud yang di peroleh dalam bentuk siap pakai atau dengan di bangun terlebih dahulu, yang di gunakan dalam operasi perusahaan , tidak di maksudkan untuk di jual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

Dalam hal ini , aktiva tetap memiliki beberapa unsur antara lain sebagai berikut :

1. Masa manfaat adalah : suatu periode aktiva yang diharapkan digunakan oleh perusahaan atau jumlah produksi atau unit serupa yang di harapkan diperoleh dari aktiva oleh perusahaan.
2. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang di berikan untuk memperoleh suatu aktiva pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aktiva tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk di pergunakan.
3. Nilai wajar adalah suatu jumlah untuk itu suatu aktiva mungkin ditukar atau suatu kewajiban diselesaikan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi secara wajar.
4. Jumlah tercatat (*Carrying Amount*) adalah nilai buku , yaitu biaya perolehan suatu aktiva setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
5. Jumlah yang dapat di peroleh kembali (*Recoverable Amount*) jumlah yang di harapkan dapat di peroleh kembali dari penggunaan suatu aktiva dimasa yang akan datang, termasuk nilai sisanya atas pelepasan aktiva.

Untuk diakui sebagai aktiva tetap maka harus dipenuhi syarat sebagai berikut :

1. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi dimasa yang akan datang berkaitan dengan aktiva tersebut akan mengalir ke dalam perusahaan.
2. Biaya perolehan aktiva dapat diukur secara andal. Dimana transaksi dengan pihak eksternal dan perusahaan untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan input lain yang di gunakan dalam proses transaksi.
3. Aktiva yang akan digunakan dalam operasi / kegiatan utama perusahaan dan tidak untuk di jual.
4. Memiliki unsur ekonomi yang panjang, biasanya lebih dari satu tahun dan disusutkan nilainya dan
5. Memiliki bentuk fisik yang aktual.

Akan muncul masalah apabila perusahaan mempunyai *Leverage* yang tinggi dengan *Fixed Asset* yang rendah. Jadi *Fixed Asset* mempunyai pengaruh yang positif dengan *Leverage*, karena *Fixed Asset* dapat di pergunakan sebagai jaminan sehingga dapat meminimalkan konflik antara pemegang saham

dan kreditur (Megginson, 1997) seperti yang di kutip oleh Florentina (2004). Dengan demikian perusahaan yang memiliki lebih banyak *Fixed Asset* lebih mampu mengatasi kesulitan keuangan. Karena pada waktu perusahaan mengalami kepailitan aktiva berwujud tersebut dapat di cairkan. Perusahaan kecil akan cenderung untuk biaya modal sendiri dan biaya hutang jangka panjang lebih mahal dari pada perusahaan besar. Maka perusahaan kecil akan cenderung menyukai hutang jangka pendek dari pada jangka hutang jangka panjang karena biayanya lebih rendah. Rahardjo dan Hartantiningrum, (2006) seperti yang di kutip oleh Joni dan Lina (2010). Hal ini dapat dihubungkan dengan adanya aturan struktur finansial konservatif horisontal yang menyatakan bahwa besarnya modal sendiri hendaknya paling sedikit dapat menutup jumlah aktiva tetap plus aktiva lain yang sifatnya permanen. Dan perusahaan yang sebagian besar dari aktivasnya terdiri atas aktiva lancar akan mengutamakan kebutuhan dananya dengan hutang.

Penelitian terdahulu, Rajan dan Zingales (1995) mengukur aktiva tetap sebagai rasio antara total aktiva tetap dengan *Total Asset* dan berpendapat bahwa *Fixed Asset* perusahaan dapat di pergunakan sebagai jaminan yang akan mengurangi resiko bagi pihak yang memberikan pinjaman seperti halnya jika terjadinya pergeseran resiko (*Risk Shifting*). Menurut Riyanto seperti di kutip oleh Elim (2010) kebanyakan perusahaan industri dimana sebagian besar modalnya tertanam dalam aktiva tetap, akan mengutamakan pemenuhan modalnya dari modal permanen, yaitu modal sendiri.

2.3 Hubungan profitabilitas dengan Leverage

Profitabilitas merupakan tingkat keuntungan bersih yang mampu diraih oleh perusahaan pada saat menjalankan operasionalnya. Pada lingkungan pasar modal laporan keuangan yang di publikaasikan adalah informasi yang sangat penting bagi setiap pelaku pasar. Dan salah satu faktor yang menjadi perhatian adalah pada nilai keuntungan yang di dapat pada tahun berjalan. Dalam teori ekonomi juga dikenal adanya istilah profit atau laba, akan tetapi pengertian profit atau laba di dalam teori ekonomi berbeda dengan pengertian profit atau laba menurut akuntansi.

Dalam teori ekonomi, para ekonom mengartikan profit sebagai suatu kenaikan dalam kekayaan perusahaan, sedangkan dalam akuntansi, profit adalah perbedaan pendapatan yang direalisasi dari transaksi yang terjadi pada waktu dibandingkan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan pada periode tertentu (Harahap, 1997 dalam Makalah Artikel Ekonomi).

Laba atau rugi sering dimanfaatkan sebagai ukuran untuk menilai prestasi perusahaan atau sebagai dasar ukuran penilaian yang lain, seperti laba per lembar saham. Unsur-unsur yang menjadi bagian pembentuk laba adalah pendapatan dan biaya. Dengan mengelompokkan unsur-unsur pendapatan dan biaya, akan dapat diperoleh hasil pengukuran laba yang berbeda antara lain: laba kotor, laba operasional, laba sebelum pajak, dan laba bersih atau *Net Income*

Pecking Order Theory mengatakan bahwa perusahaan lebih menyukai *Internal Funding*. Perusahaan dengan *Profitabilitas* yang tinggi tentu memiliki dana internal yang lebih banyak dari pada perusahaan dengan *Profitabilitas* rendah. Menurut *Pecking – Order Theory Profitabilitas* perusahaan mempunyai pengaruh negative dengan tingkat hutang. Myers dan Majluf (1984) memprediksi bahwa akibat dari informasi asimetri, perusahaan akan memilih menggunakan dana internal dari pada dana eksternal sehingga terdapat pengaruh yang negative antara *Leverage* dengan *Profitabilitas*. Tingkat pengembalian yang tinggi memungkinkan untuk membiayai sebagian besar kebutuhan pendanaan dengan dana yang dihasilkan secara internal. Menurut Pandey (2002:7) bahwa perusahaan dengan *Free Cash Flow*, atau memiliki *Profitabilitas* yang tinggi akan mempunyai *higher debt*. Hal ini menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap struktur modal perusahaan

Saat memperoleh pendanaan perusahaan akan menginvestasikannya pada berbagai aset. Aset mencerminkan sumber keamanan sekunder bagi pemberi pinjaman dan diperoleh dari pinjaman yang dijamin oleh aset tertentu hingga aset yang tersedia sebagai pengaman umum bagi kreditor tanpa jaminan. (Subramanyam dan Wild, 2010:263). Salah satu tolak ukur yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan adalah ukuran aset dari perusahaan tersebut. Perusahaan yang memiliki total aset besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah mencapai tahap kedewasaan dimana

dalam tahap ini arus kas perusahaan sudah positif dan dianggap memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang relatif lama, selain itu juga mencerminkan bahwa perusahaan relatif lebih stabil dan lebih mampu menghasilkan laba dibanding perusahaan dengan total aset yang kecil (Indriani, 2005 seperti dikutip oleh Ibrahim (2008 :21).

Aset merupakan tolok ukur besaran atau skala suatu perusahaan. Biasanya perusahaan besar mempunyai aset yang besar pula nilainya. Secara teoritis perusahaan yang lebih besar mempunyai kepastian (*Certainty*) yang lebih besar dari pada perusahaan kecil sehingga akan mengurangi tingkat ketidak pastian mengenai prospek perusahaan ke depan. Hal tersebut dapat membantu investor memprediksi risiko yang mungkin terjadi jika ia berinvestasi pada perusahaan itu (Yolana dan Martani, 2005 seperti di kutip oleh Ibrahim (2008 :21)

Ukuran perusahaan merupakan indikator yang menunjukkan kekuatan financial perusahaan. Perusahaan besar dapat mengakses pasar modal dan memiliki fleksibilitas dan kemampuan lebih untuk mendapatkan dana Wahidahwati 2002 seperti dikutip oleh Joni dan Lina (2010 :86) Perusahaan besar dapat memberikan jaminan dalam hal pelunasan hutang yang lebih besar daripada perusahaan yang kecil . Perusahaan yang besar juga memiliki kecenderungan untuk menggunakan sumber dana eksternal daripada perusahaan kecil karena *accessibility* perusahaan ke pasar modal . (Joni dan Lina , 2010:86)

Penentuan ukuran perusahaan ini didasarkan kepada total aset perusahaan Machfoedz (1994) yang dikutip oleh Ibrahim (2008: 21) . Perusahaan yang memiliki ukuran lebih besar akan lebih mudah memasuki pasar modal karena lebih memiliki fleksibilitas dan kemampuan mendapatkan dana.

Suatu perusahaan yang besar dimana sahamnya tersebar dengan sangat luas, setiap penambahan modal saham akan mempunyai pengaruh yang kecil terhadap kemungkinan hilangnya kontrol dari pihak dominan terhadap perusahaan yang bersangkutan. Ukuran perusahaan merupakan indikator kemampuan perusahaan dalam mengambil peluang bisnis yang ada. Semakin besar kesempatan perusahaan untuk menjalankan peluang bisnis maka semakin besar pula risiko yang dihadapi perusahaan.

Besar kecilnya ukuran suatu perusahaan akan berpengaruh terhadap struktur modal, semakin besar perusahaan maka akan semakin besar pula dana yang dibutuhkan perusahaan untuk melakukan investasi Ariyanto (2002) seperti dikutip oleh Joni dan Lina (2010). “ *The cost issuing debt or equity is also related to firm size. Small firms may be more leveraged than large firms but prefer to borrow short term rather than long term debt to lower cost*” (Riyad , 2010). Perusahaan kecil membutuhkan dana yang sedikit membiayai kebutuhan operasionalnya begitu juga dengan perusahaan besar semakin besar juga membutuhkan dana oprasionalnya karena itu perusahaan besar membutuhkan tambahan dana dalam bentuk “debt” (Riyad 2010 :21)

Leverage keuangan merupakan penggunaan utang untuk meningkatkan laba. *Leverage* memperbesar keberhasilan (laba) dan kegagalan (rugi) manajerial. Utang yang terlalu besar menghambat inisiatif dan fleksibilitas manajemen untuk mengejar kesempatan yang menguntungkan.(Subramanyam dan Wild, 2010:265)

Leverage merupakan salah satu rasio solvabilitas yaitu rasio untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jika perusahaan itu di likuidasi. (Darsono dan Ashari 2005:76) Rasio solvabilitas yang lain adalah dalam bentuk *Debt to Equity*. Semakin rendah DER berarti semakin kecil tingkat hutang yang dimiliki dan kemampuan untuk membayar akan semakin tinggi pula. Semakin tinggi rasio ini akan makin besar risiko yang dihadapi .Ketika perusahaan memutuskan untuk menggunakan dana eksternal berbentuk hutang maka akan semakin besar kewajibannya . Dan hal ini akan mengurangi pendapatan bersih.

Baik *Debt Ratio* dan *Debt to Equity Ratio* sama sama sebagai alat pengukur kinerja perusahaan yang dipakai dalam analisis keuangan , perbedaannya terletak pada tujuan analisisnya. Informasi *Debt Ratio* diperlukan kreditor untuk mengetahui ketidakmampuan perusahaan dalam membayar semua kewajibannya. Sedangkan informasi *Debt to Equity Ratio* diperlukan oleh pemegang saham apabila

terdapat penurunan dalam DER menunjukkan sebagian besar investasi yang dilakukan oleh perusahaan harus didanai dari ekuitas pemegang saham. (Subramanyam dan Wild, 2010:265)

Dalam penelitian ini *Leverage* yang digunakan merupakan perhitungan sederhana *Debt to Equity Ratio* yang membandingkan total hutang perusahaan dari modal pemegang saham. *Shareholders Equity* diperoleh dari Total asset dikurangi Total utang. Irham (2012: 63) menyatakan bahwa DER tidak mempunyai batasan berapa yang aman bagi perusahaan , namun konservatif biasanya DER yang lewat 66 % atau 2/3 dianggap beresiko.

Menurut Subramanyam dan Wild (2010:265) dari sudut pandang pemegang saham, utang adalah sumber pendanaan eksternal yang lebih disukai karena dua alasan :

1. Bunga atas sebagian besar utang jumlahnya tetap, dan jika bunga lebih kecil daripada pengembalian atas aset operasi bersih, selisih pengembalian tersebut akan menjadi keuntungan bagi investor ekuitas.
2. Bunga merupakan beban yang dapat mengurangi pajak, sedangkan dividen tidak

Hal ini terkait dengan manfaat dari penggunaan sumber dana hutang untuk pemenuhan kegiatan perusahaan. Misalnya, pada tahap ini dimana keuntungan sudah cukup tinggi dan beban pajak juga relative tinggi pemenuhan dana dari alternatif utang dalam banyak hal dapat menekan besarnya pajak. Para kreditor lebih menyukai rasio hutang yang moderat, oleh karena semakin rendah rasio ini, akan ada semacam perisai sehingga kerugian yang diderita kreditor semakin kecil jika terjadi likuidasi. Rasio utang (debt ratio) akan mencapai puncaknya pada saat perusahaan berada pada tahap kedewasaan (mature).

Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil , mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing – masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain. Pengguna jasa adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan / proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi

Kontrak konstruksi adalah suatu kontrak yang di negosiasikan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi aset yang berhubungan erat satu sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan teknologi dan atau fungsi atau pengguna pokok.

Kontrak harga tetap adalah kontrak konstruksi dengan syarat bahwa kontraktor menyetujui nilai kontrak tetap, atau tarif tetap yang telah di ditentukan per unit *output*, yang dalam beberapa hal tunduk pada klausa – klausa kenaikan biaya.

Kontrak biaya plus adalah kontrak konstruksi dimana kontraktor mendapatkan penggantian untuk biaya biaya yang telah diizinkan atau telah di tentukan, ditambah imbalan dengan persentase terhadap biaya atau imbalan tetap.

Suatu kontrak konstruksi mungkin di negosiasikan untuk membangun sebuah aset tunggal seperti jembatan, bangunan, bendungan , pipa , jalan , kapal dan terowongan. Kontrak konstruksi juga berkaitan dengan sejumlah aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal rancangan , teknologi dan fungsi atau tujuan pokok penggunaan, contoh kontrak seperti ini misalnya konstruksi kilang minyak atau bagian bagian lain yang kompleks dari pabrik atau peralatan. Dalam pernyataan ini, kontrak konstruksi meliputi

- (a) Kontrak pemberian jasa yang berhubungan langsung dengan konstruksi aset, misalnya, pelayanan jasa untuk manajer proyek dan arsitek; dan
- (b) Kontrak untuk penghancuran atau restorasi aset dan restorasi lingkungan setelah penghancuran aset. Jika suatu kontrak mencakup sejumlah aset, konstruksi dari setiap aset diperlukan sebagai suatu kontrak konstruksi yang terpisah jika:
 - (a) Proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset
 - (b) Setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah dan kontraktor serta pemberi kerja dapat menerima atau menolak bagian kontrak yang berhubungan dengan masing masing aset tersebut.
 - (c) Biaya dan pendapatan masing masing aset dapat di identifikasi.

Suatu Kontrak mungkin berisi klausul yang memungkinkan konstruksi aset tambahan atas permintaan pelanggan atau dapat diubah sehingga konstruksi aset tambahan dapat dimasukkan ke dalam kontrak tersebut. Konstruksi aset tambahan diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi terpisah jika:

- (a) Aset tambahan tersebut berbeda secara signifikan dalam rancangan teknologi atau fungsi dengan aset yang tercakup dalam kontrak semula; atau
- (b) Harga set tambahan tersebut di negosiasikan tanpa memperhatikan harga kontrak semula.

Pendapatan kontrak diukur pada nilai wajar dari imbalan yang diterima atau akan diterima. Pengukuran pendapatan kontrak dipengaruhi oleh beragam ketidakpastian yang bergantung pada hasil dari peristiwa dimasa depan. Estimasi sering kali perlu untuk direvisi sesuai dengan realisasi dan hilangnya ketidakpastian. Oleh karena itu, jumlah pendapatan kontrak dapat meningkat atau menurun dari suatu periode ke periode berikutnya. Misalnya

- (a) Kontraktor dan pelanggan mungkin menyetujui penyimpangan atau klaim yang meningkatkan atau menurunkan pendapatan kontrak pada periode setelah periode yang disetujui pada kontrak awal;
- (b) Jumlah pendapatan yang disetujui dalam harga tetap dapat meningkat karena ketentuan kenaikan biaya;
- (c) Jumlah pendapatan kontrak dapat menurun karena denda yang timbul akibat keterlambatan kontraktor dalam penyelesaian kontrak tersebut; atau
- (d) Jika dalam kontrak harga tetap terdapat harga tetap per unit output, pendapatan kontrak meningkat jika jumlah unit meningkat.

Biaya kontrak terdiri atas:

- (a) Biaya yang berhubungan langsung dengan kontrak tertentu
- (b) Biaya yang dapat diatribusikan pada aktivitas kontrak secara umum dan dapat dialokasikan pada kontrak tersebut; dan
- (c) Biaya lain yang secara spesifik dapat ditagihkan ke pelanggan sesuai isi kontrak.

Biaya kontrak meliputi biaya –biaya yang dapat diatribusikan pada suatu kontrak selama periode sejak tanggal kontrak itu diperoleh sampai dengan penyelesaian akhir kontrak. Namun biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kontrak dan terjadi untuk memperoleh kontrak juga dimasukkan sebagai bagian dari biaya kontrak jika biaya tersebut dapat diidentifikasi secara terpisah dan dapat diukur secara andal dan kemungkinan besar kontrak tersebut dapat diperoleh. Jika biaya-biaya yang terjadi untuk memperoleh kontrak diakui sebagai beban pada periode terjadinya, maka biaya tersebut tidak dimasukkan dalam biaya kontrak ketika kontrak tersebut diperoleh pada periode selanjutnya.

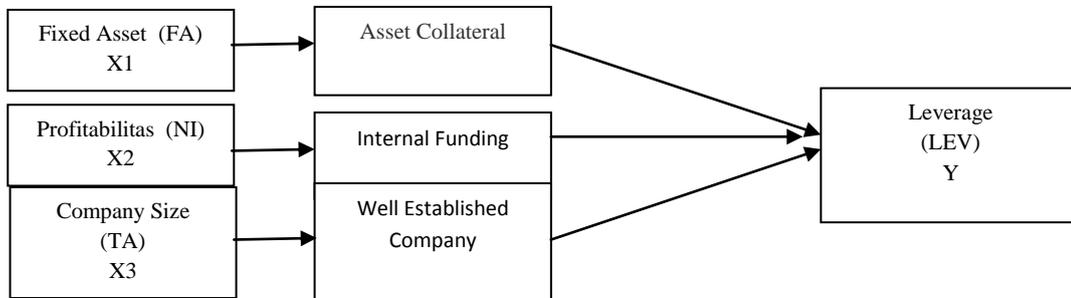
2.4 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu dilakukan di dalam dan diluar negeri antara lain :

1. Penelitian yang dilakukan Rajan dan Zingales (1995) dengan leverage sebagai dependen variabel . Untuk variabel independen terdiri dari *tangibility*, *market to book*, *Size*, dan *profitability*. Dengan hasil semuar berpengaruh terhadap *Leverage*.
2. Ozkan Aydin (2000) dengan *Leverage Ratio* sebagai Dependen Variabel, dengan ukuran perusahaan, Kesempatan tumbuh, *non – debt tax shield*, *profitabilitas* dan likuiditas sebagai variabel independen. Semua berpengaruh signifikan terhadap *leverage ratio*.
3. Fitri Mega (2010), Dependen :Kebijakan Hutang (*DTA*) dan Nilai Perusahaan (*PBV*)
Indpenden : Ukuran Perusahaan (Size) Risiko Bisnis (BRISK) Likuiditas (CR) , Ukuran Perusahaan, (Size) :Positif dan Signifikan terhadap DTA, Risiko Bisnis (BRISK) Negatif dan Signifikan terhadap DTA, Likuiditas (CR) Positif dan tidak Signifikan , DTA berpengaruh negative dan Signifikan terhadap Nilai Perusahaan (PBV)
4. Homaifar dan Zietz *et al* (1994) Dependen : *leverage ratio* Independen : Tingkat pajak perusahaan, *unleverade tax rate*, *non debt tax shelter*, ukuran perusahaan kesempatan pertumbuhan kondisi

pasar modal, dengan hasil Pada jangka Panjang tingkat pajak perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap leverage ratio *Unleverade tax rate, non debt tax shelter* menunjukkan hasil tidak signifikan terhadap leverage ratio. Ukuran perusahaan menunjukkan hasil positif signifikan.

5. Steven dan Lina (2011), Dependen : *Kebijakan Hutang Independen : Dividend Policy, Investment, Firm Growth, Aset Structure, Size, Profitability, Managers Ownership* , dengan hasil *Dividend Policy, Aset Structure, Profitability* Berpengaruh Signifikan Terhadap Kebijakan Hutang, Sementara *Investment, Firm Growth, Size, Managers Ownership* tidak berpengaruh terhadap Kebijakan Hutang.



3. Kerangka Konseptual dan Perumusan Hipotesis

3.1 Kerangka Konseptual

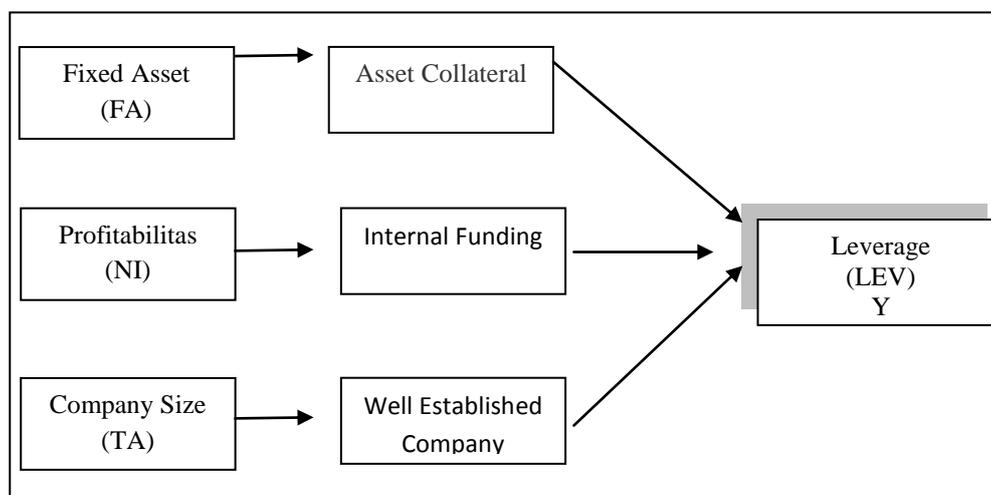
Kerangka konseptual dalam suatu penelitian perlu dikemukakan apabila penelitian berkenaan dengan dua variabel atau lebih. Apabila penelitian hanya membahas sebuah variabel atau lebih secara mandiri, maka perlu dilakukan deskripsi teoritis masing-masing variabel dengan argumentasi terhadap variasi besarnya variabel yang diteliti.

Kerangka konseptual yang baik menurut Sugiyono yang dikutip oleh Iskandar (2008: 54) sebagai berikut:

1. Variabel-variabel penelitian yang akan diteliti harus jelas.
2. Kerangka konseptual haruslah menjelaskan hubungan antara variabel-variabel yang akan diteliti, dan ada teori yang melandasi.
3. Kerangka konseptual tersebut lebih selanjutnya perlu dinyatakan dalam bentuk diagram, sehingga masalah penelitian yang akan dicari jawabannya mudah dipahami.

Dan berdasarkan teori dan hasil penelitian sebelumnya terhadap *Leverage* maka dapat disusun kerangka pemikiran teoritis seperti pada gambar 3.1

Gambar 3.1
Kerangka Konseptual :



3.2 Perumusan Hipotesis

Dalam penelitian suatu hipotesis mempunyai berbagai fungsi penting. Fungsinya yang paling penting adalah sebagai pedoman untuk mengarahkan penelitian. Dengan demikian hipotesis mengarahkan bentuk desain penelitian mana yang paling sesuai. (Sunyoto, 2011:102) . Menurut Nasir (1988) seperti dikutip oleh Surhayadi dan Purwanto (2009 : 82) hipotesis yang baik mempunyai ciri-ciri (a) menyatakan hubungan, (b) sesuai dengan fakta, (c) sederhana dan dapat diuji, dan (d) dapat menerangkan fakta dengan baik.

Dalam penelitian ini ditariklah hipotesis :

H_{a1} : *Fixed Asset* berpengaruh signifikan terhadap *Leverage*

H_{a2} : *Profitabilitas* berpengaruh signifikan terhadap *Leverage*

H_{a3} : *Company Size* berpengaruh signifikan terhadap *Leverage*

3.3 Model Analisis

Model analisis regresi linear berganda dengan model seperti dibawah ini

$$Y = \alpha + \beta_1.X_1 + \beta_2.X_2 + \beta_3.X_3 + e \quad (4)$$

Atau

$$LEV = \alpha + \beta_1.FA + \beta_2.NI + \beta_3.LnTA + e \quad (4)$$

4. METODE PENELITIAN

4.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono (2007:13), "Data kuantitatif adalah data dalam bentuk angka – angka atau data kualitatif yang diangkakan. "Sedangkan data sekunder eksternal yaitu data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui perantara , seperti orang lain atau dokumen menurut Sugiyono (2007:129). Data sekunder merupakan data yang sudah ada, data tersebut sudah dikumpulkan sebelumnya untuk tujuan – tujuan yang tidak mendesak. Keuntungan data sekunder ialah sudah tersedia, ekonomis dan cepat didapat. Sarwono & Surhayati (2010: 69)

Data yang digunakan penulis dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh mengunduh data laporan keuangan tahunan perusahaan konstruksi dan sejenis properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2007-2010. Adapun data yang diunduh adalah data laporan tahunan untuk tahun 2007- 2010 dari situ www.idx.co.id dan ICMD.

4.2 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan konstruksi, properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2007-2010. Sampel adalah bagian dari jumlah maupun karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. (Sugiyono, 2007) .

Berdasarkan studi pendahuluan, populasi dalam penelitian karya akhir ini adalah seluruh perusahaan usaha jasa konstruksi, properti dan real estate yang terdaftar di laporan keuangan audit secara berkala secara terus menerus selama tahun amatan.

Teknik pengambilan sampel adalah *Purposive Sampling*, yaitu penarikan sampel dengan pertimbangan tertentu . Pertimbangan tersebut didasarkan pada kepentingan atau tujuan penelitian . Penarikan dengan sampel *purposive* dibagi menjadi dua cara : (a) *Convenience Sampling* , yaitu penarikan sampel berdasarkan keinginan peneliti seduai dengan tujuan penelitian , dan (b) *Judgment Sampling* yaitu penarikan sampel berdasarkan penilaian terhadap karakteristik anggota sampel yang disesuaikan dengan tujuan peneliti. Surhayadi dan Purwanto (2008), adanya kriteria tertentu yang di tempuh dalam pengambilan sampel , dengan tahapan sebagai berikut:

1. Menentukan jumlah perusahaan konstruksi, properti dan real estate yang terdaftar di BEI sepanjang tahun 2007 sampai dengan 2010

2. Menetapkan jumlah emiten aktif perusahaan konstruksi, properti dan real estate sepanjang tahun 2007 sampai dengan 2010.

Total perusahaan konstruksi, properti dan real estate sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2010 yang secara terus menerus listing ada 52 perusahaan

Dan pada penelitian ini jumlah sampel sama dengan jumlah populasi 52 perusahaan, yang terdiri dari 44 perusahaan properti dan real estate serta 8 perusahaan konstruksi jumlah tersebut sebagai dasar untuk menguji hipotesis penelitian.

4.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini dilakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Melalui penelusuran jalur internet dengan alamat situs : www.idx.co.id, www.bapepam.go.id, www.deperindag.go.id
2. Melalui Indonesia Capital Market Directory untuk memperoleh data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan (Laporan Laba/rugi, dan neraca)
3. Studi literatur yaitu dengan mengumpulkan data kepustakaan yang berhubungan dengan penelitian.

4.4 Identifikasi Variabel

4.4.1 Variabel Tergantung (*Dependent Variable*)

Variabel tergantung adalah variabel yang memberikan reaksi /respon jika dihubungkan dengan variabel bebas. Variabel tergantung adalah variabel yang keberadaannya diamati dan diukur untuk menentukan pengaruh yang disebabkan oleh variabel bebas. Sarwono & Suhayati (2010 : 32).

Leverage digunakan untuk mengukur hubungan antara total hutang dengan modal ekuitas dikenal dengan *Debt to equity ratio (DER)* merupakan rasio yang mengukur tingkat penggunaan hutang (leverage) terhadap total *Shareholder's Equity* yang dimiliki perusahaan.

Secara matematis DER adalah perbandingan antara total hutang atau total *debts* dengan total *shareholder's equity*.

4.4.2 Variabel Bebas (*Independent Variable*)

Variabel bebas merupakan variabel stimulus atau variabel yang mempengaruhi variabel lain. Variabel bebas merupakan variabel yang pengaruhnya diukur, dimanipulasi, atau dipilih oleh peneliti untuk menentukan hubungannya dengan suatu gejala yang diobservasi dalam kaitannya dengan variabel lain. Sarwono dan Suhayati (2010:31)

Fixed Asset, adalah kekayaan perusahaan untuk melaksanakan kegiatan perusahaan, bukan untuk di jual kembali karena kekayaan ini mempunyai wujud sering kali aktiva tetap ini disebut dengan aktiva tetap berwujud. Data yang di gunakan adalah total *fixed assets* pada perusahaan konstruksi, properti dan real estate (Aktiva Tetap = *Fixed Asset*).

Profitabilitas, mengukur seberapa profit perusahaan tersebut dinilai dari *Net income*. *Net Income* merupakan tingkat keuntungan bersih yang mampu diraih oleh perusahaan pada saat menjalankan oprasionalnya pada penelitian ini data yang di ambil yaitu total *Net Income*. Khusus setiap *Net Loss* dari perusahaan yang merepresentasikan nilai negative tidak digunakan.

Company Size, diukur dari seberapa banyak total asset yang diperoleh, salah satu tolak ukur yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan adalah ukuran aset dari perusahaan tersebut. Total aktiva dipilih sebagai proksi atas ukuran perusahaan dengan mempertimbangkan bahwa nilai aktiva relative lebih stabil dibandingkan dengan nilai market capitalized dan penjualan menurut Wuryatiningsih 2002 dalam Ayu Putri (2011:68)

4.5. Teknik Analisis

4.5.1 Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan pengolahan terhadap data untuk Analisis regresi berganda, data harus memenuhi uji asumsi klasik terlebih dahulu.

a. Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Untuk menguji apakah residual berdistribusi normal atau tidak dapat diuji dengan dua cara yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. Cara termudah dalam melihat normalitas residual adalah dengan menggunakan grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal.

Untuk mendeteksi normalitas data bisa juga dengan analisis statistik yang dapat dilihat melalui Kolmogorov-Smirnov test (K-S). Uji K-S dilakukan dengan membuat hipotesis. Apabila nilai Z uji K-S signifikan secara statistik maka H_0 ditolak, yang berarti data terdistribusi tidak normal. Dan apabila nilai Z uji K-S tidak signifikan statistik maka H_0 di terima, yang berarti data terdistribusi normal.

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan sebagai upaya untuk menentukan ada dan tidaknya korelasi yang sempurna atau mendekati hubungan yang sempurna. Menurut Hasan (2002:281) dalam Sunyoto (2011:144) non multikolinieritas adalah hubungan antara variabel bebas yang satu dengan variabel yang lain dalam regresi tidak terjadi hubungan yang mendekati sempurna. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas. Multikolinieritas dapat dilihat dari nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Dasar acuannya :

1. Jika nilai VIF < 5 , maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antara variabel independen dalam model regresi
2. Jika nilai VIF > 5 , maka dapat disimpulkan bahwa ada multikolinieritas antara variabel independen dalam model regresi.

c. Uji Autokorelasi Data

Pengujian asumsi yang lain dalam model regresi linier klasik adalah *autocorrelation*. Untuk menguji keberadaan *autocorrelation* dalam penelitian ini digunakan metode *Durbin-Watson test*, dimana angka-angka yang diperlukan dalam metode tersebut adalah dl , du , $4 - dl$, dan $4 - du$. Jika nilainya mendekati 2 maka tidak terjadi autokorelasi, sebaliknya jika mendekati 0 atau 4 terjadi autokorelasi (+/-).

d. Uji Heterokedastisitas Data

Uji Heteroskedasitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap maka disebut homoskedasitas, dan jika berbeda maka disebut heteroskedasitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedasitas dan tidak terjadi heteroskedasitas. Ada beberapa cara yang digunakan untuk mengetahui terjadi heteroskedastisitas pendeteksian ada tidaknya heteroskedastisitas bisa dilakukan dengan menggunakan metode *Glejser Test*, yaitu dengan cara meregresikan nilai absolute residual terhadap variabel independent

4.5.2 Koefisien Korelasi dan Koefisien Determinasi

Koefisien korelasi digunakan untuk mengukur kekuatan, tingkat signifikansi 5% dan arah hubungan antara variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). Besarnya koefisien korelasi berkisar antara +1 s/d -1. Jika koefisien korelasi positif, maka kedua variabel mempunyai hubungan searah, jika koefisien korelasi negatif, maka kedua variabel mempunyai hubungan terbalik. Kriteria kekuatan hubungan antara dua variabel adalah sebagai berikut :

1. 0 : tidak ada korelasi
2. $>0-0,25$: korelasi sangat lemah
3. $>0,25-0,5$: korelasi cukup

4. >0,5-0,75 : korelasi kuat
5. >0,75-0,99 : korelasi sangat kuat
6. 1 : korelasi sempurna

Koefisien determinasi (R^2) dimaksudkan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Gujarati, 2004). Nilai koefisien determinasi (R^2) antara 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai R^2 yang mendekati satu lebih (Gujarati, 2004: 213) baik berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Kelemahan mendasar pada penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Setiap tambahan satu variabel independen, maka R^2 pasti akan meningkat tanpa melihat apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

4.5.3 Regresi Linear Berganda

Data akan diolah dengan menggunakan Analisa Regresi Berganda dengan program SPSS , sehingga akan dapat dilihat signifikansi pengaruh masing-masing variabel independent terhadap variabel dependent. Persamaan fungsinya dirumuskan sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Dimana :

- Y : *Leverage*
- α : Konstanta yang menyatakan bahwa jika tidak ada variabel *Fixed Asset, Profitabilitas dan Company Size* maka nilai *Leverage* akan sebesar a satuan.
- β_1 : Koefisien yang menyatakan bahwa setiap penambahan 1 satuan pada *Fixed asset* akan mempengaruhi *Leverage* sebesar b_1
- X_1 : *Fixed Asset*
- β_2 : Koefisien yang menyatakan bahwa setiap penambahan 1 satuan pada *Profitabilitas* akan mempengaruhi *Leverage* sebesar b_2 .
- X_2 : *Profitabilitas*
- β_3 : Koefisien yang menyatakan bahwa setiap penambahan 1 satuan pada *Company Size* akan mempengaruhi *Leverage* sebesar b_2 .
- X_3 : *Company Size*
- ε : *error*

4.5.4 Uji F dan Uji t

Setelah memenuhi syarat asumsi klasik, maka dilakukan uji statistik regresi linier dengan program SPSS Versi 17.00, sehingga akan dapat diketahui signifikansi pengaruh masing-masing variabel independent terhadap variabel dependent.

Untuk mengetahui tingkat signifikansi variabel independent terhadap variabel dependent secara bersama-sama / simultan dilakukan Uji statistik dengan uji F.

Uji F dilakukan dengan membandingkan Nilai F hitung dengan nilai F tabel pada signifikansi 5 %, apabila :

1. nilai F hitung > nilai F tabel maka H_a diterima, H_0 ditolak.
2. nilai F hitung < nilai F tabel maka H_a ditolak , H_0 diterima.

Dalam Uji F hipotesis penelitian ini bisa berbunyi sebagai berikut :

$H_0: \beta_1, \beta_2, \beta_3 = 0$, artinya variabel *Fixed Asset, Profitabilitas dan Company Size* berpengaruh tidak signifikan terhadap *Leverage* pada perusahaan konstruksi, properti dan real estate yang listing pada BEI tahun 2007 sampai 2010

$H_a: \beta_1, \beta_2, \beta_3 \neq 0$, artinya variabel *Fixed Asset, Profitabilitas dan Company Size* berpengaruh signifikan terhadap *Leverage* pada perusahaan konstruksi, properti dan real estate yang listing pada BEI tahun 2007 sampai 2010

Uji t digunakan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan atau pengaruh yang berarti antara variabel independen (*Fixed asset, Profitabilitas dan Company Size*) secara parsial atau masing masing terhadap variabel dependen (*Leverage*), dengan tingkat signifikan Dengan kriteria pengujian diatas, jika :

1. $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau apabila signifikan $< 0,05$ maka H_0 ditolak berarti variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat
2. $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau apabila signifikan $> 0,05$ maka H_a ditolak berarti variabel bebas berpengaruh tidak signifikan terhadap variabel terikat.

5. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Gambaran Umum dan Hasil Penelitian

Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan konstruksi, properti dan real estate yang listing dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia, namun ada beberapa kriteria harus dipenuhi, yaitu merupakan perusahaan konstruksi, properti dan real estate terdaftar tahun 2007 sampai tahun 2010. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, terdapat populasi 52 perusahaan konstruksi, properti dan perusahaan real estate yang telah *Go-Public* dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang secara terus menerus melaporkan laporan keuangan 4 tahun berturut – turut dari tahun 2007 – 2010. Dan sampel yang diambil sejumlah populasi yang ada sebanyak 52 perusahaan yang terdiri dari 44 perusahaan properti dan real estate dan sebanyak 10 perusahaan konstruksi.

5.2 Hasil Penelitian

5.2.1 Statistik Deskripsi Variabel Penelitian

Nilai rata-rata (mean) dari FA (aktiva tetap), NI (*Profitabilitas*) dan TA (*Company Size*) adalah diatas nilai standar deviasinya, sehingga disimpulkan bahwa tidak banyak terjadi perubahan/gejolak pada dari FA (*Fixed Asset*), NI (*Profitabilitas*) dan TA (*Company Size*), selama periode penelitian.

LEV atau *Leverage* adalah rasio yang menunjukkan penggunaan hutang dengan total ekuitas. Rata – rata kebijakan hutang pada perusahaan konstruksi dan perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di BEI adalah 12 % . Berdasarkan data yang diperoleh leverage terendah selama periode penelitian adalah sebesar 5 % yaitu pada PT. Ristia Bintang Mahkota Sejati Tbk pada tahun 2004. Hal ini menunjukkan perusahaan tersebut mempunyai rasio leverage paling rendah atau perusahaan mengoptimalkan dana internal perusahaan. Sedangkan tingkat penggunaan hutang selama periode penelitian adalah PT. Adi Karya Tbk pada tahun 2008 yaitu sebesar 77,5 % yang menunjukkan bahwa perusahaan tersebut mempunyai tingkat *Leverage* paling tinggi dibandingkan perusahaan lain.

Jaminan yang dicerminkan dari FA (*Fixed Asset*) menunjukkan angka rata-rata Rp. 466.867 milyar .Dan yang tertinggi adalah Bakrieland Development Tbk sebesar Rp.5.639.422 Trilyun tahun 2010 dan yang terendah adalah Perusahaan Ristia Bintang Mahkota Sejati hanya Rp. 291 juta pada tahun 2004. Dengan *Fixed Asset* yang sedikit perusahaan tersebut memiliki jaminan yang lebih sedikit juga berarti kesempatan memperoleh pinjaman yang lebih besar cenderung kecil karena *Fixed Asset* yang bisa di jadikan *asset collateral* hanya sedikit di bandingkan dengan perusahaan yang sejenis lainnya.

Profitabilitas di ukur dengan seberapa besar *Net Income* yang bisa di capai selama periode tahun amatan, tercermin dari hasil olah data. Dan rata rata profit yang bisa di capai adalah sebesar Rp. 86,23 Milyar . *Net Income* tertinggi di capai oleh PT. Lippo Karawaci TBK pada tahun 2010 sebesar Rp. 525.346 Milyar sedangkan posisi terendah sebesar Rp. 88 Juta oleh PT. Pelita Sejahtera Abadi Tbk, Tahun 2010

Company Size dalam hal ini diukur dari *Total Asset* yang dimiliki . Dimana Rata rata *Total Asset* adalah Rp. 2.7 Trilyun dan yang mempunyai *Total Asset* terbesar atau dengan kata lain *Company Size* tertinggi dalam tahun amatan ini ada pada Perusahaan Bakrieland Development TBK tahun 2010

sebesar Rp. 17.196 Trilyun sementara *Company Size* yang terendah adalah Pelita Sejahtera Abadi Tbk Tahun 2007 sebesar Rp. 12.170 Milyard.

Tabel 5.1 Data Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Lev	160	-3.00	2.05	-.2259	.97671
FA	160	5.67	15.55	11.6513	2.18042
NI	160	4.48	13.17	10.2833	1.95857
TA	160	9.41	16.65	14.1563	1.40338
Valid N (listwise)	160				

Sumber : Data olahan , 2012

5.2.2 Uji Asumsi Klasik

Analisis data yang di gunakan untuk penelitian ini adalah regresi berganda yang sebelumnya harus dilakukan uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji autokorelasi , uji heteroskedasitas dan uji multikolinearitas.

1. Uji Normalitas

Hasil uji Kolmogorov Smirnov Untuk Variabel dependen *Leverage* dapat dilihat seperti di bawah ini berdasarkan tabel 5.2 dapat di simpulkan bahwa residual eror dari uji *Kolomogorov Smirnov* sebesar 0.200 dan angka ini lebih besar dari 0.05 sehingga residual eror bisa diinterpretasikan terdistribusi secara normal.

Tabel 5.2 Tes Normalitas

	Kolmogorov - Smirnov ^a		
	Statistic	df	Sig
Res	.049	160	.200*

Sumber : Data Olahan, 2012

2. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara anggota sampel . Untuk menentukan apakah ada tidaknya masalah autokorelasi di uji dengan Durbin – Watson sebagai berikut :

1. $1,65 < DW < 2,35$, Tidak ada autokorelasi
2. $1,21 < DW < 1,65$ atau $2,35 < DW < 2,79$, daerah ragu ragu
3. $DW < 1,21$ atau $DW > 2,79$, Maka terjadi autokorelasi

Dari hasil pengujian pada Tabel 5.3 angka Durbin Watson sebesar 1.665 maka dapat disimpulkan bahwa data penelitian ini terbebas dari autokorelasi.

Tabel 5.3 Uji Autokolerasi

Model	Durbin - Watson
1	1.665 ^a

Sumber : Data Olahan, 2012

3. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (*Fixed Asset, Company Size, dan Profitabilitas*) . Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Uji Multikolinearitas dapat dilakukan dengan melihat nilai VIF (*variance inflation factor*) dan *Tolerance*.

Salah satu cara mendeteksi ada atau tidaknya multikolineritas adalah dengan melihat nilai Variance Inflation Factor (VIF). Menurut Singgih santoso (2007) seperti yang di kutip Tirsono (2008) pada umumnya nilai VIF lebih besar dari 5 maka variabel tersebut mempunyai persoalan multikolinearitas dengan variabel independen lainnya. Dan berdasarkan hasil Tabel 5.4 dapat dijelaskan bahwa Nilai VIF dibawah 5, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi terbebas dari masalah multikolinearitas.

Tabel 5.4 Uji Multikolinearitas

Model	Colinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
FA	.423	2.366
NI	.343	2.917
TA	.266	3.755

Sumber : Data Olahan, 2012

4. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas yaitu adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya gejala heteroskedastisitas.

Dengan menggunakan Uji Glesjer, maka di ketahui masing masing variabel independen memiliki tingkat signifikansi diatas 0,05 terhadap absolut residual eror, sehingga dapat di simpulkan bahwa varians data penelitian bebas efek heteroskedastisitas.

Tabel 5.5 Uji Heteroskedastisitas

Model	Understandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig
	B	Std Error	Beta		
1 (Constant)	1.236	.513		2.407	.017
FA	-.044	.031	-.168	-1.395	.165
NI	.343	2.917	-.104	-.774	.440
TA	.023	.061	.056	.369	.712

Sumber : Data Olahan, 2012

5.2.3 Koefisien Korelasi (r) & Determinasi (r²)

Analisis ini digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan antara variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). Dan dari data hasil output yang ada diperoleh nilai variabel *Fixed Asset*, *Profitabilitas* dan *Company Size* sebesar 29.6 % mempengaruhi variabel *Leverage* secara bersama sama.

Dengan melihat tabel ouput SPSS tabel 5.6 *Model Summary* maka dapat diketahui bahwa besarnya nilai koefisien determinasi (R²) terlihat dari nilai *Adjusted R Square* karena penelitian ini memiliki lebih dari satu variabel bebas yaitu sebesar 7 % sedangkan 93 % dipengaruhi oleh variabel lainnya yang mempengaruhi leverage yang tidak di masukkan dalam penelitian ini seperti tingkat pajak perusahaan ,kesempatan bertumbuh , umur perusahaan , resiko bisnis , suku bunga dan lain lain yang sudah pernah di teliti sebelumnya sebagai faktor faktor yang mempengaruhi *Leverage*.

Tabel 5.6

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.096 ^a	0.088	.070	.94190

Sumber : Data Olahan, 2012

5.2.4 Analisis Regresi Linear Berganda

Untuk menguji hipotesis hipotesis dilakukan dengan menggunakan model persamaan regresi linear berganda dengan memasukkan variabel *Leverage (Debt To Equity)* sebagai variabel dependen. Interpretasi model linear berganda dapat ditulis dengan persamaan regresinya sebagai berikut

$$\text{LEV} -1.642 - 0.052 \text{ FA} + 0.169 \text{ NI} + 0.020 \text{ TA} + \varepsilon$$

Tabel 5.7

Model	Understandardized Coefficients	
	B	Std Error
1 (Constant)	-1.642	.864
FA	-.052	.053
NI	.169	.065

TA	.020	.103
----	------	------

Sumber : Data Olahan, 2012

Konstanta sebesar -1.642 menyatakan jika tidak ada variabel *Fixed Asset* (X1), *Profitabilitas* (X2) dan *Company Size* (X3) maka *Leverage* pada perusahaan konstruksi, properti dan real estate tidak akan bernilai dari jumlah *leverage* pada periode sebelumnya. Koefisien regresi *Fixed asset* (FA-X1) sebesar -0.052 menunjukkan bahwa jika variabel *Fixed Asset* (FA-X1) meningkat 1 % , maka *Leverage* (Y) akan mengalami penurunan 5,2 % persen dengan asumsi variabel lainnya tetap. Dan dari hasil diperoleh antara Variabel *Fixed Asset* dengan *Leverage* memiliki hubungan yang negatif.

Koefisien regresi *Profitabilitas* (NI- X2) sebesar 0.169 menunjukkan bahwa jika variabel *Profitabilitas* (NI-X2) meningkat 1 % , maka *Leverage* (Y) akan mengalami kenaikan 16,9 % dengan asumsi variabel lainnya tetap. Dan dari hasil diperoleh antara variabel *Profitabilitas* dengan *Leverage* memiliki hubungan yang positif.

Koefisien regresi *Company Size* (TA - X2) sebesar 0.020 menunjukkan bahwa jika variabel *Company Size* (TA - X2) meningkat 1 % , maka *Leverage* (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 2% dengan asumsi variabel lainnya tetap. Dan dari hasil diperoleh antara Variabel *Company Size* dengan *Leverage* memiliki hubungan yang positif.

5.2.5 Pengujian Hipotesis Uji F

Pengujian secara simultan *Fixed Asset*, *Profitabilitas*, dan *Company Size* terhadap *Leverage* mempunyai pengaruh signifikan terhadap *Leverage* pada perusahaan konstruksi, properti dan real estate. Hal ini terbukti secara Simultan dengan menggunakan uji F dengan tingkat signifikan 0,05 didapati hasil $0,02 < 0,05$ ($\alpha = 5\%$).

5.2.6 Pengujian Hipotesis Uji t

Uji parsial, Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen (*Leverage*). Hasil pengujian menunjukkan bahwa *Fixed Aset* (FA) perusahaan konstruksi, properti dan real estate di BEI tahun amatan 2007 – 2010 tidak berpengaruh signifikan terhadap *Leverage*

(LEV). Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai t_{hitung} sebesar -0.990 yang lebih kecil dari t_{tabel} (1,975) , sehingga H_a1 di tolak dengan serta nilai probabilitas $(0,324) > \alpha$ (0,05) menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Dengan kata lain semakin meningkatnya *Fixed Asset* maka *Leverage* akan mengalami penurunan bisa dilihat dari hubungan negative antara *Fixed Asset* terhadap *Leverage*.

Hasil hipotesis ke dua menunjukkan bahwa profitabilitas yang di gambarkan dengan *Net Income* (NI) berpengaruh signifikan terhadap *Leverage* (LEV). Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai t_{hitung} sebesar 2.597 yang lebih besar dari t_{tabel} (1,975) , sehingga H_a2 di terima . Dengan nilai probabilitas $(0,01) < \alpha$ (0,05) menunjukkan hasil yang signifikan .

Company Size yang di ukur dari Total Asset (TA) perusahaan konstruksi, properti dan real estate yang terdaftar di BEI berpengaruh tidak berpengaruh signifikan terhadap *Leverage* (LEV). Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai t_{hitung} sebesar 0,195 yang lebih kecil dari - t_{tabel} (1,975) serta nilai probabilitas $(0,846) > \alpha$ (0,05). Sehingga dapat dijelaskan bahwa *Company Size* perusahaan konstruksi, properti & real estate yang terdaftar di BEI terbukti berpengaruh tidak signifikan terhadap *Leverage*.

5.3 Pembahasan

5.3.1 Hasil Pembahasan Hipotesis 1

Hipotesis pertama yang menyatakan diduga bahwa *Fixed Asset* berpengaruh signifikan terhadap *leverage* pada perusahaan konstruksi ,properti dan real estate tidak terbukti dengan adanya nilai *fixed asset* $(0,324) > \alpha$ (0,05) sehingga menolak H_a 1 dan menerima H_o1 . Dari Uji t didapati secara parsial bahwa *Fixed Asset* tidak signifikan berpengaruh terhadap *Leverage* dengan mempunyai hubungan yang negatif

Hasil ini mendukung penelitian Asih Suko (2006) yang mendapatkan bahwa Struktur Aktiva yang didalamnya termasuk Fixed Aset tidak berpengaruh signifikan terhadap *Debt Equity Ratio*.

Hasil yang tidak signifikan terhadap *Leverage* mencerminkan bahwa *Fixed Asset* selama kurun waktu tahun pengamatan merupakan hasil dari transaksi masa lalu sehingga tidak mempengaruhi *Leverage*. Ataupun perolehan *Fixed Asset* didapat dari penggunaan dana internal *Retained Earnings*. Dari sisi *Assets Collateral*, *Fixed Assets* yang ada tidak di jaminkan untuk memperoleh tambahan *Leverage*. Karena untuk membiayai biaya konstruksi perusahaan mendapatkan dana segar dari pendapatan kontrak yang di bayar di muka (*Down Payment*) dan pembayaran mengangsur atau termin, sehingga biaya operasional dibiayai dari pendapatan termin sebelumnya. sehingga tidak perlu mencari sumber pendanaan dari *Leverage*. Pembayaran termin didasarkan dari kesepakatan bersama dari hasil *Percentage of Completion*. Sedangkan hubungan yang negative menggambarkan bahwa perusahaan yang memiliki *Fixed Assets* yang banyak tidak selalu harus meningkatkan *Leverage*. Seperti hasil penelitian Ivo Welch (2010:8) “*Negative relation between asset tangibility and leverage is contrary to what has been reported in a number of papers. Firms with more tangible assets do not necessarily have more Leverage. The relation is not robust*”.

5.3.2 Hasil Pembahasan Hipotesis 2

Hipotesis kedua yang menduga bahwa *Profitabilitas* yang diukur dari besarnya *Net Income* berpengaruh signifikan terhadap *Leverage* pada perusahaan konstruksi, properti dan real estate terbukti dengan adanya nilai probabilitas dari *Profitabilitas* ($0.010 < \alpha (0,05)$) sehingga menerima H_{a2} dan menolak H_{o2} . Dari Uji t didapat secara parsial bahwa *Profitabilitas* signifikan berpengaruh terhadap *Leverage*. Hal ini menggambarkan bahwa perusahaan konstruksi, properti dan real estate menggunakan *profit* yang didapat dari perusahaan untuk mendapatkan kemudahan dalam mendapatkan tambahan *Leverage* seperti pada penelitian Dorrn Nisin and Stephen Penman (2001) “*Firms with high profitability might be willing to take on more leverage because the risk of the spread turning unfavorable is lower with correspondingly lower expected bankruptcy cost*” yang sejalan dengan penelitian ini bahwa antara *Profitabilitas* dan *Leverage* mempunyai hubungan yang positif. Dimana setiap profit bisa membiayai kebutuhan pendanaan yang ada sehingga perusahaan akan lebih memanfaatkan hal tersebut untuk memperoleh tambahan modal dari komposisi hutang yang bisa menaikkan komposisi *Leverage*, sebab perusahaan yang memiliki profit akan menggunakan lebih banyak utang untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari pengurangan pajak Adrianto dan Wibowo (2007) seperti dikutip oleh Bram Hadianto (2010 : 13). Dan sejalan juga dengan hasil penelitian Bram Hadianto (2010,), juga Saidi (2004) seperti yang dikutip oleh Meyulinda (2010) bahwa *Profitabilitas* berpengaruh positif terhadap *Leverage*.

5.3.3 Hasil Pembahasan Hipotesis 3

Hipotesis ketiga yang menduga bahwa *Company Size* yang diukur dari besarnya total aset berpengaruh signifikan terhadap *leverage* pada perusahaan konstruksi, properti dan real estate tidak terbukti dengan adanya nilai *probabilitas Company Size* $0.846 > \alpha (0,05)$ sehingga menolak H_{a3} dan menerima H_{o3} . Dari Uji t didapat secara parsial bahwa *Company Size* tidak signifikan berpengaruh terhadap *Leverage* dengan mempunyai hubungan yang positif.

Menurut Brigham dan Houston (2001: 40) seperti yang dikutip Fitri Mega (2010) perusahaan yang tumbuh dengan pesat harus lebih banyak mengandalkan modal eksternal. Kecenderungan mencerminkan modal eksternal yang dipilih adalah penjualan saham bukan *Leverage*, Apalagi untuk perusahaan – perusahaan yang sudah *Go Public* penjualan saham merupakan salah satu dari bentuk penambahan modal. Dan juga perusahaan konstruksi, properti dan real estate yang sudah *Well Established* sudah pasti mendapatkan tingkat kepercayaan lebih dari pada supplier dengan bisa mendapatkan fasilitas kredit sehingga pekerjaan konstruksi tetap berjalan dengan tanpa tambahan *Leverage* dalam hal ini menggunakan modal supplier sebagai pihak ketiga. Sistem pembayaran termin sangat membantu untuk pelunasan hutang terhadap supplier. Hasil penelitian ini mendukung penelitian

Steven dan Lina (2011) dengan hubungan yang positif ukuran perusahaan tidak signifikan berpengaruh terhadap kebijakan hutang dengan memakai proksi yang sama yaitu total aset sebagai ukurannya.

6. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pengujian mengenai pengaruh *Fixed Asset*, *Profitabilitas*, dan *Company Size* terhadap *Leverage* pada perusahaan kontraktor, properti dan real estate yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Hasil uji kecocokan model atau uji F, maka pengaruh *Fixed Asset*, *Profitabilitas*, dan *Company Size* secara simultan signifikan berpengaruh terhadap leverage pada perusahaan kontraktor, properti dan real estate yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI). Hal ini didasarkan dari hasil pengujian Uji F dengan didapati hasil $0,002 < \alpha : 5\%$
2. Hasil perhitungan nilai koefisien determinasi menunjukkan bahwa hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen sangat lemah nilai *Adjusted R Square* sebesar 0.070. Dengan nilai determinasi sebesar 0.070 atau 7% dalam arti variabel independen dapat menjelaskan model variabel dependen hanya sebesar 7% dan sisanya 93% (100% - 7%) dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Dan korelasi yang cukup dengan nilai R sebesar 29,6%.
3. Berdasarkan Hasil uji kecocokan model atau Uji t secara parsial, dua variabel diatas tidak signifikan berpengaruh terhadap *Leverage* pada perusahaan kontraktor, properti dan real estate yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu *Fixed Asset* dan *Company Size*. Hanya *Profitabilitas* saja yang berpengaruh signifikan terhadap *Leverage*.

Dengan adanya hubungan yang tidak signifikan untuk variabel *Fixed Asset* dan *Company Size* dapat disimpulkan periode penelitian tahun 2007-2010 perusahaan perusahaan kontraktor, properti dan real estate tidak memiliki *Asset* ataupun *Fixed Asset* yang cukup dijadikan sebagai *Asset Collateral* untuk penambahan *Leverage*. Atau kecenderungan perusahaan perusahaan tersebut tidak memilih penggunaan *Leverage* untuk mendapatkan tambahan modal. Kelangsungan operasional perusahaan dibiayai dengan cara penerimaan pendapatan dengan metode pembayaran *Down Payment* dan termin sehingga pekerjaan yang akan dikerjakan saat ini dapat di biayai dari pendapatan termin sebelumnya dan dapat menguntungkan ke dua belah pihak, bagi pihak kontraktor berpeluang untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar karena mendapatkan dana dari pemilik proyek, ditambah dengan adanya suplier yang bisa memberikan fasilitas kredit sehingga tidak dibutuhkan dana yang besar pada saat pembelian bahan bahan untuk pembangunan konstruksi. Hubungan *Profitabilitas* yang signifikan dimana setiap profit bisa membiayai kebutuhan pendanaan yang ada sehingga perusahaan akan lebih memanfaatkan hal tersebut untuk memperoleh tambahan modal dari komposisi hutang yang bisa menaikkan komposisi *Leverage*, sebab perusahaan yang memiliki profit akan menggunakan lebih banyak utang untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari pengurangan pajak Adrianto dan Wibowo (2007) yang dikutip oleh Bram Hadianto (2010 : 13).

6.2 Keterbatasan

Sejumlah keterbatasan dalam penelitian ini yang memungkinkan dapat menimbulkan gangguan pada hasil analisa ini.

1. Penelitian ini hanya dilakukan dengan periode selama 4 tahun, sehingga hasil penelitian ini belum tentu reliabel untuk digunakan sebagai bahan justifikasi untuk jangka panjang.
2. Penelitian ini hanya menggunakan variable yang terbatas pada *Fixed Asset* (FA), *Profitabilitas* (NI), dan *Company size* (TA) dalam mempengaruhi *Leverage* perusahaan.
3. Sampel objek penelitian dilakukan khusus pada jenis perusahaan kontraktor sejenis termasuk properti dan real estate, sehingga hasil ini terbatas hanya untuk jenis perusahaan ini, dan mungkin pada jenis atau objek penelitian yang lain hasil ini tidak dapat digunakan untuk

menginterpretasikan hubungan antara *Fixed Asset (FA)*, *Profitabilitas (NI)*, dan *Company size (TA)* terhadap *Leverage* perusahaan yang bergerak pada sektor lain.

6.3 Saran

Dengan melihat keterbatasan yang di kemukakan diatas maka penulis menyadari tidak ada penelitian yang sempurna. Untuk itu saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini hanya terbatas pada kajian empiris tentang faktor – faktor yang mempengaruhi *Leverage* perusahaan kontraktor, properti dan real estate di BEI tetapi tidak sampai kepada pemecahan masalah tentang bagaimana dampak *Leverage* itu sendiri terhadap kinerja perusahaan. Oleh karena itu, peneliti lain yang berminat terhadap permasalahan *Leverage* yang erat kaitannya dengan struktur modal perusahaan dapat mengembangkan penelitian ini dalam rangka mengetahui dampak dari *Leverage* dengan menambah variabel independen yang lain.
2. Penelitian mendatang hendaknya mengarahkan penelitian pada obyek penelitian yang lebih luas dengan mengambil obyek semua perusahaan yang terdaftar di BEI dengan mengambil sampel yang lebih banyak atau menambah tahun pengamatan. Sehingga hasil penelitian menjadi lebih baik karena unsur keterwakilan data yang lebih tinggi dibandingkan pengambilan sampel yang lebih sedikit.
3. Bagi investor dan calon investor dalam melakukan investasi pada perusahaan kontraktor, properti dan real estate sebaiknya memperhatikan informasi dalam laporan keuangan perusahaan khususnya untuk *Leverage Ratio* sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk investasi yang tepat karena leverage akan menambah beban perusahaan dalam bentuk bunga pinjaman yang tetap.

DAFTAR PUSTAKA

- Darsono Drs dan Ashari , (2005).” *Pedoman Praktis Memahami Laporan Keuangan* “. Yogyakarta : Penerbit Andi
- Doron Nisin, (2001) . “*Financial Statement Analyisi of Leverage and How it Informs about Profitability and Price –to –Book Ratios* “. Columbia University: 1-10
- De Jong A. (1999) “ *An Empirical Analysis of Capital Structure Decisiions in Dutch Firms* “ Pd.D Dissertation. Tillburg University
- Elim Meyulinda Aviana dan Yusfarita, (2010). “ *Pengaruh Aktiva, Tingkat Pertumbuhan Penjualan , dan Return on Assets Terhadap Struktur Modal pada Perusahaan manufaktur di Bursa Efek Jakarta* “. Jurnal Bisnis dan Ekonomi : Vol 1 No. 1 Juni 2010 , 88-103
- Friend Irwin and Joel Hasbrouck , (1986) . “ *Determinants Of Capital Structure* “ Rodney L White Centre for Financial Research :7-86
- Fahmi Irfam ,(2012). “*Analisis Kinerja Keuangan Panduan Bagu Akademisi, Manejer dan Investor untuk Menilai dan Menganalisa Bisnis dari Aspek Keuangan* ”. Bandung : Penerbit Alfabeta.
- Gujarati Damodar N, (2004). “ *Basic Econometrics* “ Fourth Edition.
- Hadianto Bram, (2010). “ *Pengaruh Struktur Aktiva, Ukuran Perusahaan , dan Profitabilitas terhadap Struktur Modal Emiten Sektor Telekomunikasi Periode 2000-2006 ; Sebuah Pengujian Hipotesis Pecking Order*”. Universitas Kristen Maranatha Bandung.
- Heryanto Florentina, (2004). “*Analisa Faktor Faktor yang Mempengaruhi Leverage Pada Perusahaan Perusahhan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEJ* ”. Tesis , Program Studi Magister Akuntansi UNDIP.
- Homaifar Ghassem, Joachim Ziets and Omar Benkato , (1994). “ *An Empirical Model Of Capital Structure : Some New Evidence* “. Journal Of Bussiness Finance & Accounting 21 . January 1994

- Ibrahim Hadasman ,(2008). “*Pengaruh Tingkat Suku Bunga, Peringkat Obligasi, Ukuran Perusahaan dan DET Terhadap Yield To Maturity Obligasi Korporasi Di BEI Periode Tahun 2004-2006* “.Tesis, Program Studi Magister Manajemen Program Pasca sarjana UNDIP
- Indonesian Capital Market Directory 2008-2011. *Institute for Economic and Financial Research*
- Ivo Welch, (2010).” *Common problems in Capital Structure Research : The Financial – Debt-To Asset Ratio, and Issuing Activity vs leverage Changes*”. Brown University: 9-10
- Indranarain Ramlalli, (2009). “ *Determinants of Capital Structure Among Non-Quoted Mauritian Firms Under Specificity of Leverage : Looking for a Modified Pecking Order Theory* ”. Internatioanl Research Journal of Finance and Economics. University of Technology , Mauritius.
- IAI, 2012. PSAK Per Juni 2012. Jakarta : IAI
- Joni dan Lina, (2010). “ *Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Struktur Modal* “. Jurnal Bisnis dan Akuntansi No 2 (Vol 12 Agustus) : 81-96.
- Mulianti Fitri Mega, (2010). “*Analisa Faktor – faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Hutang dan Pengaruhnya Terhadap Nilai Perusahaan* “. Tesis, Program Studi Magister Manajemen Program Pasca sarjana UNDIP.
- Myers Stewart, (1984) “ *The Capital Structure Puzzle* “ Journal of Finance Economics Vol 39 NO. 3 : 187-221
- Myers, Stewart and Nicolas Majluf , (1984) “ *Coporate financing and investment Decisions Where Firms Have information that Investors Do Not Have* , “ Journal of Finance Economics 13, 187-221
- Modigliani, F and M Miller, (1958).” *The cost of capital, corporation finance and the theory of investment* “, American Economic Review 47 pp 261-297
- _____,(1963).” *Corporation Income taxes and The cost of capital : A correction*” , American Economic Review 53 :433-443
- Makalah Artikel Ekonomi. 2008. Artikel Tentang Laba . Source Internet <http://cafe-ekonomi.blogspot.com/2009/09/artikel-tentang-laba.html>.
- Nugroho Asih Suko, (2006) , “ *Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Struktur Modal Perusahaan Properti yang Go-Public Di Bursa Efek Jakarta Untuk Periode Tahun 1994-2004*”. Tesis Program Studi Magister Manajemen UNDIP.
- Ozkan Aydin , (2000). “ *An Empirical analysis of Corporate Debt Maturity Structure* “. European Financial Managemnet , Vol 6 No. 2. 200:197-212
- Pandey, I.M. (2002). “ *Capital structure and Market Power Interaction: Evidence from Malaysia, in Zamri, Ruhani Ali, Subramaniam Pillay*”, Proceedings for the fourth annual Malaysian Finance Association Symposium 31st May- 1st June 2002. Penang. Malaysia
- Priantahara Ida bagus Teddy ,(2009).” *Sistem Akuntansi Perusahaan Jasa Konstruksi dilengkapi Ketentuan Perpajakan* “. Yogyakarta : Penerbit Graha Ilmu
- Rajan R and L zingales. (1995).” *What we know about capital structure choice ? Some evidence from international data* “, Journal of finance 50:1421-1460
- Santika Rista Bagus dan Bambang Sudyatno, (2011). “*Menentukan Struktur Modal Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia* “. Dinamika Keuangan dan Perbankan, November 2011, Vol 3 No.2 Hal 172-182
- Subramanyam K.R dan Jhon Wild, (2010). “ *Analisis Laporan Keuangan Financial Statement Analysis* “. Terjemahan . Edisi Kedua, Jakarta : Penerbit Salemba Empat. Sudarto, (2011) .” *Meningkatkan Kinerja Perusahaan Jasa Konstruksi di Inodnesia, Aplikasi Knowledge Based Mangement System* ”. Jakarta : PT. Ghassan Cipta Media.
- Sakatan Riyad, (2010) .” *The Capital Structure in Developing countries : Saudi Arabia*”, Dissertation.
- Steven dan Lina, (2011). “ *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Hutang perusahaan Manufaktur* “, Jurnal Bisnis dan Akuntansi, Vol 13. No 3 Desember 2011, Hal 163-181.

- Suprianto Edy, (2008). “ *Pengaruh Leverage, Corporate Tax Rate , Non Debt Tax Shield, Investment Opportunity Set, Profitability, Past Debt Terhadap Tingkat Utang Pada Perusahaan – Perusahaan Keuangan Yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2002 sampai dengan 2008* “. Repositori Publikasi Ilmiah, Universitas Islam Sultan Agung.
- Sugiyono Prof. Dr. , (2007). “ *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* “. Jakarta : Penerbit Alfabeta .
- Sarwono Jonathan dan Ely Suhayati, (2010) . “ *Riset Akuntansi Menggunakan SPSS* “. Yogyakarta : Penerbit Graha Ilmu
- Sunyoto Danang, (2011).” *Metodologi Penelitian untuk Ekonomi (Alat Statistik & Analisa Output Komputer)* “. Yogyakarta : PT. Buku Seru
- Suharyadi & Purwanto S.K., (2009) .” *Statistika untuk Ekonomi dan Keuangan Modern* “. Jakarta : Penerbit Salemba Empat
- Tirsono, (2008).“*Analisis Faktor Pajak dan Faktor-Faktor Lain yang Berpengaruh Terhadap Tingkat Utang Pada Perusahaan-Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta* “. Tesis , Magister Sains Akuntansi , UNDIP .
- Zyblock M., (1997) “*Corporate Financial Leverage : A Canada – U.S Comparisons. 1961-1996*”. *Analytical Studies Branch – Research Paper Series . Statistic Canada No. 11F0019MPE No. 11*

KAJIAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BERDASARKAN PERSPEKTIF PERMENDAGRI NOMOR 59 TAHUN 2007 PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SORONG

**Meyta Longkutoy
Jullie J. Sondakh
Ventje Ilat**

ABSTRAK

Mengingat pentingnya Pengelolaan Keuangan Daerah dalam penyelenggaraan Pembangunan Daerah, maka perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui lebih lanjut tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mulai dari tahap penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Sorong. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji proses pengelolaan keuangan daerah Kota Sorong berdasarkan perspektif Permendagri Nomor 59 Tahun 2007. Data yang digunakan adalah data kualitatif yang diperoleh dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif yang bersifat eksploratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses Pengelolaan Keuangan Daerah Perspektif Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, yaitu proses perencanaan/penyusunan, pelaksanaan/penatausahaan, dan pelaporan/pertanggungjawaban APBD di Kota Sorong belum sepenuhnya dilakukan sesuai dengan aturan karena beberapa perubahan yang terjadi pada aturan yang baru belum dilaksanakan sehingga masih mengacu pada aturan yang lama yaitu Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Hal ini disebabkan karena kurangnya sumber daya manusia yang handal dan berkompeten dibidangnya serta aturan yang berubah-ubah membuat siklus pengelolaan keuangan daerah belum dijalankan sebagaimana mestinya.

Kata kunci : Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, Sumber Daya Manusia

ABSTRACT

Considering the importance of the Local Financial Management in the implementation of local development, is necessary to do research to find out more about the Local Financial Management that starting from the preparation, implementation and reporting is done by the Sorong Local Government. This study was aimed to review the local financial management perspective from the Minister for Home Affairs Regulation Number 59/2007. The data is qualitative data that obtained from the Local Finance and Assets Management Board. This research used a qualitative descriptive analysis that explorative. The data to create conclusion that the local financial management perspective from the Minister for Home Affairs Number 59/2007, which is the process of planning/preparation, implementation/administration, and reporting/accountability in budget has not been fully performed in accordance with the rules because of some changes in the new rules have not been implemented so it still refers to the old rules. It's the Minister for Home Affairs Number 13/2006. This is caused by the lack of reliable and competent human resources and rules that always change to make the local financial management cycle has not run properly.

Keywords : local government financial management, the rule of the Minister for Home Affairs Number 59/2007, human resources.

1. PENDAHULUAN

1.5 Latar Belakang

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah perlu didukung oleh sistem pengelolaan keuangan yang cepat, tepat dan akurat. Sistem tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang ditindaklanjuti dengan petunjuk teknis pelaksanaannya yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana direvisi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Syafriada, 2008).

Oleh karena pentingnya regulasi yang baik dalam menciptakan pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good governance*), maka dibutuhkan profesionalisme dan tanggungjawab untuk mematuhi berbagai aturan yang ada, tidak hanya oleh pihak-pihak yang akan melaksanakan saja, namun pihak regulator atau pembuat aturanpun harus mau mendengar, melihat dan memperhatikan *best practise* sekaligus melaksanakan uji publik terlebih dahulu, sehingga tidak membingungkan aparatur di daerah dalam proses implementasi aturan tersebut.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, cakupan Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi seluruh kegiatan perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Implementasinya harus diiringi dengan penataan kelembagaan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia di bidang Keuangan Daerah.

Sebagai salah satu Pemerintahan Kota dalam lingkup Pemerintah Provinsi Papua Barat, Kota Sorong memiliki prospek dan peluang amat besar dalam memacu pertumbuhan ekonominya. Dalam kerangka otonomi, Pemerintah Daerah Kota Sorong mengadopsi sistem yang disarankan oleh Pemerintah Pusat sesuai kebutuhan dan kondisinya, dengan tetap memperhatikan standar dan pedoman yang ditetapkan.

Pembangunan Kota Sorong merupakan pencerminan kehendak rakyat sesuai dengan kondisi, potensi permasalahan, kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang tujuannya sebagai berikut,

1. Mewujudkan sistem pemerintahan yang akuntabel demi terselenggaranya tata pemerintahan yang baik.
2. Meningkatkan kehidupan masyarakat yang harmonis dan meningkatkan pola pikir masyarakat.
3. Meningkatkan perekonomian dan jasa di Kota Sorong.
4. Meningkatkan perkembangan UKM dan penanaman investasi daerah.
5. Mewujudkan penataan lingkungan Kota Sorong yang bersih, nyaman dan berkelanjutan.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat di Kota Sorong.
7. Meningkatkan kecerdasan masyarakat melalui pendidikan.
8. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keluarga.
9. Meningkatkan infrastruktur dan tata ruang Kota Sorong yang memadai.

Untuk mewujudkan tujuan yang dimaksud faktor utama dan sebagai penggerak dalam penyelenggaraan pemerintah yaitu keuangan, sumber daya manusia dan teknologi informasi. Pemerintah Daerah Kota Sorong berusaha untuk mengembangkan sistem serta prosedur kerja yang cepat, tepat, jelas dan nyata, serta dapat dipertanggungjawabkan melalui implementasi pengelolaan keuangan daerah. Dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kota Sorong telah menyusun Perda pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah dan Perda tentang organisasi dan tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sorong Nomor 5 Tahun 2008, dan telah diperbaharui kembali dengan Perda Nomor 9 Tahun 2012. Perda tersebut menjadi rujukan atau standar serta strategi untuk melakukan reformasi pengelolaan keuangan daerah dengan langkah-langkah sebagai berikut,

1. Penata organisasi dan kelembagaan.
2. Peningkatan sumber daya manusia.
3. Sistem dan prosedur yang didukung dengan teknologi informasi.
4. Menjaring jejaring kerja komunitas keuangan daerah.

Mengingat pentingnya Pengelolaan Keuangan Daerah dalam penyelenggaraan Pembangunan Daerah, maka perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui lebih lanjut tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Sorong. Penelitian tersebut mengangkat judul “**Kajian Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan Perspektif Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Sorong**”.

1.6 Rumusan Masalah

Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah “bagaimana pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan perspektif Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Sorong?”.

1.7 Tujuan Penelitian

Mengacu pada masalah pokok yang telah dirumuskan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan perspektif Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Sorong.

1.8 Manfaat Penelitian

Penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat berikut ini.

1. Sebagai wahana untuk mendalami isu-isu yang berkaitan dengan proses Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Sebagai bahan informasi dan masukan bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Sorong dalam Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan Perspektif Permendagri Nomor 59 Tahun 2007.
3. Dapat memperkaya khazanah empirik dan berkontribusi dalam menambah literatur terkait Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.3 Landasan Teori

2.1.7 Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi Keuangan (Pemerintahan) Daerah merupakan salah satu bidang ilmu dalam Akuntansi Sektor Publik yang saat ini sedang berkembang sangat pesat. Tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik atas dana-dana masyarakat yang dikelola pemerintah memunculkan kebutuhan atas penggunaan akuntansi dalam mencatat dan melaporkan kinerja pemerintahan (Nordriawan *et al.*, 2007).

2.1.8 Akuntansi Sektor Publik

Secara kelembagaan, domain publik antara lain meliputi badan-badan pemerintahan (pemerintah pusat dan daerah serta unit kerja pemerintah), perusahaan milik negara (BUMN dan BUMD), yayasan, organisasi politik dan organisasi massa, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), universitas, dan organisasi laba lainnya. Jika dilihat dari variabel lingkungan, sektor publik dipengaruhi oleh banyak faktor tidak hanya faktor ekonomi semata, akan tetapi faktor politik, sosial, budaya, dan historis juga memiliki pengaruh yang signifikan. Sektor publik tidak seragam dan sangat heterogen (Mardiasmo, 2009).

2.1.9 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada hakekatnya merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. APBD adalah suatu anggaran daerah, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut: rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara rinci; adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya-biaya sehubungan dengan aktivitas-

aktivitas tersebut, dan adanya biaya-biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran-pengeluaran yang akan dilaksanakan; jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka; periode anggaran, yaitu biasanya 1 (satu) tahun (Halim dan Abdullah, 2004).

2.1.10 Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah meliputi keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005, “Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut”. Hak dan kewajiban daerah tersebut perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Menurut Bastian (2006:20), ruang lingkup keuangan daerah terdiri dari keuangan daerah yang dikelola langsung dan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang termasuk dalam keuangan yang dikelola langsung adalah APBD dan barang-barang inventaris milik daerah. Sedangkan keuangan daerah yang dipisahkan meliputi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

2.1.11 Permendagri Nomor 59 Tahun 2007

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Perubahan dari Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ke Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 sebagaimana yang telah diuraikan, meskipun tidak substantif namun cukup mengganggu aparatur Pemerintah Daerah. Bahkan ada anggapan bahwa Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tidak berlaku lagi karena digantikan oleh Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, padahal Permendagri baru ini hanya memuat 2 pasal dan 53 item, yakni item-item Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang diubah, dihilangkan, dan ditambah (Abdullah, 2008). Secara garis besar terdapat beberapa perbedaan antara Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 yaitu berikut ini.

1. Aspek Anggaran

- (1) Memperpendek jadwal penyusunan anggaran dengan cara meringkas proses dan konten KUA-PPAS (Kebijakan Umum APBD-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara), sehingga istilah PPA (Prioritas dan Plafon Anggaran) dihapus.
- (2) Tatacara pemberian kode program dan kegiatan dalam pengisian RKA (Rencana Kerja Anggaran).
- (3) Reklasifikasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan, beserta kode rekeningnya.
- (4) Penegasan alur pengerjaan RKA SKPD, pada SKPKD penyusunan RKA dipisahkan antara RKA sebagai SKPD dan RKA sebagai pemerintah daerah (RKA PPKD).

2. Aspek Pelaksanaan APBD

- (1) Alur pengerjaan DPA
- (2) SKPD dan SKPKD juga ikut berubah, mengikuti perubahan alur pengerjaan RKA.
- (3) Penomoran DPA (Dokumen Pelaksana Anggaran) juga ikut berubah karena adanya perubahan pada pemberian kode program dan kegiatan.

3. Aspek Penatausahaan

- (1) Penatausahaan Penerimaan
Penyederhanaan proses pertanggungjawaban fungsional ke BUD sehingga tercipta proses yang lebih efisien. Hal ini dilihat dari dihapusnya buku pembantu per rincian objek penerimaan yang harus dilampirkan dalam SPJ fungsional.
- (2) Penatausahaan pengeluaran

Penegasan SPD (Surat Penyediaan Dana) diberikan kepada SKPD secara periodik (bulanan, triwulan, semesteran) tergantung pada ketersediaan dana. Perubahan format SPD, SPP UP (Surat Perintah Pembayaran Uang Persediaan), SPP GU (Surat Perintah Pembayaran Ganti Uang Persediaan), SPP TU (Surat Perintah Pembayaran Tambahan Uang Persediaan), SPP LS (Surat Perintah Pembayaran Langsung) gaji dan tunjangan, SPP LS barang dan jasa dan ada penambahan format SPP LS belanja tidak langsung PPKD.

4. Aspek Akuntansi dan Pelaporan

- (1) Memberikan ruang gerak yang luwes bagi Pemda untuk menyusun sistem akuntansi, dengan dihapusnya beberapa pasal tentang buku-buku yang digunakan untuk catatan akuntansi.
- (2) Sudah diterapkannya prinsip harga perolehan pada perolehan aktiva tetap.
- (3) Adanya contoh format neraca untuk SKPD.

2.4 Penelitian Terdahulu

Pembahasan maupun studi empiris mengenai pengelolaan keuangan daerah telah banyak diaplikasikan oleh peneliti sebelumnya sehingga penulis tertarik untuk mengaplikasikan studi ini pada Pemerintah Daerah Kota Sorong.

Berikut beberapa tinjauan pustaka yang diperoleh penulis guna memenuhi pengetahuan yang memadai tentang hubungan antara variabel yang diteliti, yaitu berikut ini.

1. Azhar (2007) melakukan studi yang berjudul "Faktor-faktor yang mempengaruhi Keberhasilan Penerapan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 pada Pemerintah Kota Banda Aceh" yang menyimpulkan bahwa komitmen, Sumber Daya Manusia, dan perangkat pendukung secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan penerapan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, sedangkan regulasi tidak mempengaruhi secara signifikan.
2. Syafrida Fitri (2008) meneliti tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Perspektif Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pada Pemerintah Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyusunan APBD di Kota Binjai belum mencerminkan sepenuhnya aspirasi masyarakat dimana arah dan kebijakan umum anggaran lebih didominasi oleh kepentingan elit lokal di atasnya serta belum optimalnya peranan panitia anggaran DPRD Kota Binjai sebagai wakil rakyat di daerah.
3. Budiharto (2008) melakukan riset tentang Analisis Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan faktor-faktor yang menjadi kendala dalam implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo. Hasil menunjukkan bahwa Implementasi Sistem Akuntansi telah menggunakan aturan baru, yaitu Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang diperbaharui dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007. Sementara faktor-faktor yang menjadi kendala dalam mengimplementasikan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah adalah sumber daya manusia, sarana dan prasarana, asistensi, mekanisme kerja SKPD dan struktur organisasi (kelembagaan).
4. Dwi Widjayanti (2010) meneliti tentang Evaluasi penyajian Laporan Keuangan Kota Surakarta berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007. Hasil penelitian termuat dalam Jurnal Akuntansi dan Bisnis, Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret, Surakarta. Riset bertujuan untuk mengetahui kesesuaian dan hambatan yang dihadapi dalam penyajian Laporan Keuangan Kota Surakarta Tahun Anggaran 2008 dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dan disimpulkan bahwa penyajian Laporan Keuangan Kota Surakarta tahun 2008 tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, sementara hambatan yang dihadapi Pemerintah Kota Surakarta adalah seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta belum menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan aturan, dan terbatasnya jumlah personel yang berlatar belakang akuntansi.
5. Handoko Hadiyanto (2009) melaksanakan riset tentang Kajian Implementasi Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dalam Pengelolaan APBD Pemerintah Bengkulu. Studi ini bertujuan

untuk mengetahui proses pengelolaan APBD Pemerintah Provinsi Bengkulu Tahun 2008 dan 2009, mengukur kinerja Pemerintah Daerah terhadap pelaksanaan APBD Tahun 2008 dan 2009, serta mengevaluasi pelaksanaan/implementasi Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 di Pemerintah Provinsi Bengkulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengelolaan APBD Pemerintah Provinsi Bengkulu belum dikelola secara tertib karena belum mencerminkan aspirasi masyarakat, belum sepenuhnya taat pada perundang-undangan, belum memperhatikan asas kepatutan karena belum proporsional dalam pengalokasian anggaran, dan belum memperhatikan manfaatnya untuk masyarakat karena masih adanya penyelewengan penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran.

6. Kelompok IV Diklat KKD Khusus Penatausahaan /AKD Angkatan IV (2007) mengkaji Tinjauan atas Implementasi Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan Nomor 59 Tahun 2007 dalam struktur organisasi pengelolaan Keuangan Daerah pada BPKAD Kota Banjar Jawa Barat. Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses penetapan struktur organisasi pengelolaan keuangan daerah terkait dengan sistem dan prosedur pengeluaran pada BPKAD Kota Banjar selaku SKPD apakah sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007. Dari hasil tinjauan tersebut disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Banjar yang baru berdiri selama empat tahun sudah cukup baik dalam mengimplementasikan Permendagri 13/2006. Struktur organisasi pengelolaan keuangan daerah telah sesuai dengan sistem dan prosedur pengeluaran.

3. KERANGKA KONSEPTUAL

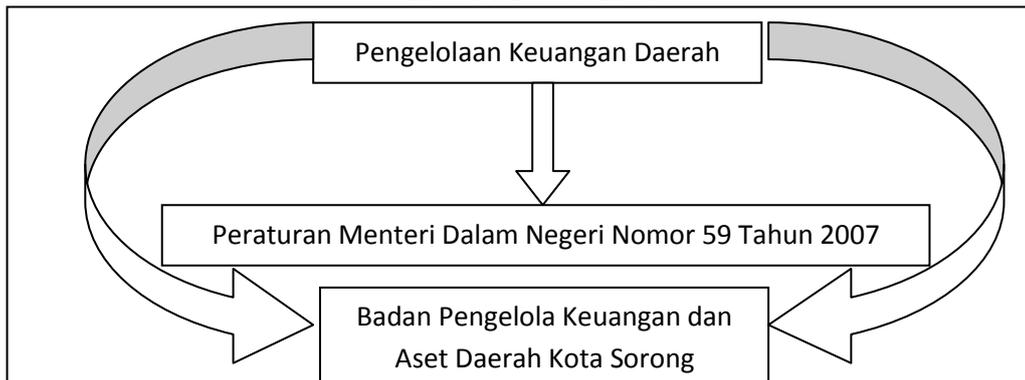
3.3 Pertanyaan Riset dan Proposisi

Peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dalam pengelolaan keuangan daerah selalu berubah-ubah. Dasar penyusunan APBD dan pengelolaan keuangan daerah pada tahun 1980-an menggunakan Manual Keuangan Daerah (Makuda), kemudian diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002. Akan tetapi, keputusan tersebut belum diimplementasikan secara utuh, kemudian keluar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang disusul setahun kemudian dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007. Perubahan peraturan yang begitu cepat diduga akan mempengaruhi keberhasilan penerapan aturan tersebut. Dengan kata lain regulasi di bidang pengelolaan keuangan daerah sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi peraturan yang bersangkutan.

Perubahan peraturan yang begitu cepat menimbulkan keengganan dari aparat pengelola keuangan daerah di masing-masing SKPD untuk mempelajari dan memahami perubahan tersebut. Mereka beranggapan peraturan baru mungkin akan muncul lagi saat mereka mulai memahami penerapan peraturan yang lama. Hal ini disebabkan oleh Keputusan Mendagri yang ditetapkan tahun 2002 dan mulai diterapkan pada Tahun Anggaran 2005 sudah berubah lagi setelah muncul Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 kemudian diubah lagi setahun kemudian dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007. Perubahan-perubahan inilah yang cukup mengganggu aparatur daerah dalam menjalankan siklus pengelolaan keuangan daerah. Mulai dari proses penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan pengelolaan Keuangan Daerah.

3.2. Model Analisis

Gambar Model Analisis



Sumber: Hasil olahan (2013)

4. METODE PENELITIAN

4.1. Alasan logis digunakannya pendekatan alternatif yang dipilih

Penelitian ini menganalisis implementasi Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dalam pengelolaan keuangan daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Sorong. Pendekatan ini bertujuan untuk meninjau secara akademis tingkat efektivitas pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Sorong dalam mencapai tujuan/sasaran dan proses pengelolaan serta pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Walaupun obyek penelitian hanya berupa satu SKPD, namun pembahasan penelitian ini mencakup area yang lebih luas, yaitu Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Sorong. Hal ini disebabkan oleh fungsi ganda dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Sorong, yaitu selaku entitas akuntansi (Satuan Kerja Perangkat Daerah/SKPD) merangkap sebagai entitas pelaporan Pemerintah Daerah Kota Sorong (Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah/SKPKD).

4.2. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang diperoleh dengan melakukan pengamatan atau observasi terhadap pengelolaan keuangan daerah berdasarkan perspektif Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Sorong.

4.3. Sumber Data

Berdasarkan sumbernya, data terbagi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian melalui wawancara dengan berbagai pihak atau pejabat yang ada pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sorong yang meliputi unsur pimpinan dan pegawai lainnya yang terkait pelaksanaan tugas dan fungsinya dengan materi yang diteliti sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai referensi berupa literatur dan buku, serta dokumen-dokumen yang ada serta tersedia di tempat penelitian, termasuk didalamnya peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan Daerah dari perspektif Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dan lembaga pengumpul data atau pihak-pihak lain yang datanya telah diolah terlebih dahulu.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif sehingga dalam penelitian ini tidak dikenal adanya sampel penelitian melainkan informan penelitian. Untuk memperoleh informan yang lebih menguasai masalah pokok penelitian, maka ditentukan informan kunci (*key informan*). Atas pertimbangan tersebut, maka ditentukan informan penelitian yaitu aparat pengelola keuangan daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Sorong.

4.4. Prosedur Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian yaitu berikut ini.

1. Studi Kepustakaan

Yakni penyerapan data-data yang relevan dengan permasalahan dari berbagai buku, referensi dan naskah kerja yang berhubungan dengan objek yang diteliti. Sumber data yang diperoleh adalah data sekunder dan digunakan sebagai pendukung analisa data.

2. Wawancara

Kegiatan berhadapan langsung dengan informan untuk mendapatkan informasi penelitian. Wawancara dilakukan terhadap aparat Pengelola Keuangan Daerah mengenai tingkat implementasi Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Sorong.

4.5 Teknik Analisis

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang berusaha menyimpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian, yakni Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Sorong, serta berusaha menjelaskan dan menggambarkan variabel penelitian secara mendalam dan komprehensif (mendetail) sesuai dengan tujuan penelitian yang sudah dirumuskan. Tetapi teknik ini tidak menggambarkan hubungan satu variabel dengan variabel lainnya serta tidak menghasilkan teori baru dalam melihat hubungan antara variabel tersebut. Atas dasar itu dapat diketahui tentang pengelolaan keuangan daerah, kemudian berdasarkan analisis tersebut dapat disusun dan ditentukan rekomendasi kebijakan terhadap permasalahan yang ada.

5. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.3 Hasil Penelitian

5.1.1 Gambaran Umum Kota Sorong

1. Sejarah berdirinya Kota Sorong

Nama Sorong berasal dari kata 'Soren' yang dalam bahasa Biak Numfor berarti laut yang dalam dan bergelombang. Pada zaman dahulu, kata Soren digunakan pertama kali oleh suku Biak Numfor yang berlayar dengan perahu-perahu layar dari satu pulau ke pulau lain hingga tiba dan menetap di Kepulauan Raja Ampat. Suku Biak Numfor inilah yang memberi nama 'Daratan Maladum' dengan sebutan 'Soren' yang kemudian dilafalkan para pedagang Thionghoa, Misionaris dari Eropa, pelaut dari Maluku dan Sangehe Talaud dengan sebutan Sorong.

2. Kondisi Geografis

Kota Sorong adalah salah satu kota di Provinsi Papua Barat yang letaknya sangat strategis karena berada pada posisi paling barat dan merupakan pintu masuk dari wilayah Indonesia Bagian Barat ke Pulau Papua. Kota Sorong juga merupakan tempat persinggahan bagi pengunjung dan wisatawan sebelum melanjutkan perjalanan ke arah utara dan selatan, yakni ke kota/kabupaten lain, serta ke ibukota Provinsi Papua Barat di Manokwari dan ibukota Provinsi Papua, Jayapura, yang terletak paling ujung di sebelah timur Pulau Papua.

3. Pertumbuhan Ekonomi

Kota Sorong memiliki prospek dan peluang amat besar dalam memacu pertumbuhan ekonominya. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan dasar pengukuran atas nilai tambah yang dihasilkan akibat adanya berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu wilayah. PDRB merupakan dasar pengukuran atas nilai tambah yang dihasilkan akibat adanya berbagai aktifitas ekonomi dalam suatu wilayah. Data PDRB tersebut menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki.

5.1.2 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Sorong

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) belum terbentuk atau belum dikenal di masa Orde Baru, yaitu dimasa berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-

pokok Pemerintahan di Daerah. Pada masa tersebut lembaga Pemerintah Daerah yang mengurus bidang Keuangan Daerah adalah Sekretariat Daerah, yang didalamnya terdapat unit kerja yang disebut Biro Keuangan pada Daerah Tingkat I (Provinsi) dan Bagian Keuangan pada Daerah Tingkat II (Kabupaten dan Kotamadya).

Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 9 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sorong menetapkan bahwa badan ini merupakan Lembaga Teknis Daerah dan unsur pendukung Kepala Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan dan berada dibawah serta bertanggung jawab kepada Walikota Sorong melalui Sekretaris Daerah Kota Sorong.

5.1.3 Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Sorong

5.1.3.1 Proses Perencanaan dan Penyusunan APBD Kota Sorong

Sebagai bahan awal untuk mulai melakukan penyusunan APBD setiap tahun adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD yang dikeluarkan setiap tahun, sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Disamping itu, setiap daerah baik provinsi, maupun kabupaten dan kota, termasuk Kota Sorong, menetapkan sejumlah dokumen perencanaan yang disusun sendiri sebagai pedoman penyusunan rencana kegiatan dan anggaran atau pedoman penyusunan APBD.

Adapun tahapan-tahapan proses penyusunan APBD dalam siklus pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kota Sorong adalah berikut ini.

1. Penyusunan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) disusun selama 1 bulan. Dokumen perencanaan dimaksud meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, serta Rencana Pembangunan Jangka Pendek atau rencana tahunan yang dikenal dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Disamping itu, di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau lembaga daerah juga mempunyai perencanaan yang dikenal dengan Rencana Strategis (Renstra) untuk jangka menengah 5 (lima) tahun sebagai penjabaran RPJMD, dan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai rencana tahunan.
2. Penyampaian Rancangan KUA kepada Kepala Daerah (dalam waktu 2 minggu), Sebagai langkah awal penyusunan RAPBD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyiapkan dokumen perencanaan yang disebut Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang disusun oleh KDH berdasarkan RKPD yang diformulasikan dari hasil Jaring Asmara (MUSRENBANGDA) dan hasil evaluasi kinerja masa lalu mengacu pada RPJMD & RKP serta pedoman penyusunan APBD untuk disepakati bersama DPRD.
3. Penyampaian Rancangan KUA dari Kepala Daerah kepada DPRD dilakukan selama 2 minggu.
4. KUA disepakati antara Kepala Daerah dengan DPRD 1 bulan.

Proses penyusunan Arah dan Kebijakan Umum Anggaran Pemerintah Daerah Kota Sorong adalah sebagai berikut:

- 1) DPRD melakukan penjangkaran aspirasi masyarakat. Penjangkaran aspirasi dimaksudkan agar didapatkan informasi tentang kebutuhan riil masyarakat sebagai input dalam penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD. Tujuan penjangkaran aspirasi masyarakat antara lain : mengeksplorasi data/informasi dari masyarakat, mendeskripsikan aspirasi masyarakat, memaparkan aspirasi masyarakat.
- 2) Berdasarkan hasil penjangkaran aspirasi masyarakat dan rencana strategi Daerah (Renstrada), DPRD menyusun pokok-pokok pikiran yang digunakan sebagai masukan dalam Perumusan Arah dan Kebijakan Umum Anggaran Daerah.

- 3) Pemerintah Kota Sorong merumuskan Arah dan Kebijakan Umum Anggaran Daerah berdasarkan : (1) Pokok-pokok pikiran DPRD; (2) Arahan, mandat dan pembinaan dari Pemerintah Atasan; (3) Data Historis; (4) Renstrada; dan (5) Dapat juga dari hasil penjarangan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah Daerah.
- 4) DPRD bersama pemerintah daerah menentukan mengenai rumusan Arah dan Kebijakan Umum Anggaran Daerah.
5. Penyampaian Rancangan PPAS yang disusun oleh KDH dan dibahas dengan DPRD untuk disepakati bersama yang selanjutnya KUA & PPA dijadikan sebagai pedoman penyusunan RKA-SKPD. Dilakukan selama 1 minggu.
6. Penyampaian Rancangan PPAS ke DPRD dilakukan selama 3 minggu.

Berdasarkan Arah dan Kebijakan Umum Anggaran Daerah yang telah disepakati tersebut, Pemerintah Daerah (dapat dibantu Tim Ahli) menyusun strategi dan Prioritas Anggaran Daerah. Rumusan tersebut selanjutnya dikonfirmasikan kepada DPRD untuk memastikan apakah Strategi dan Prioritas Anggaran Daerah sudah sesuai dengan Arah dan Kebijakan Umum Anggaran Daerah yang telah disepakati. Berdasarkan Strategi dan Prioritas Anggaran Daerah, pemerintah daerah melalui forum warga yang terdiri dari: Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan warga masyarakat menyusun rencana Program dan Kegiatan untuk menjadi masukan bagi Tim Anggaran Eksekutif dan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Daerah. Berdasarkan masukan dari forum warga, Tim Anggaran Eksekutif menerbitkan surat edaran yang dikirim kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Daerah. Surat edaran tersebut antara lain memuat: Petunjuk Pelaksanaan dan Teknis Penyusunan Anggaran, Plafon Anggaran, Tolok Ukur Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, Formulir Memoranda Anggaran, dan Standart Analisa Belanja. Pernyataan anggaran atau memoranda anggaran merupakan dokumen perencanaan anggaran yang dibuat oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran dari Tim Anggaran Eksekutif. Dokumen Memoranda anggaran berisi usulan program, kegiatan dan rancangan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Unit Kerja yang bersangkutan. Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah Digunakan sebagai pertimbangan dalam penyusunan memoranda anggaran. Tim Anggaran Eksekutif melakukan evaluasi terhadap memoranda anggaran yang dibuat oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah. Evaluasi dilakukan untuk menganalisis kesesuaian antara Rancangan Program, Kegiatan dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Arah dan Kebijakan Umum, serta Strategi dan Prioritas Anggaran Daerah. Jika diperlukan, Tim Anggaran Eksekutif dapat meminta Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyempurnakan memoranda anggaran. Selanjutnya berdasarkan memoranda anggaran yang telah dievaluasi, Tim Anggaran Eksekutif menyusun Rancangan Anggaran Daerah. Sebelumnya diajukan dalam sidang Paripurna DPRD, dilakukan pembahasan Rancangan Anggaran Daerah antara Tim Anggaran Eksekutif dengan Panitia Anggaran Legislatif. Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dikelola dalam APBD.
7. KUA & PPAS disepakati antara Kepala Daerah dengan DPRD.

Jika pembahasan kedua dokumen perencanaan tersebut (KUA & PPAS) telah selesai dan disepakati dalam arti telah disepakati antara TAPD dan Panitia Anggaran SKPD, maka hasil kesepakatannya dituangkan ke dalam naskah yang disebut Nota Kesepakatan yang di tanda tangani oleh Kepala Daerah. Penyampaian Nota Keuangan dan rancangan Peraturan Daerah tentang penetapan APBD beserta lampirannya kepada DPRD oleh Walikota Sorong Selanjutnya dibahas oleh DPRD dalam sidang paripurna DPRD dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan, pandangan umum dan tanggapan terhadap nota Keuangan. Pembahasan ini dilakukan juga melalui konsultasi (*sharing*) dengan masing-masing Dinas/Instansi terkait dan panitia anggaran eksekutif. Dalam kesempatan ini panitia anggaran dewan berpeluang untuk menambah/mengurangi rencana penerimaan dan belanja daerah yang telah diusulkan oleh pihak eksekutif. biasanya cenderung

menaikkan rencana penerimaan. Setelah pertanyaan, pandangan umum dan tanggapan dijawab oleh Walikota Sorong (pihak eksekutif), selanjutnya fraksi-fraksi di DPRD memberikan tanggapan akhir untuk menerima dan menolak rancangan APBD. Bila masing-masing fraksi telah menyetujui rancangan APBD tersebut, maka rancangan APBD dapat ditetapkan menjadi APBD dalam bentuk Peraturan Daerah.

8. Penetapan Pedoman penyusunan RKA-SKPD oleh Kepala Daerah selama 1 minggu. Setelah Nota Kesepakatan ditandatangani, maka Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bekerjasama dengan Badan Pengelola Keuangan Daerah menyiapkan surat edaran Walikota perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD dengan melampirkan KUA dan PPAS yang sudah disepakati oleh Walikota bersama dengan Pimpinan DPRD. Surat Edaran tersebut disampaikan kepada setiap SKPD sebagai pedoman untuk menyempurnakan Pra RKA-SKPD yang telah disusun sebelumnya. Surat Edaran yang diterima oleh setiap Kepala SKPD beserta KUA dan PPAS yang melampiri surat edaran tersebut, dijadikan dasar atau pedoman untuk mengoreksi Pra RKA-SKPD yang telah disusun. Dalam menyempurnakan Pra RKA-SKPD dimaksud, setiap Kepala Bidang dan Sekretaris SKPD menyesuaikan program dan kegiatan serta anggaran masing-masing sesuai bidang tugas dan fungsinya.
9. Penyampaian Raperda APBD kepada DPRD selama 2 bulan. Setelah RKA-SKPD diterima oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, selanjutnya menyampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk diteliti atau dibahas. Dalam membahas RKA-SKPD oleh TAPD dilakukan bersama Kepala SKPD beserta staf yang terkait. Jika dalam pembahasan atau penelitian RKA-SKPD terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan yang berlaku, termasuk bentuk dokumen RKA-SKPD. Maka kepala SKPD bersama stafnya melakukan perbaikan dan selanjutnya diteliti kembali oleh TAPD untuk disetujui.
10. Pengambilan keputusan bersama DPRD dan Kepala Daerah terhadap RAPBD selama 2 bulan. Setelah Rancangan APBD diterima oleh DPRD maka sesuai jadwal pembahasan yang telah ditetapkan oleh DPRD, langkah awal yang dilakukan sesuai aturan tata tertib DPRD, adalah melakukan Rapat Paripurna DPRD untuk mendengarkan pidato pengantar Walikota yang menjelaskan secara singkat isi RAPBD yang telah disampaikan kepada DPRD. Untuk Memudahkan dan melancarkan pembahasan dimaksud, DPRD menghadirkan atau mengikutsertakan Kepala SKPD beserta staf yang terkait. Dalam membahas RAPBD tersebut, dikaji kembali berdasar dokumen perencanaan atau ketentuan lainnya yang berlaku, baik berupa KUA dan PPAS.
11. Penetapan hasil evaluasi 1 bulan.
Berdasarkan keputusan bersama antara Walikota dan DPRD, Badan Pengelola Keuangan Daerah bersama TAPD menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sesuai dengan hasil pembahasan, sekaligus menyempurnakan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD yang telah disiapkan sebelumnya untuk selanjutnya diproses lebih lanjut dalam rangka penetapannya menjadi Peraturan Daerah Pemerintah Kota Sorong.
12. Penetapan Perda tentang APBD & Raper KDH tentang penjabaran APBD bila sesuai hasil evaluasi selama 2 minggu.
13. Penyempurnaan sesuai hasil evaluasi 2 minggu.
14. Pembatalan berdasarkan hasil evaluasi
15. Penghentian dan pencabutan pelaksanaan Perda tentang APBD bersama DPRD.
16. Penetapan keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Perda APBD dan penyampaian hasil penyempurnaan berdasarkan hasil evaluasi.
17. Penetapan Perda APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD.
18. Penyampaian Perda APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD kepada Gubernur.

5.1.3.2 Proses Pelaksanaan/Penatausahaan APBD Pemerintah Kota Sorong

Jadwal dan proses pelaksanaan APBD Kota Sorong dilaksanakan dengan tahap-tahap sebagai berikut:

1. Pemberitahuan menyusun DPA-SKPD.
PPKD paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah peraturan daerah tentang APBD ditetapkan, memberitahukan kepada semua kepala SKPD agar menyusun rancangan DPA-SKPD. Rancangan DPA-SKPD merinci sasaran yang hendak dicapai, program, kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap SKPD serta pendapatan yang diperkirakan.
2. Penyerahan Rancangan DPA-SKPD dan rancangan anggaran kas dari SKPD kepada PPKD. Kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA-SKPD kepada PPKD paling lama 6 (enam) hari kerja setelah pemberitahuan.
3. Verifikasi dan pengesahan rancangan DPA-SKPD dan rancangan anggaran kas. TAPD melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD bersama-sama dengan kepala SKPD paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak ditetapkannya peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Berdasarkan hasil verifikasi, PPKD mengesahkan rancangan DPA-SKPD dengan persetujuan Sekretaris Daerah. DPA-SKPD yang telah disahkan disampaikan kepada kepala SKPD, Satuan kerja Pengawasan Daerah, dan Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal disahkan. Setelah DPA-SKPD ditetapkan, Kepala SKPD melaksanakan kegiatan-kegiatan SKPD berdasarkan dokumen tersebut yaitu :
 - (1) Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.
 - (2) Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran.
 - (3) Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.
4. Penyampaian DPA-SKPD dan anggaran kas yang telah disahkan ke SKPD.
5. Kepala SKPD menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan fisik dan non fisik maupun keuangan kepada PPKD untuk pengesahan menjadi DPAL-SKPD tahun anggaran berikutnya.
6. Pelaksanaan APBD dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA):
 - (1) Azas Umum Pelaksanaan APBD
 - (2) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD
 - (3) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - (4) Kebijakan Umum Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan APBD.
1. Penatausahaan Keuangan Daerah:
 - (1) Azas Umum penata Usahaan Keuangan Daerah.
 - (2) Pelaksanaan Penata Usahaan Keuangan Daerah.
 - (3) Penata Usahaan Penerimaan.
 - (4) Penata Usahaan Pembayaran.
 - (5) Permintaan dan prosedur pembayaran.
 - (6) Permintaan membayar dan pencarian dana.
 - (7) Pertanggung jawaban penggunaan dana.
2. Pelaksanaan APBD Pemerintah Kota Sorong yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan dilaksanakan setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD) ditetapkan oleh PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) dengan persetujuan Sekretaris Daerah. Anggaran daerah disusun berdasarkan pendekatan Kinerja, yaitu sistem anggaran yang mengutamakan kepada upaya pencapaian hasil kinerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Anggaran Belanja Daerah yang disusun dengan pendekatan kinerja juga harus memuat keterangan sebagai berikut :
 - 1) Sasaran yang diharapkan menurut fungsi belanja.

- 2) Standar pelayanan yang diharapkan dan perkiraan biaya satuan komponen kegiatan yang bersangkutan.
- 3) Persentase dari jumlah pendapatan yang membiayai Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasi dan Pemeliharaan dan Belanja Modal/Pembangunan.

Komposisi belanja terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, sedangkan belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Sesuai dengan definisi belanja tidak langsung dan belanja langsung, maka alokasi anggaran lebih diarahkan pada belanja langsung sehingga rasio belanja tidak langsung dan belanja langsung daerah mencapai 48,35% dan 51,65%.

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan dijabarkan berikut ini.

1. Urusan Wajib meliputi: Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, RSUD, Dinas Pekerjaan Umum, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Perhubungan, Kantor Lingkungan Hidup, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Penanggulangan Bencana Alam, Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan, Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata, Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Kepegawaian dan Diklat, Staf Ahli Walikota, Sekretariat KPU, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kantor PDE, Arsip dan Humas, Kantor Perpustakaan Umum Daerah.
2. Urusan Pilihan meliputi: Dinas Pertanian, Dinas Pariwisata, Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

5.1.3.3 Proses Pertanggungjawaban/Pelaporan APBD Kota Sorong

Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ditegaskan bahwa laporan pertanggungjawaban keuangan dinyatakan dalam bentuk laporan keuangan yang setidak-tidaknya meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, dan disusun berdasarkan SAP.

Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menjabarkan lebih rinci komponen laporan keuangan yang wajib disusun dan disampaikan oleh setiap tingkatan Pengguna Anggaran, Pengelola Perbendaharaan serta Pemerintah Daerah. Selain itu diatur pula hubungan kegiatan akuntansi mulai dari tingkat satuan kerja pelaksana sampai tersusunnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan jadwal yang telah ditentukan. Kepala Daerah menyampaikan laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Kepala Daerah menyampaikan Raperda tentang Pelaksanaan Pertanggungjawaban APBD berupa Laporan Keuangan kepada DPRD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD adalah laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Adapun isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Sorong terdiri atas:

1. Batang Tubuh Perda.
2. Lampiran-lampiran Perda :
 - Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - Lampiran I.1 : Ringkasan LRA menurut urusan dan organisasi
 - Lampiran I.2 : Rincian LRA menurut urusan, organisasi, pendapatan belanja dan pembangunan
 - Lampiran I.3 : Rekap RA Belanja Daerah menurut urusan, organisasi, program dan kegiatan.
 - Lampiran I.4 : Rekap RA Belanja Daerah untuk keselarasan urusan dan fungsi
 - Lampiran I.5 : Daftar Piutang Daerah
 - Lampiran I.6 : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah

- Lampiran I.7 : Daftar Realisasi Tambahan dan Kurang Aset Tetap Daerah
- Lampiran I.8 : Daftar Realisasi Tambahan dan Kurang Aset lainnya
- Lampiran I.9 : Daftar kegiatan yang belum diselesaikan s/d akhir tahun
- Lampiran I.10 : Daftar Dana Cadangan Daerah
- Lampiran I.11 : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah
- Lampiran II : Neraca
- Lampiran III : Laporan Arus Kas
- Lampiran IV : Catatan Atas Laporan Keuangan

5.2 Pembahasan

5.2.1 Evaluasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Struktur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Sorong

Secara garis besar visi, misi, tujuan, sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan yang ditetapkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Sorong sudah cukup realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan. Seperti telah dikemukakan sebelumnya, pembentukan BPKAD Kota Sorong diatur dalam Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 5 Tahun 2008 dan di rubah dengan Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 9 Tahun 2012 sebagai pedoman umum bagi setiap pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sehingga pelaksanaan tugas dan fungsinya dapat mencapai hasil kerja yang efektif sesuai dengan ketentuan dan rencana yang telah ditetapkan.

Secara umum BPKAD Kota Sorong telah melaksanakan tugas pengelolaan keuangan dan aset dengan semestinya yang dibuktikan dengan tercapainya efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran yang seimbang dan terkelolanya aset daerah yang berorientasi pada kepentingan publik.

5.2.2 Proses Penyusunan APBD Kota Sorong berdasarkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007

Sebagai salah satu instansi pemerintahan yang memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan penyusunan, pelaksanaan, dan pelaporan APBD, penulis menemukan beberapa masalah yang kadang terjadi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Sorong, diantaranya keterlambatan penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan juga Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang mengalami pengunduran waktu. Keterlambatan penyusunan anggaran terjadi karena adanya tarik ulur atau adanya perbedaan pendapat antara eksekutif dengan legislative yang menghabiskan waktu cukup lama untuk mencapai satu pendapat yang sama. Selain itu terdapat hubungan yang kurang harmonis dengan DPRD akan memperlambat penyusunan anggaran, apabila anggota dewan kurang menyukai penyusunan anggaran yang telah diajukan atau kurang menyukai orang yang menyusun anggaran tersebut, maka hal tersebut akan proses pelaksanaan anggaran.

Solusi yang dibutuhkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sorong yaitu kinerja yang diterapkan harus lebih efisien, dalam hal keterlambatan penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), seharusnya setiap SKPD yang ada bisa meminimalisir terjadinya tarik ulur atau perbedaan pendapat yang kadang terjadi antara eksekutif dengan Legislatif, dan setiap orang yang menyusun anggaran diusahakan untuk lebih mengetahui anggaran apa saja yang harus dibelanjakan dan membuat penyusunan anggaran yang dianggap penting oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sorong, kemudian hubungan yang harmonis perlu dijunjung tinggi antara Pemerintah Daerah dengan DPRD, karena dengan keharmonisan tentu penyusunan anggaran yang diajukan tentu tidak akan dipersulit.

Setelah melihat gambaran proses penyusunan APBD dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah Kota Sorong belum melaksanakan sesuai dengan peraturan yang dimaksud, hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Sorong dalam melaksanakan proses penyusunan APBD masih mengacu pada aturan yang lama dan juga masih mengacu pada draft sendiri atau aturan yang disusun sendiri.

Proses penyusunan anggaran yang sesuai dengan Perubahan yang terjadi pada Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Sorong yaitu penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 1 ayat 33 yang berbunyi Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD, sementara pada Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 Pasal 1 disisipkan menjadi ayat 34a yang berbunyi : Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah dalam artian bahwa penegasan alur pengerjaan RKA SKPD, pada SKPKD penyusunan RKA seharusnya dipisahkan antara RKA sebagai SKPD dan RKA sebagai pemerintah daerah (RKA PPKD). Sama halnya dengan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Rancangan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS), RKA-SKPD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Pemerintah Kota Sorong. Sesuai dengan teori bahwa untuk Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 pada tahap penyusunan anggaran jadwalnya diperpendek dengan cara meringkas proses konten KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara), sehingga istilah PPA (Prioritas dan Plafon Anggaran) dihapus.

5.2.3 Proses Pelaksanaan dan Penatausahaan APBD berdasarkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007

Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah daerah dikelola dalam APBD. Pelaksanaan APBD meliputi pelaksanaan anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Penjelasan berikut ini didasarkan pada peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan ini telah disusun pedoman pelaksanaannya yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengeluaran dapat dilakukan jika dalam keadaan darurat, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

Secara obyektif masih banyak masalah dan tantangan yang harus diselesaikan dan menjadi prioritas dalam tahun 2011, tetapi di lain pihak kondisi dan kemampuan pemerintah dalam hal penyediaan anggaran masih terbatas, sehingga prinsip efisiensi, efektifitas, *equity* dan ekonomis tetap menjadi dasar dalam pengalokasian belanja daerah tentunya dengan memperhatikan tolok ukur dan target kinerja yang ingin dicapai dari setiap kegiatan yang dilaksanakan.

Berkaitan dengan belanja daerah, proses yang cukup memakan waktu adalah saat melakukan pencairan dana, dimana dana tiap-tiap SKPD akan diperkirakan oleh BUD. BUD akan membuat Surat Penyediaan Dana dalam rangka manajemen kas daerah. Selanjutnya Bendahara SKPD mengajukan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) berdasarkan SPD tersebut bersama dengan dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD. Proses selanjutnya adalah pengajuan SPP untuk diterbitkannya SPM (diterbitkan paling lambat 2 hari sejak SPP diterima). SPM yang telah ditandatangani kemudian diajukan kepada BUD sebagai otoritas yang akan melakukan pencairan dana. Setelah SPM diterima oleh BUD baru lah Bendahara SKPD memperoleh SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dimana surat tersebut berlaku pada bank yang telah ditunjuk sebagai tempat pencairan dana (SP2D diterbitkan paling lambat 2 hari sejak SPM diterima).

Proses tersebut belum termasuk jika SPP dan atau SPM yang diajukan oleh Bendahara SKPD ditolak. Hal tersebut tentu akan menghambat program kerja tiap-tiap SKPD yang sangat membutuhkan dana tersebut. Saat dana tersebut dicairkan dan SKPD mulai melaksanakan program kerjanya, SKPD diberikan waktu sampai tanggal 10 bulan berikutnya untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban. Format laporan tersebut sedikitnya harus terdapat Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan yang disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (PP No.24 Tahun 2005).

Dengan demikian sudah jelas bahwa proses-proses tersebut sangat berpengaruh terhadap penyampaian laporan pertanggungjawaban oleh tiap-tiap SKPD, dengan beberapa hal yang terjadi diatas akan mengakibatkan keterlambatan penyusunan anggaran dan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ).

5.2.4 Pertanggungjawaban/Pelaporan APBD Kota Sorong berdasarkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007

Secara keseluruhan, proses penyusunan Laporan Pertanggungjawaban telah sesuai dengan aturan, baik Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 ataupun Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) karena sudah ada contoh format. Hal ini dapat dilihat dari isi Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Sorong yang terdiri atas Batang Tubuh Peraturan Daerah (PERDA) dan lampiran-lampiran Perda.

Masalah yang terjadi dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban adalah jadwal penyusunan yang seharusnya dilaporkan paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya, mengalami pengunduran waktu lebih dari tanggal yang sudah ditentukan. Hal ini akan berdampak pada keterlambatan penyerahan laporan pertanggungjawaban yang seharusnya berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, serta menghambat proses pengolahan data pada tingkat selanjutnya, karena semua laporan pertanggungjawaban nantinya akan melalui proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang membutuhkan waktu cukup lama. Oleh karena itu banyak waktu yang akan terbuang hanya karena Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) telat menyerahkan laporan pertanggungjawaban.

Laporan pertanggungjawaban tersebut mengalami pengunduran waktu, karena Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus mengumpulkan bukti Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) sebelum diserahkan untuk dilaporkan, pengumpulan bukti tersebut memerlukan waktu yang cukup lama, kemudian selain dari pengumpulan bukti yang cukup, kemampuan dalam Sumber Daya Manusia (SDM) belum merata menjadi salah satu sebab terjadinya pengunduran waktu Surat Pertanggungjawaban (SPJ).

Selain itu solusi yang perlu diterapkan pada Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang mengalami pengunduran waktu yang seharusnya laporan tersebut diserahkan pada tanggal 10 bulan berikutnya, mengalami pengunduran waktu dan baru bisa diserahkan melebihi waktu yang sudah ditentukan, yaitu dengan setiap SKPD yang ada harus bisa mengumpulkan bukti-bukti Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dengan segera atau secepatnya, dan juga diusahakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum merata, bisa secepat mungkin diatasi. Karena semua Laporan Pertanggungjawaban nantinya akan melalui proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan tentunya pemeriksaan oleh BPK tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama, oleh karena itu banyak waktu yang akan terbuang hanya karena Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) telat menyerahkan laporan pertanggungjawaban.

Sementara penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Widjayanti (2010) dimana hasil penelitian menemukan bahwa penyajian laporan keuangan tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, dikarenakan seluruh SKPD belum menghasilkan laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan, belum adanya sistem akuntansi pemerintah daerah yang baik, terbatasnya jumlah personil pemerintah daerah yang berlatar belakang akuntansi, sistem rotasi yang kurang tepat sasaran, dan kurangnya ketelitian dalam penyajian saldo laporan keuangan.

6. PENUTUP

6.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, maka dapat ditarik beberapa simpulan berikut ini.

1. Pembentukan Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Sorong berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 yang telah direvisi dengan Peraturan Daerah Nomor 9

Tahun 2012 menunjukkan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Sorong telah berupaya untuk mencapai hasil kerja yang efektif sesuai dengan ketentuan atau rencana yang telah ditetapkan meskipun masih banyak kendala karena terbatasnya Sumber Daya Manusia, belum lengkapnya kebijakan menurut ketentuan yang berlaku, belum lengkapnya instrumen pelaksanaan serta adanya peraturan-peraturan yang berubah-ubah.

2. Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dalam memperpendek jadwal penyusunan anggaran dengan cara meringkas proses KUA-PPAS, sehingga istilah PPA dihapus, belum dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Sorong. Proses yang dilaksanakan masih mengikuti aturan yang lama, yaitu penyusunan KUA-PPAS, Pemerintah Kota Sorong mengeluarkan surat edaran kepada setiap SKPD untuk melaksanakan Pra RKA-SKPD sebagai bahan penyusunan rancangan KUA-PPAS sehingga hal ini memperpanjang prosesnya. Jika proses yang dilalui cukup panjang maka akan menyebabkan lambatnya pelaksanaan proses selanjutnya. Adapun langkah-langkah yang harus dilengkapi adalah:
 - (1) tata cara pemberian kode program dan kegiatan dalam pengisian RKA (Rencana Kerja Anggaran) belum dilakukan sesuai dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007
 - (2) reklasifikasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan, beserta kode rekening APBD belum dilakukan sesuai dengan aturan.
 - (3) penegasan alur pengerjaan RKA SKPD, pada SKPKD penyusunan RKA dipisahkan antara RKA sebagai SKPD dan RKA sebagai PPKD.
3. Tahapan-tahapan yang mengalami perubahan pada proses Pelaksanaan dan Penatausahaan APBD Kota Sorong perspektif permendagri Nomor 59 Tahun 2007 belum dilaksanakan masih mengacu pada aturan yang lama. Tahapan-tahapan yang mengalami perubahan diuraikan berikut ini.
 - (1) Alur pengerjaan DPA-SKPD dan SKPKD .
 - (2) Penomoran DPA (Dokumen Pelaksana Anggaran) juga ikut berubah karena adanya perubahan pada pemberian kode program dan kegiatan.
 - (3) Penatausahaan Penerimaan
Penyederhanaan proses pertanggungjawaban fungsional ke BUD sehingga tercipta proses yang lebih efisien. Hal ini dilihat dari dihapusnya buku pembantu per rincian objek penerimaan yang harus dilampirkan dalam SPJ fungsional.
 - (4) Penatausahaan pengeluaran Penegasan SPD (Surat Penyediaan Dana) diberikan kepada SKPD secara periodik (bulanan, triwulan, semesteran) tergantung pada ketersediaan dana. Perubahan format SPD, SPP UP (Surat Perintah Pembayaran Uang Persediaan, SPP GU (Surat Perintah Pembayaran Ganti Uang Persediaan, SPP TU (Surat Perintah Pembayaran Tambahan Uang Persediaan, SPP LS (Surat Perintah Pembayaran Langsung) gaji dan tunjangan, SPP LS barang dan jasa dan ada penambahan format SPP LS belanja tidak langsung PPKD.
4. Proses Pertanggungjawaban dan Pelaporan Pelaksanaan APBD Kota Sorong secara keseluruhan sudah sesuai dengan aturan, baik Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 ataupun SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan) karena sudah tersedianya contoh format penyusunan.

6.2 Saran-saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka saran-saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. mengoptimalkan kualitas dan kuantitas Sumberdaya Manusia untuk mencapai sasaran demi mewujudkan tujuan organisasi dengan cara mengarahkan personil sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah diharapkan bekerjasama dengan instansi terkait untuk mengadakan pelatihan Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 atau workshop mengenai perkembangan peraturan pengelolaan keuangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat maupun lembaga keuangan lainnya.

2. proses perencanaan dan penyusunan, pelaksanaan dan penatausahaan serta APBD Kota Sorong seyogyanya dilaksanakan berdasarkan tahapan-tahapan yang disesuaikan dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007. Tahapan-tahapan yang belum dilakukan agar segera dilakukan sesuai dengan prosedur.
3. proses penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sorong perlu lebih diperjelas dan terinci sehingga tidak terkesan tertutup serta tetap melaksanakan prinsip transparansi pelaporan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Syukry. 2008. Pedoman Permendagri 13, dan Permendagri 59. Diakses dari <http://.iman-nugraha.net/?p=77> pada tanggal 12 Januari 2013.
- _____. 2010. *Manajemen Kas Daerah*. diakses dari <http://syukry.word-press.com> pada tanggal 9 juli 2012.
- anonymous. Mudah Nerapin Permendagri 13/2006 jo 59/2007 dengan eBudgeting. Posted on Mei 7, 2008. Diakses dari wordPress.com tanggal 5 Februari 2013.
- Azhar. 2008. *Faktor-faktor yang mempengaruhi Keberhasilan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pada Pemerintah Aceh*. Tesis S2. Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Bastian, Indra. 2006. *Sistem Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- _____. 2007. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Ed. 2. Salemba Empat. Jakarta.
- Budiharto. 2008. *Analisis Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo*. Universitas Nasional Kabupaten Kulon Progo.
- Darise. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik)*. PT. Indeks Jakarta 2008
- Diklat KKD Angkatan IV. 2007. *Tinjauan atas Implementasi Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan Nomor 59 Tahun 2007 dalam struktur organisasi pengelolaan keuangan Daerah pada BPKAD Kota Banjar Provinsi Jawa Barat*, Makalah Kelompok IV Diklat KKD Khusus Penatausahaan/AKD Angkatan IV 2007.
- Dwi Widjayanti. 2010. *Evaluasi penyajian laporan keuangan kota Surakarta berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007*. Jurnal Akuntansi dan Bisnis. Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Hadiyanto. 2009. *Kajian Implementasi Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dalam Pengelolaan APBD Pemerintah Provinsi Bengkulu*. Tesis S2. Universitas Bengkulu.
- Halim, Abdul dan Syukriy Abdullah. 2004. *Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Pemda: Studi Kasus Kabupaten dan Kota di Jawa dan Bali*. Jurnal Ekonomi STEI No.2/Tahun XIII/25.
- Halim, Abdul. 2011. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP-AMP YKPN.
- Mahmudi. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UII Press.
- Mardiasmo. 2009. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Nordiawan, et al. 2007. *Akuntansi Pemerintahan Jilid 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 9 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Sorong.
- Rahayaan, Kisman. 2010, *Profil Kota Sorong*. Bappeda Kota Sorong Tahun 2010.
- Saragih, Juli Panglima. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Republik Indonesia. 1999. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839). Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

- _____. 2000. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- _____. 2002. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurus, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD. Jakarta: Sekretariat Jenderal Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia.
- _____. 2003. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- _____. 2004. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503). Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- _____. 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- _____. 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Sekretariat Jenderal Departemen Dalam Negeri.
- _____. 2007. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13/ 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Sekretariat Jenderal Departemen Dalam Negeri.
- _____. 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Syafrida, Fitrie. 2008. *Pengelolaan Keuangan Daerah Perspektif Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 pada Pemerintah Kota Binjai*. Tesis. Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Ventura Hardi. 2009. *Indeks Pembangunan Manusia Kota Sorong*. Badan Pusat Statistik Kota Sorong.

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAMPUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN BIAK NUMFOR

Terry Corie Pangkong
David P.E. Saerang
Jullie J. Sondakh

ABSTRAK

Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas. Laporan keuangan yang diterbitkan harus disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dibandingkan dengan laporan keuangan entitas yang jelas. Setiap entitas pelaporan dan entitas akuntansi harus mampu menyusun laporan keuangan pemerintah daerah yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, necara, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pemahaman Peraturan, Komitmen, Kualitas Sumber Daya Manusia dan Perangkat Pendukung terhadap Kemampuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Biak Numfor. Populasi pada penelitian sebanyak 49 SKPD di Kabupaten Biak Numfor dan sampel penelitian adalah Kepala SKPD, PPK-SKPD, PPKD dan Bidang Akuntansi pada SKPKD. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan menggunakan metode analisis regresi berganda. Melakukan uji kualitas data dengan validitas dan reliabilitas. Selain itu dilakukan pengujian asumsi klasik yaitu normalitas, multikolinearitas dan heteroskedastisitas. Hasil penelitian membuktikan bahwa secara parsial variabel Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kemampuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Biak Numfor sedangkan variabel Pemahaman Peraturan, Komitmen dan Perangkat Pendukung tidak berpengaruh.

Kata kunci : *Pemahaman Peraturan, Komitmen, Kualitas Sumber Daya Manusia, Perangkat Pendukung dan Kemampuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*

ABSTRACT

The financial report is a form of accountability for the stewardship of economic resources that are owned by an entity. Issued financial statements should be prepared in accordance with applicable accounting standards so that financial statements can be compared with the prior period financial statements or in comparison with the entity's financial statements are clear. Each reporting entity and accounting entity should be able to prepare financial statements which consist of a local government budget realization report, balance sheet, cash flow statement and notes to the financial statements. This study aims to determine the influence of Understanding Regulation, Commitment, Quality and Human Resources Capability Devices Supporting the Local Government Financial Statements in Biak. The population in the study by 49 SKPD in Biak and the sample was Chief SKPD, PPK-SKPD, PPKD and Field Accounting at SKPKD. This research is quantitatively using multiple regression analysis. To test the validity of data quality and reliability. Besides testing the classical assumption of normality, multicollinearity and heteroscedasticity. The results prove that in partial Quality Human Resources affect the ability of Local Government Financial Statements in Biak while variable Understanding Regulation, Commitment and Support Device has no effect.

Keywords : *Understanding Regulation, Commitment, Quality of Human Resources, Tools and Capabilities Supporting Local Government Financial Statements*

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah Indonesia telah melakukan reformasi manajemen keuangan negara baik pada pemerintah pusat maupun pada pemerintah daerah dengan ditetapkannya paket undang-undang bidang keuangan negara, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 pasal 31 dikatakan bahwa “Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan dimaksud setidaknya meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah”.

Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dalam struktur pemerintahan daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan entitas akuntansi yang mempunyai kewajiban melakukan pencatatan atas transaksi-transaksi pendapatan, belanja, aset dan selain kas yang terjadi di lingkungan satuan kerja. Proses pencatatan tersebut dilakukan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) dan pada akhir periode dari catatan tersebut PPK-SKPD menyusun laporan keuangan untuk satuan kerja bersangkutan.

Laporan keuangan yang dihasilkan dari pencatatan transaksi keuangan oleh Kepala SKPD berupa : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan. Sedangkan pada tingkat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) laporan keuangan yang dihasilkan dari pencatatan transaksi keuangan berupa : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Pada akhir tahun melalui mekanisme konsolidasi dihasilkan laporan keuangan pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan berupa : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2011 Badan Pemeriksa Keuangan dalam opininya terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Biak Numfor yaitu : Opini Tahun 2005 WDP, Tahun 2006 TW, Tahun 2007 TMP, Tahun 2008 TMP, Tahun 2009 WDP dan Tahun 2010 TMP. Hasil evaluasi oleh BPK menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor dalam menyusun laporan keuangan masih terdapat kelemahan yaitu : pencatatan tidak/belum dilakukan secara akurat, proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan, entitas terlambat menyampaikan laporan, sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai dan sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung sumber daya manusia yang memadai.

Berdasarkan hasil pengamatan dan kenyataan yang ada, rata-rata Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Biak Numfor belum sepenuhnya dapat menerapkan Permendagri 13 Tahun 2006 dan PP 24 Tahun 2005 sesuai dengan ketentuan dalam Pelaporan Keuangan, karena adanya perubahan basis pencatatan yaitu dari basis kas ke *cash to accrual* (kombinasi antara basis kas dan basis akrual) sehingga masing-masing SKPD belum sepenuhnya mampu menyusun laporan keuangan dalam bentuk realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan dan pelaporan tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan yakni selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sesudah tahun anggaran berakhir.

Oleh karena itu pemahaman peraturan, komitmen, kualitas sumber daya manusia dan perangkat pendukung yang ada mendukung terhadap penciptaan akan kemampuan aparatur terkait dalam

penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah. Dalam menyajikan tata kelola keuangan yang baik, maka pemerintah daerah harus dapat menyajikan LKPD sesuai dengan PP 24 Tahun 2005.

Menurut Halim, dkk (2010), ada beberapa kendala dalam mengimplementasikan sistem akuntansi sehingga berimplikasi pada ketidakhandalan dan ketidaktepatan waktu dalam menghasilkan laporan keuangan yaitu meliputi : pimpinan SKPD seringkali tidak memahami secara utuh tentang tugas, wewenang dan tanggung jawabnya, kapasitas SDM yang terbatas, komitmen yang tidak memadai, penguasaan tentang peraturan keuangan dan akuntansi yang rendah, keterbatasan fasilitas kerja atau perangkat pendukung (komputer) dan prasarana tugas serta belum berjalannya koordinasi antara unit-unit yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan.

Berdasarkan fenomena dan hasil penelitian sebelumnya maka termotivasi untuk melakukan penelitian lanjutan tentang kinerja pemerintah daerah dalam kemampuan penyusunan laporan keuangan dengan judul **"Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemampuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Biak Numfor"**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka permasalahan penelitian ini sebagai berikut: "

1. Apakah Pemahaman tentang Peraturan berpengaruh terhadap Kemampuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Biak Numfor ?"
2. Apakah Komitmen berpengaruh terhadap Kemampuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Biak Numfor ?"
3. Apakah Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kemampuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Biak Numfor ?"
4. Apakah Perangkat Pendukung berpengaruh terhadap Kemampuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Biak Numfor ?"

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh Pemahaman tentang Peraturan terhadap Kemampuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Biak Numfor.
2. Untuk mengetahui pengaruh Komitmen terhadap Kemampuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Biak Numfor.
3. Untuk mengetahui pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Kemampuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Biak Numfor.
4. Untuk mengetahui pengaruh Perangkat Pendukung terhadap Kemampuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Biak Numfor.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan akan bermanfaat:

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang langkah-langkah apa saja yang harus diambil agar Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah memiliki kemampuan dalam menyusun LKPD.
2. Bagi peneliti diharapkan dapat menambah pengalaman, pemahaman kemampuan intelektual tentang Pengaruh Pemahaman Peraturan, Komitmen, Kualitas Sumber Daya Manusia dan Perangkat Pendukung terhadap Kemampuan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
3. Bagi dunia pendidikan diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan memperkuat teori-teori yang telah berkembang sebelumnya, serta dapat memperkaya khasanah terhadap jenis penelitian yang sama.

2. LANDASAN TEORI

2.1. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas. Laporan keuangan yang diterbitkan harus disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dibandingkan dengan laporan keuangan entitas yang jelas. (PP 24 Tahun 2005).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, bahwa laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Entitas pelaporan dalam pemerintah adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan, yang terdiri dari : (a) Pemerintah Pusat, (b) Pemerintah Daerah, (c) Satuan organisasi di lingkungan pusat/daerah atau organisasi lainnya, jika menurut perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

2.2. Kemampuan Penyusunan Laporan Keuangan Daerah

Sesuai dengan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 serta Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 menetapkan bahwa kepala satuan kerja perangkat daerah menyusun laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut disampaikan kepada kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah paling lambat dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dalam PP 24 Tahun 2005 menyebutkan bahwa Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer, sehingga tiap-tiap entitas pelaporan dan entitas akuntansi yakni SKPD dan SKPKD harus mampu menjalankan sistem keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan sekurang-kurangnya prosedur akuntansi penerimaan kas, prosedur akuntansi pengeluaran kas, prosedur akuntansi aset tetap/ barang milik daerah dan prosedur akuntansi selain kas.

Setiap entitas pelaporan dan entitas akuntansi yakni SKPD dan SKPKD diharapkan mampu menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yakni laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan dengan baik dan benar berdasar peraturan dan perundangan yang berlaku. Kemampuan penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah yang disusun oleh entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam hal ini SKPD dan SKPKD dapat diukur dengan ketepatan waktu pelaporan yakni 2 (dua) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006).

2.3. Pemahaman Peraturan

Menurut Halim (2007), Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan pedoman bagi penyusunan dan pelaporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dengan tujuan penyeragaman, sinkronisasi dan harmonisasi pelaporan.

Berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk menyusun kebijakan akuntansi dan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Oleh karena hal tersebut diatas, pemerintah daerah dapat menyusun laporan keuangannya dalam bentuk laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang mengacu kepada standar akuntansi pemerintahan dan sesuai dengan kebijakan akuntansi serta sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah sehingga menghasilkan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel (Halim, dkk, 2010).

2.4. Komitmen

Pentingnya komitmen pejabat pengelola keuangan daerah untuk penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan untuk menghasilkan laporan keuangan yang handal dan tepat waktu. (Halim, dkk, 2010).

Setiap pejabat pengelola keuangan daerah harus mengetahui secara utuh apa yang menjadi tugas, wewenang dan tanggung jawabnya sehingga setiap ada perubahan peraturan perundang-undangan siap untuk melaksanakan perubahan tersebut.

Secara substansi, istilah komitmen sarat dengan nilai dan sasaran. Istilah tersebut mengandung makna sebuah proses bagaimana nilai dan sasaran tersebut tercapai atau dengan kata lain komitmen merupakan syarat sebuah keberhasilan. Dalam kaitan dengan penelitian ini, komitmen dipandang sebagai keyakinan dan dukungan yang kuat terhadap keberhasilan penerapan peraturan.

2.5. Kualitas Sumber Daya Manusia

Menurut Halim, dkk (2010), Kualitas dan kinerja organisasi sangat ditentukan oleh faktor sumber daya manusia, karena keberadaan manusia dalam suatu organisasi tidak dapat digantikan oleh unsur lainnya. Organisasi dapat mencapai sukses apabila dikelola dengan baik, oleh karenanya diperlukan suatu manajemen sumber daya manusia yang efektif.

Kaitannya dengan kualitas sumber daya manusia di pemerintah daerah saat ini, menunjukkan bahwa aparat yang memperoleh kuasa dalam mengelola keuangan daerah belum dapat menyusun laporan secara komprehensif (berupa neraca, laporan arus kas, dan laporan realisasi anggaran) disebabkan karena baru memahami sebagian materi atau konsep akuntansi dan manajemen keuangan (Halim, dkk, 2010).

Kenyataan ini dibuktikan dengan adanya beberapa laporan keuangan yang mendapatkan opini tidak wajar dan tidak memberikan pendapat oleh BPK. Banyaknya SDM keuangan pemda yang berlatar belakang non-akuntansi merupakan satu kendala utama sampai saat ini akibatnya berbagai latihan tidak memberikan hasil maksimal.

Rekrutmen pegawai untuk mengatasi keterbatasan SDM selama ini belumlah optimal dalam mendapatkan pegawai dengan kompetensi terbaik. Hal ini disebabkan oleh model seleksi pegawai yang ditetapkan masih bersifat umum dan belum menggali aspek kompetensi akuntansi.

2.6. Perangkat Pendukung

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 pada Pasal 1 ayat (5) menyebutkan bahwa Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah.

Perangkat pendukung komputer yang digunakan untuk menjalankan sistem tersebut diatas untuk meningkatkan efisiensi di dalam pemrosesan data transaksi sehari-hari sehingga memudahkan dalam penyajian laporan keuangan tepat waktu. (Halim, 2007).

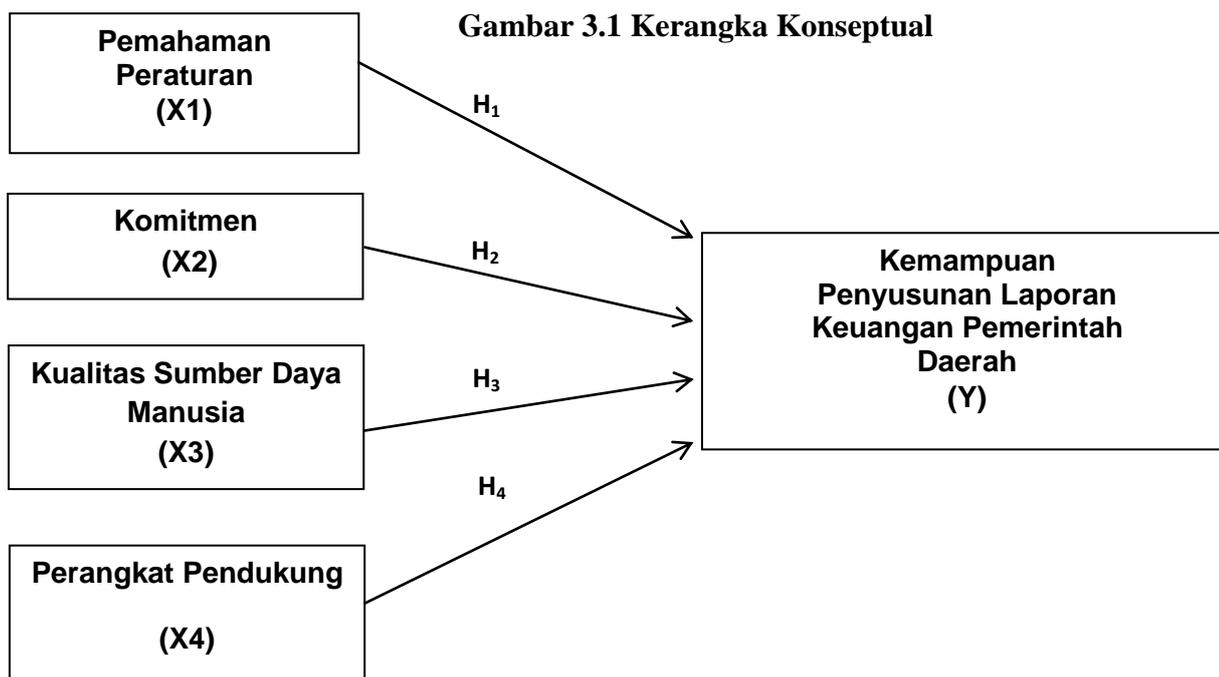
2.7. Penelitian Terdahulu

Penelitian Azhar (2007) tentang Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Penerapan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 pada Pemerintah Kota Banda Aceh. Hasil penelitian yang didapatkan pada Pemerintah Kota Banda Aceh menyimpulkan bahwa secara parsial variabel Komitmen, SDM dan Perangkat Pendukung berpengaruh terhadap keberhasilan penerapan Permendagri 13 Tahun 2006 sedangkan variabel regulasi tidak berpengaruh.

Penelitian Aidil (2010) tentang Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemampuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kota Tebing Tinggi). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel Perangkat Pendukung berpengaruh terhadap Kemampuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kota Tebing Tinggi sedangkan variabel Peraturan, Latar Belakang Pendidikan, Pelatihan dan Komitmen tidak berpengaruh.

3. KERANGKA KONSEPTUAL

3.1. Kerangka Konseptual Penelitian



3.2. Hipotesis

H₁ : Pemahaman Peraturan berpengaruh terhadap kemampuan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Biak Numfor.

H₂ : Komitmen berpengaruh terhadap kemampuan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Biak Numfor.

H₃ : Kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kemampuan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Biak Numfor.

H₄ : Perangkat Pendukung berpengaruh terhadap kemampuan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Biak Numfor.

4. METODE PENELITIAN

4.1. Jenis/Rancangan Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Menurut Sugiyono (2011) metode kuantitatif adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik.

4.2. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2011). Populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 49 (empat puluh sembilan) SKPD yang terdapat di Kabupaten Biak Numfor.

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2011). Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling yaitu : 48 Kepala SKPD, 1 PPKD, 49 PPK-SKPD, 1 Kepala Bidang Akuntansi pada SKPKD dan 1 Kepala Seksi pada Bidang Akuntansi SKPKD. Jadi jumlah sampel yang ditetapkan dalam penelitian ini sebanyak 100 responden.

4.3. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Penelitian ini menggunakan empat variabel independen (Pemahaman Peraturan, Komitmen, Kualitas Sumber Daya Manusia dan Perangkat Pendukung) dan satu variabel dependen yaitu Kemampuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Variabel-variabel tersebut di atas menggunakan kuesioner yang terdiri dari 6 pertanyaan dan diukur dengan skala *Likert* 1-5 untuk setiap bobot pertanyaan yaitu :

1. Sangat Tidak Setuju (STS) Skor 1
2. Tidak Setuju (TS) Skor 2
3. Netral (N) Skor 3
4. Setuju (S) Skor 4
5. Sangat Setuju (SS) Skor 5

4.4. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di 49 SKPD di Kabupaten Biak Numfor. Adapun waktu penelitian yang diijinkan oleh Pemerintah Daerah Biak Numfor dari tanggal 1 Agustus s/d 31 Agustus 2012.

4.5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data tentang variabel-variabel yang diungkapkan dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dan informasi melalui penyebaran kuesioner dan melakukan wawancara.

4.6. Cara Pengolahan dan Analisis Data

Cara pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Uji Validitas dan Reliabilitas
2. Uji Asumsi Klasik
3. Analisis Regresi Linier Berganda
4. Uji F dan Uji t.

5. ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

5.1. Uji Validitas dan Reliabilitas

Tabel 5.1. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Pemahaman Peraturan (X_1)

Indikator	Pearson correlation	Signifikansi	Keterangan
P1	0.468	0.009	Valid
P2	0.685	0.000	Valid
P3	0.780	0.000	Valid
P4	0.789	0.000	Valid
P5	0.827	0.000	Valid
P6	0,720	0.000	Valid

Alpha Cronbach = 0.785
 $r_{tabel}=0.3610$

Sumber : Hasil Olahan Data 2012

Tabel 5.2. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Komitmen (X_2)

Indikator	Pearson correlation	Signifikansi	Keterangan
P1	0.806	0.000	Valid
P2	0.859	0.000	Valid
P3	0.816	0.000	Valid
P4	0.757	0.000	Valid
P5	0.812	0.000	Valid
P6	0.365	0.047	Valid

Alpha Cronbach = 0.893
 $r_{tabel}= 0.3610$

Sumber :HasilOlahan Data 2012

Tabel 5.3. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Kualitas SDM (X₃)

Indikator	PearsonCorrelation	Signifikansi	Keterangan
P1	0.398	0.029	Valid
P2	0.847	0.000	Valid
P3	0.658	0.000	Valid
P4	0.812	0.000	Valid
P5	0.738	0.000	Valid
P6	0.591	0.001	Valid
Alpha Cronbach = 0.700 r _{tabel} = 0.3610			

Sumber : Hasil Olahan Data 2012

Tabel 5.4. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Perangkat Pendukung (X₄)

Indikator	Pearson correlation	Signifikansi	Keterangan
P1	0.629	0.000	Valid
P2	0.874	0.000	Valid
P3	0.786	0.000	Valid
P4	0.781	0.000	Valid
P5	0.859	0.000	Valid
P6	0.711	0.000	Valid
Alpha Cronbach = 0.860 r _{tabel} = 0.3610			

Sumber : Hasil Olahan Data 2012

Tabel 5.5. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Kemampuan Penyusunan Laporan Keuangan (Y)

Indikator	Pearson correlation	Signifikansi	Keterangan
P1	0.444	0.014	Valid
P2	0.648	0.000	Valid
P3	0.616	0.000	Valid
P4	0.705	0.000	Valid
P5	0.807	0.000	Valid
P6	0.522	0.003	Valid
Alpha Cronbach = 0.726 r _{tabel} = 0.3610			

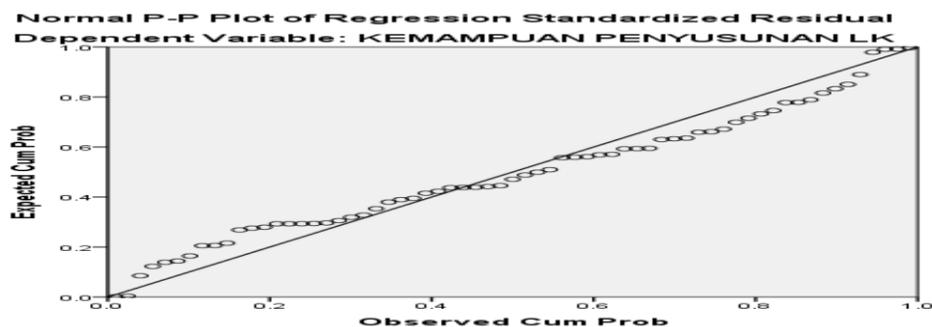
Sumber : Hasil Olahan Data 2012

Hasil uji validitas dan reliabilitas untuk pertanyaan 1-6, untuk variabel X₁, X₂, X₃, X₄ dan Y, mempunyai nilai korelasi diatas 0,30 dan Alpha Cronbach di atas 0,6 sehingga semua dinyatakan reliabel dan valid.

5.2. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Gambar 5.6. Grafik Normal P-P Plot



Sumber : Hasil Olahan Data SPSS Version 20.00

Berdasarkan gambar 5.6, grafik normal plot, menunjukkan bahwa model regresi layak dipakai dalam penelitian ini karena pada grafik normal plot terlihat titik-titik menyebar disekitar garis diagonal serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal sehingga memenuhi asumsi normalitas.

2. Uji Multikolinearitas

Tabel 5.7. Hasil Perhitungan *Tolerance* dan *VIF*

Coefficients^a

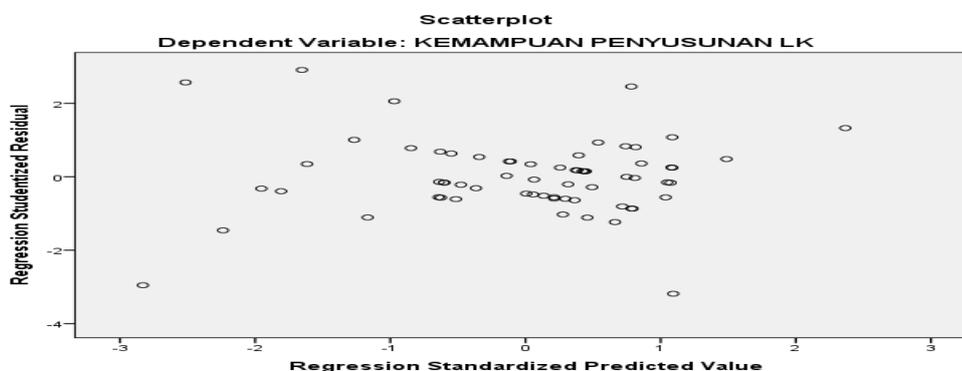
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	PEMAHAMAN PERATURAN	.964	1.037
	KOMITMEN	.964	1.037
	KUALITAS SDM	.842	1.188
	PERANGKAT PENDUKUNG	.872	1.147

a. Dependent Variable: Kemampuan Penyusunan Laporan Keuangan (Y)
 Sumber : data Hasil Olahan SPSS Version 20.00

Berdasarkan tabel 5.7 dapat disimpulkan semua varia belum mempunyai nilai $VIF < 10$, artinya semua varia belum dependen tersebut tidak terdapat hubungan multi kolinearitas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Gambar 5.8 Grafik *Scatterplot*



Sumber : data Hasil Olahan SPSS Version 20.00

Berdasarkan gambar 5.8, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi eteros kedastisitas. Hal ini berdasarkan gambar grafik dimana titik-titik yang ada dalam grafik tidak membentuk pola tertentu yang jelas dan titik-titik tersebut tersebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y.

4. Analisis Regresi Linier Berganda

Hasil analisis regresi linear berganda yang diperoleh dari pengolahan data menggunakan SPSS 20.0 tampak pada table 5.9. Berdasarkan table 5.9, maka menghasilkan :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \varepsilon$$

$$Y = 9,250 + 0,001X_1 + 0,015X_2 + 0,398X_3 + 0,059X_4$$

Tabel 5.9. Hasil Regresi Linier Berganda

Model		Coefficients ^a			t	Sig.
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta		
	(Constant)	9.250	4.025		2.298	.025
1	PEMAHAMAN PERATURAN	.001	.099	.001	.012	.990
	KOMITMEN	.015	.069	.025	.213	.832
	KUALITAS SDM	.398	.118	.424	3.364	.001
	PERANGKAT PENDUKUNG	.059	.128	.057	.463	.645

Sumber : Data Olahan, 2012

Berdasarkan persamaan regresi linear berganda, dapat dilihat nilai konstanta (α) sebesar 9.250 dan bernilai positif. Hal ini berarti variabel *dependent* yaitu Kemampuan Penyusunan LKPD (Y) mempunyai hubungan positif atau searah dengan variabel *independent* Variabel Pemahaman Peraturan (X_1), Variabel Komitmen (X_2), dan Variabel Kualitas Sumber daya Manusia (X_3) serta Variabel Perangkat Pendukung (X_4). Koefisien regresi Pemahaman Peraturan (X_1), sebesar 0,001 dan mempunyai nilai positif atau searah yang menunjukkan bahwa setiap adanya peningkatan variabel Pemahaman Peraturan (X_1), maka akan mengakibatkan peningkatan Kemampuan Penyusunan LKPD (Y) dengan asumsi faktor lain konstan. Koefisien regresi Komitmen (X_2), sebesar 0,015 dan mempunyai nilai positif atau mempunyai hubungan searah yang menunjukkan bahwa setiap adanya peningkatan variabel Komitmen (X_2), maka akan mengakibatkan peningkatan Kemampuan Penyusunan LKPD (Y) dengan asumsi faktor lain konstan. Koefisien regresi Kualitas SDM (X_3), sebesar 0,398 dan mempunyai nilai positif atau mempunyai hubungan searah yang menunjukkan bahwa setiap adanya peningkatan variabel Kualitas SDM (X_3), maka akan mengakibatkan peningkatan Kemampuan Penyusunan LKPD (Y) dengan asumsi faktor lain konstan. Koefisien regresi variabel Perangkat Pendukung (X_4), sebesar 0,059 dan mempunyai nilai positif atau mempunyai hubungan searah yang menunjukkan bahwa setiap adanya peningkatan variabel Perangkat Pendukung (X_4), maka akan mengakibatkan peningkatan Kemampuan Penyusunan LKPD (Y) dengan asumsi faktor lain konstan.

5. Uji koefisien regresi secara bersama-sama (Uji F)

Dari hasil *output* uji koefisien regresi secara bersama-sama (Uji F) dapat diketahui nilai F seperti pada tabel 5.10 berikut ini :

Tabel 5.10 Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
	Regression	91.932	4	22.983	3.684	.010 ^b
1	Residual	374.315	60	6.239		
	Total	466.246	64			

a. *Dependent Variable* : Kemampuan Penyusunan LKPD

b. *Predictors: (Constant)*: Pemahaman Peraturan, Komitmen, Kualitas SDM, Perangkat Pendukung

Sumber: Data penelitian yang telah diolah, 2012.

Berdasarkan tabel 5.10, hasil uji F diperoleh F_{hitung} sebesar $3,684 > F_{tabel}$ 1,524 dengan menggunakan tingkat signifikan $P = 0,010 < \alpha = 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa Variabel

Pemahaman Peraturan (X_1), Variabel Komitmen (X_2), Variabel Kualitas SDM (X_3) dan Variabel Perangkat Pendukung (X_4) secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kemampuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Biak Numfor.

6. Uji koefisien regresi secara parsial (Uji t)

Dari analisis regresi output dapat dilihat pada tabel 5.11 sebagai berikut :

Tabel5.11. Hasil Uji t Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	9.250	4.025		2.298	.025
1 PEMAHAMAN PERATURAN	.001	.099	.001	.012	.990
KOMITMEN	.015	.069	.025	.213	.832
KUALITAS SDM	.398	.118	.424	3.364	.001
PERANGKAT PENDUKUNG	.059	.128	.057	.463	.645

a. Dependent Variable : Kemampuan Penyusunan LKPD

b. Predictors: (Constant) : Pemahaman Peraturan, Komitmen, Kualitas SDM, Perangkat Pendukung

Sumber : Data Olahan, 2012

Tabel distribusi t dicari pada $\alpha = 5\% : 2 = 2,5\%$ (uji 2 sisi), dengan derajat kebebasan $df = (n-k-1)$ atau $(64-5-1) = 58$. Dengan pengujian 2 sisi (signifikansi = 0,025) hasil diperoleh untuk t_{tabel} sebesar 2,0017 (lihat pada lampiran tabel t), dengan kriteria pengujian :

- H_0 diterima jika $t_{hitung} < t_{tabel}$
- H_0 ditolak jika $t_{hitung} > t_{tabel}$

1) Pengujian hipotesis 1

Variabel Pemahaman Peraturan (X_1) memiliki nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($0,012 < 2,0017$) dan signifikansi $P = 0,990 > \alpha = 0,05$ maka H_0 diterima, dan H_a ditolak artinya secara parsial variabel Pemahaman Peraturan (X_1) tidak berpengaruh terhadap Kemampuan Penyusunan LKPD (Y).

2) Pengujian hipotesis 2

Variabel Komitmen memiliki nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($0,213 < 2,0017$) dan signifikansi $P = 0,832 > \alpha = 0,05$ maka H_0 diterima, dan H_a ditolak artinya secara parsial Komitmen(X_2) tidak berpengaruh terhadap Kemampuan Penyusunan LKPD (Y).

3) Pengujian hipotesis 3

Variabel Kualitas SDM (X_3) memiliki nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3,4364 > 2,0017$) dan signifikansi $P = 0,001 < \alpha = 0,05$ maka H_0 ditolak, dan H_a diterima artinya secara parsial Kualitas SDM (X_3) berpengaruh terhadap Kemampuan Penyusunan LKPD (Y).

4) Pengujian hipotesis 4

Variabel Perangkat Pendukung memiliki nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($0,463 < 2,0017$) dan signifikansi $P = 0,645 > \alpha = 0,05$ maka H_0 diterima, dan H_a ditolak artinya secara parsial Perangkat Pendukung (X_4) tidak berpengaruh terhadap Kemampuan Penyusunan LKPD (Y).

5.3. Pembahasan

1. Pengaruh Variabel Pemahaman Peraturan terhadap Kemampuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Variabel Pemahaman Peraturan (X_1) tidak berpengaruh terhadap kemampuan aparatur terkait dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, disebabkan karena terjadi perubahan peraturan dalam waktu yang sangat singkat sehingga menyulitkan pejabat pengelola keuangan dalam memahami peraturan yang menjadi acuan di dalam penyusunan laporan keuangan. Selain itu di Kabupaten Biak Numfor belum ada peraturan bupati yang mengatur tentang Sistem Akuntansi dan Kebijakan Akuntansi yang menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun laporan keuangan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Aidil (2010) bahwa peraturan tidak berpengaruh terhadap kemampuan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah karena sering terjadinya perubahan peraturan sehingga menimbulkan perbedaan penafsiran antara peraturan baru dan peraturan sebelumnya membuat para pegawai kesulitan dalam penyusunan laporan keuangan.

2. Pengaruh Variabel Komitmen terhadap Kemampuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pada penelitian ini variabel Komitmen (X_2) tidak berpengaruh terhadap Kemampuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini disebabkan karena pejabat pengelola keuangan daerah di Kabupaten Biak Numfor tidak mengetahui secara utuh apa yang menjadi tugas, wewenang dan tanggung jawabnya sehingga setiap ada perubahan dalam peraturan tidak siap untuk melaksanakan perubahan tersebut dan tidak bertanggung jawab terhadap tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya. Tanpa komitmen maka pekerjaan-pekerjaan besar akan sulit terlaksana.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Aidil (2010) yang mengatakan bahwa komitmen tidak berpengaruh terhadap kemampuan penyusunan laporan keuangan disebabkan para pegawai yang terkait belum bisa mengeluarkan sumber daya fisik, mental dan spiritual tambahan dalam melaksanakan penugasannya.

3. Pengaruh Variabel Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Kemampuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pada penelitian ini variabel Kualitas SDM (X_3) berpengaruh terhadap kemampuan aparatur terkait dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Semakin baik tingkat pendidikan dan semakin sering mengikuti pelatihan pengelolaan keuangan daerah maka semakin baik laporan keuangan yang dihasilkan. Penyajian laporan keuangan pemerintah daerah lebih efektif disajikan dengan kualitas sumber daya manusia yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi.

Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang baik, aparat SKPD harus memiliki kualitas sumber daya manusia yang didukung dengan pengalaman, pendidikan, kematangan usia, pemahaman atas tupoksi, peningkatan keahlian, tingkat intelegensia serta kepuasan kerja di bidang keuangan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Azhar (2007) sumber daya manusia berpengaruh terhadap kemampuan penyusunan laporan keuangan karena sumber daya manusia merupakan elemen organisasi yang sangat penting dan harus dikelola sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi.

4. Pengaruh Variabel Perangkat Pendukung terhadap Kemampuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa variabel Perangkat Pendukung (X_4) tidak berpengaruh terhadap Kemampuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini disebabkan karena di Kabupaten Biak Numfor masih terbatas perangkat keras dan perangkat lunak, SKPD belum memiliki tenaga operator komputer dan perangkat pendukung yang ada sering mengalami kerusakan

sehingga tidak dapat membantu proses penyusunan laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Biak Numfor juga menggunakan jasa konsultan.

Penelitian ini sejalan dengan Sulani (2009) bahwa perangkat pendukung tidak berpengaruh karena di Kabupaten Labuhan Batu masih menggunakan jasa konsultan dalam penyusunan laporan keuangan.

6. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Pemahaman tentang Peraturan, Komitmen, Kualitas Sumber Daya Manusia dan Perangkat Pendukung terhadap Kemampuan Penyusunan Laporan Keuangan di Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Secara parsial Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kemampuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Biak Numfor sedangkan Pemahaman Peraturan, Komitmen dan Perangkat Pendukung tidak berpengaruh terhadap Kemampuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Biak Numfor.
2. Secara bersama-sama Pemahaman Peraturan, Komitmen, Kualitas Sumber Daya Manusia dan Perangkat Pendukung berpengaruh terhadap Kemampuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Biak Numfor.

6.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka diajukan saran sebagai berikut :

1. Peneliti menyarankan untuk penelitian selanjutnya agar memperluas objek penelitian pada SKPD dan SKPKD se-Provinsi Papua khususnya dan pada SKPD serta SKPKD kabupaten/kota yang ada di Indonesia sehingga hasilnya dapat digeneralisasi.
2. Bagi pengelola keuangan daerah di Kabupaten Biak Numfor untuk dapat menyusun laporan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga menghasilkan laporan keuangan yang relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo, 2011, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Aidil, 2010, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemampuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kota Tebing Tinggi)*, USU, Medan.
- Azhar, 2007, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Penerapan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 pada Pemerintah Kota Banda Aceh*USU, Medan.
- Bastian, Indra, 2006, *Akuntansi Sektor Publik, Suatu Pengantar*, Erlangga, Jakarta.
- BPK RI, 2011, *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2011*, Jakarta.
- _____, 2012, *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2011*, Jakarta.
- Darise, Nurlan, 2008, *Akuntansi Keuangan Daerah*, Indeks, Jakarta.
- Darise, Nurlan, 2009, *Pengelolaan Keuangan Daerah*, Edisi 2, Indeks, Jakarta.
- Halim, Abdul, 2007, *Akuntansi dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Daerah*, Edisi Revisi, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- _____, 2007, *Pengelolaan Keuangan Daerah*, Edisi Kedua, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- _____, 2010, *Sistem Akuntansi Sektor Publik*, Edisi Pertama, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.

- Mahmudi, 2010, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, Edisi 2, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Mahardika, Nur Fakhururi, 2011, *Pengaruh Sumber Daya Manusia, Motivasi, Pelatihan, Peraturan dan Sarana Pendukung terhadap Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Keuangan SKPD di Pemerintah Kota Malang*, Unibraw, Malang.
- Mardiasmo, 2009, *Akuntansi Sektor Publik*, Andi, Yogyakarta.
- Mahsun, Mohamad, 2009, *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*, Cetakan Kedua, BPFE, Yogyakarta.
- Robbins, Stephen P. – Judges, Timothy A, 2008, *Perilaku Organisasi*, Edisi 12, Salemba Empat, Jakarta.
- Sopiah, 2008, *Perilaku Organisasi*, Andi, Yogyakarta.
- Sonny Sumarsono, 2010, *Manajemen Keuangan Pemerintah*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Sulani A, Aldiani, 2009, *Faktor-faktor yang Mendukung Keberhasilan Penerapan PP 24 Tahun 2005 Kabupaten Labuhan Batu*, USU, Medan.
- Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Alfabeta, Bandung.
- Tanjung, Abdul Hafiz, 2008, *Penatausahaan dan Akuntansi Keuangan Daerah*, Alfabeta Bandung.
- Warisno, 2009, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi*, USU, Medan.
- Wyono, H. Suko, 2010, *Peraturan Daerah sebagai Bagian Integral dari Peraturan Perundang-Undangan dalam Negara Hukum Republik Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana, Malang.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang *Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang *Keuangan Negara*.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang *Perbendaharaan Negara*.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang *Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*.
- www.bpk.go.id
- www.wikiapbn.org

PENGARUH PROFESIONALISME AUDITOR, KUALITAS AUDIT, ETIKA PROFESI AUDITOR, DAN PENGALAMAN AUDITOR TERHADAP PERTIMBANGAN TINGKAT MATERIALITAS DALAM PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN SULAWESI UTARA

**Rendy Eldy Fensi Entuu
Jullie J. Sondakh
Ventje Ilat**

ABSTRAK

Pemeriksaan yang dilakukan untuk menghasilkan opini berhubungan dengan pertimbangan tingkat materialitas. Pertimbangan yang dilakukan harus mengacu kepada seorang auditor. Auditor juga harus memiliki profesionalisme, beserta kualitas audit dan etika profesi auditor serta pengalaman. Ketika auditor memegang teguh prinsip maka hal-hal berupa independensi tetap terjaga dalam setiap pemeriksaan yang dilakukan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh profesionalisme auditor, kualitas audit, etika profesi auditor, dan pengalaman auditor terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan pada Badan Pemeriksa Keuangan. Populasi penelitian adalah auditor yang bekerja pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Utara. Sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* karena yang akan dijadikan sampel adalah orang yang bekerja di BPK RI Perwakilan Sulut yang melakukan pemeriksaan. Metode analisis yang dipakai adalah model regresi berganda dengan sebelumnya melakukan uji reabilitas dan validitas. Sedangkan untuk pemrosesan data penelitian menggunakan program komputer *SPSS 19.0*. Hasil pengujian secara parsial yaitu dengan uji t menunjukkan bahwa variabel profesionalisme auditor, kualitas audit, etika profesi auditor dan pengalaman auditor tidak berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan budaya organisasi dan objek pemeriksaan baik yang dilakukan oleh sektor publik maupun sektor swasta.

Kata kunci: *Profesionalisme Auditor, Kualitas Audit, Etika Profesi Auditor, Pengalaman Auditor, Tingkat Materialitas.*

ABSTRACT

Examination is performed to generate opinions related to the level of materiality considerations. Considerations is made to refer to an auditor. Auditors also need to have professionalism, along with audit quality and auditor professional ethics and experience. When auditors uphold the principles of the independence of the form of things is maintained in each of the test. The purpose of this study was to determine the effect of the professionalism of auditors, audit quality, auditor professionalism ethics, and the experience level of the auditor's consideration of materiality in the examination of financial statements at the Supreme Audit Agency. The study population is the auditor who worked on the Audit Board of the Republic of Indonesia Representative of North Sulawesi. The sample in this study using *purposive sampling* due to be sampled are those who work in the Audit Board of the Republic of Indonesia Representative of North Sulawesi examination. The analytical method used was multiple regression model with the previous test reliability and validity. As for the processing of research data using *SPSS 19.0* computer program. The partial test result with the t test showed that the variables professionalism auditors, audit quality, auditor professional ethics and auditor experience no effect on the level of materiality

considerations in the examination of the financial statements. This is because of differences in organizational culture and object inspection by either the public sector or the private sector.

Keywords: *Professionalism Auditor, Audit Quality, Auditor Professional Ethics, Experience Auditors, Materiality level.*

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan merupakan standar baku yang dipakai sebagai salah satu bentuk informasi dalam pengambilan keputusan, sehingga laporan keuangan sendiri dipakai juga dalam sektor pemerintah sebagai suatu alat ukur segi pengelolaan administrasi keuangan. Suatu laporan keuangan diperiksa karena sesuai dengan teori agen. Dalam sektor publik atau pemerintah, masyarakat sebagai pemilik modal dan pemerintah sebagai manajemen. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen dalam hal ini pemerintah dan masyarakat sebagai pemilik modal wajib mengkritisi maupun menilai. Tentunya hasil penilaian tersebut dicantumkan lewat pemeriksaan yang menghasilkan opini baik sektor publik maupun sektor swasta. Indonesia sendiri memiliki auditor eksternal yang berfungsi sebagai suatu pihak independen yang bertugas untuk memeriksa laporan keuangan yang ada di daerah. Pihak independen tersebut adalah Badan Pemeriksa Keuangan. Badan Pemeriksa Keuangan merupakan lembaga independen yang bertugas untuk memeriksa laporan keuangan dan menghasilkan opini untuk masyarakat luas maupun pemakai laporan keuangan. Dalam menjalankan tugasnya Badan Pemeriksa Keuangan harus sesuai dengan Standar Pemeriksa Keuangan Negara (SPKN), layaknya SPAP dalam sektor swasta yang menjadi tolak ukur auditor Kantor Akuntan Publik, SPKN juga merupakan standar yang dijunjung tinggi oleh seorang auditor pemerintah yang bernaung dalam BPK. Perilaku auditor baik merupakan auditor yang ada dalam sektor swasta yang bernaung dalam Kantor Akuntan Publik maupun yang ada dalam Badan Pemeriksa Keuangan menjalankan tugasnya harus dengan jiwa profesionalisme. Profesionalisme seperti yang dibahasakan dalam penelitian yang dilakukan oleh Hall dalam Febrianti (2012) terbagi dalam lima dimensi yaitu pengabdian kepada profesi, kewajiban sosial, kemandirian, kepercayaan terhadap peraturan profesi dan hubungan dengan sesama profesi. Sikap profesionalisme menunjukkan bagaimana auditor bertindak dalam setiap pemeriksaan yang kemudian tercermin dalam kelima hal tersebut. Selain profesionalisme auditor yang wajib dimiliki seorang auditor harus memiliki pengalaman yang cukup dalam melakukan pemeriksaan. Hal ini ditandai dengan jam pemeriksaan yang sangat ketat di setiap Kantor Akuntan Publik maupun Badan Pemeriksa Keuangan. Kedua hal baik profesionalisme maupun pengalaman sangat penting dimiliki seorang auditor. Selain itu etika profesi adalah salah satu hal penunjang yang juga sebagai faktor dominan dalam menjalankan kerja sebagai seorang auditor. Etika profesi adalah salah satu hal yang mempengaruhi tindak tanduk seseorang profesional dalam profesinya. Etika profesi juga harus dimiliki sebagai seorang auditor yang menjadi syarat mutlak dalam menerapkan norma-norma dalam setiap pemeriksaan. Ketiganya wajib dimiliki dan dijunjung tinggi sebagai salah satu standar maupun aturan yang tidak tertulis. Dalam menjalankan pemeriksaan sebagai auditor eksternal kualitas diperlukan untuk mempertanggungjawabkan gelar profesinya maupun pengetahuannya. Sehingga dalam SPAP atau Standar Profesional Akuntan Publik memuat mengenai standar umum mengenai kemampuan seorang auditor. Kemampuan seorang auditor mencerminkan pada hasil pemeriksaan atau kualitas auditnya. Kualitas audit atau kualitas hasil pemeriksaan merupakan ukuran keberhasilan suatu auditor. Kualitas audit menjadi suatu tren yang menjadi alat ukur suatu Kantor Akuntan Publik dipakai sebagai media pemeriksaan untuk memberikan opini. Kasus yang terjadi seperti fenomena gratifikasi yang mendera auditor BPK RI perwakilan Sulawesi Utara. Hal ini terjadi akibat adanya pemeriksaan BPK terhadap laporan

keuangan suatu SKPD yang kemudian terdapat dugaan kasus suap kepada dua auditor yang memeriksa SKPD tersebut. Tentunya fenomena ini menimbulkan stigma baru di masyarakat yang menimbulkan citra buruk terhadap auditor pemerintah. Kasus ini menggambarkan masih terdapat kelemahan pada perilaku auditor yang kemudian berimplikasi pada opini yang dihasilkan. Dua aspek yang menjadi tolak ukur dalam menentukan pertimbangan tingkat materialitas yaitu kondisional maupun situasional. Kondisional adalah merujuk pada sesuatu yang seharusnya terjadi dalam hal ini auditor memiliki pemahaman maupun pertimbangan yang sama. Pertimbangan ataupun penentuan tingkat materialitas dilihat dari banyak aspek seperti ukuran perusahaannya maupun dari segi perencanaannya. Situasional adalah suatu kondisi sebenarnya terjadi di lapangan namun kadang kala hal ini berhubungan perilaku auditor sendiri. Beberapa faktor tersebut yang berhubungan dengan pengalaman, etika sebagai seorang auditor, profesionalismenya serta mutu maupun kualitas hasil pemeriksaan adalah hal yang perlu ada baik dari segi auditornya sendiri maupun perilakunya. Berdasarkan latar belakang masalah terutama fenomena yang telah dijelaskan maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Profesionalisme Auditor, Kualitas Audit, Etika Profesi Auditor dan Pengalaman Auditor Terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas Dalam Pemeriksaan Laporan Keuangan Pada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sulawesi Utara”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah profesionalisme auditor berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan pada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sulawesi Utara ?
2. Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan pada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sulawesi Utara ?
3. Apakah etika profesi auditor berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan pada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sulawesi Utara ?
4. Apakah pengalaman auditor berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan pada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sulawesi Utara ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasar pada rumusan masalah di atas maka, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis dan memperoleh bukti empiris pada:

1. Profesionalisme auditor berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan pada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sulawesi Utara.
2. Kualitas audit berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan pada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sulawesi Utara.
3. Etika profesi auditor berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan pada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sulawesi Utara.
4. Pengalaman auditor berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan pada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sulawesi Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengalaman, pemahaman, kemampuan intelektual serta bukti empiris tentang profesionalisme auditor, kualitas audit, etika profesi auditor dan pengalaman auditor terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang profesionalisme auditor, kualitas audit, etika profesi auditor, pengalaman auditor dan pertimbangan tingkat

materialitas terhadap sejauh mana auditor memberikan sumbangsih bagi kebijakan pemerintah dan masyarakat luas.

3. Penelitian ini diharapkan memperkaya hasil penelitian dan sebagai bahan referensi peneliti lain yang akan meneliti hal yang sama.

2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tingkat Materialitas

Materialitas adalah besarnya nilai yang dihilangkan atau salah saji informasi akuntansi, yang dilihat dari keadaan yang melingkupinya, dapat mengakibatkan perubahan atas atau pengaruh terhadap pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan terhadap informasi tersebut, karena adanya penghilangan atau salah saji itu.

2.2 Profesionalisme Auditor

Profesionalisme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kualitas, mutu dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi. Kajian mengenai profesionalisme ini menitikberatkan pada cerminan tingkah laku seseorang dalam hal ini auditor dalam bertindak dan berperilaku sesuai dengan etika dan bertindak sesuai dengan pekerjaan.

2.3 Kualitas Audit

De Angelo dalam Martiyani (2010) mendefinisikan *audit quality* (kualitas audit) sebagai probabilitas dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya. Probabilitas penemuan suatu pelanggaran tergantung pada kemampuan teknikal auditor dan independensi auditor tersebut.

2.4 Etika Profesi Auditor

Etika merupakan serangkaian prinsip atau nilai-nilai moral. Kebutuhan akan etika dalam masyarakat sangat mendesak sehingga lazim memasukkan nilai-nilai etika ini ke dalam undang-undang atau peraturan-peraturan yang berlaku. Bagaimanapun, banyak nilai etika yang telah ditampilkan tidak dapat dijadikan undang-undang atau peraturan yang berlaku akibat dari sifat nilai-nilai etika itu sangat tergantung pada pertimbangan seseorang.

2.5 Pengalaman Auditor

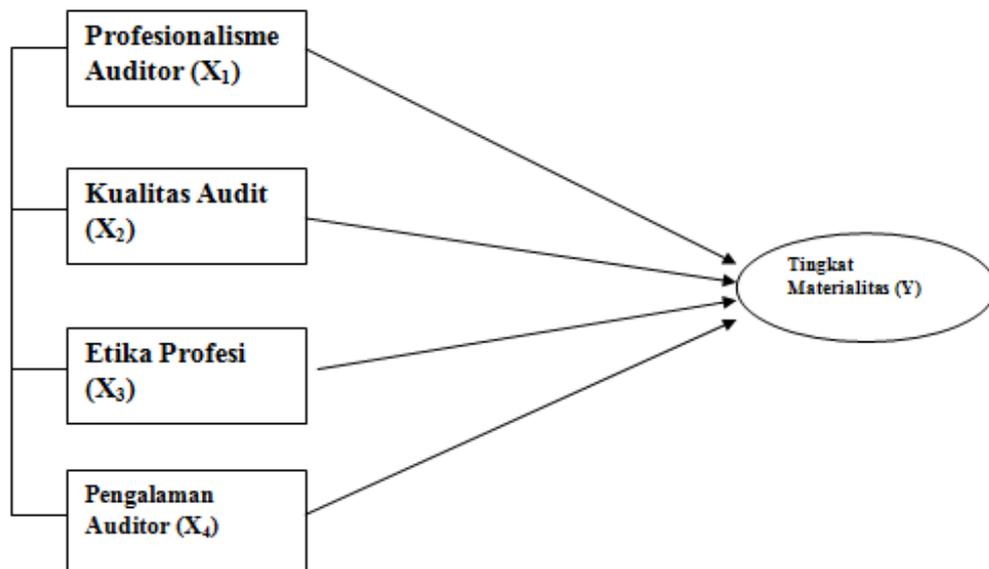
Pengalaman auditor adalah pengalaman dalam melakukan audit laporan keuangan baik dari segi lamanya waktu, banyaknya penugasan maupun jenis-jenis perusahaan yang ditangani (Asih dalam Kusuma 2012). Definisi lain menyebutkan bahwa pengalaman merupakan suatu proses pembelajaran dan penambahan perkembangan potensi bertingkah laku baik dari pendidikan formal maupun non formal atau bisa diartikan sebagai suatu proses yang membawa seseorang kepada suatu pola tingkah laku yang lebih tinggi.

2.6 Penelitian Terdahulu

Iriyadi dan Vannywati (2011) melakukan penelitian mengenai pengaruh profesionalisme auditor dan etika profesi auditor terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa profesionalisme auditor dan etika profesi berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan. Regina Trestiana (2011) melakukan penelitian mengenai pengaruh profesionalisme, pengetahuan akuntan publik dalam mendeteksi kekeliruan, etika profesi dan kualitas audit terhadap materialitas. Penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan variabel profesionalisme, pengetahuan akuntan publik dalam mendeteksi kekeliruan, etika profesi dan kualitas audit terhadap materialitas. Arleen Herawaty dan Yulius Kurnia Susanto (2008) melakukan penelitian mengenai profesionalisme, pengetahuan akuntan publik dalam mendeteksi kekeliruan, etika

profesi dan pertimbangan tingkat materialitas dimana profesionalisme auditor, pengetahuan akuntan publik dalam mendeteksi kekeliruan dan etika profesi berpengaruh positif terhadap tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan. Reni Yendrawati (2008) meneliti hubungan antara profesionalisme auditor dengan pertimbangan tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dari kelima dimensi profesionalisme auditor yang dijadikan proksi yaitu variabel pengabdian kepada profesi, variabel kewajiban sosial, variabel kemandirian, variabel keyakinan terhadap profesi, variabel hubungan dengan sesama profesi menunjukkan bahwa yang memiliki hubungan dengan tingkat materialitas hanya variabel keyakinan terhadap profesi. Winda Fridati (2005) melakukan penelitian mengenai analisa hubungan antara profesionalisme auditor dengan pertimbangan tingkat materialitas dalam proses pengauditan laporan keuangan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Winda menyimpulkan bahwa dari kelima dimensi variabel independen yaitu pengabdian kepada profesi, kewajiban sosial, kemandirian, keyakinan kepada profesi, dan hubungan dengan sesama profesi memiliki hubungan dengan tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan. Novanda Friska Bayu Aji Kusuma (2012) melakukan penelitian mengenai profesionalisme auditor, etika profesi, dan pengalaman auditor terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kusuma menyimpulkan bahwa profesionalisme auditor, etika profesi, pengalaman auditor berpengaruh secara parsial maupun simultan terhadap pertimbangan tingkat materialitas.

3. KERANGKA KONSEPTUAL
3.1 Kerangka Konseptual Penelitian



Gambar 3.1 Kerangka Konseptual Penelitian

3.2 Hipotesis

- H₁ :diduga profesionalisme auditor berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Utara.
- H₂ :diduga kualitas audit berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Utara.

- H₃ :diduga etika profesi auditor berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Utara.
- H₄ :diduga pengalaman auditor berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Utara.

4. METODE PENELITIAN

4.1 Jenis Data Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian deskripsi atau survey, Mansyuri dan Zainuddin (2008) menyebutkan bahwa penelitian ini bermaksud membuat ‘penyandraan’ secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu dengan menggunakan kuesioner sebagai alat analisis.

4.2 Populasi, Sampel, Besar Sampel dan Teknik Pengumpulan Data

Populasi penelitian ini adalah seluruh auditor yang ada di Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Utara. Berdasarkan survey pendahuluan yang dilakukan bahwa auditor yang ada di BPK Perwakilan Sulawesi Utara adalah 38 auditor. Berdasarkan uraian yang dipaparkan dalam jenis penelitian dengan menggunakan sensus disebabkan populasi yang relatif sedikit sehingga besar sampel dalam penelitian ini adalah sesuai dengan besar populasi. Teknik Pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *Sampling Purposive*. *Sampling Purposive* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono 2012). Pertimbangan dari peneliti sendiri bahwa yang akan dijadikan sampel adalah orang yang berprofesi sebagai auditor yang ada pada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sulawesi Utara.

4.3 Definisi Variabel

1 Pertimbangan Tingkat Materialitas (Y)

Variabel Dependen dalam penelitian ini adalah pertimbangan tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan yaitu pertimbangan auditor atas besarnya penghilangan atau salah saji informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pertimbangan pihak yang meletakkan kepercayaan terhadap informasi tersebut.

2 Profesionalisme Auditor (X₁)

Profesionalisme menurut Hall dalam Yendrawaty (2008) meliputi lima dimensi yaitu pengabdian kepada profesi (*dedication*), kewajiban sosial (*social obligation*), kemandirian (*autonomy*), keyakinan terhadap peraturan profesi (*belief in self regulation*), hubungan dengan sesama profesi (*professional community affiliation*).

3 Kualitas Audit (X₂)

Kualitas audit merupakan merupakan suatu kemungkinan dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya. DeAngelo dalam Martiyani (2010) berargumentasi bahwa kualitas audit secara langsung berhubungan dengan ukuran dari perusahaan audit, dengan proksi untuk ukuran perusahaan audit adalah jumlah klien.

4. Etika Profesi Auditor (X₃)

Etika profesi auditor sebuah profesi harus memiliki komitmen moral yang tinggi dalam bentuk aturan khusus. Aturan ini merupakan aturan main dalam menjalankan atau mengemban profesi tersebut, yang biasa disebut kode etik. Berdasarkan kode etik Ikatan Akuntan Indonesia yang memuat delapan prinsip etika yaitu tanggung jawab profesi, kepentingan publik, integritas, obyektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, perilaku professional, dan standar teknis.

5. Pengalaman Auditor (X₄)

Pengalaman auditor didefinisikan sebagai sejauh mana auditor melakukan pemeriksaan dan lamanya seorang auditor melakukan pemeriksaan dari satu SKPD ke SKPD lainnya. Pengalaman auditor sendiri diukur dengan indikator yang mengacu pada penelitian yang dilakukan Kusuma (2012) dengan sedikit penyesuaian.

4.4 Teknik Analisis Data

Cara pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Uji Validitas dan Reliabilitas
2. Uji Asumsi Klasik
3. Koefisien Korelasi dan Koefisien Determinasi
4. Analisis Regresi Linear Berganda : $Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4$
5. Uji t

5. ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

5.1 Uji Validitas dan Reabilitas

Tabel 5.1 Uji Validitas dan Reabilitas

Variabel dan Pernyataan	Koefisien Korelasi	Nilai r Tabel	Keterangan
X1P1	0.767	0.334	Valid
X1P2	0.584	0.334	Valid
X1P3	0.656	0.334	Valid
X1P4	0.712	0.334	Valid
X1P5	0.583	0.334	Valid
X2P1	0.747	0.334	Valid
X2P2	0.738	0.334	Valid
X2P3	0.919	0.334	Valid
X2P4	0.819	0.334	Valid
X2P5	0.875	0.334	Valid
X3P1	0.724	0.334	Valid
X3P2	0.594	0.334	Valid
X3P3	0.807	0.334	Valid
X3P4	0.914	0.334	Valid
X3P5	0.877	0.334	Valid
X3P6	0.723	0.334	Valid
X3P7	0.914	0.334	Valid
X3P8	0.808	0.334	Valid
X4P1	0.792	0.334	Valid
X4P2	0.861	0.334	Valid
X4P3	0.807	0.334	Valid
Y1P1	0.345	0.334	Valid
Y1P2	0.509	0.334	Valid
Y1P3	0.602	0.334	Valid
Y1P4	0.499	0.334	Valid
Y1P5	0.444	0.334	Valid
Y1P6	0.462	0.334	Valid
Y1P7	0.481	0.334	Valid
Y1P8	0.702	0.334	Valid
Y1P9	0.573	0.334	Valid

Sumber : Data Olahan 2012

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai pengujian validitas, maka hasil uji validitas dengan taraf signifikan sebesar 5% dengan jumlah responden sebanyak 35 orang diperoleh angka kritis dari r tabel (tabel r *product moment*) yang didapat adalah sebesar 0,334.

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.835	30

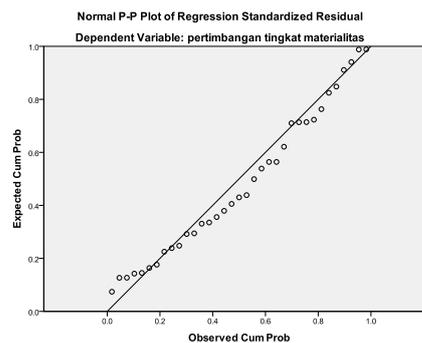
Sumber : Data Olahan 2012

Dari pengujian tingkat reliabilitas seperti yang disajikan pada tabel 5.1, maka pada bagian *Reliability* terdapat *N of case* dimana terlihat bahwa responden yang diteliti pada uji coba kuesioner berjumlah 35 responden. Pada bagian ini juga terlihat *alpha* = 0,835 dengan *N of items* atau butir pertanyaan sebanyak 30 pertanyaan. Jadi, oleh karena nilai *Cronbach Alpha* 0,835 lebih besar dari 0,60 maka dapat disimpulkan bahwa kuesioner yang digunakan adalah Reliabel.

5.2 Uji Asumsi Klasik

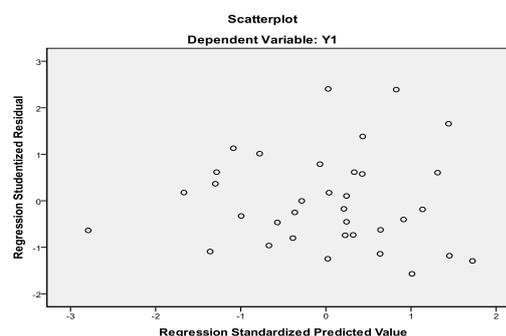
1. Uji Normalitas

Grafik 5.1 menunjukkan *Normal Plot of Regression Standardized Residual* menggambarkan penyebaran data di sekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti arah garis diagonal grafik tersebut, maka model regresi yang digunakan dalam penelitian ini memenuhi asumsi normalitas



Grafik 5.1 Uji Normalitas

2. Uji Heteroskedastisitas



Grafik 5.2 Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan hasil analisis dengan bantuan *software Program SPSS Version 17*, maka dapat dilihat dari grafik 5.2 *Scatterplot* bahwa titik-titik menyebar dengan pola yang tidak jelas di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Dengan demikian pada model regresi tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

3. Uji Multikolinieritas

Persyaratan yang harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya multikolinieritas. Untuk mendeteksi ada tidaknya masalah multikolinieritas dalam regresi dapat dilihat pada nilai VIF. Dari *output Coefficients* pada tabel 5.2, kita dapat melihat pada kolom VIF bahwa nilai VIF untuk profesionalisme auditor sebesar 2.194, kualitas audit sebesar 1.861, etika profesi auditor sebesar 3.200, dan pengalaman auditor sebesar 1.658. Karena masing-masing dari nilai VIF kurang dari 5, maka dapat disimpulkan bahwa pada model regresi tidak ditemukan adanya masalah multikolinieritas.

Tabel 5.2 Hasil Uji Multikolinieritas

		Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients				
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	34.449	7.957		4.329	.000		
	profesionalisme auditor	.229	.445	.132	.514	.611	.456	2.194
	kualitas audit	.591	.390	.358	1.513	.141	.537	1.861
	etika profesi auditor	-.588	.374	-.488	-1.571	.127	.312	3.200
	pengalaman auditor	.006	.401	.003	.015	.988	.603	1.658

a. Dependent Variable: pertimbangan tingkat materialitas

5.3 Koefisien Korelasi (R)

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan bantuan *software SPSS Version 17* seperti yang ada pada lampiran *output SPSS* pada *Model Summary*^b dapat dilihat bahwa koefisien korelasi linear yang dihasilkan sebesar 0,310. Angka 0,310 berada diantara 0,20– 0,399 sesuai dengan tabel 3.1, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang rendah antara variabel profesionalisme auditor (X₁), kualitas audit (X₂), etika profesi auditor (X₃), Pengalaman auditor (X₄) dengan pertimbangan tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan (Y) pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Utara.

5.4 Koefisien Determinasi (r²)

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan bantuan *software SPSS Version 17* seperti yang ada pada lampiran *Model Summary*^b maka dapat diketahui bahwa nilai *Adjusted R Square* yang diperoleh adalah sebesar 0.096 atau sebesar 9,6%. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pertimbangan tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan dipengaruhi oleh profesionalisme auditor (X₁), kualitas audit (X₂), etika profesi auditor (X₃), Pengalaman auditor (X₄) sebesar 9,6%, sedangkan sisanya sebesar 90.4% dipengaruhi oleh faktor lain atau variabel lain diluar penelitian ini.

5.5 Analisis Regresi Linier Berganda

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan bantuan *software SPSS version 19* seperti yang ada pada lampiran, maka dapat dilihat pada bagian *Coefficients*^a bahwa model regresi yang diperoleh adalah :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

$$Y = 34,449 + 0,229X_1 + 0,591X_2 - 0,588X_3 + 0,006X_4$$

Dari model regresi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut. Konstanta α sebesar 34,449 artinya jika variabel profesionalisme auditor, kualitas audit, etika profesi auditor dan pengalaman auditor nilai adalah 0, maka besarnya pertimbangan tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan sebesar 34,449. Nilai β_1 yang merupakan koefisien regresi dari variabel Profesionalisme auditor (X_1) sebesar 0,229 mempunyai arti bahwa jika variabel Profesionalisme auditor (X_1) bertambah sebesar 1 skor, maka pertimbangan tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0,229. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara variabel profesionalisme auditor (X_1) dengan variabel pertimbangan tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan (Y). Nilai β_2 yang merupakan koefisien regresi dari variabel kualitas audit (X_2) sebesar 0,591 mempunyai arti bahwa jika variabel kualitas audit (X_2) bertambah sebesar 1 skor, maka pertimbangan tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0,591. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara variabel kualitas audit (X_2) dengan variabel pertimbangan tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan (Y). Nilai β_3 yang merupakan koefisien regresi dari variabel etika profesi auditor (X_3) sebesar -0,588 mempunyai arti bahwa jika variabel etika profesi auditor (X_3) bertambah sebesar 1 skor, maka pertimbangan tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan (Y) akan mengalami penurunan sebesar 0,588. Koefisien bernilai negatif artinya terjadi hubungan negatif antara variabel etika profesi auditor (X_3) dengan variabel pertimbangan tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan (Y). Semakin tinggi etika profesi auditor, maka semakin rendah pertimbangan tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan. Hal ini disebabkan karena persepsi atau pandangan auditor terhadap etika profesi auditor berbeda. Perbedaan inilah yang menyebabkan adanya hubungan negatif antara etika profesi auditor dan pertimbangan tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan. Meskipun penelitian terdahulu menunjukkan ada hubungan positif antara etika profesi auditor dan pertimbangan tingkat materialitas disebabkan objek penelitian yang berbeda yaitu KAP dan Badan Pemeriksa Keuangan. Nilai β_4 yang merupakan koefisien regresi dari variabel Pengalaman auditor (X_4) sebesar 0,006 mempunyai arti bahwa jika variabel Pengalaman auditor (X_4) bertambah sebesar 1 skor, maka pertimbangan tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,006. Hal ini berarti pula bahwa terdapat hubungan yang positif antara Pengalaman auditor dengan pertimbangan tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan. Dengan demikian jika pengalaman auditor bertambah, maka akan semakin bertambah pula pertimbangan tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan.

5.6 Pengujian Hipotesis (Uji t)

Perumusan hipotesis yang akan diuji yaitu dengan melihat $\alpha = 0.05$ dengan uji dua sisi sehingga α menjadi 0.025. Derajat kebebasan dalam penelitian ini adalah $df = n-5 = 35-5 = 30$. Berdasarkan t table yang terdapat dalam lampiran menunjukkan $t_{tabel} = 2.042$. Dengan menggunakan bantuan *program SPSS version 17* (lihat lampiran 3) maka dapat diketahui hasil t_{hitung} untuk variabel profesionalisme auditor (X_1) = 0.514 dan $t_{tabel} = 2,024$ dengan signifikan 0,611. Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa $t_{hitung} < t_{tabel}$ dan signifikan 0,611 > 0,05. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa profesionalisme auditor tidak berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan. Hasil t_{hitung} untuk variabel kualitas audit (X_2) = 1,513 dan signifikan 0,095 serta $t_{tabel} = 2,024$. Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa $t_{hitung} < t_{tabel}$ dan signifikan 0,127 > 0,05. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan. Hasil t_{hitung} untuk variabel etika profesi auditor (X_3) = -1.571 dan signifikan 0,011 serta $t_{tabel} = 2,024$. Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa $t_{hitung} < t_{tabel}$ dan signifikan 0,127 > 0,05. Dengan demikian variabel etika profesi auditor tidak berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan. Hasil t_{hitung} untuk variabel pengalaman auditor (X_4) = 0.015 dan signifikan 0,988 serta $t_{tabel} = 2,024$. Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa $t_{hitung} < t_{tabel}$ dan signifikan 0,988 > 0,05. Dengan demikian dapat dinyatakan variabel pengalaman auditor tidak berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan.

5.7 Pembahasan

Profesionalisme auditor sejatinya memberikan suatu gambaran tentang seorang auditor yang dikatakan profesional baik dalam melaksanakan pemeriksaan maupun hubungan dan keterkaitan dengan rekan profesinya. Menurut Hall dalam Yendrawati (2008) profesionalisme bisa dibagi dalam lima dimensi yaitu pengabdian kepada profesi, kewajiban sosial, kemandirian, keyakinan terhadap peraturan profesi, serta hubungan sesama profesi. Pemeriksa berikut istilah yang diberikan untuk auditor Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia memiliki sudut pandang yang lain dalam menilai profesionalisme. Pemeriksa yang ada dalam Badan Pemeriksa Keuangan memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda meskipun memiliki kesamaan fungsi. Hal ini disebabkan setiap audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan bersifat *mandatory* (keharusan). Suatu SKPD harus setiap saat bersedia untuk dilakukan pemeriksaan karena berdasarkan surat tugas yang sifatnya wajib untuk dilaksanakan. Perbedaannya yaitu auditor eksternal yang dalam hal ini bernaung dalam Kantor Akuntan Publik karena pelaksanaan audit yang dilakukan oleh auditor Kantor Akuntan Publik berasal dari surat perikatan (*Engagement Letter*) yang disepakati kedua belah pihak. Maka secara tidak langsung audit yang dilakukan oleh KAP sifatnya tidak harus, dan muncul ketika adanya permintaan untuk melaksanakan pemeriksaan. Penelitian yang dilakukan oleh Fridati (2005) mengenai hubungan antara profesionalisme auditor terhadap pertimbangan tingkat materialitas menghasilkan adanya pengaruh positif pada Kantor Akuntan Publik namun sekali lagi penelitian ini menggunakan objek yaitu Badan Pemeriksa Keuangan. Meskipun penelitian yang dihasilkan yaitu profesionalisme auditor tidak berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas itu disebabkan karena adanya perbedaan budaya organisasi dan jenis pemeriksaan di antara Kantor Akuntan Publik dan Badan Pemeriksa Keuangan. Kualitas audit berhubungan dengan hasil dari pemeriksaan yang dilakukan. Kualitas atau mutu dari pemeriksaan ditentukan berbagai banyak faktor. Kualitas audit berdasarkan teori yang dikemukakan oleh De Angelo dalam Martiyani (2010) yaitu suatu probabilitas dimana ditemukan suatu pelanggaran yang terjadi pada klien yang diperiksa. Penelitian yang dilakukan oleh Tretiana (2011) menyebutkan bahwa kualitas audit berpengaruh terhadap tingkat materialitas. Semakin banyak pelanggaran yang dilaporkan maka kualitas suatu pemeriksaan akan semakin baik. Dalam penafsiran tersebut terdapat perbedaan dengan auditor yang bernaung dalam Badan Pemeriksa Keuangan. Kualitas suatu laporan bukan berdasarkan temuan yang banyak tetapi berdasarkan opini. Hal ini tercermin dalam pernyataan ketua BPK RI dalam wawancara dengan jurnalis perihal keterkaitan antara opini dan potensi korupsi (www.antara.com) Pemeriksa yang ada pada Badan Pemeriksa Keuangan lebih menekankan pada menjaga etika profesi ketika berhadapan dengan SKPD. Hal ini tercermin dalam berbagai hal untuk tetap menjaga nilai dasar Badan Pemeriksa Keuangan. Penelitian yang dilakukan terbukti bahwa etika profesi auditor yang ada di Badan Pemeriksa Keuangan tidak mempengaruhi secara signifikan pertimbangan tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan. Variabel terakhir dalam penelitian ini adalah pengalaman auditor untuk melihat pengaruhnya terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kusuma (2012) menyebutkan bahwa pengalaman auditor berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan. Namun, sesuai dengan wawancara yang dilakukan dengan pemeriksa yang ada di BPK RI membuktikan bahwa tidak selamanya pengalaman menjadi faktor utama dalam melaksanakan audit. Pemeriksa tersebut menjelaskan bahwa ketika melaksanakan pemeriksaan seorang auditor atau pemeriksa belum bisa menjadi ketua tim pemeriksa meskipun sudah ada pengalaman sebelumnya karena seorang pemeriksa harus melaksanakan pelatihan yang menunjukkan kemampuan seorang auditor. Pelatihan mencakup dua hal yaitu yang berhubungan dengan kemampuan dan pengetahuan mengenai pemeriksaan dan juga yang berhubungan dengan tes psikologi. Auditor tersebut juga menjelaskan bahwa walaupun setiap pemeriksa melakukan pelatihan dan selesai dengan pelatihannya, tetapi ketika melakukan tes psikologi dan dinyatakan tidak lulus maka pemeriksa tersebut tidak akan pernah menjadi ketua tim dan perjalanan karirnya akan tetap seperti itu. Berbeda dengan pemeriksa di lingkungan BPK RI, auditor yang ada di Kantor Akuntan Publik juga dibekali dengan pengalaman. Pengalaman dalam hal ini berhubungan dengan jam pemeriksaan yang sangat ketat sekali diberlakukan untuk seorang auditor sebelum melaksanakan pemeriksaan atau membuka suatu Kantor Akuntan

Publik. Auditor di lingkungan Kantor Akuntan Publik harus memenuhi persyaratan dalam hal lamanya auditor ikut dalam pemeriksaan sebelum bisa membuka Kantor Akuntan Publik atau berubah kedudukan menjadi SPV maupun Manajer Audit. Auditor di lingkungan pemerintahan maupun di Kantor Akuntan Publik memiliki standar yang sama, walaupun memiliki objek yang berbeda dalam pemeriksaan. Auditor swasta selain harus memenuhi persyaratan lamanya ikut dalam pemeriksaan juga memiliki syarat harus ikut dalam PPL yang dilaksanakan oleh PPAJP. Hal tersebut dilakukan untuk lebih menguatkan potensi auditor dan juga isu-isu baru yang dibahas yang berhubungan dengan pemeriksaan. Pelatihan itu digelar oleh PPAJP yang merupakan wadah profesi auditor Kantor Akuntan Publik dan juga sebagai wadah yang menjadi fungsi control terhadap Kantor Akuntan Publik yang bermasalah. Secara statistik terlihat bahwa tidak adanya pengaruh pengalaman terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan. Alasan yang mendasar adalah pemeriksa di lingkungan BPK RI ketika melaksanakan pemeriksaan hal pertama yang dilakukan adalah memahami ruang lingkup entitas. Berdasarkan hal tersebut siapapun bisa memberikan pertimbangan tingkat materialitas karena BPK sendiri memiliki tahap-tahap dalam melakukan penjurangan calon pemeriksa yang baru. Penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan pertimbangan tingkat materialitas yang mendukung hasil penelitian ini yaitu tidak adanya pengaruh tidak ditemukan karena penelitian ini adalah yang pertama yang mengambil judul profesionalisme auditor, kualitas audit, etika profesi auditor dan pengalaman yang diujikan pada objek yang lain yaitu Badan Pemeriksa Keuangan. Penelitian yang ditemukan yang memiliki korelasi dengan mengambil objek Badan Pemeriksa Keuangan yaitu penelitian yang dilakukan oleh Prima (2012) mengenai pengaruh etika profesi, independensi, profesional *judgement* auditor terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan. Penelitian ini membuktikan bahwa terdapat pengaruh baik secara parsial maupun secara simultan ketiga variabel di atas. Namun dari beberapa variabel yang diajukan tidak berhubungan dengan penelitian ini yang berhubungan adalah variabel dependen yaitu pertimbangan tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan. Hal terakhir bahwa perbedaan objek penelitian mungkin faktor yang paling dominan ketika penelitian ini dilakukan. Meskipun Badan Pemeriksa Keuangan dan Kantor Akuntan Publik memiliki kesamaan dalam hal pemeriksaan karena menghasilkan opini namun adanya perbedaan budaya organisasi dan tujuan melaksanakan pemeriksa menjadi kendala tersendiri. Secara umum Badan Pemeriksa Keuangan tidak hanya menitikberatkan pada opini melainkan ada pemeriksaan lain yaitu pemeriksaan kinerja maupun pemeriksaan dengan tujuan tertentu (investigatif). Berbeda dengan auditor BPK, auditor KAP lebih menekankan pada opini karena nilai jual KAP adalah opini yang menekankan pada jaminan terhadap laporan keuangan perusahaan. Meskipun pada perjalanannya KAP juga menawarkan jasa lain yaitu atestasi tetapi jasa tersebut bukan bersifat pemeriksaan namun lebih menitikberatkan pada konsultan atau pembimbingan untuk membuat laporan keuangan yang sesuai dengan SAK dan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Berdasarkan penjelasan tersebut jasa atestasi ini apabila di pemerintah layaknya inspektorat maupun BPKP yang tugasnya lebih kepada pengawasan dan pembimbingan.

6. PENUTUP

6.1 Simpulan

Hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa :

1. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa variabel profesionalisme auditor (X_1) tidak berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan.
2. Kualitas audit (X_2) berdasarkan hasil uji statistik menunjukkan bahwa tidak adanya pengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan.
3. Etika Profesi auditor (X_2) sesuai hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan.
4. Pengalaman auditor (X_3) berdasarkan hasil penelitian tidak memiliki pengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka menunjukkan bahwa dari variabel yang diteliti kesemuanya tidak memberikan pengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan. Hal ini menjadi bukti empiris bahwa tidak selamanya profesionalisme auditor, kualitas audit, etika profesi auditor dan pengalaman auditor memberikan pengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan. Sesuai dengan hasil penelitian maka kedepannya penelitian ini bisa diteliti lagi dengan jumlah responden yang lebih banyak dengan objek penelitian yang berbeda dari penelitian sekarang. Hal lain yang perlu diperbaiki adalah dengan adanya penelitian ini bisa memberikan sumbangsih terhadap pemikiran dan informasi bagi pemeriksa dalam menjalankan kode etik pemeriksa dengan pertimbangan materialitas yang baik untuk mendapatkan opini yang sesuai dengan kondisi entitas atau SKPD. Penelitian ini juga memberikan gambaran mengenai betapa pentingnya kode etik dan juga prinsip yang harus dimiliki oleh BPK RI khususnya perwakilan Sulawesi Utara sehingga kejadian seperti yang dibahas dari latar belakang penelitian ini tidak terjadi lagi. Faktor-faktor lain mungkin saja berhubungan dengan pertimbangan tingkat materialitas namun belum dilakukan penelitian, sehingga penulis berharap suatu saat ada penelitian selanjutnya dengan mengambil pandangan faktor-faktor lain dalam menganalisis lebih jauh hubungan dengan pertimbangan tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arleen Herawaty dan Yulius Kurnia Susanto, 2008, *Profesionalisme, Pengetahuan Akuntan Publik Dalam Mendeteksi Kekeliruan, Etika Profesi dan Pertimbangan Tingkat Materialitas*. The Second National Conference UKWMS. Surabaya.
- Bambang Soepeno, 2002, *Statistik Terapan Dalam Penelitian Ilmu-Ilmu sosial dan Pendidikan*. Penerbit Rineka Cipta. Jakarta.
- Brooks Leonard J dan Paul Dunn, 2011, *Etika Bisnis dan Profesi untuk Direktur, Eksekutif, dan akuntan*, Edisi Lima Buku Satu Penerbit Salemba Empat.
- Dwi Priyatno, 2009, *5 Jam Belajar Olah Data Dengan SPSS 17*. Andi Offset.
- Febrianty, 2012, *Pengaruh Profesionalisme Auditor Terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas Audit Atas Laporan Keuangan*. Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi Volume 2 Nomor 2
- Fridati, Windi, 2005, *Analisa Hubungan Antara Profesionalisme Auditor Dengan Pertimbangan Tingkat Materialitas Dalam Proses Pengauditan Laporan Keuangan*. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Hendro Wahyudi dan Aida Inul Mardiyah. *Pengaruh Profesionalisme Auditor Terhadap Tingkat Materialitas Dalam Pemeriksaan Laporan Keuangan*. Simposium Nasional Akuntansi IX. Padang.
- Ikatan Akuntan Indonesia, 2009, *Standar Profesional Akuntan Publik*. Salemba Empat. Jakarta.
- Iriyadi, Vannywati, 2011, *Pengaruh Profesionalisme Auditor dan Etika Profesi Auditor Terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas*, Jurnal Ilmiah Ranggagading Volume 11 No. 2, Oktober 2011 :75-81. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesatuan Bogor.

- Kusuma Novanda Friska Bayu Aji, 2012, *Pengaruh Profesionalisme Auditor, Etika Profesi dan Pengalaman Auditor Terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas*. Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Mansyuri, Zainuddin, 2008. *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif*. Edisi Revisi. Bandung: Rafika Aditama.
- Martiyani, Milka, 2010. *Pengaruh Profesionalisme Auditor dan Kualitas Audit Terhadap Tingkat Materialitas Dalam Pemeriksaan Laporan Keuangan*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur
- Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia No. 01 Tahun 2007 tentang **Standar Pemeriksa Keuangan Negara**.
- Prima, Yoga Satria, 2012, *Pengaruh Etika Profesi, Independensi, dan Professional Judgement Auditor Terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas Dalam Proses Audit Laporan Keuangan (Studi Empiris pada Auditor BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Banten, dan Jawa Barat)*, Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara.
- Rai I Gusti Agung, 2008, *Audit Kinerja pada Sektor Publik* . Jakarta. Salemba Empat.
- Randal, Mark, Alvin dan Amir Abadi Jusuf, 2011, *Jasa Audit dan Assurance*, Buku Satu. Salemba Empat. Jakarta.
- Riduwan, Rusyana Adun, dan Enas, 2011, *Cara Mudah Belajar SPSS 17.0 dan Aplikasi Statistik Penelitian*. Bandung : Alfabeta.
- Sarjono Haryadi dan Winda Julianita, 2011, *SPSS vs Lisrel Sebuah Pengantar, Aplikasi untuk Riset*. Jakarta : Salemba Empat.
- Suartana Wayan SE., Ak., MSi, 2010, *Akuntansi Keperilakuan Teori dan Implementasi*, Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Alfabeta, Jakarta.
- Sukrisno Agoes, 2004, *Auditing (Pemeriksaan Akuntan) Oleh Kantor Akuntan Publik Jilid 1 Edisi Ketiga*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi. Jakarta.
- Trestiana Regina, 2011, *Pengaruh Profesionalisme, Pengetahuan Akuntan Publik Dalam Mendeteksi Kekeliruan, Etika Profesi dan Kualitas Audit Terhadap Materialitas*. UPN Veteran Yogyakarta.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik
- www.antaranews.com Selasa 5 Juli 2011
- www.mando.bpk.go.id
- Yendrawati Reni, 2008, *Analisis Hubungan Antara Profesionalisme Auditor Dengan Pertimbangan Tingkat Materialitas*, Jurnal Penelitian & Pengabdian dppm.uui.ac.id.